



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2025-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui program kerja dan kegiatan yang dirumuskan secara komprehensif dan integral merupakan konsep pembangunan *smart city*, sehingga mampu memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat diperlukan arah pengembangan yang berkelanjutan sebagai pedoman kebijakan dan penyusunan program terpadu yang disusun dalam bentuk *Masterplan Smart City* Kabupaten Sampang Tahun 2025 - 2033;
- b. bahwa diperlukan *Masterplan Smart City* sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan *Smart City* di Kabupaten Sampang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Sampang Tahun 2025-2033.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6840);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 39);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 376);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sampang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 02);
16. Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 125);
17. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *MASTERPLAN SMART CITY* KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025-2033

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Bupati adalah Bupati Sampang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. *Masterplan* adalah rencana induk arah pengembangan yang berkelanjutan sebagai pedoman kebijakan dan penyusunan program yang terpadu pada PD.
6. *Smart City* adalah konsep pengembangan kota/kabupaten yang mengelola berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya sehingga dapat hidup aman, nyaman dan berkelanjutan berdasarkan prinsip teknologi informasi yang dibuat untuk kepentingan bersama secara efektif dan efisien.
7. *Masterplan Smart City* Kabupaten Sampang Tahun 2025-2033 yang selanjutnya disebut *Masterplan Smart City* memuat arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyelarasan program PD dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2033 untuk mewujudkan visi Kabupaten Sampang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan *Masterplan Smart City* dimaksudkan untuk sebagai landasan hukum dan pedoman dalam menyusun rencana strategis yang digunakan sebagai arahan kebijakan, strategi dan pedoman umum dalam rangka menyusun perencanaan serta pelaksanaan yang berkaitan dengan pengembangan *Smart City* sehingga lebih sistematis, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka mendukung tugas, fungsi Pemerintah Daerah ke arah efektifitas pelayanan publik serta pelayanan antar instansi pemerintah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan dan pengembangan *Smart City* Daerah;
 - b. menyelaraskan penerapan *Smart City* Daerah dengan proses bisnis pemerintah Daerah;
 - c. sebagai dasar yang dijadikan pedoman pemilihan keputusan dan penetapan kebijakan dalam pembangunan *Smart City* di Daerah;
 - a. menjamin terakomodasinya sasaran pembangunan di dalam RPJMD dalam dokumen perencanaan *Smart City* Daerah;
 - b. mendorong penerapan *Smart City* Daerah yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif;
 - c. mendorong proses pengembangan *Smart City* yang efektif, efisien, inklusif, dan partisipatif.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. *Masterplan Smart City*;
- b. Pelaksanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi *Masterplan Smart City*.

BAB IV MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN SAMPANG

Pasal 4

- (1) *Masterplan Smart City* merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan *Smart City* yang memuat arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyelarasan Program Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2033 secara berkesinambungan dalam upaya percepatan pencapaian visi pembangunan daerah.
- (2) *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. Pedoman bagi seluruh PD dalam mengembangkan inovasi pembangunan daerah guna mewujudkan Sampang *Smart City*; dan
 - b. Pedoman bagi seluruh PD dalam merencanakan, menyusun anggaran serta melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Sampang *Smart City*.
- (3) *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Buku I Analisis Strategis Daerah;
 - b. Buku II Peta Jalan dan Rencana Aksi *Smart City*;
 - c. Buku III *Executive Summary Masterplan Smart City*;
 - d. Buku IV *Quick Win Smart City*;
- (4) *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAKSANAAN, PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI MASTERPLAN SMART CITY

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan dan pengembangan *Smart City* Kabupaten Sampang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Pelaksanaan dan pengembangan *Smart City* Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan melibatkan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pengendalian dan Evaluasi *Masterplan Smart City* Kabupaten Sampang bertujuan untuk:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana penerapan Sampang *Smart City*;
- b. konsistensi antara pelaksanaan Sampang *Smart City* dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

- c. konsistensi antara pelaksanaan Sampang *Smart City* dengan Peta Jalan tahapan pembangunan Sampang *Smart City*; dan
- d. kesesuaian antara capaian pelaksanaan Sampang *Smart City* dengan Indikator Program Pembangunan Sampang *Smart City*.

Pasal 7

Pengendalian dan Evaluasi *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Program *Masterplan Smart City* Kabupaten Sampang;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Program *Masterplan Smart City*; dan
- c. evaluasi terhadap capaian hasil pelaksanaan *Masterplan Smart City*.

Pasal 8

Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan Program *Masterplan Smart City* mencakup pengendalian terhadap implementasi kebijakan dalam *Masterplan Smart City* pada dokumen perencanaan dan penganggaran PD.

Bagian Kesatu

Pengendalian dan Evaluasi *Masterplan Smart City*

Pasal 9

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan PD sebagaimana dimaksud Pasal 8 mencakup perumusan strategis dan kebijakan, rencana Program dan Kegiatan, indikator keberhasilan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja *output* dan *outcomes* yang mengacu pada *Masterplan Smart City* Kabupaten Sampang.
- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan PD telah berpedoman pada *Masterplan Smart City*.

Bagian Kedua

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Program *Masterplan Smart City*

Pasal 10

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Program *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah sejalan/sesuai dengan rencana Program dan Kegiatan dalam *Masterplan Smart City* dan telah direncanakan dan dianggarkan pada dokumen perencanaan dan anggaran PD.

Pasal 11.....

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Program *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud Pasal 10 mencakup indikator kinerja Program/Kegiatan, rencana Program, Kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja PD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. Indikator kinerja, rencana Program, Kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif *Masterplan Smart City*, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja Program/Kegiatan, rencana Program, Kegiatan, kelompok sasaran dan dana indikatif dan perkiraan maju rencana strategis dan rencana kerja PD.
 - b. Visi, misi, tujuan dan sasaran *Masterplan Smart City* telah dijabarkan dalam tujuan rencana strategis dan rencana kerja PD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan dana indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran *Masterplan Smart City*.

Bagian Ketiga

Evaluasi Terhadap Capaian Hasil Pelaksanaan *Masterplan Smart City*

Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap Capaian Hasil Pelaksanaan *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf c, mencakup indikasi rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran dalam upaya mewujudkan visi Sampang *Smart City*.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan *Masterplan Smart City*.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. Realisasi antara rencana Program dan Kegiatan *Masterplan Smart City* dengan rencana Program dan Kegiatan dalam rencana kerja pembangunan daerah;
 - b. Realisasi antara capaian rencana Program yang direncanakan dalam *Masterplan Smart City* dengan Program/Kegiatan dalam rencana strategis dan rencana kerja setiap PD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan visi, misi, tujuan dan sasaran *Masterplan Smart City* dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan evaluasi *Masterplan Smart City* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilakukan oleh Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City*.
- (2) Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengendalian Dan Evaluasi *Masterplan Smart City* Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau waktu tertentu sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil Pengendalian dan Evaluasi *Masterplan Smart City* Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dalam hal terjadi perubahan Nomenklatur Organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini tetap melekat pada PD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 9 April 2025

BUPATI SAMPANG,

ttd

SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 9 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd

YULIADI SETIAWAN

BUKU I
ANALISIS STRATEGIS DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2025 – 2033

Daftar Isi

Halaman Sampul	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	vi
1. Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tentang Kabupaten Sampang.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
2. Analisis Masa Depan	5
2.1 Analisis Visi dan Misi Pembangunan Daerah.....	5
2.2 Analisis Kondisi Eksternal.....	13
2.2.1 Politik	13
2.2.2 Ekonomi.....	14
2.2.3 Sosial	15
2.2.4 Teknologi.....	16
2.2.5 Lingkungan	17
2.2.6 Legal/Hukum	18
3. Analisis Kesiapan Daerah	19
3.1 Nature	19
3.2 Struktur	21
3.2.1 Analisis Kualitas SDM Daerah Kabupaten Sampang.....	21
3.2.3 Analisis Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Sampang.....	25
3.3 Infrastruktur	27
3.3.1 Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah Kabupaten Sampang	27
3.3.2 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah Kabupaten Sampang	29
3.3.3 Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah Kabupaten Sampang	30
3.4 Suprastruktur.....	32
3.4.1 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah Kabupaten Sampang	32
3.4.2 Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah Kabupaten Sampang.....	33
3.4.3 Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah Kabupaten	
Sampang	34
3.5 Culture	37
4. Analisis Strategi Pembangunan Smart City	39
4.1 Analisis Kesenjangan.....	39

4.1.1 Dimensi Smart Governance	39
4.1.2 Dimensi Smart Branding	40
4.1.3 Dimensi Smart Economy	41
4.1.4 Dimensi Smart Living	42
4.1.5 Dimensi Smart Society	43
4.1.6 Dimensi Smart Environment	43
4.2 Analisis SWOT	44
4.2.1 Dimensi Smart Governance	44
4.2.2 Dimensi Smart Branding	46
4.2.3 Dimensi Smart Economy	50
4.2.4 Dimensi Smart Living	51
4.2.5 Dimensi Smart Society	54
4.2.6 Dimensi Smart Environment	55
4.3 Analisis TOWS	57
4.3.1 Dimensi Smart Governance	57
4.3.2 Dimensi Smart Branding	61
4.3.3 Dimensi Smart Economy	67
4.3.4 Dimensi Smart Living	72
4.3.5 Dimensi Smart Society	77
4.3.6 Dimensi Smart Environment	83
5. Analisis Pembangunan Visi Smart City.....	90
5.2 Sasaran Smart City Daerah.....	91
5.2.1 Sasaran Dimensi Smart Governance	91
5.2.2 Sasaran Dimensi Smart Branding	96
5.2.3 Sasaran Dimensi Smart Economy.....	101
5.2.4 Sasaran Dimensi Smart Living	105
5.2.5 Sasaran Dimensi Smart Society.....	109
5.2.6 Sasaran Dimensi Smart Environment.....	113
6. Penutup.....	117
Daftar Pustaka.....	118
Lampiran.....	119
L1. Undangan Bimtek 1 pada tanggal 5-6 Juli 2023	119
L2. Dokumentasi FGD Bimtek 1 hari ke-1 (Rabu, 5 Juli 2023)	119
L3. Dokumentasi FGD Bimtek 1 hari ke-2 (Kamis, 6 Juli 2023).....	122

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah kab/kota untuk pendampingan Masterplan *Smart City* daerah 1

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi dengan RPJMD dan RPJP Provinsi 7

Tabel 2.2 Pemetaan Misi dan Sasaran RPJMD Terhadap Dimensi *Smart City* 10

Tabel 3.1 Analisis Kualitas SDM daerah 21

Tabel 3.2 Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintah..... 23

Tabel 3.3 Analisis Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Sampang..... 25

Tabel 3.4 Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah Kabupaten Sampang 27

Tabel 3.5 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah Kabupaten Sampang 29

Tabel 3.6 Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah Kabupaten Sampang 31

Tabel 3.7 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah Kabupaten Sampang 32

Tabel 3.8 Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah Kabupaten Sampang..... 34

Tabel 3.9 Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah Kabupaten Sampang 35

Tabel 4.1 Analisis Kesenjangan pada Dimensi *Smart Governance* 39

Tabel 4.2 Analisis Kesenjangan pada Dimensi *Smart Branding* 40

Tabel 4.3 Analisis Kesenjangan pada Dimensi *Smart Economy*..... 41

Tabel 4.4 Analisis Kesenjangan pada Dimensi *Smart Living* 42

Tabel 4.5 Analisis Kesenjangan pada Dimensi *Smart Society* 43

Tabel 4.6 Analisis Kesenjangan pada Dimensi *Smart Environment* 43

Tabel 4.7 Analisis SWOT *Smart Governance*..... 44

Tabel 4.8 Analisis SWOT *Smart Branding*..... 46

Tabel 4.9 Analisis SWOT *Smart Economy* 50

Tabel 4.10 Analisis SWOT *Smart Living*..... 51

Tabel 4.11 Analisis SWOT *Smart Society* 54

Tabel 4.12 Analisis SWOT *Smart Environment*..... 55

Tabel 4.13 Analisis Strategi TOWS *Smart Governance*..... 57

Tabel 4.14 Analisis Strategi TOWS *Smart Branding*..... 61

Tabel 4.15 Analisis Strategi TOWS *Smart Economy* 67

Tabel 4.16 Analisis Strategi TOWS *Smart Living*..... 72

Tabel 4. 17 Analisis Strategi TOWS *Smart Society*..... 77

Tabel 4.18 Analisis Strategi TOWS *Smart Environment*..... 83

Tabel 5.1 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Governance*.... 92

Tabel 5.2 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Branding* 97

Tabel 5.3 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Economy*..... 102

Tabel 5.4 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Living* 106

Tabel 5.5 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Society*..... 110

Tabel 5.6 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi Smart Environment 114

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Tahap penyusunan Masterplan *Smart City*..... 2

Gambar 1.2 Karapan Sapi sebagai tradisi kebanggaan masyarakat Madura 3

Gambar 2.1 Enam Dimensi *Smart City* 8

Gambar 3.1 Peta Geografis Kabupaten Sampang 19

Gambar 3.2 Rangkuman analisis kesiapan smart city Kabupaten Sampang.. 36

1. Pendahuluan

Perubahan paradigma pembangunan menuju masa depan yang terintegrasi dan cerdas sebagai dampak dari transformasi digital juga telah dialami oleh kabupaten. Secara umum kabupaten memiliki latar belakang sejarah, kekayaan budaya, dan sumber daya alamnya yang unik. Dengan pendekatan holistik, pembangunan *Smart City* akan mengubah kabupaten ini menjadi pusat inovasi yang memadukan kebijakan cerdas, teknologi adaptif, kearifan lokal, dan partisipasi aktif masyarakat demi kesejahteraan bersama. Tiga Subbab berikut akan menguraikan latar belakang, profil kabupaten, maksud dan tujuan dari pembangunan *Smart City* di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur.

1.1 Latar Belakang

Program Gerakan Menuju 100 *Smart City* adalah sebuah program yang diinisiasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia. Menurut definisi Kominfo *Smart City* adalah kawasan yang dapat mengelola berbagai sumber dayanya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya (Direktorat Jenderal Kominfo, 2023).

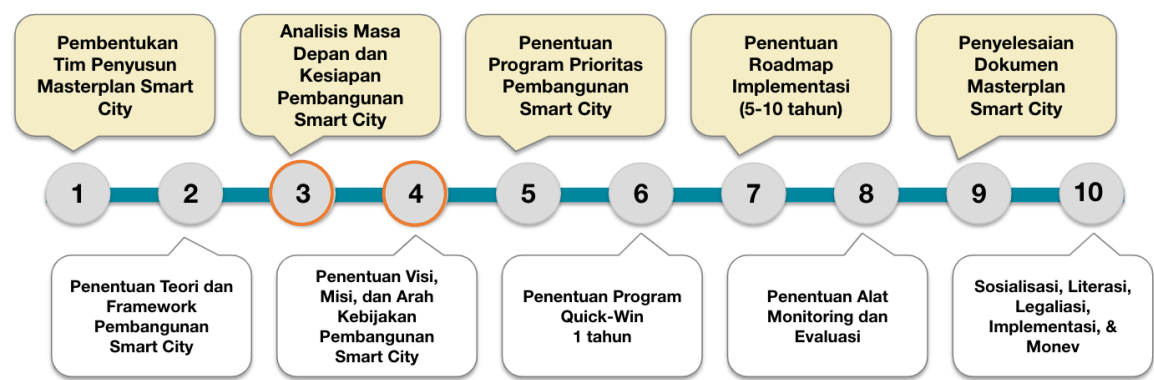
Tujuan dari gerakan ini adalah membimbing kabupaten/kota terpilih untuk merencanakan pengembangan *Smart City* di daerah masing-masing dengan memperhitungkan potensi dan tantangan pada setiap daerah. Terlihat pada Tabel 1.1 memperlihatkan data jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota yang mendapatkan Pendampingan Penyusunan Masterplan *Smart City* dalam kurun waktu tahun 2017-2023 (Direktorat Layanan Aplikasi Kominfo, 2023).

Tabel 1.1 Jumlah kab/kota untuk pendampingan Masterplan *Smart City* daerah

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kab/kota	25	50	25	0	48	50	50

Pada tahun 2020 kegiatan pendampingan ditunda, karena kondisi pandemik COVID-19. Berdasarkan data pada Tabel 1.1 jumlah total kab/kota yang telah menyelesaikan Masterplan *Smart City* sebanyak 198 kab/kota (2017-2019,

2021-2022), sedangkan saat buku ini ditulis 50 kab/kota (2023) masih dalam proses pelaksanaan bimbingan teknis.



Gambar 1.1 Tahap penyusunan Masterplan Smart City

Gambar 1.1 memperlihatkan tahap penyusunan Masterplan *Smart City* yang digunakan oleh Kominfo. Diawali dengan Tahap 1 Pembentukan Tim Penyusun Masterplan *Smart City* dan Tahap 2 Penentuan Teori dan *Framework* Pembangunan *Smart City*. Buku 1 ini berisi uraian detail Tahap 3 Analisis Masa Depan dan Kesiapan Pembangunan *Smart City* dan Tahap 4 Penentuan Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan *Smart City*.

Kabupaten Sampang berada pada urutan 33 dari 50 kab/kota yang mendapatkan bimbingan dalam Program menuju 100 *Smart City* dari Kemenkominfo dalam Penyusunan Masterplan *Smart City* di tahun 2023 ini. Bimbingan Teknis (Bimtek) 1 telah dilaksanakan pada tanggal 5-6 Juli 2023.

1.2 Tentang Kabupaten Sampang

Kabupaten Sampang adalah salah satu dari empat kabupaten lainnya yang berada di Pulau Madura yaitu Bangkalan, Sumenep, dan Pamekasan. Secara geografis, wilayahnya dibatasi oleh dua perairan yaitu Laut Jawa di sebelah utara dan Selat Madura di sebelah selatan. Kabupaten Sampang juga berbatasan dengan dua kabupaten, yaitu Kabupaten Pamekasan di sebelah timur dan Kabupaten Bangkalan di sebelah barat. Kabupaten Sampang terletak pada 113°08' - 113°39' Bujur Timur dan 06°05' - 07°13' Lintang Selatan. Sebagian besar wilayahnya merupakan daratan. Luas wilayah Kabupaten Sampang estimasi 1.233,30 km² yang terdiri dari 14 kecamatan dan 186 desa atau kelurahan.



Gambar 1.2 Karapan Sapi sebagai tradisi kebanggaan masyarakat Madura

(Sumber: Sampangtourism, 2023)¹

Gambar 1.2 memperlihatkan dua ekor sapi dan seorang laki-laki remaja sedang mengikuti lomba Karapan Sapi.

Terdapat satu pulau yang berjarak kurang dari 2 mil arah selatan dari Kecamatan Sampang yaitu Pulau Mandangin yang juga dikenal sebagai Pulau Kambing. Pulau tersebut luasnya 1,67 km². Pulau tersebut juga merupakan satu desa yaitu Desa Pulau Mandangin yang masuk dalam wilayah Kecamatan Sampang.

Berdasarkan data BPS provinsi Jawa Timur dalam tiga tahun terakhir (2021-2023) Kabupaten Sampang mengalami peningkatan jumlah penduduk yaitu pada tahun 2023 mencapai 992.210 jiwa yang terbagi dengan populasi perempuan sebanyak 50,36% dan populasi laki-laki sebanyak 49,64% (BPS Kab. Sampang, 2023).

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya buku 1 ini adalah

1. Menjadi dasar panduan dalam menentukan kesiapan Kabupaten Sampang menuju kepada kabupaten yang cerdas (*Smart City Readiness*),

¹ Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sampang Madura (<https://pariwisata.sampangkab.go.id/home>)

2. Memastikan bahwa arah pembangunan *Smart City* yang disusun telah selaras dengan arah pembangunan jangka menengah yang tercantum pada RPJMD Kabupaten Sampang 2019-2024 dan enam dimensi Smart City.

2. Analisis Masa Depan

Analisis masa depan diperlukan bagi daerah untuk menentukan arah pembangunan Smart City. Arah pembangunan Smart City harus selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah dan berdasarkan rencana pembangunan Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang. Analisis kondisi eksternal menjadi patokan dalam mengukur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman kabupaten dan mengetahui posisinya berdasarkan aspek Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Lingkungan, dan Legal/Hukum (PESTEL).

2.1 Analisis Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Visi dan Misi pembangunan daerah yang diuraikan pada subbab ini berasal dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (RPJMD Kab. Sampang, 2022).

Visi bupati dan wakil bupati Kabupaten Sampang periode tahun 2019-2024 adalah:

“Sampang Hebat Bermartabat”

Terdapat dua pokok Visi Kabupaten Sampang pada periode tahun 2019-2024 yaitu:

1.	Hebat
	Kabupaten Sampang berusaha untuk mencapai keberhasilan yang dilakukan melalui proses perubahan yang cepat, tepat, dan bermanfaat dengan semangat bangkit Bersama dan bersatu menuju masyarakat sejahtera. Kondisi hebat diindikasikan oleh terwujudnya sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, serta tercapainya pembangunan ekonomi yang inklusif.
2.	Bermartabat
	Kabupaten Sampang berusaha untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang mandiri, maju, berakhlak mulia yang senantiasa berlandaskan taqwa kepada Allah SWT/Tuhan yang Maha Esa. Kondisi tersebut diindikasikan oleh terwujudnya masyarakat yang harmonis.

Visi **Hebat** diturunkan ke dalam tiga misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 1	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan manusia yang sehat dan cerdas yaitu penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menurun, akses prasarana dasar perumahan dan permukiman membaik, daya saing pemuda dan olah raga yang baik, jumlah penduduk yang terkendali, serta tetap mengutamakan kesetaraan gender dan perlindungan anak.
Misi 2	Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif
	Misi ini untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan usaha mikro, meningkatkan kemampuan keuangan daerah, mengembangkan sektor unggulan dan ekonomi kreatif, meningkatkan ketahanan pangan, dan mendorong kemajuan dan kemandirian desa.
Misi 3	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
	Misi Mewujudkan pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.

Visi **Bermartabat** diturunkan ke dalam dua misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 4	Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik
	Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kabupaten Sampang yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang profesional dan sistem berbasis informasi teknologi (IT) menuju tatakelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>).

Misi 5	Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai, dan bersatu
	Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan warga Kabupaten Sampang yang berkepribadian dan berbudaya yang dicirikan oleh terpeliharanya seni dan warisan budaya dan meningkatnya suasana tenteram, tertib, dan aman.

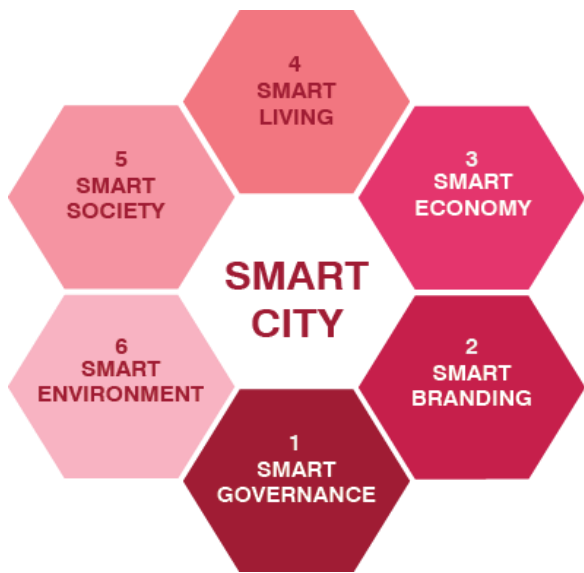
Rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sampang 2019-2024 memiliki keterkaitan dan keselarasan dengan visi RPJPD Sampang 2005–2025 (RPJPD Kab. Sampang, 2010), visi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, visi RPJP Provinsi Jawa Timur 2005-2025, dan visi RPJMN 2020 - 2024 seperti terlihat pada **Tabel 2.1** berikut:

Tabel 2.1 Keterkaitan Visi dengan RPJMD dan RPJP Provinsi

Visi RPJMN 2020 - 2024	Visi RPJP Jatim 2005-2025	Visi RPJMD Jatim 2019-2024	Visi RPJPD Sampang 2005- 2025	Visi RPJMD Sampang 2019-2024
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Terwujudnya Jawa Timur sebagai pusat agribisnis terkemuka, berdaya saing global dan berkelanjutan	Terwujudnya Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan gotong royong	Membangun Sampang Bersatu, Berkualitas, dan Berdaya Saing, Untuk Kesejahteraan Umat	Sampang Hebat Bermartabat

Dari kelima Misi akan dipetakan sesuai dengan keenam dimensi di dalam *Smart City* yang terdiri dari *Smart Governance* (Tata Kelola Pemerintahan), *Smart Branding* (Tata Kelola Peningkatan Daya Saing Daerah), *Smart Economy* (Tata Kelola Perekonomian), *Smart Living* (Kelayakan Taraf Hidup Masyarakat), *Smart Society* (Tata Kelola Ekosistem Masyarakat), dan *Smart Environment* (Tata Kelola Lingkungan). Keenam dimensi ini akan menjadi dasar untuk pengembangan *Smart City* di Kabupaten Sampang. Gambar 2.1

memperlihatkan enam dimensi *Smart City* yang menopang model *Smart City Readiness* dan juga telah diadaptasi oleh (Direktorat Jenderal Kominfo, 2023) pada Program Gerakan Menuju 100 Smart City untuk kota dan kabupaten di Indonesia mulai tahun 2017.



Gambar 2.1 Enam Dimensi *Smart City*

(Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023)

Keenam dimensi *Smart City* masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

Smart Governance	Merupakan fondasi utama dari kerangka kerja model <i>Smart City</i> . <i>Smart Governance</i> berfungsi sebagai pendorong utama bagi semua unsur lain dalam konsep <i>Smart City</i> . <i>Smart Governance</i> perlu diwujudkan dalam tiga fungsi pemerintahan, yakni kebijakan publik, pengaturan birokrasi, dan penyediaan layanan masyarakat.
Smart Branding	Dalam kerangka model <i>Smart City</i> , <i>Smart Branding</i> memiliki peran penting kedua. Fungsi utama dari <i>Smart Branding</i> adalah untuk mengkomunikasikan nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu kota atau daerah kepada penduduk setempat, wisatawan, dan pelaku bisnis. Proses <i>Smart Branding</i> harus difokuskan pada tiga aspek penting dari wilayah tersebut, yaitu pariwisata, sektor bisnis, dan citra keseluruhan daerah.
Smart Economy	Membentuk sistem <i>Smart Economy</i> merupakan salah satu tugas utama suatu kota (daerah). Hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan lingkungan industri yang sesuai, meningkatkan kesejahteraan penduduknya, serta memfasilitasi kemudahan dan kenyamanan dalam

	infrastruktur transaksi.
Smart Living	Konsep <i>Smart Living</i> mencakup lingkungan hunian yang memenuhi standar yang sesuai bagi penduduknya. Komponen utama dari <i>Smart Living</i> adalah terwujudnya keseimbangan yang harmonis dalam kehidupan komunitas. Keseimbangan ini perlu tercermin dalam aspek-aspek seperti pengaturan lingkungan permukiman, adanya fasilitas bisnis, serta rekreasi yang tersedia bagi masyarakat.
Smart Society	Konsep <i>Smart Society</i> menciptakan kondisi yang ideal di mana interaksi antara individu, komunitas, dan teknologi digital berjalan secara harmonis. Setiap anggota masyarakat diharapkan memiliki peluang akses ke pendidikan yang ditingkatkan melalui fasilitas belajar digital. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan terhadap aspek keselamatan individu, aset, dan mitigasi risiko bencana untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Smart Environment	Konsep <i>Smart Environment</i> mencerminkan tekad suatu kota (daerah) dalam menjaga kelestarian lingkungan, mengelola limbah, dan menggunakan sumber energi secara bijak. Semua upaya ini bertujuan untuk mendukung kelangsungan hidup seluruh ekosistem yang ada dalam lingkungan tersebut.

Jika dipetakan, maka kelima Misi penajaman RPJMD 2019-2024 Kabupaten Sampang telah selaras dengan keenam dimensi *Smart City* sebagai berikut:

- Misi 1 telah selaras dengan dimensi *Smart Governance*, *Smart Living*, *Smart Environment*, dan *Smart Society*.
- Misi 2 telah selaras dengan dimensi *Smart Economy*, *Smart Governance*, *Smart Society*, *Smart Living*, dan *Smart Branding*.
- Misi 3 telah selaras dengan dimensi *Smart Living*, dan *Smart Environment*.
- Misi 4 telah selaras dengan dimensi *Smart Governance*.
- Misi 5 telah selaras dengan dimensi *Smart Society* dan *Smart Governance*.

Tabel 2.2 memperlihatkan pemetaan misi ke setiap dimensi *Smart City* (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023d).

Tabel 2.2 Pemetaan Misi dan Sasaran RPJMD Terhadap Dimensi Smart City

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Dimensi Smart City					
				Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
1	Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Terbangunnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				✓		✓
			Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat	✓				✓	
			Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak				✓	✓	
2	Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif	Menurunnya angka kemiskinan			✓	✓		
			Menurunnya jumlah pengangguran			✓		✓	
			Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif		✓	✓			

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Dimensi Smart City					
				Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
			Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa			✓		✓	
			Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	✓					
3	Misi 3: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah				✓		
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana						✓
4	Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	✓					
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan desa yang akuntabel, efektif, dan efisien	✓					

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Dimensi Smart City					
				Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
5	Misi 5: Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai, dan bersatu	Meningkatnya toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai, dan bersatu	Meningkatnya ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	✔				✔	

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

2.2 Analisis Kondisi Eksternal

2.2.1 Politik

Kondisi eksternal di bidang politik yang mendasari perlunya mewujudkan Kota Cerdas di Kabupaten Sampang adalah dari regulasi-regulasi pemerintah pusat sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik,
- Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia,
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity,
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Terbitnya regulasi-regulasi ini telah memberikan dasar hukum dan pedoman pengembangan kota cerdas di Indonesia yang akan memberikan dampak signifikan bagi pembuatan kebijakan di tingkat daerah, salah satunya adalah diterbitkannya Peraturan Bupati Sampang Nomor 66 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang (Bupati Sampang, 2019). Saat ini berdasarkan situs resmi Kabupaten Sampang memiliki 26 perangkat daerah, 14 kecamatan, 180 desa, 24 rumah sakit dan puskesmas, dan 591 (1 TKN, 537 SDN, dan 53 SMPN) dengan kompleksitas yang tinggi dalam tata kelolanya sudah saatnya mewujudkan kota cerdas². Kabupaten Sampang telah menerapkan portal-portal layanan sebagai tuntutan regulasi dari pemerintah pusat yaitu SPBE Sampang, Sampang SATU DATA, LPSE, OSS, dan beberapa aplikasi lain. Dalam penerapan kebijakan Satu Data di Indonesia, maka Kabupaten Sampang telah melaksanakan Satu Data Kabupaten Sampang (Sampang SATU DATA)³. Konsep Satu Data di Indonesia mengacu pada usaha untuk menggabungkan dan menyatukan data yang dihasilkan oleh berbagai

² Instansi Pemerintah Kabupaten Sampang (<https://sampangkab.go.id/>)

³ Portal Layanan Pemerintah Daerah (<https://sampangkab.go.id/aplikasi-sampang/>)

instansi pemerintah ke dalam satu platform terpusat. Tujuannya adalah memastikan kualitas, keseragaman, dan keakuratan data, serta mempermudah dan mempercepat akses informasi bagi pemerintah dan masyarakat.

Dalam konsep Satu Data, data dari instansi pemerintah dalam hal ini data dari Kabupaten Sampang seperti kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lainnya, dikumpulkan, diintegrasikan, dan dikelola dalam satu basis data terpusat. Dengan adanya Satu Data, instansi pemerintah dapat menghindari duplikasi data, mengurangi tumpang tindih, dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data.

2.2.2 Ekonomi

Faktor eksternal ekonomi yang dapat mempengaruhi perkembangan Smart City di Kabupaten Sampang adalah terkait dengan situasi keuangan daerah di tingkat provinsi di Jawa Timur pada tahun 2022. Pada tahun tersebut, Anggaran Pendapatan Daerah dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur didominasi oleh Pendapatan Transfer. Terjadi peningkatan pangsa anggaran Pendapatan Transfer di Kabupaten/Kota dari 73,11% pada tahun 2021 menjadi 74,45% pada tahun 2022. Peningkatan ini sejalan dengan alokasi anggaran yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan daerah, termasuk dana BOS yang dialokasikan di Kabupaten/Kota. Selain itu, pangsa anggaran Pendapatan Asli Daerah juga mengalami peningkatan dari 22,59% pada tahun 2021 menjadi 24,14% pada tahun 2022. Peningkatan ini sejalan dengan perkiraan perbaikan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2022, yang diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Daerah, terutama melalui pajak daerah seperti pajak hotel dan restoran, serta pajak kendaraan bermotor. Secara rata-rata, Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten/Kota di Jawa Timur mencapai 19,92% pada tahun 2022, meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang sebesar 18,79%. Beberapa daerah seperti Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang, dan Kota Mojokerto memiliki target Pendapatan Daerah yang tinggi, sehingga mendorong peningkatan DOF. Daerah-daerah ini merupakan pusat industri dan pariwisata. Namun, terdapat 4 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan persentase DOF rendah (kurang dari 10%), menunjukkan tingginya ketergantungan Kabupaten/Kota tersebut terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Dari perspektif kemandirian keuangan, Kabupaten Sampang merupakan wilayah yang paling bergantung pada Pemerintah Pusat. Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten Sampang hanya mencapai 9,43%, namun target ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan target DOF tahun 2021 yang sebesar 7,72%. Selanjutnya, berdasarkan DOF dari masing-masing Kabupaten/Kota, sebagian besar daerah (26 Kabupaten/Kota) ditargetkan untuk meningkatkan DOF melalui pemanfaatan potensi ekonomi setempat, sementara 12 Kabupaten/Kota lainnya diperkirakan akan mengalami penurunan DOF dan membutuhkan lebih banyak dana transfer dari Pemerintah Pusat (Bank Indonesia Jawa Timur, 2023).

2.2.3 Sosial

Kabupaten Sampang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Dalam upaya mewujudkan konsep Smart City, faktor eksternal sosial memegang peran penting di Kabupaten Sampang. Faktor eksternal sosial ini melibatkan beberapa aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, budaya, dan partisipasi masyarakat. Analisis kondisi eksternal sosial di Kabupaten Sampang akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampaknya terhadap pengembangan Smart City di wilayah tersebut.

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan Smart City yang berkelanjutan. Kabupaten Sampang masih menghadapi sejumlah tantangan dalam hal ini. Tingkat literasi penduduknya masih rendah, dengan akses terbatas ke pendidikan yang berkualitas. Upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan dan meningkatkan aksesibilitasnya menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung Smart City.

Kesehatan juga menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan Smart City. Di Kabupaten Sampang, infrastruktur kesehatan masih perlu ditingkatkan, termasuk akses ke fasilitas kesehatan dan layanan medis yang berkualitas. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan edukasi kesehatan kepada masyarakat dapat mendorong partisipasi aktif dalam mengadopsi teknologi kesehatan canggih yang mendukung konsep Smart City, seperti penggunaan telemedicine dan monitoring kesehatan berbasis teknologi.

Aspek budaya juga memiliki peran penting dalam pengembangan Smart City. Kabupaten Sampang memiliki kekayaan budaya yang unik, termasuk tradisi

dan warisan lokal yang berharga. Pemanfaatan dan pelestarian budaya ini harus menjadi perhatian dalam pembangunan Smart City. Upaya untuk menggabungkan teknologi dengan nilai-nilai budaya lokal dapat meningkatkan partisipasi dan penerimaan masyarakat terhadap perkembangan Smart City.

Partisipasi masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam mewujudkan Smart City. Kabupaten Sampang perlu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan Smart City. Langkah-langkah partisipatif, seperti konsultasi publik, melibatkan komunitas, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap manfaat teknologi, harus ditingkatkan. Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan juga dapat membantu mendorong partisipasi yang lebih besar dalam pengembangan Smart City.

2.2.4 Teknologi

Kondisi eksternal teknologi di Kabupaten Sampang memiliki pengaruh signifikan dalam mewujudkan konsep Smart City. Terdapat beberapa aspek yang perlu dianalisis, seperti peran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), perkembangan industri 4.0, dan konsep Socio 5.0. Peran Kominfo menjadi krusial dalam pengembangan Smart City di Kabupaten Sampang. Kementerian ini bertanggung jawab dalam menyediakan kebijakan, regulasi, dan infrastruktur teknologi yang diperlukan. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Sampang dan Kominfo pusat akan mempercepat peningkatan aksesibilitas internet, penyediaan layanan e-government, dan pengembangan infrastruktur teknologi yang mendukung Smart City. Selanjutnya, perkembangan industri 4.0 juga berdampak pada mewujudkan Smart City di Kabupaten Sampang. Industri 4.0 mengacu pada integrasi teknologi digital, otomasi, dan konektivitas yang tinggi. Kabupaten Sampang dapat memanfaatkan teknologi ini untuk mengoptimalkan berbagai sektor seperti transportasi, energi, dan manajemen limbah. Penerapan teknologi terbaru seperti Internet of Things (IoT), big data, dan kecerdasan buatan (AI) dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Sampang. Selain itu, konsep Socio 5.0 juga relevan dalam mewujudkan Smart City di Kabupaten Sampang. Socio 5.0 menekankan integrasi teknologi dengan kebutuhan sosial dan kemanusiaan. Kabupaten Sampang perlu memperhatikan aspek keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan dalam pengembangan Smart City. Mendorong partisipasi aktif masyarakat, menggabungkan teknologi dengan budaya lokal, dan

memastikan inklusivitas adalah langkah penting dalam mengimplementasikan konsep Socio 5.0 dalam konteks Smart City di Kabupaten Sampang.

2.2.5 Lingkungan

Kondisi eksternal lingkungan di Kabupaten Sampang memiliki dampak yang signifikan dalam mewujudkan konsep Smart City. Dalam konteks ini, ada dua aspek yang perlu dianalisis, yaitu perubahan iklim (*global warming*) dan penggunaan energi terbarukan.

Perubahan iklim, khususnya dalam bentuk *global warming*, merupakan tantangan serius yang mempengaruhi pembangunan Smart City di Kabupaten Sampang. Perubahan iklim dapat menyebabkan peningkatan suhu, cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut. Oleh karena itu, langkah-langkah mitigasi dan adaptasi perlu diambil untuk mengurangi dampak negatifnya. Kabupaten Sampang dapat mempertimbangkan strategi pengurangan emisi karbon, seperti menggunakan energi terbarukan, mengurangi penggunaan energi fosil, dan mengoptimalkan efisiensi energi dalam infrastruktur dan bangunan.

Penggunaan energi terbarukan menjadi aspek penting dalam pengembangan Smart City di Kabupaten Sampang. Dalam rangka mencapai kemandirian energi dan mengurangi emisi karbon, peralihan ke sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan biomassa sangat dianjurkan. Kabupaten Sampang dapat memanfaatkan potensi energi terbarukan yang dimilikinya, seperti energi surya di daerah pesisir atau potensi penggunaan energi biomassa dari sektor pertanian dan perikanan. Dalam mengembangkan Smart City, penting juga untuk mempertimbangkan infrastruktur pengisian mobil dan motor listrik dan penerapan teknologi hemat energi di sektor transportasi.

Dalam upaya mewujudkan Smart City yang berkelanjutan di Kabupaten Sampang, kesadaran akan pentingnya pengurangan emisi karbon, penggunaan energi terbarukan, dan perlindungan lingkungan harus ditingkatkan. Kolaborasi dengan institusi penelitian, pemerintah pusat, dan sektor swasta dapat membantu dalam mengembangkan kebijakan dan program yang berfokus pada mitigasi perubahan iklim dan penerapan energi terbarukan. Dengan demikian, Kabupaten Sampang dapat menjadi contoh dalam menerapkan prinsip-prinsip Smart City yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

2.2.6 Legal/Hukum

Kondisi eksternal berdasarkan kondisi legal/hukum di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan Smart City di Kabupaten Sampang. Beberapa aspek hukum yang perlu dianalisis meliputi peraturan pemerintah, kebijakan, dan regulasi terkait Smart City. Dalam konteks Smart City, Kabupaten Sampang perlu memperhatikan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai infrastruktur teknologi, keamanan data, privasi, dan perlindungan konsumen. Peraturan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik harus diperhatikan dalam implementasi Smart City di Kabupaten Sampang.

Selain itu, kebijakan pemerintah juga memainkan peran penting. Kebijakan nasional seperti Rencana Induk Pembangunan Industri 4.0, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan kebijakan sektoral lainnya dapat membantu memberikan arah dan panduan dalam pengembangan Smart City. Kabupaten Sampang perlu memahami dan mematuhi kebijakan-kebijakan ini serta memastikan bahwa upaya pengembangan Smart City selaras dengan tujuan nasional dan peraturan yang ada.

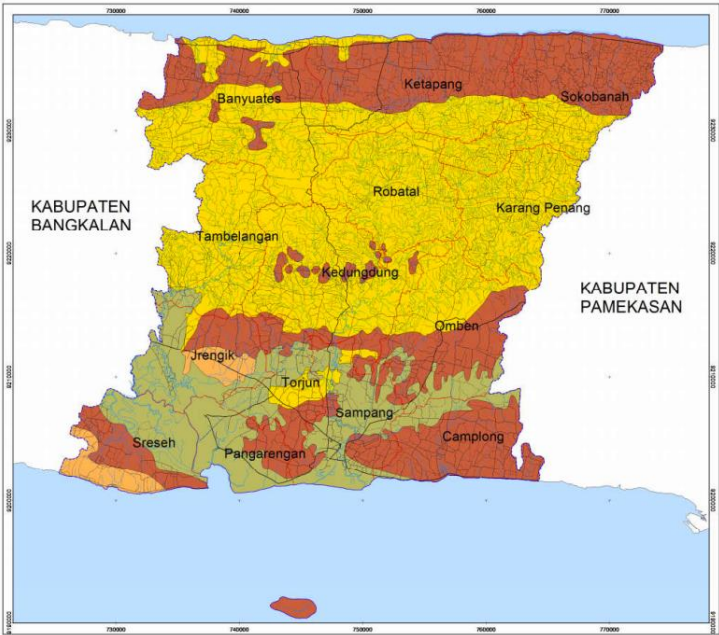
Regulasi terkait perlindungan data pribadi dan keamanan siber juga harus dipertimbangkan dengan serius dalam pengembangan Smart City di Kabupaten Sampang. Perlindungan privasi dan keamanan data merupakan isu penting yang harus dipatuhi untuk memastikan integritas dan kepercayaan dalam penggunaan teknologi Smart City.

3. Analisis Kesiapan Daerah

Saat melakukan evaluasi terhadap kesiapan Kabupaten, diperlukan analisis menyeluruh. Setiap elemen, mulai dari aspek budaya, struktur, infrastruktur, suprastruktur, hingga lingkungan alam, memiliki peran yang signifikan. Pemahaman mengenai interaksi budaya lokal dengan teknologi infrastruktur, peran struktur pemerintahan dalam mendukung transformasi, dan sejauh mana lingkungan alam berkolaborasi dengan inovasi, akan membentuk dasar untuk mencapai keberhasilan sebagai 100 Smart City. Proses analisis kesiapan ini menjadi langkah awal dalam merancang solusi yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan tujuan menciptakan kesejahteraan menyeluruh bagi masyarakat Kabupaten.

3.1 Nature

Luas wilayah Kabupaten Sampang adalah sekitar 1233,33 km² yang dibagi menjadi 14 kecamatan dan 186 desa/kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Banyuates 11,45%, Ketapang 10,16% dan Kedungdung 9,98% terhadap total wilayah Kabupaten Sampang. Sementara itu, kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Pangarengan 3,46%, Torjun 3,58% dan Jrengik 5,30% terhadap total wilayah Kabupaten Sampang (BPS Kab. Sampang, 2022).



Gambar 3.1 Peta Geografis Kabupaten Sampang
(Sumber: RPJPD Kabupaten Sampang (2005-2025))

Gambar 3.1 memperlihatkan posisi geografis Kabupaten Sampang yang berbatasan dengan Kabupaten Bangkalan di sebelah barat, Kabupaten Pamekasan di sebelah timur, dari sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa,

dan dari sebelah selatan berbatasan dengan selat Madura (RPJPD Kab. Sampang, 2010). Lokasi Kabupaten Sampang berada di sekitar garis khatulistiwa, seperti kabupaten lainnya di Madura, wilayah ini mengalami 2 perubahan musim, musim kemarau dan musim penghujan. Musim penghujan biasanya pada bulan Oktober sampai Maret sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April sampai September. Bulan-bulan dengan curah hujan tinggi terjadi pada November, Desember, Januari, dan Februari sedangkan bulan dengan curah hujan paling rendah terjadi pada Juli dan September.

Berdasarkan ketinggian dari permukaan laut, sebagian besar wilayah Kabupaten Sampang merupakan dataran rendah (0 – 100 meter) yakni 87.067 hektar atau 70,60 persen dari total wilayah. Sisanya berada pada ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut. Berdasarkan kemiringan tanah, sebagian besar wilayah Kabupaten Sampang memiliki kemiringan 9 - 15 % (agak miring) yakni seluas 67.807 hektar atau 54,98 persen dari total wilayah. Wilayah yang landai dan datar (kemiringan 0 – 8 %) mencapai 37.786 hektar atau 30,64 persen. Sementara itu, wilayah yang miring dan agak curam (kemiringan 16 - 40 %) mencapai 17.737 Ha atau 14,38 persen dari total luas Kabupaten Sampang.

Topografi Kabupaten Sampang yang cenderung datar dan bergelombang sangat cocok untuk ditanami padi atau sebagai lahan persawahan. Ketinggian permukaan wilayah Kabupaten Sampang berada diantara 0–300 meter di atas permukaan laut. Kecamatan Sampang merupakan kecamatan di Kabupaten Sampang dengan luas wilayah terbesar berkategori datar, yaitu sebesar 5.849 hektar. Kabupaten Sampang memiliki kondisi geologis dengan lima macam batuan utama. Lima batuan tersebut adalah alluvium, pliosen fasies sedimen, plistosen fasies sedimen, pliosen fasies batu gamping, dan mioses fasies sedimen. Jenis geologi alluvium dan mioses fasies sedimen banyak digunakan oleh masyarakat untuk tegalan dan sawah, serta sebagian kecil jenis batuan plistosen fasies sedimen yang seluruhnya untuk tegalan. Sebagian besar jenis tanah di Kabupaten Sampang sangat cocok untuk dikembangkan komoditas pertanian khususnya tanaman pangan. Bagian yang terluas adalah tanah dari jenis kompleks mediteran grumosol, regosol dan litosol yakni seluas 54.335 hektar. Diikuti oleh jenis tanah alluvial hidromorf dengan luas sekitar 10.720 hektar. Sementara untuk proporsi jenis tanah terendah adalah jenis grumosol kelabu yang hanya terdapat di Kecamatan Sampang dan Kecamatan Camplong, dengan luasan 2.125 hektar.

3.2 Struktur

Kesiapan struktur Kabupaten Sampang untuk mewujudkan *smart city* yaitu menggunakan analisis kesiapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) daerah, kualitas SDM pemerintahan Kabupaten Sampang, dan kapasitas keuangan daerah.

3.2.1 Analisis Kualitas SDM Daerah Kabupaten Sampang

Tabel 3.1 memperlihatkan analisis kesiapan kualitas SDM daerah Kabupaten Sampang dan interpretasi per komponen (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023a).

Tabel 3.1 Analisis Kualitas SDM daerah

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Jumlah komunitas minat bakat/hobbie/kreatif di daerah	12			
2	Adanya komunitas pengembang/developer perangkat lunak TIK di daerah	1			
3	Adanya digital startup di daerah	4			
4	Adanya perguruan tinggi di daerah	14			
5	Jumlah penerima beasiswa perguruan tinggi dari pemerintah daerah	100			
6	Jumlah tindakan pelanggaran ketertiban umum dalam satu tahun	388			
7	Jumlah angka kriminalitas dalam satu tahun	318			
8	Jumlah tindakan merusak fasilitas umum dalam satu tahun	4			
9	Jumlah kegiatan tawuran antar kelompok warga dalam satu tahun	Tidak ada			

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

Berdasarkan Tabel 3.1 terdapat Sembilan komponen untuk mengukur kesiapan SDM daerah. Dari sembilan komponen, tiga komponen memiliki interpretasi buruk. Ketiga komponen tersebut mencakup masih minimnya jumlah pengembang perangkat lunak TIK yaitu hanya satu yang merupakan relawan TIK; kelangkaan digital *start-up* daerah hanya ada empat yang bersifat lokal yaitu Jontor, Ojol, Ude Pakde Bisa, dan Gopank; penyerapan beasiswa dari pemerintah daerah yang belum maksimal dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu beasiswa sahabat penerima hanya 10 orang dan beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kabupaten (KIPK) sebanyak 90 siswa.

Empat komponen memiliki interpretasi sedang meliputi 12 komunitas berdasarkan minat, bakat, dan hobi seperti komunitas musik tradisional, kicau mania, karapan sapi, pencak silat, Al-Banjari, dan Tari Saman; adanya 14 perguruan tinggi baik negeri (Poltera) maupun swasta (beberapa STKIP, Stikes Sukma Wijaya, dan STAI Nata) seharusnya dapat mendorong potensi SDM pada ketersediaan komunitas pengembang TIK daerah dan juga inisiatif pembentukan digital *start-up* baru; meskipun tidak bisa dikatakan sedikit jumlah pelanggaran ketertiban umum masih dalam batas kecukupan yaitu sebanyak 318 tindakan dengan rincian penertiban PKL: 180 kali (sosialisasi,penyisiran,himbauan,penertiban); penertiban badut, pengemis, pengamen: 34 kali; penertiban siswa bolos: 36 kali; penertiban cafe yang melanggar aturan: 36 kali; penertiban orang dalam gangguan jiwa: 31 kali; dan penertiban reklame: 23 kali. Angka kriminalitas dalam satu tahun pada dasarnya terjadi secara fluktuatif yaitu 318 kasus (2023), sedangkan data dari Polres Sampang tercatat 217 kasus kriminalitas di tahun 2022 terjadi penurunan sebanyak 26% dibandingkan 369 kasus di tahun 2021.

Hasil yang berbeda ditemukan pada dua komponen terakhir yaitu hanya terdapat empat kasus kerusakan fasilitas umum (pencurian Tutup gorong-gorong, pencurian kabel pompa air, pencurian komponen *solar cell*, dan kerusakan kursi taman) dan tidak ada sama sekali kasus tawuran antar kelompok warga. Kedua komponen ini dapat mengindikasikan dukungan dimensi *Smart Society*.

3.2.2 Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintahan Kabupaten Sampang

Tabel 3.2 menyajikan analisis kualitas SDM di pemerintah daerah Kabupaten Sampang (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023a), baik dari sisi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau perangkat pendukung para ASN dalam melakukan pekerjaannya.

Tabel 3.2 Analisis Kualitas Sumber Daya Pemerintah

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Persentase pegawai dengan jenjang pendidikan S2 ke atas	9,51%			
2	Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan Ilmu Komputer/Teknik Informatika	16			
3	Jumlah relawan TIK di daerah	34			
4	Persentase jumlah unit komputer (PC & Laptop) terhadap jumlah pegawai	75,30%			
5	Persentase pegawai berusia 50 tahun ke atas terhadap jumlah pegawai	30,13%			
6	Persentase pegawai berusia 40-50 tahun terhadap jumlah pegawai	40,02%			
7	Persentase pegawai berusia 25 -40 tahun terhadap jumlah pegawai	29,85%			
8	Jumlah sistem informasi yang digunakan di pemerintah daerah	63			
9	Persentase ketersediaan jaringan broadband access terhadap jumlah kantor pemerintahan	88%			
10	Persentase ketersediaan jaringan LAN/WAN di kantor pemerintahan	88%			
11	Jumlah lokasi wireless internet (hotspot) di kawasan perkantoran pemerintahan	85			
12	Ketersediaan data center (baik yang dikelola sendiri maupun manage service) untuk kepentingan pemerintahan	Tersedia			
13	Ketersediaan rencana dan SOP mitigasi bencana terhadap data pemerintahan	Belum tersedia			
14	Ketersediaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang interoperabel	Tersedia			

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
15	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang interoperabel	Tersedia	✓		
16	Ketersediaan sistem informasi kantor virtual pemerintah daerah yang interoperabel	Tersedia	✓		
17	Ketersediaan sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang interoperabel	Tersedia		✓	
18	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan kepegawaian daerah yang interoperabel	Tersedia		✓	
19	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan legislasi daerah yang interoperabel	Tersedia		✓	
20	Ketersediaan sistem informasi pelayanan publik yang interoperabel	Tersedia	✓		

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

Berdasarkan data pada Tabel 3.2, terdapat sepuluh komponen dengan interpretasi baik dan tujuh komponen interpretasi sedang secara umum sumber daya pemerintah daerah Kabupaten Sampang telah siap untuk program Smart City. Interpretasi baik meliputi ketersediaan 85 titik *hotspot* di lingkungan perkantoran di Kabupaten Sampang, sehingga akan mendukung mobilitas dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat; Sistem informasi layanan publik seperti Uji Kir, SI-Pos; Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (SIPD) dan juga keuangan daerah (SIPKD); beroperasinya data center; kesiapan infrastruktur fisik yang sangat mendukung Smart City seperti ketersediaan jaringan broadband access dan jaringan LAN/WAN yang telah mencapai 88%; selain itu terdapat 63 sistem informasi yang telah digunakan oleh pemerintah daerah. Interpretasi sedang yang juga mengindikasikan Sistem informasi telah sebagian besar digunakan untuk operasional internal pemerintahan daerah antara lain bengkel SiRENCA dan SiPEDAL, SIASN, Simpeg, dan tersedianya *web* untuk OPD.

Sumber daya ASN, mayoritas memiliki interpretasi sedang. Berdasarkan pembagian kategori ASN yang berusia di atas 50 tahun mencapai 30,13%, di atas 40 – 50 tahun mencapai 40,02%, dan sisanya 25 – 40 tahun mencapai 29,85%, persentase untuk ASN yang berusia 25-40 tahun ini perlu ditingkatkan jumlahnya seiring dengan kemampuan adaptasi penggunaan TIK. Jumlah total ASN per Desember 2022 di Kabupaten Sampang berdasarkan data BPS tahun 2023 mencapai 6.380 (BPS Kab. Sampang, 2023). Adanya persebaran kelompok usia ASN yang hampir merata memungkinkan para pegawai akan saling melengkapi. Selain itu terdapat komponen yang masih perlu dilengkapi yaitu ketersediaan rencana dan SOP mitigasi bencana terhadap data pemerintahan.

3.2.3 Analisis Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Sampang

Kapasitas Keuangan Daerah mengukur kemampuan daerah dalam mendanai program-program pembangunan yang telah direncanakan, agar program Smart City dapat terwujud. Tabel 3.3 menyajikan hasil analisis Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Sampang (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023a).

Tabel 3.3 Analisis Kapasitas Keuangan Daerah Kabupaten Sampang

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Persentase Nilai Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah	9,78%			
2	Nilai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Lalu	149.058.594.697,83			
3	Persentase Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Daerah	64,49%			
4	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Total Belanja Daerah	10,94%			
5	Jumlah Anggaran untuk Belanja Smart City yang dapat dialokasikan di dalam APBD Tahun 2022	6.650.000.000			

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
6	Jumlah Anggaran untuk Belanja Smart City yang dapat dialokasikan di dalam APBD Tahun 2023	350.000.000			
7	Jumlah program pembangunan untuk mendukung smart city di daerah	Jangka Pendek (14) Jangka Menengah (45) Jangka Panjang (7)			
8	Nilai investasi masuk yang mendukung pembangunan daerah	329.378.337.166			
9	Jumlah sumber-sumber pendanaan pembangunan alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung smart city	3			

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

Berdasarkan Tabel 3.3 terdapat tiga komponen kapasitas keuangan daerah dengan interpretasi baik, lima komponen memiliki interpretasi sedang, dan hanya satu komponen yang interpretasinya buruk. Bukti bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sampang telah serius mendukung program Smart City adalah adanya alokasi anggaran belanja *Smart City* tahun 2022 dan 2023, ditambah lagi dengan adanya sebanyak total 66 program pembangunan untuk mendukung *Smart City* terdiri dari 14 program jangka pendek, 45 program jangka menengah, dan 7 program jangka Panjang. Terlihat alokasi anggaran belanja infrastruktur hanya 10,94%. Meskipun nilai persentase kecil dapat diartikan bahwa kondisi infrastruktur di Kabupaten Sampang sudah semakin baik, meskipun masih ditemukan permasalahan rusaknya peningkatan jalan raya Panggung-Pangilen yang dana proyeknya diambil dari Dana Alokasi

Umum (DAU) dari APBD tahun 2023⁴. Harapannya proyek tersebut dapat segera diperbaiki.

Suntikan dana dari investor untuk pembangunan daerah dan sumber-sumber pendanaan alternatif sangat mendukung untuk program Smart City, persentase nilai pendapatan asli daerah sebesar 9,78% juga perlu ditingkatkan lagi. Realisasi belanja pegawai sebesar 64,49% dari total realisasi belanja pemerintah memiliki interpretasi paling rendah, kondisi ini perlu dicermati agar kesejahteraan pegawai secara umum meningkat. Data ini masih perlu ditelusuri lebih lanjut, karena alokasi belanja pegawai menurut BPS tahun 2023 belum muncul (BPS Kab. Sampang, 2023).

3.3 Infrastruktur

3.3.1 Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah Kabupaten Sampang

Tabel 3.4 memperlihatkan analisis kesiapan infrastruktur daerah mencakup kondisi jalan, lampu penerangan, Kawasan perkantoran dan perbelanjaan, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023a).

Tabel 3.4 Analisis Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah Kabupaten Sampang

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Persentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik	66.83%			
2	Persentase panjang pedestrian (fasilitas pejalan kaki) per panjang jalan beraspal	Ada			
3	Persentase lampu jalan yang berfungsi dengan baik	99,72%			
4	Persentase rambu dan petunjuk jalan dalam kondisi baik	94%			

⁴ Proyek Jalan Raya Panggung-Pangilen (<https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/aktivis-soroti-rusaknya-proyek-peningkatan-jalan-di-sampang/>)

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedan g	Buru k
5	Adanya kawasan perkantoran untuk kegiatan bisnis	Ada			
6	Adanya kawasan perbelanjaan untuk kegiatan perdagangan masyarakat	Ada			
7	Persentase sarana prasarana pendidikan dalam kondisi baik	54,58%			
8	Persentase sarana prasarana pelayanan kesehatan dalam kondisi baik	68,20%			

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

Berdasarkan Tabel 3.4 dari delapan komponen kesiapan infrastruktur fisik, dua komponen menunjukkan interpretasi yang baik yaitu lampu penerangan jalan yang berfungsi dengan baik mencapai 99,72% artinya seluruh jalan mendapatkan penerangan yang memadai, dengan rambu dan petunjuk jalan yang juga dalam kondisi baik yaitu mencapai 94%, maka masyarakat pengguna jalan akan merasa nyaman dan aman dalam berkendara terutama di malam hari. Infrastruktur fisik kabupaten ini juga ditunjang oleh keberadaan kawasan perkantoran yaitu di Kawasan Wahid Hasyim, sebaiknya dipertimbangkan untuk menambah jumlah kawasan perkantoran agar kegiatan bisnis dapat lebih hidup. Keberadaan pasar tradisional juga sudah cukup mendukung kegiatan perdagangan masyarakat seperti di Kawasan Srimangunan, Kawasan Margalela, dan Kawasan Pasar Rong-Tengah.

Sarana dan prasarana pendidikan dengan kondisi baik yang baru mencapai 54,58% perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Tercatat ruang kelas yang mengalami kondisi rusak berat mencapai 20,07%, rusak sedang 11,70%, dan rusak ringan 12,96%. Peran kepala sekolah menjadi kunci utama dalam mendorong perbaikan kondisi gedung dan fasilitas sekolah, berdasarkan sumber surat kabar terdapat 102 sekolah yang mengalami kekosongan kepala sekolah sejak tahun 2022, karena faktor purna tugas dan meninggal sehingga

perlu segera dicari penggantinya⁵. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan juga masih perlu di tingkatkan lagi, meskipun capaian 68,2% mendapatkan interpretasi sedang, pemerataan fasilitas kesehatan masih belum maksimal. Tercatat 31,8% (7 Puskesmas) belum memenuhi standar. Dari 57 Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 50,9% (29 Pustu) dalam kondisi yang baik, 5,3% (3 Pustu) mengalami rusak ringan, dan 43,8% (25 Pustu) mengalami rusak berat. Secara umum kesiapan infrastruktur fisik memiliki interpretasi sedang ke arah baik sehingga dengan program Smart City pembangunan infrastruktur akan lebih massif.

3.3.2 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah Kabupaten Sampang

Dalam menyusun program *Smart City* diperlukan juga kesiapan infrastruktur digital daerah. Tabel 3.5 menyajikan hasil analisis kesiapan infrastruktur digital di Kabupaten Sampang (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023a).

Tabel 3.5 Analisis Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah Kabupaten Sampang

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedan g	Buruk
1	Persentase luas area dengan jaringan 4G atau 3G	Ada			
2	Tersedianya jaringan broadband access untuk masyarakat	Tersedia			
3	Jumlah lokasi wireless untuk publik	4			
4	Persentase rumah tangga yang terlayani listrik	96,24%			
5	Jumlah kejadian pemadaman listrik setiap bulan (dalam jam)	32			

⁵ (<https://madura.tribunnews.com/2023/07/21/ada-102-lembaga-sekolah-di-sampang-tanpa-sosok-kepsek-kegiatan-belajar-mengajar-terus-berjalan>)

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
6	Jumlah sekolah yang memiliki akses internet	78			
7	Jumlah rumah sakit yang menggunakan sistem layanan elektronik/online	3			

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

Berdasarkan Tabel 3.5 kesiapan infrastruktur digital di Kabupaten Sampang cenderung sedang ke arah interpretasi yang baik. Terdapat dua komponen yang mendominasi dengan interpretasi baik seperti jaringan listrik yang sudah ada di sebagian besar wilayah kabupaten mencapai 96,24% dan ketersediaan 4 lokasi *wireless* untuk publik yang terletak di taman, alun-laun, dan monument. Sebagian besar wilayah sudah dapat diakses dengan jaringan baik 3G maupun 4G, termasuk juga akses jaringan *broadband* kepada masyarakat.

Ketersediaan layanan listrik sangat berdampak kepada ketersediaan dan kestabilan koneksi *Internet*, sehingga pemadaman listrik perlu diminimalisasi. Sebanyak 78 sekolah (13,19%) yang memiliki akses *Internet* dibandingkan dengan jumlah 591 sekolah total yang ada di Kabupaten Sampang belumah mencukupi, sekolah menjadi lembaga pertama yang dapat mencetak SDM unggul dan berkontribusi besar dalam mengembangkan *Smart Society*. Kualitas hidup yang ada di dalam dimensi *Smart Living* pada sub dimensi kesehatan perlu penyediaan layanan kesehatan berkualitas dengan TIK, sehingga 3 rumah sakit yang menggunakan sistem layanan elektronik dari 24 rumah sakit/puskesmas dapat menjadi *best practice* yang perlu diadaptasi.

3.3.3 Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah Kabupaten Sampang

Kesiapan infrastruktur sosial daerah pada

Tabel 3.6 juga tidak kalah penting sebagai komponen pendukung pengembangan *Smart City* daerah, terutama untuk pengembangan program-program yang berkaitan dengan dimensi *Smart Society* dan *Smart Environment* (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023a).

Tabel 3.6 Analisis Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah Kabupaten Sampang

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Adanya pusat kegiatan belajar masyarakat di tingkat kelurahan/desa	Ada			
2	Adanya Ruang Terbuka Publik di tingkat RW	Ada			
3	Adanya aula/balai warga di tingkat kelurahan/desa	Ada			
4	Jumlah fasilitas olahraga di tingkat kelurahan/desa	195			
5	Ketersediaan perpustakaan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah	Tersedia			

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

Dari lima komponen kesiapan infrastruktur sosial daerah, tiga komponen memiliki interpretasi baik dan dua komponen memiliki interpretasi buruk. Terdapat 186 aula/balai warga di tingkat kelurahan/desa memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat kabupaten Sampang untuk berbagai kegiatan seperti musyawarah desa, pertemuan komunitas, kegiatan pengajian, bakti sosial, latihan seni dan budaya yang mendukung dimensi *Smart Society*. Ketersediaan fasilitas olahraga dari sisi jumlah sudah baik. Namun perlu ditinjau lebih jauh, apakah 195 fasilitas olahraga yang tersebar di 180 desa sudah tersebar merata dan dimanfaatkan secara maksimal. Keberadaan perpustakaan umum sangat penting sebagai sumber informasi dan pengetahuan terdapat 1 perpustakaan di kabupaten, 54 perpustakaan desa, 1 unit mobil untuk perpustakaan keliling, dan 3 rumah pintar, komponen ini memiliki interpretasi baik, meskipun demikian pemanfaatan perpustakaan yang sudah ada perlu dikaji kembali serta akses perpustakaan bagi 126 desa lainnya. Keberadaan 35 pusat kegiatan belajar masyarakat di tingkat desa masih dinilai belum mencukupi dari 180 desa yang ada, ditambah lagi dengan

minimnya ruang terbuka public di tingkat RW memberikan kedua komponen ini interpretasi yang buruk, sehingga secara umum kesiapan infrastruktur sosial daerah masih perlu ditingkatkan untuk mewujudkan program Smart City.

3.4 Suprastruktur

Kesiapan suprastruktur meliputi dukungan kebijakan daerah dan dukungan organisasi masyarakat di Kabupaten Sampang. Dari hasil analisa kesiapan daerah, baik kesiapan kebijakan ataupun organisasi masyarakat daerah menunjukkan adanya interpretasi baik dari sebagian besar komponen yang ada.

3.4.1 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah Kabupaten Sampang

Tabel 3.7 memperlihatkan hasil analisis kesiapan kebijakan daerah Kabupaten Sampang yang berpotensi untuk mendukung pelaksanaan Smart City (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023a).

Tabel 3.7 Analisis Kesiapan Kebijakan Daerah Kabupaten Sampang

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Adanya Peraturan Daerah tentang Dewan Smart City Daerah	Ada			
2	Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang Tim Pelaksana Smart City Daerah	Ada			
3	Adanya masterplan smart city daerah	Ada			
4	Adanya Peraturan Daerah tentang Masterplan Smart City Daerah	Belum ada			
5	Adanya visi pembangunan smart city yang selaras dengan visi misi pembangunan daerah	Ada			

No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
6	Adanya kepastian terhadap keberlanjutan program smart city dalam jangka panjang	Ada			
7	Adanya mekanisme evaluasi dan apresiasi kinerja terhadap aparatur dan organisasi yang berprestasi dalam melaksanakan program smart city	Hanya ada evaluasi			

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

Dari hasil analisis kesiapan kebijakan daerah pada Tabel 3.7 dapat disimpulkan bahwa meskipun Kabupaten Sampang belum memiliki Rencana Induk Kota Cerdas (Master Plan *Smart City*), namun Pemerintah Daerah yaitu Kepala Bupati telah mengeluarkan SK. Nomor: 188.45/154/KEP/434.013/2023 tentang Dewan *Smart City* Kabupaten Sampang (Bupati Sampang, 2023a) dan SK. Nomor: 188.45/154/KEP/434.013/2023 tentang Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Sampang (Bupati Sampang, 2023b). Arah pembangunan daerah dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 (RPJPD Kab. Sampang, 2010) yang juga telah selaras dengan konsep *Smart City*, yaitu pada Bidang Geomorfologi dan Lingkungan Hidup, Bidang Demografi, Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, Bidang Sarana dan Prasarana, dan Bidang Pemerintahan. Ditambah lagi, Kabupaten Sampang juga telah mengalokasikan anggaran untuk belanja *Smart City* sebesar Rp. 6,65 miliar dari APBD 2022 dan Rp. 350 juta dari APBD 2023 (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023a). Dengan modal-modal yang sudah dimiliki ini, maka Kabupaten Sampang memiliki dukungan kebijakan yang kuat untuk pembuatan Rencana Induk Kota Cerdas sekaligus melaksanakan *Smart City*.

3.4.2 Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah Kabupaten Sampang

Tabel 3.8 menyajikan hasil analisis dukungan kelembagaan daerah dalam pengembangan *Smart City* di Kabupaten Sampang.

Tabel 3.8 Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah Kabupaten Sampang

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Adanya Dewan Smart City Daerah	Ada			
2	Adanya Tim Pelaksana Smart City Daerah	Ada			
3	Adanya SOP smart city daerah	Ada			
4	Adanya tata pamong yang bertugas sebagai anggota Tim Pelaksana Smart City di setiap OPD	Dalam proses			

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

Berdasarkan keempat komponen tersebut dapat dipastikan bahwa secara kelembagaan Kabupaten Sampang telah siap melaksanakan *Smart City*. Kabupaten Sampang telah memiliki SK. Bupati tentang Dewan *Smart City* Daerah (Bupati Sampang, 2023a), SK. Bupati tentang Tim Pelaksana *Smart City* Daerah (Bupati Sampang, 2023b), dan juga SOP *Smart City* Daerah. Di dalam SK tersebut, telah disebutkan keterlibatan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada dimensi-dimensi *Smart City* sejalan dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi (Tupoksi) OPD berkaitan. Adanya Dewan *Smart City* dan Tim Pelaksana *Smart City* ini sudah cukup untuk menjadi modal awal pelaksanaan *Smart City* di Kabupaten Sampang.

3.4.3 Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah Kabupaten Sampang

Tabel 3.9 menyajikan data hasil isian kesiapan organisasi masyarakat daerah di Kabupaten Sampang (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023a).

Tabel 3.9 Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah Kabupaten Sampang

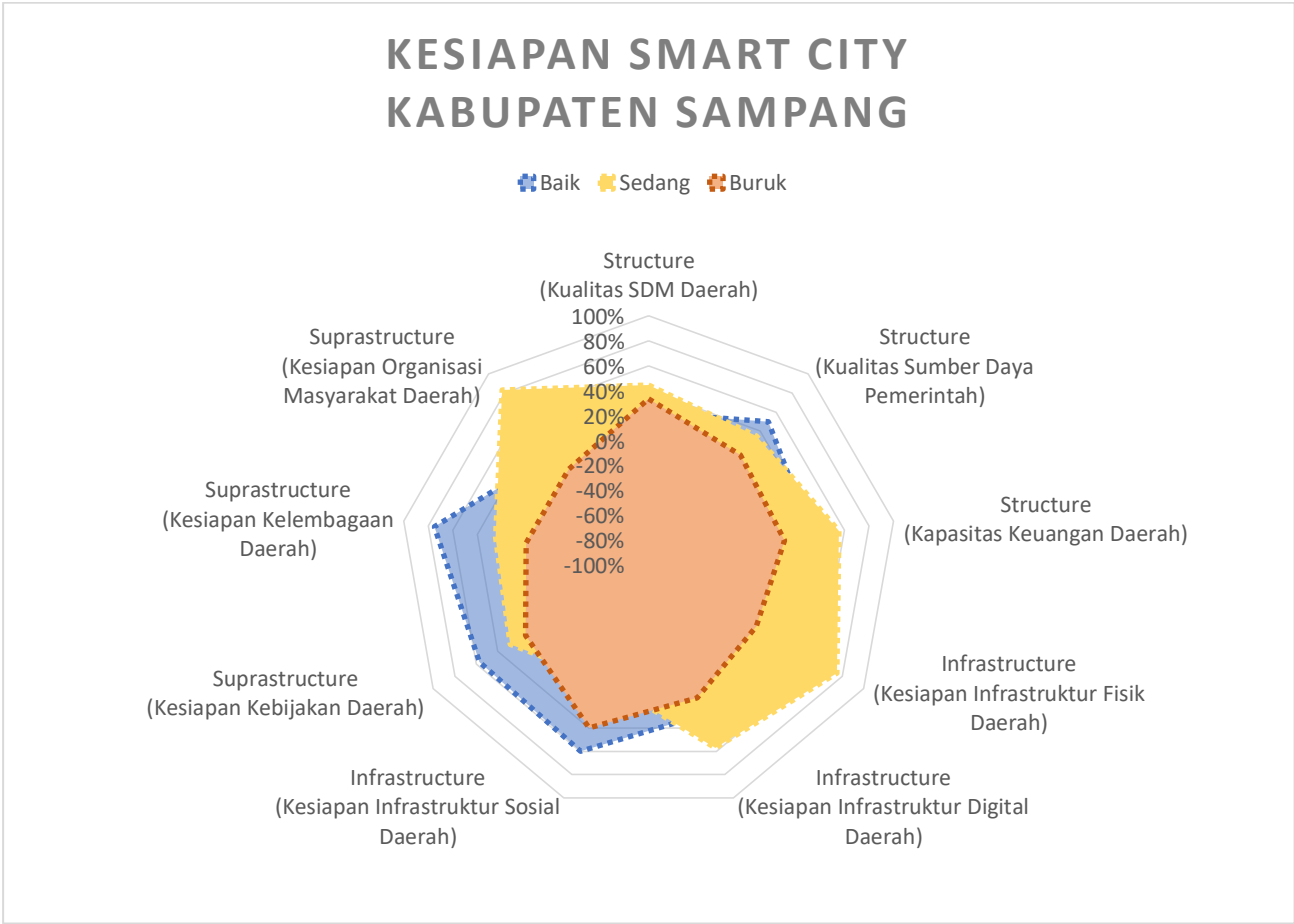
No	Komponen	Nilai/ Kondisi	Interpretasi		
			Baik	Sedang	Buruk
1	Adanya lembaga pengabdian masyarakat dari perguruan tinggi di daerah	Ada			
2	Adanya forum-forum swadaya masyarakat pendukung smart city	Ada			
3	Jumlah forum swadaya masyarakat pendukung smart city	6			
4	Dukungan operasional pemerintah terhadap forum pendukung smart city	Ada			
5	Jumlah forum pendukung smart city yang memiliki sekretariat definitif	4			
6	Adanya partisipasi pakar dari perguruan tinggi lokal dalam Dewan Smart City Daerah	Ada			

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

Berdasarkan Tabel 3.9 secara umum interpretasi setiap komponen mengarah kepada kesiapan Kabupaten Sampang menuju *Smart City* pada organisasi daerah. Adanya kontribusi perguruan tinggi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibuktikan dengan terlaksananya kerjasama antara Politeknik Negeri Madura (POLTERA) dan Pemerintah Daerah Kab. Sampang baik dari hibah internal POLTERA untuk pembangunan desa maupun dana hibah dari pemerintah pusat dalam bentuk hibah Kedaireka dan *Matching Fund*; adanya ambulance boat, Mangrove, dan mesin pengolah sampah berbasis listrik juga dihasilkan dari kerjasama ini. Aktifnya kegiatan forum-forum yang dibentuk dari swadaya masyarakat dan mendapatkan dukungan operasional dari pemerintah daerah seperti Forum Penanggulangan Risiko Bencana, Forum Sampang Sehat, Forum Anak, Forum Tematik, dan Forum CSR. Empat forum

juga didukung oleh sekretariat definitif yaitu Forum FPRB, Forum Sampang Sehat, Forum Anak, dan Forum CSR. Sekretariat definitif sangat penting perannya dalam melakukan kegiatan administrasi umum forum, penyelenggaraan rapat, komunikasi secara eksternal dan internal, pengelolaan informasi, koordinasi setiap kegiatan, dan pembuatan laporan.

Keberadaan forum-forum ini bisa menjadi komponen yang penting dalam pelaksanaan program-program *Smart City*. Misalnya, Forum Sampang Sehat dan Forum Anak bisa dilibatkan dan mendukung program-program dimensi *Smart Living*. Apalagi peran dari partisipasi pakar yaitu direktur POLTERA dalam Dewan Smart City Daerah akan mempercepat pencapaian program *Smart City* daerah.



Gambar 3.2 Rangkuman analisis kesiapan smart city Kabupaten Sampang

Grafik Spider pada Gambar 3.2 memperlihatkan kesiapan Kabupaten Sampang dalam menerapkan smart city. Analisis Kesiapan Daerah untuk Implementasi smart city:

1. Struktur (Kualitas SDM Daerah): Dengan 22% baik, 44% sedang, dan 33% buruk, kualitas SDM daerah memerlukan perhatian ekstra, dengan mayoritas parameter berada pada tingkat sedang dan buruk.

2. Struktur (Kualitas Sumber Daya Pemerintah): Meskipun mayoritas indikator menunjukkan tingkat yang baik, perlu diperhatikan bahwa 15% berada pada kategori buruk, yang dapat menjadi titik fokus peningkatan.
3. Struktur (Kapasitas Keuangan Daerah): Dengan mayoritas indikator menunjukkan tingkat sedang dan baik, daerah memiliki dasar yang relatif solid dalam kapasitas keuangan.
4. Infrastruktur (Kesiapan Infrastruktur Fisik Daerah): Dengan 75% baik, daerah memiliki kesiapan yang baik dalam hal infrastruktur fisik.
5. Infrastruktur (Kesiapan Infrastruktur Digital Daerah): Mayoritas indikator menunjukkan tingkat baik dan sedang, menandakan kesiapan yang cukup baik dalam infrastruktur digital.
6. Infrastruktur (Kesiapan Infrastruktur Sosial Daerah): Meskipun mayoritas indikator menunjukkan baik, 40% buruk menunjukkan perlunya perhatian pada aspek sosial.
7. Suprastruktur (Kesiapan Kebijakan Daerah): Dengan mayoritas baik, daerah memiliki dasar kebijakan yang baik untuk mendukung transformasi menuju smart city.
8. Suprastruktur (Kesiapan Kelembagaan Daerah): Mayoritas indikator menunjukkan tingkat baik, menandakan kesiapan lembaga dalam mendukung implementasi smart city.
9. Suprastruktur (Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah): Mayoritas indikator menunjukkan tingkat sedang dan baik, tetapi perlu diperhatikan bahwa 17% berada pada kategori buruk.

Secara keseluruhan, Kabupaten Sampang memiliki fondasi yang baik untuk implementasi smart city, terutama dalam aspek struktur dan infrastruktur. Namun, perlu fokus lebih lanjut pada peningkatan kualitas SDM daerah, infrastruktur sosial, dan kelembagaan masyarakat untuk mencapai tingkat kesiapan yang optimal. Tindakan strategis yang terfokus pada perbaikan di area ini akan meningkatkan peluang kesuksesan dalam melaksanakan inisiatif smart city secara efektif.

3.5 Culture

Kabupaten Sampang, sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur, Indonesia, memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang unik. Kultur masyarakat di Kabupaten Sampang mencerminkan harmoni antara adat istiadat, agama,

seni, dan nilai-nilai lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu ciri khas budaya di Kabupaten Sampang adalah keramahan dan kehangatan dalam berkomunikasi. Masyarakatnya dikenal sangat ramah terhadap pengunjung, dengan sikap saling sapa yang hangat dan menyambut. Ketulusan dalam bertegur sapa dan kepedulian terhadap sesama adalah nilai-nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari.

Kabupaten Sampang juga terkenal dengan seni dan tradisi yang memukau. Seni pertunjukan seperti tari, musik, dan teater merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya lokal. Tarian tradisional seperti Reog Ponorogo dan Barongan sering dipentaskan dalam acara adat, festival, atau perayaan keagamaan. Selain itu, seni kerajinan tangan, seperti anyaman, tenun, dan ukiran kayu, juga menjadi warisan budaya yang dijaga dengan penuh kebanggaan.

Agama Islam mendominasi kehidupan masyarakat Kabupaten Sampang. Nilai-nilai keagamaan tercermin dalam kegiatan ibadah, adat istiadat, dan perayaan hari besar keagamaan. Masyarakatnya menghormati ajaran agama dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Islam.

Tradisi gotong royong juga menjadi ciri khas kultur masyarakat Kabupaten Sampang. Semangat kebersamaan dan kerjasama dalam membantu sesama tercermin dalam berbagai acara adat, seperti pernikahan, khitanan, dan selamatan. Nilai-nilai solidaritas dan persatuan sangat dijunjung tinggi dalam mengatasi berbagai tantangan dan peristiwa kehidupan sehari-hari. Bahasa Madura menjadi bahasa utama yang digunakan dalam interaksi sehari-hari. Sementara aksara Pegon digunakan dalam penulisan ajaran agama dan sastra lokal. Penggunaan bahasa dan aksara ini menjadi simbol keberagaman dan kekayaan linguistik masyarakat Kabupaten Sampang.

Pesisir utara Kabupaten Sampang yang menghadap ke Laut Jawa memberi pengaruh kuat terhadap budaya dan kehidupan masyarakat. Nelayan dan petani merupakan dua profesi utama yang masih dijalankan dengan bangga. Tradisi dan kesenian terkait dengan kehidupan laut menjadi bagian integral dari kultur masyarakat ini.

4. Analisis Strategi Pembangunan Smart City

Pengkajian Strategi Pembangunan Smart City di Kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk inovasi dan keberlanjutan. Analisis kesenjangan memberikan wawasan yang mendalam berdasarkan tiga komponen utama, yakni Sintesis Kondisi Saat Ini, Tinjauan Tren Masa Depan, dan Penentuan Kesenjangan. Sementara analisis SWOT menguraikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, analisis TOWS mengarahkan perumusan strategi yang selaras, cerdas, dan mudah beradaptasi. Dengan pendekatan holistik ini, perencanaan yang terfokus, membimbing kabupaten menuju kepada kemajuan smart city yang cerdas, tanggap, dan bersaing secara efektif.

4.1 Analisis Kesenjangan

Analisis kesenjangan dilakukan untuk mengetahui adanya gap antara kondisi saat ini dengan rencana masa depan di Kabupaten Sampang berdasarkan enam dimensi Smart City. Hasil dari analisis Gap ini dapat menjadi bagian dari arah pembangunan Smart City yang diprogramkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang.

4.1.1 Dimensi Smart Governance

Tabel 4.1 memperlihatkan kesenjangan yang berhasil ditemukan pada dimensi Smart Governance (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023a, 2023b, 2023c)

Tabel 4.1 Analisis Kesenjangan pada Dimensi Smart Governance

Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi Gap/Kesenjangan
Penggunaan e-government terbatas pada beberapa layanan publik.	Rencana penerapan Smart Governance yang komprehensif dengan adopsi teknologi dalam seluruh sektor pelayanan publik.	Perlunya perluasan cakupan layanan e-government dan adopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan keterbukaan pelayanan publik.
Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih terbatas.	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan kebijakan melalui platform partisipatif dan	Perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi Gap/Kesenjangan
	mekanisme konsultasi publik.	
Transparansi informasi publik perlu ditingkatkan.	Peningkatan transparansi informasi dan aksesibilitas data publik.	Kebutuhan untuk meningkatkan transparansi dalam menyediakan informasi publik dan memberikan akses lebih mudah bagi masyarakat.
Kurangnya koordinasi antar departemen dan lembaga pemerintah.	Perlunya integrasi data dan informasi antara departemen dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.	Diperlukan upaya untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara departemen dan lembaga pemerintah dalam pengembangan Smart City.

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

Kesenjangan di *Smart Governance* masih berfokus kepada pelayanan publik yang belum terintegrasi (silo), kondisi ini disebabkan oleh OPD dalam membantu pekerjaan operasionalnya membuat aplikasi masing-masing. Pemerintah pusat pada dasarnya telah mengeluarkan beberapa kebijakan seperti SIPD dan SIPKD untuk perencanaan pembangunan dan penganggaran, dan kebijakan Satu Data. Namun penerapan kebijakan-kebijakan baru ini masih membutuhkan adaptasi bagi daerah untuk melakukannya.

4.1.2 Dimensi *Smart Branding*

Tabel 4.2 memperlihatkan kesenjangan yang berhasil ditemukan pada dimensi *Smart Branding* (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023a, 2023b, 2023c)

Tabel 4.2 Analisis Kesenjangan pada Dimensi *Smart Branding*

Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi Gap/Kesenjangan
Keterbatasan destinasi wisata	Kabupaten Sampang menjadi destinasi wisata budaya	Destinasi wisata alam, dan destinasi wisata budaya yang ada belum dikembangkan dengan optimal

Ekonomi kreatif belum berperan aktif dalam pengembangan pariwisata	Kelompok ekonomi kreatif terlibat dalam pengembangan pariwisata	Ekonomi kreatif bidang budaya sebagai kearifan lokal masih terbatas
Belum adanya pengembangan pariwisata terpadu di Kawasan pelabuhan Camplong	Adanya pengembangan pariwisata di pelabuhan Camplong secara terpadu	Belum adanya koordinasi dari pemerintah daerah masing-masing akan pentingnya kerjasama dalam pengembangan pariwisata terpadu

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

Kesenjangan di Dimensi *Smart Branding* berkaitan dengan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Terkait dengan pengembangan pariwisata, seperti sudah diketahui, Kabupaten Sampang tidak memiliki banyak potensi wisata alam. Potensi wisata bisa dibuat melalui pengembangan tempat wisata yang sudah ada dengan menambahkan wahana-wahana baru, misalnya untuk wisata di pantai Camplong dapat dibuat taman bermain anak dalam bentuk ikan-ikan, pelatihan cara membuat garam yang siap jual, atau dengan investasi yang cukup membuat aquarium air laut semacam *Sea World*.

4.1.3 Dimensi *Smart Economy*

Tabel 4.3 menyajikan kesenjangan yang ditemukan pada dimensi *Smart Economy* (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023a, 2023b, 2023c)

Tabel 4.3 Analisis Kesenjangan pada Dimensi *Smart Economy*

Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi Gap/Kesenjangan
UMKM masih mengalami kesulitan dalam memasarkan produk, akses permodalan, dan sertifikasi usaha	UMKM yang sudah memberikan kontribusi kepada daerah	UMKM belum seluruhnya mendapatkan edukasi teknik-teknik dalam memasarkan produk, mekanisme akses permodalan dan atau pengurusan sertifikasi usaha
UMKM yang masih belum maksimal memanfaatkan TIK	Seluruh UMKM menggunakan aplikasi <i>e-commerce</i> sebagai	Tingkat literasi <i>internet</i> dan <i>fintech</i> dari pelaku usaha UMKM masih belum optimal, demikian juga

terutama aplikasi <i>e-commerce</i> dalam memasarkan hasil usaha mereka	wadah untuk memasarkan produk mereka misalnya melalui <i>e-marketplace</i> komersial atau layanan <i>on demand</i>	dengan pemanfaatan media sosial untuk mendekatkan penjual ke calon pembeli

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

Dari hasil identifikasi kesenjangan pada dimensi *Smart Economy*, UMKM masih menjadi perhatian utama. Persoalan yang dihadapi oleh UMKM adalah teknik dalam memasarkan produk, persoalan akses permodalan dan sertifikasi usaha, seperti sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) apabila produk mereka dalam bentuk makanan. Terkait dengan akses permodalan, pemerintah pusat sudah memiliki serangkaian program untuk UMKM, terlebih sejalan dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

4.1.4 Dimensi *Smart Living*

Tabel 4.4 memperlihatkan kesenjangan pada dimensi *Smart Living* yang meliputi tiga aspek yaitu harmonisasi tata ruang, layanan kesehatan yang berkualitas, dan transportasi yang memadai untuk mempermudah mobilitas (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023a, 2023b, 2023c)

Tabel 4.4 Analisis Kesenjangan pada Dimensi *Smart Living*

Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi Gap/Kesenjangan
Terjadinya genangan (banjir) dan permukiman kumuh	Tata ruang yang harmonis bebas banjir dan permukiman asri	Pembangunan dan pengembangan wilayah yang tidak memperhatikan tata ruang
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang hanya satu lokasi per kelurahan	Tiap RT/RW telah memiliki ruang terbuka hijau	Rendahnya kesadaran untuk penyediaan RTH
Akses jalan yang rusak dan kelangkaan alat transportasi publik	Akses jalan yang mulus di seluruh daerah/kota dan ketersediaan transportasi massif berbasis teknologi yang terjangkau sampai pelosok	Transportasi kendaraan umum yang nyaman tidak tersedia dan kondisi jalan rusak

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

Masalah tata ruang kota yang harmonis dan transportasi yang layak menjadi fokus yang berhasil diidentifikasi. Realisasi tata ruang yang harmonis perlu untuk kembali melihat RT/RW Kabupaten Sampang sehingga program-program terkait dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) bisa dimasukkan di dalam *Smart City*. Strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan moda transportasi alternatif adalah kendaraan umum yang sudah terintegrasi dengan penyedia jasa layanan transportasi.

4.1.5 Dimensi *Smart Society*

Tabel 4.5 memperlihatkan hasil analisis kesenjangan pada dimensi *Smart Society* (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023a, 2023b, 2023c)

Tabel 4.5 Analisis Kesenjangan pada Dimensi *Smart Society*

Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi Gap/Kesenjangan
Minat baca yang masih rendah	Peningkatan literasi masyarakat	Belum meratanya jumlah perpustakaan yang tersedia
Hanya ada satu PKBM	Setiap kelurahan telah memiliki PKBM dan digunakan untuk kegiatan masyarakat	Tidak menganggap sebagai fasilitas yang penting

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

Hasil analisis kesenjangan pada dimensi *Smart Society* menunjukkan minat baca dan melek literasi masih rendah, sebenarnya bisa dikolaborasikan dengan perpustakaan dan penyediaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Masyarakat di satu kelurahan, RW, atau bahkan RT bisa memanfaatkan PKBM sebagai pusat kegiatan untuk melek literasi.

4.1.6 Dimensi *Smart Environment*

Tabel 4.6 memperlihatkan hasil analisis kesenjangan ditemukan pada dimensi *Smart Environment* (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023a, 2023b, 2023c)

Tabel 4.6 Analisis Kesenjangan pada Dimensi *Smart Environment*

Rangkuman Kondisi Saat Ini	Rangkuman Tren Masa Depan	Identifikasi Gap/Kesenjangan
Volume sampah padat yang tinggi	Sampah sudah diolah secara otonom dari hulu ke hilir dengan	Belum adanya kesadaran untuk pengolahan sampah terpadu, dan belum adanya teknologi

	keterlibatan masyarakat dalam <i>Reduce, Reuse</i> , dan <i>Recycle</i> (3R) sehingga berkurang jumlah volume yang dikirim ke TPA	pengolahan sampah
Kabupaten Sampang tidak memiliki sarana pengolahan limbah cair terpadu, khususnya IPLT	Limbah cair termasuk limbah tinja yang sudah terolah dan dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan lainnya	Lahan yang sempit untuk penyediaan IPLT

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

Berdasarkan hasil analisis, masalah sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menjadi isu yang muncul. Persoalan sampah, tidak berhenti hanya mengharapkan dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dibutuhkan peran serta masyarakat dari tingkat RT sampai kelurahan bisa berkontribusi untuk program ini.

4.2 Analisis SWOT

Bagian ini akan menyajikan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, and Threats*) untuk pengembangan *Smart City* di Kabupaten Sampang pada masing-masing dimensi.

4.2.1 Dimensi *Smart Governance*

Tabel 4.7 menyajikan analisa SWOT dari dimensi *Smart Governance* (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023b)

Tabel 4.7 Analisis SWOT *Smart Governance*

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, and Threats)		
Faktor	Kekuatan	Kelemahan
Internal	1. Adanya komitmen pimpinan (Bupati Sampang) 2. Sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan (MPP dari Tahun 2021, terdiri dari 92 pelayanan). 3. Sudah tersedia jaringan internet ke seluruh kantor dan unit pelayanan (OPD, Kecamatan, Puskesmas, Polres, Kejaksaan, beberapa koramil, beberapa sekolah, KONI, Kantor Pramuka, 119, MPP, Taman Kota, Taman Wijaya Kusuma, Bank Sampang, Taman Monumen, PIP) 4. Infrastruktur TIK sudah dikelola secara mandiri oleh Dinas Kominfo (Tidak ada ketergantungan dengan	1. Baru sebagian sistem dan data yang terintegrasi 2. Ketersediaan anggaran untuk mewujudkan smart city belum memadai 3. kepedulian masyarakat terhadap pembangunan sangat rendah 4. SDM yang berkompetensi dalam TIK kurang merata dan belum optimal 5. Belum adanya regulasi yang mengatur sistem keamanan aplikasi 6. Belum tersedianya Masterplan pengembangan TIK 7. Rendahnya kolaborasi dan koordinasi antar OPD 8. Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal 9. PD di Kabupaten Sampang tidak ada yang memiliki sertifikasi ISO

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, and Threats)		
Faktor	Kekuatan	Kelemahan
	pihak ketiga). 5. Aplikasi layanan sudah memanfaatkan SPLP yang telah disediakan pemerintah pusat 6. Sudah tersedianya dashboard monitoring layanan publik 7. Mencapai Indeks SPBE dengan predikat Sedang 8. Termasuk Kabupaten yang sangat inovatif (Peringkat 13 IGA Tahun 2022) 9. ASN mampu melakukan perubahan budaya kerja dengan cepat (Penggunaan aplikasi SRIKANDI Go Live secara masif) 10. Tersedia SDM yang mempunyai kompetensi spesifik di Bidang IT (Programmer, Network Administrator, Sistem Administrator, Sistem Integrator, Sistem Analis, Cyber Security) 11. Kemampuan merespon isu Cyber Security dengan baik (Clean Google Index) Isu slot judi online 12. Telah menyediakan Disaster Recovery Centre untuk mitigasi bencana	
Faktor	Peluang	Ancaman
Eksternal	1. Terdapat Perguruan Tinggi di Kabupaten Sampang (Poltera, STKIP PGRI) 2. Adanya dukungan masyarakat yang kolaboratif (Forum Sampang Sehat, Forum Lalu Lintas, Forum Konsultasi Publik, Forum Pengurangan Resiko Bencana, Forum Sampang Satu Data) 3. Adanya peraturan perundang-undangan di Tingkat Pusat yang mendorong penerapan e-gov/i-gov 4. Tersedianya tenaga ahli untuk asistensi penerapan SPBE	1. Adanya penyalahgunaan hak akses data oleh hacker 2. Adanya gangguan sistem atau virus 3. Perkembangan teknologi yang cepat tanpa diimbangi dengan SDM yang memadai 4. Tuntutan peningkatan kualitas layanan berbasis TIK dari masyarakat

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

Dari hasil analisis SWOT tersebut nampak bahwa kekuatan Kabupaten Sampang terletak pada komitmen kepala daerah, sebagian besar ASN sudah memiliki literasi yang cukup dan regulasi di bidang TIK sehingga kinerja birokrasi mereka bisa ditingkatkan. Regulasi yang berasal dari pemerintah pusat seperti kebijakan SPBE, Satu Data, dan Geospasial memberikan peluang bagi daerah dalam pengembangan pelayanan publik yang maksimal. Peluang adanya perguruan tinggi yang dapat mendukung peningkatan kemampuan SDM baik dari aspek tata kelola pemerintahan maupun teknologi. Meskipun demikian ditemukan kelemahan seperti belum terintegrasinya sistem yang ada di pemerintahan dapat menjadi kendala dalam menerapkan program Satu Data, dampaknya adalah aplikasi layanan yang ada di pemerintahan daerah tanpa koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat mengakibatkan pemborosan yang seharusnya mengedepankan efisiensi.

4.2.2 Dimensi *Smart Branding*

Tabel 4.8 menyajikan analisa SWOT dari dimensi *Smart Branding* (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023b)

Tabel 4.8 Analisis SWOT *Smart Branding*

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, and Threats)		
Faktor	Kekuatan	Kelemahan
Internal	1. Potensi Sumber daya alam, pertanian, perikanan, sebagai potensi pariwisata: a. Daya wisata alam (Pantai Lon Malang, Air terjun Toroan, Camplong, Hutan Kera Nepa, Hutan mangrove, Waduk Klampis) b. Agrowisata (Jambu camplong, kampung Milon Napote) c. Sektor Perikanan dengan daya tangkap tinggi di Sreseh, Camplong, Mandangin d. Desa wisata (35 desa ter SK) 2. Pemerintah yang aktif (pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas	1. Prioritas anggaran belum sesuai targetnya; 2. Belum meratanya jaringan internet ke pelosok Desa; 3. kelembagaan masyarakat terkait pemberdayaan wisata masih lemah; 4. SDM / Tenaga terlatih masih kurang yang sesuai dengan kebutuhan pasar; 5. Infrastruktur pendukung wisata masih belum memadai secara menyeluruh; 6. Transportasi umum, transportasi wisata masih kurang; 7. Tingkat Pengangguran masih tinggi (tidak ada pilihan pekerjaan); 8. Pelatihan dan Pencipta lapangan kerja kurang;

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, and Threats)		
Faktor	Kekuatan	Kelemahan
	hidup masyarakat) a. Memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP) b. Ketersediaan Pusat Informasi Wisata c. Ketersediaan tempat tempat promosi hasil kerajinan daerah (Dekranasda) d. Memiliki 6 akomodasi penginapan e. Realisasi investasi yang selalu meningkat setiap tahun : 2018 (385.297.435); 2019 (422.583.748. 152); 2020 (297.115,146); 2021 (297.513.157. 988); 2023 (329.378.337. 166) f. program pendampingan pengembangan desa wisata g. Sudah punya Aplikasi informasi pariwisata (Tourism Guiding Book) 3. Kekayaan, budaya dan warisan (seni budaya, tradisional, dan warisan sejarah) a. Landmark Daerah (Alun-alun), adanya ikon wajah kota sampang (alun alun trunojoyo) yang membranding Madura Raya b. Memiliki warisan budaya: Situs Makam Ratu Ebu, pababaran trunojoyo, bangunan peninggalan kolonial belanda krampon c. Memiliki Desa Budaya Napo laok d. memiliki ragam atraksi budaya dan atraksi wisata: Tari Malate satoor, budaya Karapan sapi, budaya daol combo dan daul dug dug, rokat tase', musik bak bang, tradisi gumbeg, tradisi sumpah pocong dan sebagainya e. Event pariwisata seperti tambelangan fashion carnival dan sebagainya 4. Adanya peran serta <i>influencer</i> dan content creator 5. Terdapat platform Media sosial seperti:	9. Belum adanya akomodasi yang standard; 10. Pelaksanaan digital tourism belum teraplikasi secara merata (e-payment, digital marketing); 11. belum memiliki dokumen RTBL 12. belum memiliki master plan pusat kota sebagai pusat branding 13. minimnya integrasi data informasi) 14. masih ada OPD yang menjalankan perijinan mandiri : Disdik (ijin pendirian sekolah) 15. Sulitnya penataan PKL di pasar tradisional dan lokasi wisata 16. Tingkat kepatuhan SOP standarisasi usaha masih rendah

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, and Threats)		
Faktor	Kekuatan	Kelemahan
	Wonderful Sampang, Sampang Kreatif, Pemkab Sampang, Pariwisata Sampang, Sampang hit, Explore Sampang, Kabupaten Sampang/ Tiktok) 6. Dari 18 Pokdarwis, terdapat 4 pokdarwis yang aktif dan berjalan mandiri (Pokdarwis Putra Lon Malang terletak di Desa Wisata Bira Tengah aktif secara mandiri mengelola DTW Pantai Lon Malang dan Desa Wisata Bira Tengah, Pokdarwis Marparan Jaya aktif mengelola secara mandiri DTW Wisata Mangrove Sreseh spot Marparan, Pokdarwis Klobur Mandiri mengelola DTW Mangrove Sreseh spot Klobur, Pokdarwis Napote Fruit aktif secara mandiri mengelola kampong Milon Napote di Desa Bira Timur) 7. Beberapa DTW di sampang sudah terdigitalisasi (Pantai Lon Malang, Wisata Mangrove Sreseh Spot Marparan) 8. Brand Jambu Camplong yang sudah terkenal	
Faktor	Peluang	Ancaman

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, and Threats)		
Faktor	Kekuatan	Kelemahan
Eksternal	1. Lokasi Sampang strategis di tengah pulau madura 2. Adanya investor dari luar Madura. 3. Belum adanya Kawasan Industri strategis di wilayah madura 4. Minat wisata ke madura pasca jembatan Suramadu. 5. potensi Kunjungan wisatawan religi luar madura dengan tujuan pamekasan (Batuampar), sumenep (asta tinggi, makam sayyid yusuf) dan Pesantren-pesantren di madura 6. kekayaan kuliner madura di Sampang: bebek songkem, Rujak madura sebagai penarik kunjungan 7. semakin besarnya minat wisatawan advanture 8. Potensi pendanaan pengembangan wilayah dari APBN pusat (DAK, DID, HIBAH)	1. Resistensi masyarakat thd perubahan (Bioskop, Karaoke, Hotel wisata) 2. Masyarakat suka wisata ke daerah lain (Malang dll) 3. Kurangnya dana dari luar untuk mendukung wisata dan investasi 4. Waktu tempuh ke sampang sulit diperkirakan karena kemacetan di sejumlah pasar. 5. Adanya kawasan industri di Bangkalan dan Surabaya yg punya daya dukung investasi 6. Persaingan Wisata religi (Batuampar pamekasan, Kraton sumenep) tanpa singgah sampang. 7. Membludaknya pengemis dan gelandangan ke Sampang ke lokasi wisata 8. Terjadinya bencana alam dan perubahan iklim terutama di daerah pesisir. 9. Perkembangan Teknologi Informasi lebih cepat dari SDMnya. 10. Perkembangan Peraturan tidak seimbang dengan perkembangan TIK

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

Berdasarkan

Tabel **4.8** nampak kekuatan Kabupaten Sampang terletak pada potensi Sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta kekayaan budaya yang perlu dilestarikan. Potensi kondisi alam dan budaya ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam membuat ekosistem pariwisata. Desa wisata misalnya perlu akses yang baik (mobilitas) untuk mencapainya, kehangatan warga sekitar dan rasa aman bagi turis lokal maupun mancanegara, didukung dengan jaringan telekomunikasi yang memadai untuk bisa saling berkomunikasi. Kendala-kendala seperti kurangnya atau tidak adanya transportasi umum ke tempat pariwisata, kurangnya edukasi bagi masyarakat dalam melayani wisatawan dengan baik, jaringan Internet yang belum merata menjadi kelemahan yang harus segera dicarikan solusinya, misalnya dengan memperluas cakupan jaringan 3G atau 4G. Dampak kurang baik sebagai ancaman yaitu menurunnya minat dari turis domestik maupun asing mengunjungi lokasi-lokasi wisata di Kabupaten Sampang.

4.2.3 Dimensi *Smart Economy*

Tabel 4.9 menyajikan analisis SWOT pada dimensi *Smart Economy* (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023b)

Tabel 4.9 Analisis SWOT *Smart Economy*

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, and Threats)		
Faktor	Kekuatan	Kelemahan
Internal	1. lembaga usaha yang berbadan hukum 2. hasil produksi umkm sudah masuk di marketplace 3. Layanan konsultasi, informasi bisnis, advokasi dan pendampingan bisnis serta akses pembiayaan, dan akses pemasaran 4. Terdapat fasilitasi perlindungan produk dengan proses standarisasi produk seperti sertifikasi halal, uji nutrisi, merk dan redesain kemasan 5. produksi UMKM/IKM sudah terstandarisasi 6. Terhubung dengan sistem informasi industri nasional (SIINas) 7. Potensi Ekonomi di tiap Kecamatan 8. Pantura menjadi sentra tanaman hortikultura dan perkebunan (Melon, semangka, cabe, labu madu, bawang merah dan mete menjadi unggulan) 9. adanya akses pembiayaan bagi kumkm/ikm 10. Terdapat cikal bakal Smart Pesantren di Nahdatul Tulab dan Karang Durin (ada potensi 352 Pondok pesantren) 11. Terintegrasinya sistem pembayaran sebagai alat pembayaran dan dengan aplikasi belanja yang memungkinkan contoh kartu KORPRI menjadi penyedia (Jumlah ASN di Kab. Sampang 8000an) 12. Terdapat pelatihan ketrampilan usaha 13. Potensi SDA untuk pengembangan ekonomi 14. Kelompok masyarakat pelaku	1. Belum terintegrasinya data potensi-potensi kekuatan 2. Belum tersedianya masterplan UKM (lokasi dan dibentuk seperti apa) 3. Kemampuan manajemen usaha dan IT pelaku usaha masih rendah 4. Progress perbaikan data NIK penduduk masih rendah (perbankan masih mengalami kesulitan ketika ada pembukaan rekening baru) 5. Kesulitan membuat sentra kerajinan karena pelaku usaha sejenis menyebar di beberapa lokasi 6. Pola pikir pelaku usaha kurang (termasuk kesadaran pajak, legalitas, varian produk, kualitas/standarisasi packaging) 7. Belum tersedianya media dan fasilitas untuk mengenalkan kelompok masyarakat pelaku ekonomi, pelaku wisata, pelaku pertanian dll kepada halayak ramai sehingga mudah untuk diakses oleh masyarakat 8. Belum terjaminnya ketersediaan hasil produksi sepanjang tahun 9. Kurangnya penanganan pasca produksi

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, and Threats)		
Faktor	Kekuatan	Kelemahan
	ekonomi, penggiat pertanian, perikanan, dan pariwisata serta pemuda kreatif	
	15. Produksi umkm berpotensi ekspor	
Faktor	Peluang	Ancaman
Eksternal	1. Program comunal branding bagi produksi kumkm/ikm 2. Dukungan dari lembaga non Pemerintah 3. Program pengembangan agrowisata 4. Industri makanan olahan dengan bahan baku hasil tanaman pertanian, peternakan dan perikanan menjadi peluang pasar potensial 5. Pasar lokal, regional dan nasional terbuka untuk pemasaran bidang pertanian, peternakan dan perikanan 6. Era industri 4.0 memanfaatkan teknologi informasi 7. Peranan BUMD untuk mendukung pelaku usaha	1. Pertumbuhan penduduk semakin tinggi 2. Makin meningkatnya konversi lahan pertanian dan perikanan 3. Perubahan iklim yang ekstrim 4. Lahan pertanian krisis unsur hara 5. Fluktuasi harga 6. Pasar modern yang berkembang pesat

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

Kekuatan Kab. Sampang dari dimensi *Smart Economy* salah satunya terlihat dari jumlah pelaku bisnis yang cukup banyak yaitu 278 PKL, Usaha Mikro 6085, Usaha Kecil 82, dan Usaha Menengah 20 atau yang sering disingkat dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Keberadaan 766 Industri Kecil Menengah (IKM) juga semakin menunjukkan penataan industri primer, sekunder, tersier semakin baik, yang akan berdampak pula kepada kesejahteraan masyarakat. Aspek yang masih perlu ditingkat lagi adalah literasi pelaku usaha yang masih rendah sehingga subsistem ekosistem keuangan perlu ditingkatkan.

4.2.4 Dimensi *Smart Living*

Tabel 4.10 memperlihatkan analisis SWOT pada dimensi *Smart Living* (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023b)

Tabel 4.10 Analisis SWOT *Smart Living*

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, and Threats)		
Faktor	Kekuatan	Kelemahan
Internal	1. Adanya komitmen pimpinan (Bupati Sampang)	1. Belum terintegrasinya sistem dan data
	2. Adanya Perda SKD No. 10 tahun 2016, SPM Bidang Kesehatan dan Akreditasi Faskesdas dan Rujukan	2. Rendahnya sebagian SDM yang berkompeten
	3. Adanya Tenaga Kesehatan dan Faskes yang menyebar sampai ke Desa	3. Beban Kerja Tenaga Kesehatan masih cukup tinggi
	4. Pengelolaan keuangan BLUD bagi Puskesmas dan Rumah sakit	4. Kepatuhan dan Kesadaran Tenaga terhadap implementasi IT masih Rendah
	5. Sarana dan Prasarana IT termasuk internet yang mendukung pelayanan sampai ke tingkat Desa	5. beberapa wilayah desa dan Puskesmas masih sering terjadi Error Jaringan Internet
	6. Tersedianya anggaran di DPA Dinkes KB dan UPTD serta Rumah Sakit	6. Tidak ada Perusahaan angkutan umum
	7. Memiliki beberapa Aplikasi Program	7. Kendaraan angkutan umum sudah tidak ada
	8. Implementasi Inovasi Pelayanan Kesehatan sampai ketingkat Desa	8. Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi
	9. kerjasama dengan perguruan tinggi	9. Tidak Memiliki Terminal Tipe C
	10. Adanya UHC (Universal Health Coverage)	10. Kapal Penyeberangan Sampang – Gili Mandangi masih tradisional
	11. Adanya PSC (119)	11. masih ada kasus AKI AKB dan Stunting di wilayah tertentu
	12. Adanya Perda Tata Ruang	12. rendahnya kesadaran tertib administrasi masyarakat
	13. Telah memiliki jaringan trayek angkutan umum (7 trayek).	
	14. Memilik 3 Pelabuhan (Pelabuhan Taddan, Pelabuhan Tanglok, Pelabuhan Gili Mandangin)	13. Jadwal penyeberangan ke pulau Mandangin hanya 1 x PP
	15. Master plan relokasi RSMZ sebagai RS rujukan di MADURA	14. APBD tidak mampu membiayai penuh proses pembangunan RS
	16. RSMZ memiliki Alat MRI pertama di madura untuk mendukung RS Rujukan Madura	15. Layanan MRI masih baru, sehingga belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dan perlu di branding
	17. RSMZ menjadi Rujukan untuk Tes Kesehatan Bagi Perusahaan Swasta (tersedianya Dokter Hiperkes)	16. perusahaan BUMD maupun swasta di sampang masih sedikit
	18. RSMZ Memiliki layanan Rumah Vaksin untuk Jamaah Haji dan Umroh	17. sosialisasi tidak terjangkau bagi warga luar sampang
	19. Adanya Perbub Nomor. 188.45/378/KEP/434.012/2019 Tentang Penetapan Ruas - ruas jalan Kabupaten.	18. Masih banyak jalan penghubung yang menjadi wewenang kabupaten mengalami kerusakan karena Struktur tanah yang kurang stabil.
		19. Terbatasnya Anggaran sehingga tidak bisa menangani kerusakan

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, and Threats)		
Faktor	Kekuatan	Kelemahan
		infrastruktur yang bersifat insidentil. 20.SDM yang kurang mendukung di daerah tertentu terkait pekerjaan infrastruktur.
Faktor	Peluang	Ancaman
Eksternal	1. Terdapat Perguruan Tinggi jurusan kesehatan di Kabupaten Sampang (Poltera, Akpernata, Graha Husada) 2. Adanya dukungan masyarakat yang kolaboratif (Forum Sampang Sehat, Saka Bakti Husada, Kader Posyandu dan KB sampai ke tingkat desa, karang taruna, PKK) 3. Adanya Peraturan Kementerian Kesehatan yang mendorong Pengendalian Program 4. Adanya Program Dasawisma yang mendukung Program Kesehatan sampai ke tingkat Desa 5. Kebutuhan Masyarakat terhadap Mutu Layanan meningkat 6. Dukungan Lintas Sektor 7. Dukungan Pihak Swasta (CSR)	1. Masih rendahnya Keterlibatan Masyarakat 2. Akses masyarakat terhadap IT masih rendah 3. tingginya kecelakaan lalu lintas 4. PHBS masih Rendah 5. Adanya ormas yang tidak mendukung program-program kesehatan 6. Mindset/pola pikir masyarakat yang masih mudah diprovokasi/ dipengaruhi yang tidak mendukung pada kesehatan 7. Kurangnya kesadaran masyarakat di daerah tertentu sehingga menghambat pembangunan infrastruktur

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

Kabupaten Sampang memiliki infrastruktur fisik yang cukup memadai untuk pelayanan kesehatan seperti tersedianya 22 Puskemas, 29 Puskesmas Pembantu, dan 2 RSUD (sistem layanan elektronik). Meskipun demikian jumlah layanan kesehatan masih perlu diperbanyak dan membutuhkan edukasi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup bersih dan sehat agar hidup lebih berkualitas.

Sementara itu pada subdimensi transportasi (*mobility*), disadari bahwa Kabupaten Sampang masih kekurangan sarana transportasi umum yang memadai dan nyaman, selain itu akses jalan yang sulit dan banyak yang rusak juga menjadikan pertimbangan sarana transportasi terutama roda empat belum menjangkau area yang lebih jauh. Sebagai alternatif saat ini layanan aplikasi *on demand* seperti Gojek dan Grab masih mendominasi. Langkah yang dapat dilakukan untuk transportasi ini adalah melakukan integrasi atau kerjasama dengan para penyedia layanan transportasi lokal dan meningkatkan lingkungan pusat kegiatan bisnis dapat berkembang sehingga masyarakat

dapat beraktifitas bisnis secara masif dan teratur memerlukan ketersediaan alat transportasi untuk kebutuhan logistik.

4.2.5 Dimensi *Smart Society*

Tabel 4.11 menyajikan analisis SWOT pada Dimensi *Smart Society* (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023b).

Tabel 4.11 Analisis SWOT *Smart Society*

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, and Threats)		
Faktor	Kekuatan	Kelemahan
Internal	1. Adanya fasilitas penunjang Literasi (Perpustakaan daerah, Perpustakaan Keliling, Pojok Baca, Perpustakaan Desa, Free-wifi) 2. Kondisi sosiokultural masyarakat Sampang yang religius dengan ketersediaan Produk Ternak 3. Masyarakat Sampang 99% Islam memiliki tujuan wisata religi 4. Kawasan berbasis potensi BUMDes/BUMDesma 5. Adanya TRC (Tim Reaksi Cepat) untuk upaya pertolongan bencana 6. Memiliki lahan pertanian yang luas	1. Banyak Guru yang sering bolos di jam kerja 2. masih terdapat lokasi sekolah yang kurang infrastruktur untuk digitalisai pendidikan 3. Belum ada wadah yang representatif yang dapat disediakan oleh pemerintah (misalnya rumah potong hewan “halal”) 4. Belum memiliki masjid yang menjadi pusat percontohan 5. Minimnya partisipasi masyarakat yang terakomodir dalam kelembagaan 6. Tidak adanya Call Center dalam memanggil TRC 7. Rendahnya minat pemuda untuk meneruskan pendidikan jurusan pertanian
Faktor	Peluang	Ancaman
Eksternal	1. Kemudahan dalam evaluasi dan kontrol keaktifan Guru 2. Tingginya Kebutuhan TIK dalam peningkatan mutu Pendidikan 3. Bersinergi dengan Perguruan tinggi dengan program Pengabdian masyarakat 4. Adanya Rumah Potong Hewan 5. Adanya organisasi-organisasi Islam 6. Adanya program Jatim Puspa, Desa Berdaya, dan Lintas OPD 7. Tersedianya sarana prasarana kebencanaan yang memadai 8. Adanya perguruan tinggi yang memiliki fokus bidang pertanian	1. Mutasi dan Pemberhentian Guru 2. Masih adanya guru yang kurang menguasai IT 3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk datang ke rumah potong hewan halal 4. Tuntutan peningkatan kualitas pengelolaan masjid 5. Urbanisasi dari Desa ke Kota 6. Terlambatnya TRC dalam melakukan pertolongan

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

Dimensi *Smart Society* memiliki tiga subdimensi yaitu interaksi masyarakat yang efisien, ekosistem belajar yang efisien, dan sistem keamanan dan keselamatan bagi masyarakat. Masyarakat Kabupaten Sampang mencapai 99% yang beragama Islam merupakan indikator kekuatan dan berpotensi mencapai interaksi masyarakat yang efisien dengan keberadaan ormas besar seperti Nadhlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Pengelolaan masjid yang baik dengan membuat program-program seperti kajian bulanan, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), dan sholat berjamaah akan meningkatkan kehidupan sosial dan pembelajaran di masyarakat, sehingga masjid harus dikelola dengan baik melalui pembentukan DKM. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam mitigasi bencana merupakan peluang dengan menerapkan teknologi *Internet of Things* (IoT) salah satunya membuat *Early Warning System* (EWS) sehingga saat terjadi bencana seperti banjir atau tanah longsor, masyarakat dapat segera dievakuasi.

4.2.6 Dimensi *Smart Environment*

Tabel 4.12 menyajikan analisis SWOT pada dimensi *Smart Environment* (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023b).

Tabel 4.12 Analisis SWOT *Smart Environment*

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, and Threats)		
Faktor	Kekuatan	Kelemahan
Internal	1. Adanya komitmen pimpinan (Bupati Sampang) 2. Kab. Sampang memiliki lahan RTH yang luas seluas 217,88 Ha (Perda RTRW no. 4 Tahun 2020) Memiliki regulasi yang mendukung Perda RTRW no. 4 Tahun 2020 3. Koordinasi yang baik dengan pihak terkait (seperti Bappedalitbang, PuPr tata ruang, pihak kecamatan, dinas pertanian, kehutanan, menyesuaikan dengan penetapan jenis RTH yang akan ditetapkan nantinya untuk keberlanjutan dalam peningkatan kualitas RTH)	1. SDM pemerintahan yang terbatas (seperti tenaga pengangkut dan penyapu pada pemilah dan pengolah sampah yang minim dan kurang inovasi) 2. Teknologi pengolah sampah yang kurang up to date 3. Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan (diartikan kurang peduli dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, kurangnya kesadaran dalam berbudaya kesadaran lingkungan mengurangi penggunaan bahan plastik, mendukung program penghijauan desa dan perkotaan, ikut mensukseskan program lingkungan (seperti bank sampah desa dan perkotaan), dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan,

Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, and Threats)		
		kondisi lingkungan sekitar akan berangsur pulih) (Dispesifikasikan) 4. pengendalian SDA yaitu kekurangan air pada saat musim kering, dan kelebihan air pada saat musim hujan (resapan) 5. tata kelola limbah atau masalah penanganan sampah yang belum tertangani dengan baik, belum ada tekonlogi yang diimplementasikan 6. Sarana dan prasarana yang terbatas (armada pengangkut sampah masih kurang dengan luas area penanganan yang luas)
Faktor	Peluang	Ancaman
Eksternal	1. Dukungan CSR dari pihak ketiga (Mulai dari tahun 2019 dari HCML, Medco Energy, Petronas, Bank Jatim, bank BNI, Bank BRI) (Sebutkan CSR-nya) 2. dukungan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi yang mendukung dengan adanya Politeknik Negeri Madura yang fokus pada bidang teknik dan kesehatan sangat mendukung untuk menunjang percepatan kemajuan daerah. 3. kerjasama dengan pemerhati lingkungan 4. Sudah ada inisiatif pengambilan sampah secara mandiri oleh forum pengurangan risiko bencana (FPRB) per hari bisa mencapai 1 ton, berhenti karena kendaraan rusak	1. Kerusakan lingkungan 2. bencana alam 3. sarana dan prasarana dalam fasilitas umum yang minim

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

Kabupaten Sampang memiliki lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang luas dan program taman kota merupakan salah satu kekuatan dalam menjaga lingkungan yang bersih, sehingga perlu juga membuat program edukasi kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan pada lingkungan RTH, tidak membuang sampah sembarangan, dan pemerintah daerah dapat memantau

melalui dukungan teknologi CCTV untuk memantau Taman Kota⁶. Pengelolaan sampah dan tata kelola energi terbaharukan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi dalam bentuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

4.3 Analisis TOWS

Bagian ini akan menyajikan analisis strategi TOWS dari hasil analisis SWOT (*Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats*) yang sudah didiskusikan pada subbab 4.2. Setiap satu dimensi *Smart City* akan memiliki satu analisis SWOT dan hasil analisis SWOT tersebut selanjutnya akan dipetakan menjadi empat strategi TOWS sebagai berikut:

- 1. Strategi SO (*Strength-Opportunities*): Strategi ini digunakan untuk memaksimalkan kekuatan dengan peluang yang ada,
- 2. Strategi ST (*Strength-Threats*): Strategi ini digunakan untuk memaksimalkan kekuatan dan meminimalisasi atau mengantisipasi ancaman-ancaman yang ada,
- 3. Strategi WO (*Weakness-Opportunities*): Strategi ini digunakan untuk mengantisipasi kelemahan dan memaksimalkan peluang-peluang yang ada,
- 4. Strategi WT (*Weakness-Threats*): Strategi ini digunakan untuk meminimalisasi kelemahan dan mengantisipasi ancaman-ancaman yang ada.

4.3.1 Dimensi *Smart Governance*

Tabel 4.13 memperlihatkan analisis strategi TOWS pada dimensi *Smart Governance* (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023b)

Tabel 4.13 Analisis Strategi TOWS *Smart Governance*

Analisis Strategi TOWS (Threats, Opportunities, Weakness, and Strength)		
Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
	1. Adanya komitmen pimpinan (Bupati Sampang) 2. Sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan (MPP dari Tahun 2021, terdiri dari 92 pelayanan). 3. Sudah tersedia jaringan internet ke seluruh kantor dan unit pelayanan (OPD, Kecamatan, Puskesmas, Polres, Kejaksaan, beberapa koramil, beberapa sekolah, KONI, Kantor Pramuka,	1. Baru sebagian sistem dan data yang terintegrasi 2. Ketersediaan anggaran untuk mewujudkan smart city belum memadai 3. kepedulian masyarakat terhadap pembangunan sangat rendah

⁶ CCTV (<http://sampangkab.go.id/cctv-streaming/>)

Analisis Strategi TOWS (Threats, Opportunities, Weakness, and Strength)		
	119, MPP, Taman Kota, Taman Wijaya Kusuma, Bank Sampang, Taman Monumen, PIP) 4. Infrastruktur TIK sudah dikelola secara mandiri oleh Dinas Kominfo (Tidak ada ketergantungan dengan pihak ketiga). 5. Aplikasi layanan sudah memanfaatkan SPLP yang telah disediakan pemerintah pusat 6. Sudah tersedianya dashboard monitoring layanan publik 7. Mencapai Indeks SPBE dengan predikat Sedang 8. Termasuk Kabupaten yang sangat inovatif (Peringkat 13 IGA Tahun 2022) 9. ASN mampu melakukan perubahan budaya kerja dengan cepat (Penggunaan aplikasi SRIKANDI Go Live secara masif) 10. Tersedia SDM yang mempunyai kompetensi spesifik di Bidang IT (Programmer, Network Administrator, Sistem Administrator, Sistem Integrator, Sistem Analis, Cyber Security) 11. Kemampuan merespon isu Cyber Security dengan baik (Clean Google Index) Isu slot judi online 12. Telah menyediakan Disaster Recovery Centre untuk mitigasi bencana	4. SDM yang berkompetensi dalam TIK kurang merata dan belum optimal 5. Belum adanya regulasi yang mengatur sistem keamanan aplikasi 6. Belum tersedianya Masterplan pengembangan TIK 7. Rendahnya kolaborasi dan koordinasi antar OPD 8. Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal 9. PD di Kabupaten Sampang tidak ada yang memiliki sertifikasi ISO
Faktor Eksternal	Strategi SO	Strategi WO
Peluang 1. Terdapat Perguruan Tinggi di Kabupaten Sampang (Poltera, STKIP PGRI) 2. Adanya dukungan masyarakat yang kolaboratif (Forum Sampang Sehat, Forum Lalu Lintas, Forum Konsultasi Publik, Forum Pengurangan Resiko Bencana, Forum Sampang	1. Integrasi sistem informasi 2. Integrasi dan kolaborasi antar PD 3. Akselerasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai upaya percepatan integrasi dan interoperabilitas data 4. Mengoptimalkan pemanfaatan inovasi dalam rangka meningkatkan pelayanan publik 5. Melalui iklim inovasi yang mendapatkan dukungan Pimpinan, Perangkat Daerah beserta Unitnya didorong untuk mengembangkan inovasi yang pro Smart Governance 6. Memanfaatkan tenaga ahli dan/atau perguruan tinggi untuk asistensi pelaksanaan	1. Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk pengembangan sistem pelayanan publik 2. Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk perumusan kebijakan pemanfaatan dan tata kelola TI 3. melakukan kerjasama dengan Pemda lain untuk mereplikasi sistem pelayanan publik 4. Meningkatkan pengawasan penyelenggaran

Analisis Strategi TOWS (Threats, Opportunities, Weakness, and Strength)		
Satu Data) 3. Adanya peraturan perundang-undangan di Tingkat Pusat yang mendorong penerapan e-gov/i-gov 4. Tersedianya tenaga ahli untuk asistensi penerapan SPBE	Smart Governance 7. Mengoptimalkan infrastruktur digital yang tersedia, prasarana yang dimiliki, serta dengan dukungan anggaran yang ada dalam pelaksanaan Smart Governance. 8. Dengan ASN yang mulai sadar IT, dibangun budaya kerja yang pro Smart Governance	pelayanan publik
Faktor Eksternal	Strategi ST	Strategi WT
Ancaman 1. Adanya penyalahgunaan hak akses data oleh hacker 2. Adanya gangguan sistem atau virus 3. Perkembangan teknologi yang cepat tanpa diimbangi dengan SDM yang memadai 4. Tuntutan peningkatan kualitas layanan berbasis TIK dari masyarakat	1. Memperkuat sistem Pengendalian/ keamanan jaringan 2. Bimtek dan Pendayagunaan ASN untuk mengembangkan layanan publik berbasis TIK 3. Penetapan prioritas peningkatan kualitas layanan berbasis TIK	1. Penetapan peta jalan pengembangan layanan publik yang berbasis TIK 2. Melakukan kajian terkait ROI terhadap pengadaan/adopsi teknologi 3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan publik

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

Berikut adalah rangkuman analisis TOWS pada Dimensi Smart Governance dari kabupaten Sampang:

Strategi SO (Strengths-Opportunities):

- 1. Integrasi sistem informasi: Memanfaatkan kekuatan seperti komitmen pimpinan, sarana dan prasarana yang mendukung, serta jaringan internet yang luas untuk meningkatkan integrasi sistem informasi.
- 2. Kerja sama dengan perguruan tinggi: Mengoptimalkan keberadaan perguruan tinggi di Kabupaten Sampang untuk pengembangan sistem pelayanan publik.

3. Akselerasi penggunaan SPLP: Meningkatkan akselerasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) guna percepatan integrasi dan interoperabilitas data.
4. Mengoptimalkan infrastruktur digital: Memanfaatkan infrastruktur TIK yang dikelola mandiri dan dukungan anggaran untuk pelaksanaan Smart Governance.
5. Pemanfaatan inovasi: Mendorong perangkat daerah dan unitnya untuk mengembangkan inovasi yang pro Smart Governance.

Strategi WO (Weaknesses-Opportunities):

1. Kerja sama dengan perguruan tinggi: Mengatasi kelemahan ketersediaan anggaran dengan kerja sama bersama perguruan tinggi untuk perumusan kebijakan dan pengembangan sistem.
2. Pemanfaatan tenaga ahli: Memanfaatkan tenaga ahli dan perguruan tinggi untuk asistensi pelaksanaan Smart Governance.
3. Peningkatan pengawasan: Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik melalui kerjasama dengan Pemda lain dan perguruan tinggi.
4. Replikasi sistem pelayanan publik: Melakukan kerjasama dengan Pemda lain untuk mereplikasi sistem pelayanan publik.

Strategi ST (Strengths-Threats):

1. Memperkuat sistem pengendalian/keamanan jaringan: Menguatkan sistem pengendalian dan keamanan jaringan untuk menghadapi ancaman seperti penyalahgunaan hak akses data dan gangguan sistem.
2. Bimtek dan Pendayagunaan ASN: Memberikan pelatihan dan pendayagunaan ASN untuk mengembangkan layanan publik berbasis TIK.
3. Prioritas peningkatan kualitas layanan: Menetapkan prioritas peningkatan kualitas layanan berbasis TIK sebagai respons terhadap ancaman tuntutan peningkatan kualitas dari masyarakat.

Strategi WT (Weaknesses-Threats):

1. Penetapan peta jalan pengembangan: Menetapkan peta jalan pengembangan layanan publik yang berbasis TIK untuk mengatasi kelemahan seperti rendahnya kolaborasi antar OPD dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang belum optimal.

2. Kajian terkait ROI: Melakukan kajian terkait Return on Investment (ROI) terhadap pengadaan/adopsi teknologi untuk mengatasi kelemahan ketersediaan anggaran.
3. Pemanfaatan teknologi: Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai respons terhadap perkembangan teknologi yang cepat.

4.3.2 Dimensi Smart Branding

Tabel 4.14 memperlihatkan analisis strategi TOWS pada dimensi *Smart Branding* (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023b)

Tabel 4.14 Analisis Strategi TOWS Smart Branding

Analisis Strategi TOWS (Threats, Opportunities, Weakness, and Strength)		
Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
	1. Potensi Sumber daya alam, pertanian perikanan, sebagai potensi pariwisata: a. Daya wisata alam (Pantai Lon Malang, Air terjun Toroan, Camplong, Hutan Kera Nepa, Hutan mangrove, Waduk Klampis) b. Agrowisata (Jambu camplong, kampung Milon Napote) c. Sektor Perikanan dengan daya tangkap tinggi di Sreseh, Camplong, Mandangin d. Desa wisata (35 desa ter SK) 2. Pemerintah yang aktif (pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat) a. Memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP) b. Ketersediaan Pusat Informasi Wisata c. Ketersediaan tempat tempat promosi hasil kerajinan daerah (Dekranasda) d. Memiliki 6 akomodasi penginapan e. Realisasi investasi yang selalu meningkat setiap tahun : 2018 (385.297.435); 2019 (422.583.748. 152); 2020 (297.115,146); 2021 (297.513.157. 988); 2023	1. Prioritas anggaran belum sesuai targetnya 2. Belum meratanya jaringan internet ke pelosok Desa 3. kelembagaan masyarakat terkait pemberdayaan wisata masih lemah 4. SDM / Tenaga terlatih masih kurang yang sesuai dengan kebutuhan pasar 5. Infrastruktur pendukung wisata masih belum memadai secara menyeluruh 6. Transportasi umum, transportasi wisata masih kurang 7. Tingkat Pengangguran masih tinggi (tidak ada pilihan pekerjaan) 8. Pelatihan dan Pencipta lapangan kerja kurang 9. Belum adanya akomodasi standar

Analisis Strategi TOWS (Threats, Opportunities, Weakness, and Strength)		
	(329.378.337. 166) f. program pendampingan pengembangan desa wisata g. Sudah punya Aplikasi informasi pariwisata (Tourism Guiding Book) 3. Kekayaan, budaya dan warisan (seni budaya, tradisional, dan warisan sejarah) a. Landmark Daerah (Alun-alun), adanya ikon wajah kota sampang (alun alun trunojoyo) yang membranding Madura Raya b. Memiliki warisan budaya: Situs Makam Ratu Ebu, pababaran trunojoyo, bangunan peninggalan kolonial belanda krampon c. Memiliki Desa Budaya Napo laok d. memiliki ragam atraksi budaya dan atraksi wisata: Tari Malate satoor, budaya Karapan sapi, budaya daol combo dan daul dug dug, rokat tase', musik bak bang, tradisi gumbeg, tradisi sumpah pocong dan sebagainya e. Event pariwisata seperti tambelangan fashion carnival dan sebagainya f. Adanya peran serta influencer dan content creator 4. Terdapat platform Media sosial seperti: Wonderful Sampang, Sampang Kreatif, Pemkab Sampang, Pariwisata Sampang, Sampang hit, Explore Sampang, Kabupaten Sampang/ Tiktok) 5. Dari 18 Pokdarwis, terdapat 4 pokdarwis yang aktif dan berjalan mandiri (Pokdarwis Putra Lon Malang terletak di Desa Wisata Bira Tengah aktif secara mandiri mengelola DTW Pantai Lon Malang dan Desa Wisata Bira	10. Pelaksanaan digital tourism belum teraplikasi secara merata (e-payment, digital marketing) 11.belum memiliki dokumen RTBL 12.belum memiliki master plan pusat kota sebagai pusat branding 13.minimnya integrasi data informasi) 14.masih ada OPD yang menjalankan perijinan mandiri: Disdik (ijin pendirian sekolah) 15.Sulitnya penataan PKL di pasar tradisional dan lokasi wisata 16.Tingkat kepatuhan SOP standarisasi usaha masih rendah

Analisis Strategi TOWS (Threats, Opportunities, Weakness, and Strength)		
	Tengah, Pokdarwis Marparan Jaya aktif mengelola secara mandiri DTW Wisata Mangrove Sreseh spot Marparan, Pokdarwis Klobur Mandiri mengelola DTW Mangrove Sreseh spot Klobur, Pokdarwis Napote Fruit aktif secara mandiri mengelola kampung Milon Napote di Desa Bira Timur) 6. Beberapa DTW di sampang sudah terdigitalisasi (Pantai Lon Malang, Wisata Mangrove Sreseh Spot Marparan) 7. Brand Jambu Camplong yang sudah terkenal	
Faktor Eksternal	Strategi SO	Strategi WO
Peluang - Lokasi Sampang strategis di tengah pulau madura - Adanya investor dari luar Madura. - Belum adanya Kawasan Industri strategis di wilayah madura - Minat wisata ke madura pasca jembatan Suramadu. - potensi Kunjungan wisatawan religi luar madura dengan tujuan pamekasan (Batuampar), sumenep (asta tinggi, makam sayyid yusuf) dan Pesantren-pesantren di Madura - kekayaan kuliner madura di Sampang: bebek songkem, Rujak madura sebagai penarik kunjungan - semakin besarnya minat wisatawan adventure - Potensi pendanaan pengembangan wilayah dari APBN pusat (DAK, DID,	- Memperbaiki wajah kota. - penawaran investasi sektor pariwisata - kegiatan pemasaran produk wisata dan daerah ke tingkat internasional - lokalisasi kawasan zona kreatif menjadi tujuan wisata - Pendampingan pengembangan potensi desa menjadi desa wisata tematik berbasis potensi yang berkelanjutan - adanya alun alun trunojoyo bisa menjadi branding Madura yang ada di Sampang	- banyaknya jumlah produk ekraf yang belum ter brand sebagai produk sampan - perbaikan regulasi moda transportasi antar daerah yang belum terkoneksi dengan baik untuk pelayanan wisatawan - perbaikan kualitas layanan akomodasi dan penginapan - perbaikan kualitas SDM Pariwisata melalui pembentukan sekolah kejuruan berbasis Pariwisata

Analisis Strategi TOWS (Threats, Opportunities, Weakness, and Strength)		
HIBAH)		
Faktor Eksternal	Strategi ST	Strategi WT
Ancaman 1. Resistensi masyarakat thd perubahan (Bioskop, Karaoke, Hotel wisata) 2. Masyarakat suka wisata ke daerah lain (Malang dll) 3. Kurangnya dana dari luar untuk mendukung wisata dan investasi 4. Waktu tempuh ke sampang sulit diperkirakan karena kemacetan di sejumlah pasar. 5. Adanya kawasan industri di Bangkalan dan Surabaya yg punya daya dukung investasi 6. Persaingan Wisata religi (Batuampar pamekasan, Kraton sumenep) tanpa singgah sampang. 7. Membludaknya pengemis dan gelandangan ke Sampang ke lokasi wisata 8. Terjadinya bencana alam dan perubahan iklim terutama di daerah pesisir. 9. Perkembangan Teknologi Informasi lebih cepat dari SDMnya. 10.Perkembangan Peraturan tidak seimbang dengan perkembangan TIK	1. Program mitigasi bencana 2. Program penanganan sampah 3. penanganan dan pencegahan banjir	1. Perbanyak jaringan dan koneksi Internet 2. Sosialisasi masyarakat terkait pemasangan tower 3. sosiali masyarakat tentang penanggulanga n sampah 4. pendampingan

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

Berikut adalah rangkuman analisis TOWS pada Dimensi Smart Branding Kabupaten Sampang:

Strategi SO (Strengths-Opportunities):

1. Memperbaiki Wajah Kota:
 - a. Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas wisata untuk menciptakan lingkungan yang menarik dan nyaman bagi pengunjung.
 - b. Menyusun program perbaikan tata kota untuk meningkatkan daya tarik wisata.
2. Penawaran Investasi Sektor Pariwisata:
 - a. Meningkatkan promosi investasi di sektor pariwisata untuk menarik investor dari luar Madura.
 - b. Menyusun paket investasi yang menarik untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata.
3. Kegiatan Pemasaran Internasional:
 - a. Melakukan pemasaran aktif produk wisata dan daerah ke tingkat internasional.
 - b. Mengembangkan kampanye pemasaran yang menarik untuk menjangkau audiens global.
4. Lokalisasi Kawasan Zona Kreatif:
 - a. Menetapkan kawasan zona kreatif sebagai tujuan wisata yang unik.
 - b. Mendorong perkembangan dan promosi bisnis kreatif di kawasan tersebut.
5. Pendampingan Pengembangan Desa Wisata:
 - a. Memberikan dukungan dan pendampingan aktif untuk pengembangan desa wisata tematik berbasis potensi berkelanjutan.
 - b. Mengintegrasikan potensi lokal dengan pengembangan wisata untuk menciptakan produk wisata yang menarik.
6. Alun Alun Trunojoyo sebagai Branding Madura:
 - a. Meningkatkan promosi dan branding Alun Alun Trunojoyo sebagai simbol khas Madura Raya.
 - b. Memanfaatkan alun-alun sebagai pusat kegiatan budaya dan pariwisata.

Strategi WO (Weaknesses-Opportunities):

1. Banyaknya Produk Ekraf yang Belum Terbrand:

- a. Membuat strategi branding untuk produk ekraf yang belum terkenal.
 - b. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk lokal secara efektif.
2. Perbaiki Regulasi Moda Transportasi:
 - a. Mengadvokasi dan berkolaborasi dengan pihak terkait untuk perbaikan regulasi moda transportasi.
 - b. Meningkatkan konektivitas antar daerah untuk memudahkan pelayanan wisatawan.
3. Perbaiki Kualitas Layanan Akomodasi:
 - a. Mengimplementasikan program peningkatan kualitas layanan akomodasi dan penginapan.
 - b. Mengembangkan standar kualitas untuk akomodasi pariwisata.
4. Perbaiki Kualitas SDM Pariwisata:
 - a. Membentuk sekolah kejuruan berbasis pariwisata untuk meningkatkan kualitas SDM.
 - b. Memberikan pelatihan dan pendidikan pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Strategi ST (Strengths-Threats):

1. Program Mitigasi Bencana:
 - a. Membangun dan mengimplementasikan program mitigasi bencana untuk mengurangi risiko bencana alam.
 - b. Mengintegrasikan aspek kebencanaan dalam pengembangan pariwisata.
2. Program Penanganan Sampah:
 - a. Mengembangkan program penanganan sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan wisata.
 - b. Melibatkan masyarakat dalam kampanye pengelolaan sampah.
3. Penanganan dan Pencegahan Banjir:
 - a. Menyusun strategi penanganan dan pencegahan banjir terutama di daerah pesisir.
 - b. Meningkatkan infrastruktur yang dapat mengurangi dampak banjir.

Strategi WT (Weaknesses-Threats):

1. Perbanyak Jaringan dan Koneksi Internet:

- a. Memperluas jaringan dan koneksi internet untuk meningkatkan aksesibilitas.
 - b. Mengadvokasi investasi dan dukungan pemerintah dalam peningkatan infrastruktur telekomunikasi.
- 2. Sosialisasi Masyarakat tentang Pemasangan Tower:
 - a. Melakukan sosialisasi aktif kepada masyarakat tentang manfaat pemasangan tower untuk meningkatkan konektivitas.
 - b. Berkolaborasi dengan pihak terkait untuk memfasilitasi pemasangan tower secara efisien.
- 3. Sosialisasi Masyarakat tentang Penanggulangan Sampah:
 - a. Mengedukasi masyarakat tentang penanggulangan sampah dan pentingnya kebersihan lingkungan.
 - b. Menyelenggarakan program sosialisasi dan kampanye bersih-bersih.
- 4. Pendampingan:
 - a. Memberikan pendampingan kepada masyarakat terkait penanganan masalah seperti resistensi terhadap perubahan dan kelemahan dalam pemberdayaan wisata.
 - b. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan pariwisata lokal.

4.3.3 Dimensi Smart Economy.

Tabel 4.15 memperlihatkan Analisis Strategi TOWS pada Dimensi *Smart Economy* (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023b).

Tabel 4.15 Analisis Strategi TOWS *Smart Economy*

Analisis Strategi TOWS (Threats, Opportunities, Weakness, and Strength)		
Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
	1. lembaga usaha yang berbadan hukum 2. hasil produksi umkm sudah	1. Belum terintegrasinya data potensi-potensi

Analisis Strategi TOWS (Threats, Opportunities, Weakness, and Strength)		
	masuk di marketplace 3. Layanan konsultasi, informasi bisnis, advokasi dan pendampingan bisnis serta akses pembiayaan, dan akses pemasaran 4. Terdapat fasilitasi perlindungan produk dengan proses standarisasi produk seperti sertifikasi halal, uji nutrisi, merk dan redesain kemasan 5. produksi umkm/ikm sudah terstandarisasi 6. Terhubung dengan sistem informasi industri nasional (SIINas) 7. Potensi Ekonomi di tiap Kecamatan 8. Pantura menjadi sentra tanaman hortikultura dan perkebunan (Melon, semangka, cabe, labu madu, bawang merah dan mete menjadi unggulan) 9. adanya akses pembiayaan bagi kumkm/ikm 10. Terdapat cikal bakal Smart Pesantren di Nahdatul Tulab dan Karang Durin (ada potensi 352 Pondok pesantren) 11. Terintegrasinya sistem pembayaran sebagai alat pembayaran dan dengan aplikasi belanja yang memungkinkan contoh kartu KORPRI menjadi penyedia (Jumlah ASN di Kab. Sampang 8000an) 12. Terdapat pelatihan ketrampilan usaha 13. Potensi SDA untuk pengembangan ekonomi 14. Kelompok masyarakat pelaku ekonomi, penggiat pertanian, perikanan, dan pariwisata serta pemuda kreatif 15. Produksi umkm berpotensi ekspor	kekuatan 2. Belum tersedianya masterplan UKM (lokasi dan dibentuk seperti apa) 3. Kemampuan manajemen usaha dan IT pelaku usaha masih rendah 4. Progress perbaikan data NIK penduduk masih rendah (perbankan masih mengalami kesulitan ketika ada pembukaan rekening baru) 5. Kesulitan membuat sentra kerajinan karena pelaku usaha sejenis menyebar di beberapa lokasi 6. Pola pikir pelaku usaha kurang (termasuk kesadaran pajak, legalitas, varian produk, kualitas/standarisasi packaging) 7. Belum tersedianya media dan fasilitas untuk mengenalkan kelompok masyarakat pelaku ekonomi, pelaku wisata, pelaku pertanian dll kepada halayak ramai sehingga mudah untuk diakses oleh masyarakat 8. Belum terjaminnya ketersediaan hasil produksi sepanjang tahun 9. Kurangnya penanganan pasca produksi
Faktor Eksternal	Strategi SO	Strategi WO
Peluang		
1. Program comunal branding bagi produksi	1. membuat sentra, cluster dan kawasan 2. Memperluas pemasaran dan penguatan sistem informasi	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia 2. Menerapkan

Analisis Strategi TOWS (Threats, Opportunities, Weakness, and Strength)		
UMKM/IKM 2. Dukungan dari lembaga non Pemerintah 3. Program pengembangan agrowisata 4. Berkembangnya industri makanan olahan dengan bahan baku hasil tanaman pertanian, peternakan dan perikanan menjadi peluang pasar potensial 5. Pasar lokal, regional dan nasional terbuka untuk pemasaran bidang pertanian, peternakan dan perikanan 6. Perkembangan era industri 4.0, masif pemanfaatan teknologi informasi 7. Peranan BUMD untuk mendukung pelaku usaha	agribisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi 3. Optimalisasi SDM Pelaku usaha melalui pelatihan dan pengembangan kelompok usaha untuk proses produksi, pengolahan dan pemasaran produk 4. Mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan dan pelayanan kepada pengunjung guna meningkatkan minat pengunjung agrowisata 5. Dengan memanfaatkan teknologi masyarakat dapat menciptakan mesin pemilah bibit unggul untuk mempermudah pengembangan SDA sektor pertanian 6. Peraturan perlindungan konsumen 7. Mendorong BUMD untuk meperluas core bisnisnya 8. Menjalin komunikasi dengan lembaga non pemerintah	diversifikasi tanaman pada pengembangan agrowisata untuk menarik pengunjung 3. Membangun sistem untuk mempermudah jangkauan pelaku usaha 4. Mengoptimalkan penggunaan tipping box (Pernah ada tipping box untuk mensupport PAD Kabupaten tetapi belum digunakan oleh pelaku usaha)
Faktor Eksternal	Strategi ST	Strategi WT
Ancaman 1. Pertumbuhan penduduk semakin tinggi 2. Makin meningkatnya konversi lahan pertanian dan perikanan 3. Perubahan	1. Menerapkan diversifikasi pangan lokal 2. Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW 3. Mengembangkan konsep agrowisata yang lebih menarik konsumen 4. Optimalisasi pendampingan kepada kelompok tani untuk menerapkan pertanian organik 5. Pengaturan perijinan pasar	1. Peningkatan kualitas agrowisata untuk meningkatkan kepuasan konsumen 2. Pengembangan Pelatihan Sektor Pertanian 3. Demplot pertanian organik 4. Adanya potensi anomali cuaca/iklim,

Analisis Strategi TOWS (Threats, Opportunities, Weakness, and Strength)		
iklim yang ekstrim 4. Lahan pertanian krisis unsur hara 5. Fluktuasi harga 6. Pasar modern yang berkembang pesat	modern	bencana alam dan ledakan serangan organisme pengganggu, akan berpengaruh terhadap produktivitas dan produksi tanaman pangan khususnya padi dan tanaman hortikultura.

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

Berikut adalah rangkuman analisis TOWS pada Dimensi Smart Economy Kabupaten Sampang:

Strategi SO (Strengths-Opportunities):

1. Membuat sentra, cluster, dan kawasan: Kaitannya dengan kekuatan memiliki potensi ekonomi di tiap kecamatan dan lembaga usaha yang berbadan hukum.
2. Memperluas pemasaran dan penguatan sistem informasi agribisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi: Berkaitan dengan kekuatan terhubung dengan sistem informasi industri nasional (SIINas) dan potensi ekonomi di tiap kecamatan.
3. Optimalisasi SDM pelaku usaha melalui pelatihan dan pengembangan kelompok usaha untuk proses produksi, pengolahan, dan pemasaran produk: Terkait dengan kekuatan terdapat pelatihan ketrampilan usaha dan potensi SDA untuk pengembangan ekonomi.
4. Mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan dan pelayanan kepada pengunjung guna meningkatkan minat pengunjung agrowisata: Melibatkan kekuatan produksi UMKM/IKM yang sudah terstandarisasi dan produksi UMKM berpotensi ekspor.
5. Dengan memanfaatkan teknologi, masyarakat dapat menciptakan mesin pemilah bibit unggul untuk mempermudah pengembangan SDA sektor pertanian: Terkait dengan kekuatan terhubung dengan SIINas dan potensi SDA untuk pengembangan ekonomi.
6. Peraturan perlindungan konsumen: Terkait dengan kekuatan lembaga usaha yang berbadan hukum.

7. Mendorong BUMD untuk memperluas core bisnisnya: Berkaitan dengan kekuatan adanya akses pembiayaan bagi kumkm/ikm.
8. Menjalin komunikasi dengan lembaga non-pemerintah: Terkait dengan kekuatan layanan konsultasi, informasi bisnis, advokasi, dan pendampingan bisnis serta akses pembiayaan, dan akses pemasaran.

Strategi WO (Weaknesses-Opportunities):

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia: Berhubungan dengan kelemahan kemampuan manajemen usaha dan IT pelaku usaha masih rendah.
2. Menerapkan diversifikasi tanaman pada pengembangan agrowisata untuk menarik pengunjung: Terkait dengan kelemahan kesulitan membuat sentra kerajinan karena pelaku usaha sejenis menyebar di beberapa lokasi.
3. Membangun sistem untuk mempermudah jangkauan pelaku usaha: Berkaitan dengan kelemahan belum tersedianya media dan fasilitas untuk mengenalkan kelompok masyarakat pelaku ekonomi.
4. Mengoptimalkan penggunaan tipping box: Terkait dengan kelemahan belum terjaminnya ketersediaan hasil produksi sepanjang tahun.

Strategi ST (Strengths-Threats):

1. Menerapkan diversifikasi pangan lokal: Berkaitan dengan kekuatan potensi ekonomi di tiap kecamatan dan lembaga usaha yang berbadan hukum sebagai respons terhadap pertumbuhan penduduk.
2. Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang sesuai RTRW: Terkait dengan kekuatan potensi ekonomi di tiap kecamatan dan lembaga usaha yang berbadan hukum sebagai respons terhadap konversi lahan.
3. Mengembangkan konsep agrowisata yang lebih menarik konsumen: Melibatkan kekuatan potensi ekonomi di tiap kecamatan dan lembaga usaha yang berbadan hukum.
4. Optimalisasi pendampingan kepada kelompok tani untuk menerapkan pertanian organik: Terkait dengan kekuatan produksi UMKM/IKM yang sudah terstandarisasi dan potensi SDA untuk pengembangan ekonomi.
5. Pengaturan perijinan pasar modern: Berkaitan dengan kekuatan adanya akses pembiayaan bagi kumkm/ikm.

Strategi WT (Weaknesses-Threats):

1. Peningkatan kualitas agrowisata untuk meningkatkan kepuasan konsumen: Berkaitan dengan kelemahan belum tersedianya media dan fasilitas untuk mengenalkan kelompok masyarakat pelaku ekonomi sebagai respons terhadap pertumbuhan penduduk.
2. Pengembangan Pelatihan Sektor Pertanian: Terkait dengan kelemahan kemampuan manajemen usaha dan IT pelaku usaha masih rendah sebagai respons terhadap fluktuasi harga.
3. Demplot pertanian organik: Berkaitan dengan kelemahan kesulitan membuat sentra kerajinan karena pelaku usaha sejenis menyebar di beberapa lokasi sebagai respons terhadap perubahan iklim.
4. Adanya potensi anomali cuaca/iklim, bencana alam, dan ledakan serangan organisme pengganggu, akan berpengaruh terhadap produktivitas dan produksi tanaman pangan khususnya padi dan tanaman hortikultura: Terkait dengan kelemahan kurangnya penanganan pasca produksi sebagai respons terhadap potensi anomali cuaca/iklim dan bencana alam.

4.3.4 Dimensi *Smart Living*

Tabel 4.16 memperlihatkan Analisis Strategi TOWS *Smart Living* (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023b)

Tabel 4.16 Analisis Strategi TOWS *Smart Living*

Analisis Strategi TOWS (Threats, Opportunities, Weakness, and Strength)		
Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
	1. Adanya komitmen pimpinan (Bupati Sampang) 2. Adanya Perda SKD No. 10 tahun 2016, SPM Bidang Kesehatan dan Akreditasi Faskesdas dan Rujukan 3. Adanya Tenaga Kesehatan dan Faskes yang menyebar sampai ke Desa 4. Pengelolaan keuangan BLUD bagi Puskesmas dan Rumah sakit 5. Sarana dan Prasarana IT termasuk internet yang mendukung pelayanan	1. Belum terintegrasinya sistem dan data 2. Rendahnya sebagian SDM yang berkompeten 3. Beban Kerja Tenaga Kesehatan masih cukup tinggi 4. Kepatuhan dan Kesadaran Tenaga terhadap implementasi IT masih Rendah 5. beberapa wilayah desa dan Puskesmas masih sering terjadi Error Jaringan Internet 6. Tidak ada Perusahaan angkutan umum

Analisis Strategi TOWS (Threats, Opportunities, Weakness, and Strength)		
	sampai ke tingkat Desa 6. Tersedianya anggaran di DPA Dinkes KB dan UPTD serta Rumah Sakit 7. Memiliki beberapa Aplikasi Program 8. Implementasi Inovasi Pelayanan Kesehatan sampai ketingkat Desa 9. kerjasama dengan perguruan tinggi 10. Adanya UHC (Universal Health Coverage) 11.Adanya PSC (119) 12.Adanya Perda Tata Ruang 13.Telah memiliki jaringan trayek angkutan umum (7 trayek) 14.Memilik 3 Pelabuhan (Pelabuhan Taddan, Pelabuhan Tanglok, Pelabuhan Gili Mandangin) 15.Master plan relokasi RSMZ sebagai RS rujukan di MADURA 16.RSMZ memiliki Alat MRI pertama di madura untuk mendukung RS Rujukan Madura 17.RSMZ menjadi Rujukan untuk Tes Kesehatan Bagi Perusahan Swasta (tersedianya Dokter Hiperkes) 18.RSMZ Memiliki layanan Rumah Vaksin untuk Jamaah Haji dan Umroh 19.Adanya Perbup Nomor. 188.45/378/KEP/434.012 /2019 Tentang Penetapan Ruas - ruas jalan Kabupaten.	7. Kendaraan angkutan umum sudah tidak ada 8. Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi 9. Tidak Memiliki Terminal Tipe C 10. Kapal Penyeberangan Sampang – Gili Mandangin masih tradisional 11. masih ada kasus AKI AKB dan Stunting di wilayah tertentu 12. rendahnya kesadaran tertib administrasi masyarakat 13. Jadwal penyeberangan ke pulau Mandangin hanya 1 x PP 14. APBD tidak mampu membiayai penuh proses pembangunan RS 15. Layanan MRI masih baru, sehingga belum banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dan perlu di branding 16. perusahaan BUMD maupun swasta di sampang masih sedikit 17. sosialisasi tidak terjangkau bagi warga luar sampang 18. Masih banyak jalan penghubung yang menjadi wewenang kabupaten mengalami kerusakan karena Struktur tanah yang kurang stabil. 19. Terbatasnya Anggaran sehingga tidak bisa menangani kerusakan infrastruktur yang bersifat insidentil. 20. SDM yang kurang mendukung di daerah tertentu terkait pekerjaan infrastruktur.
Faktor Eksternal	Strategi SO	Strategi WO
Peluang 1. Terdapat Perguruan Tinggi jurusan kesehatan di	1. Memanfaatkan tenaga ahli dan/atau perguruan tinggi untuk asistensi pelaksanaan Smart Living	1. Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk pengembangan sistem pelayanan publik dan

Analisis Strategi TOWS (Threats, Opportunities, Weakness, and Strength)		
Kabupaten Sampang (Poltera, Akpernata, Graha Husada) 2. Adanya dukungan masyarakat yang kolaboratif (Forum Sampang Sehat, Saka Bakti Husada, Kader Posyandu dan KB sampai ke tingkat desa, karang taruna, PKK) 3. Adanya Peraturan Kementerian Kesehatan yang mendorong Pengendalian Program 4. Adanya Program Dasawisma yang mendukung Program Kesehatan sampai ke tingkat Desa 5. Kebutuhan Masyarakat terhadap Mutu Layanan meningkat 6. Dukungan Lintas Sektor 7. Dukungan Pihak Swasta (CSR)	2. Mengoptimalkan Dukungan Masyarakat melalui Program Desa dalam implementasi Smart Living 3. Menjadikan Peraturan atau perundangan yang ada untuk pengendalian Program melalui Smart Living 4. Memanfaatkan Tuntutan dan Kebutuhan masyarakat dalam mempercepat dan meningkatkan mutu layanan yang pro smart Living 5. Mengoptimalkan dukungan Masyarakat dalam implemntasi Inovasi kesehatan pro Smart Living sampai ke tingkat Desa	Program 2. Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk perumusan kebijakan pemanfaatan dan tata kelola TI 3. melakukan kerjasama dengan kabupaten lain untuk mereplikasi sistem pelayanan publik
Faktor Eksternal	Strategi ST	Strategi WT
Ancaman 1. Masih rendahnya Keterlibatan Masyarakat 2. Akses masyarakat terhadap IT masih rendah 3. tingginya kecelakaan lalu lintas 4. PHBS masih Rendah 5. Adanya ormas yang tidak mendukung program-program kesehatan 6. Mindset/pola pikir masyarakat yang masih mudah diprovokasi/ dipengaruhi yang	1. Memperkuat keterlibatan dan Pemberdayaan MAsyarakat 2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap IT dan Program 3. Promosi/penyuluhan kesehatan serta pemicuan kepada masyarakat tentang kesehatan 4. Advokasi, mediasi menjelaskan tentang program-program kesehatan 5. Pendekatan kepada masyarakat untuk memperkenalkan program-program kesehatan	1. Konvergensi dan Integrasi Program berbasis IT 2. Meningkatkan program-program kesehatan berbasis masyarakat/ pemberdayaan masyarakat 3. Informasi program kesehatan melalui media sosial 4. Kerjasama dengan melibatkan ormas dalam program kesehatan

Analisis Strategi TOWS (Threats, Opportunities, Weakness, and Strength)		
tidak mendukung pada kesehatan		
7. Kurangnya kesadaran masyarakat di daerah tertentu sehingga menghambat pembangunan infrastruktur		

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

Berikut adalah rangkuman analisis TOWS pada Dimensi Smart Living Kabupaten Sampang:

Strategi SO (Strengths-Opportunities):

- Memanfaatkan tenaga ahli dan/atau perguruan tinggi untuk asistensi pelaksanaan Smart Living
 - Kaitan dengan Kekuatan: Adanya kerjasama dengan perguruan tinggi.
 - Kaitan dengan Peluang: Perguruan tinggi jurusan kesehatan.
- Mengoptimalkan Dukungan Masyarakat melalui Program Desa dalam implementasi Smart Living
 - Kaitan dengan Kekuatan: Adanya komitmen pimpinan dan implementasi inovasi pelayanan kesehatan sampai ke desa.
 - Kaitan dengan Peluang: Dukungan masyarakat kolaboratif.
- Menjadikan Peraturan atau perundangan yang ada untuk pengendalian Program melalui Smart Living
 - Kaitan dengan Kekuatan: Adanya peraturan daerah yang mendukung bidang kesehatan.
 - Kaitan dengan Peluang: Peraturan Kementerian Kesehatan yang mendukung pengendalian program.
- Memanfaatkan Tuntutan dan Kebutuhan masyarakat dalam mempercepat dan meningkatkan mutu layanan yang pro smart Living
 - Kaitan dengan Kekuatan: Adanya kebutuhan masyarakat terhadap mutu layanan.
 - Kaitan dengan Peluang: Dukungan lintas sektor dan CSR dari pihak swasta.
- Mengoptimalkan dukungan Masyarakat dalam implementasi Inovasi kesehatan pro Smart Living sampai ke tingkat Desa

- a. Kaitan dengan Kekuatan: Implementasi inovasi pelayanan kesehatan sampai ke desa.
- b. Kaitan dengan Peluang: Dukungan masyarakat kolaboratif dan organisasi kegiatan kesehatan.

Strategi WO (Weaknesses-Opportunities):

1. Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk pengembangan sistem pelayanan publik dan Program
 - a. Kaitan dengan Kelemahan: Rendahnya sebagian SDM yang berkompeten.
 - b. Kaitan dengan Peluang: Perguruan tinggi jurusan kesehatan.
2. Kerja sama dengan perguruan tinggi untuk perumusan kebijakan pemanfaatan dan tata kelola TI
 - a. Kaitan dengan Kelemahan: Belum terintegrasinya sistem dan data.
 - b. Kaitan dengan Peluang: Dukungan lintas sektor dan pihak swasta.
3. Melakukan kerjasama dengan kabupaten lain untuk mereplikasi sistem pelayanan publik
 - a. Kaitan dengan Kelemahan: Terbatasnya anggaran dan kurangnya perusahaan BUMD atau swasta.
 - b. Kaitan dengan Peluang: Perguruan tinggi jurusan kesehatan dan dukungan lintas sektor.

Strategi ST (Strengths-Threats):

1. Memperkuat keterlibatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Kaitan dengan Kekuatan: Komitmen pimpinan dan implementasi inovasi pelayanan kesehatan sampai ke desa.
 - b. Kaitan dengan Ancaman: Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dan rendahnya kesadaran tertib administrasi.
2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap IT dan Program
 - a. Kaitan dengan Kekuatan: Infrastruktur IT dan internet yang mendukung pelayanan hingga desa.
 - b. Kaitan dengan Ancaman: Akses masyarakat terhadap IT masih rendah dan kesadaran masyarakat di daerah tertentu rendah.
3. Promosi/penyuluhan kesehatan serta pemicuan kepada masyarakat tentang kesehatan
 - a. Kaitan dengan Kekuatan: Program Dasawisma yang mendukung program kesehatan di desa.

- b. Kaitan dengan Ancaman: Rendahnya kesadaran tertib administrasi masyarakat.
- 4. Advokasi, mediasi menjelaskan tentang program-program kesehatan
 - a. Kaitan dengan Kekuatan: Kerjasama dengan perguruan tinggi dan implementasi inovasi pelayanan kesehatan.
 - b. Kaitan dengan Ancaman: Adanya ormas yang tidak mendukung program-program kesehatan.
- 5. Pendekatan kepada masyarakat untuk memperkenalkan program-program kesehatan
 - a. Kaitan dengan Kekuatan: Master plan relokasi RS Madura sebagai rujukan dan memiliki layanan kesehatan khusus.
 - b. Kaitan dengan Ancaman: Kurangnya kesadaran masyarakat di daerah tertentu sehingga menghambat pembangunan infrastruktur.

Strategi WT (Weaknesses-Threats):

- 2. Konvergensi dan Integrasi Program berbasis IT
 - a. Kaitan dengan Kelemahan: Belum terintegrasinya sistem dan data.
 - b. Kaitan dengan Ancaman: Tingginya kecelakaan lalu lintas dan rendahnya keterlibatan masyarakat.
- 3. Meningkatkan program-program kesehatan berbasis masyarakat/pemberdayaan masyarakat
 - a. Kaitan dengan Kelemahan: Beban kerja tenaga kesehatan yang tinggi.
 - b. Kaitan dengan Ancaman: Akses masyarakat terhadap IT masih rendah.

4.3.5 Dimensi Smart Society

Tabel 4. 17 memperlihatkan analisis Strategi TOWS pada Dimensi *Smart Society* (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023b)

Tabel 4. 17 Analisis Strategi TOWS *Smart Society*

Analisis Strategi TOWS (Threats, Opportunities, Weakness, and Strength)		
Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan

Analisis Strategi TOWS (Threats, Opportunities, Weakness, and Strength)		
	1. Adanya fasilitas penunjang Literasi (Perpustakaan daerah, Perpustakaan Kelililng, Pojok Baca, Perpustakaan Desa, Free-wifi) 2. Kondisi sosiokultural masyarakat Sampang yang religius dengan ketersediaan Produk Ternak 3. Masyarakat Sampang 99% Islam memiliki tujuan wisata religi 4. Kawasan berbasis potensi BUMDes/BUMDesma 5. Adanya TRC (Tim Reaksi Cepat) untuk upaya pertolongan bencana 6. Memiliki lahan pertanian yang luas	1. Banyak Guru yang sering bolos di jam kerja 2. masih terdapat lokasi sekolah yang kurang infrastruktur untuk digitalisasi pendidikan 3. Belum ada wadah yang representatif yang dapat disediakan oleh pemerintah (misalnya rumah potong hewan “halal”) 4. Belum memiliki masjid yang menjadi pusat percontohan 5. Minimnya partisipasi masyarakat yang terakomodir dalam kelembagaan 6. Tidak adanya Call Center dalam memanggil TRC 7. Rendahnya minat pemuda untuk meneruskan pendidikan jurusan pertanian
Faktor Eksternal	Strategi SO	Strategi WO
Peluang 1. Kemudahan dalam evaluasi dan kontrol keaktifan Guru 2. Tingginya Kebutuhan TIK dalam peningkatan mutu Pendidikan 3. Bersinergi dengan Perguruan tinggi dengan program Pengabdian masyarakat 4. Adanya Rumah Potong Hewan 5. Adanya organisasi-organisasi Islam 6. Adanya program Jatim Puspa, Desa Berdaya, dan Lintas OPD 7. Tersedianya sarana prasarana	1. Pelaksanaan pelatihan dan beasiswa bagi pemuda-pemuda yang berprestasi di bidang akademik 2. Menjadikan rumah potong hewan bersertifikat halal 3. Menjadikan Sampang lebih dikenal di bidang pengelolaan masjid terbaik di Jatim 4. Menumbuhkan kemitraan dengan pihak ketiga 5. Menjadikan TRC lebih tanggap dalam menanggulangi bencana	1. Pemenuhan TIK di Lembaga pendidikan 2. Adanya pemasangan CCTV dan Satpam 3. Kerjasama dengan rumah potong hewan milik pribadi dengan pemerintah 4. Kerjasama dengan masjid yang sudah terkenal di Indonesia 5. Sosialisasi pembentukan kelembagaan

Analisis Strategi TOWS (Threats, Opportunities, Weakness, and Strength)		
kebencanaan yang memadai 8. Adanya perguruan tinggi yang memiliki fokus bidang pertanian		
Faktor Eksternal	Strategi ST	Strategi WT
Ancaman 1. Mutasi dan Pemberhentian Guru 2. Masih adanya guru yang kurang menguasai IT 3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk datang ke rumah potong hewan halal 4. Tuntutan peningkatan kualitas pengelolaan masjid 5. Urbanisasi dari Desa ke Kota 6. Terlambatnya TRC dalam melakukan pertolongan	1. Memberikan teguran tertulis dan lisan, pemahaman 2. Mempermudah akses dan proses bertransaksi di rumah potong hewan halal 3. Pendayagunaan Kemenag dan organisasi Islam 4. Penumbuhan pelaku UMKM yang berbasis IT	1. Melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik 2. Penguatan literasi masyarakat 3. Penggabungan rumah potong hewan milik pribadi dengan pemerintah menjadi rumah potong hewan halal 4. Penutupan 1 Masjid yang akan dijadikan pusat percontohan 5. sosialisasi keunggulan program BK Provinsi, Desa Berdaya, dan Lintas OPD 6. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk menciptakan Call Center

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

Berikut adalah rangkuman analisis TOWS pada Dimensi Smart Society Kabupaten Sampang:

Strategi SO (Strengths-Opportunities):

1. Pelaksanaan pelatihan dan beasiswa bagi pemuda-pemuda yang berprestasi di bidang akademik
- Strategi ini sejalan dengan peluang yang ada, yaitu peluang untuk meningkatkan minat pemuda terhadap pendidikan jurusan pertanian. Dengan memberikan pelatihan dan beasiswa, dapat mengatasi kelemahan minimnya partisipasi masyarakat dalam kelembagaan.
2. Menjadikan rumah potong hewan bersertifikat halal

Strategi ini terkait dengan peluang untuk meningkatkan kesadaran halal dalam masyarakat. Dengan menjadikan rumah potong hewan bersertifikat halal, dapat mengatasi kelemahan belum adanya wadah representatif seperti rumah potong hewan "halal".

3. Menjadikan Sampang lebih dikenal di bidang pengelolaan masjid terbaik di Jatim

Strategi ini berhubungan dengan peluang untuk meningkatkan pengelolaan masjid dan membuat Sampang lebih dikenal di bidang tersebut). Ini dapat mengatasi kelemahan belum adanya masjid yang menjadi pusat percontohan.

4. Menumbuhkan kemitraan dengan pihak ketiga

Strategi ini relevan dengan peluang untuk meningkatkan kemitraan dengan pihak ketiga, terutama dalam mendukung pertanian. Ini dapat mengatasi kelemahan rendahnya minat pemuda untuk meneruskan pendidikan jurusan pertanian.

5. Meningkatkan Respons TRC dalam Menanggulangi Bencana

Strategi ini sesuai dengan peluang untuk meningkatkan respons dan kemampuan TRC dalam menanggulangi bencana. Dengan demikian, dapat mengatasi kelemahan tidak adanya call center untuk memanggil TRC.

Strategi WO (Weaknesses-Opportunities):

1. Pemenuhan TIK di Lembaga Pendidikan

Strategi ini mendukung pemanfaatan kekuatan dalam kemudahan evaluasi dan kontrol keaktifan guru melalui pemenuhan TIK di lembaga pendidikan.

2. Adanya Pemasangan CCTV dan Satpam

Strategi ini berkaitan dengan pemanfaatan kekuatan literasi masyarakat dan fasilitas penunjang literasi dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan pemasangan CCTV dan Satpam.

3. Kerjasama dengan Rumah Potong Hewan Milik Pribadi dengan Pemerintah

Strategi ini terkait dengan pemanfaatan kekuatan adanya rumah potong hewan untuk memastikan kesadaran halal dengan menjalin kerjasama.

4. Kerjasama dengan Masjid yang Sudah Terkenal di Indonesia

Strategi ini mendukung pemanfaatan kekuatan masyarakat religius dan potensi masjid dalam pengelolaan masjid terbaik.

5. Sosialisasi Pembentukan Kelembagaan

Strategi ini relevan dengan pemanfaatan kekuatan kawasan berbasis potensi BUMDes/BUMDesma untuk mendukung program-program seperti Desa Berdaya.

Strategi ST (Strengths-Threats):**1. Memberikan Teguran Tertulis dan Lisan, Pemahaman**

Strategi ini relevan dengan memanfaatkan kekuatan fasilitas penunjang literasi untuk mengatasi ancaman mutasi dan pemberhentian guru. Memberikan teguran dan pemahaman dapat meningkatkan kualitas guru.

2. Mempermudah Akses dan Proses Bertransaksi di Rumah Potong Hewan Halal

Strategi ini terkait dengan memanfaatkan kekuatan adanya rumah potong hewan untuk mengatasi ancaman guru yang kurang menguasai IT. Membuat transaksi di rumah potong hewan halal lebih mudah dapat meningkatkan minat masyarakat.

3. Pendayagunaan Kemenag dan Organisasi Islam

Strategi ini mendukung pemanfaatan kekuatan masyarakat religius untuk mengatasi ancaman kurangnya kesadaran masyarakat untuk datang ke rumah potong hewan halal. Kolaborasi dengan Kemenag dan organisasi Islam dapat memperkuat pengelolaan masjid.

4. Penumbuhan Pelaku UMKM yang Berbasis IT

Strategi ini terkait dengan memanfaatkan kekuatan kawasan berbasis potensi BUMDes/BUMDesma untuk mendukung pelaku UMKM yang berbasis IT. Ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kelembagaan.

Strategi WT (Weaknesses-Threats):**1. Melakukan Pendekatan dan Komunikasi yang Baik**

Strategi ini mendukung upaya mengatasi kelemahan banyak guru yang sering bolos dengan melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik, sehingga dapat meningkatkan kehadiran guru melalui pemahaman dan dukungan.

2. Penguatan Literasi Masyarakat

Strategi ini terkait dengan upaya mengatasi kelemahan lokasi sekolah yang kurang infrastruktur untuk digitalisasi pendidikan dengan meningkatkan literasi masyarakat. Penguatan literasi dapat membantu dalam mengadopsi teknologi.

3. Penggabungan Rumah Potong Hewan Milik Pribadi dengan Pemerintah Menjadi Rumah Potong Hewan Halal

Strategi ini berkaitan dengan mengatasi kelemahan belum adanya wadah representatif seperti rumah potong hewan "halal" dengan menggabungkan rumah potong hewan milik pribadi dengan pemerintah. Dampaknya adalah dapat meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap rumah potong hewan.

4. Penutupan 1 Masjid yang akan Dijadikan Pusat Percontohan

Strategi ini terkait dengan upaya mengatasi kelemahan belum adanya masjid yang menjadi pusat percontohan dengan melakukan penutupan 1 masjid yang akan dijadikan pusat percontohan. Ini dapat merangsang perbaikan kualitas pengelolaan masjid dan kesadaran masyarakat.

5. Sosialisasi Keunggulan Program BK Provinsi, Desa Berdaya, dan Lintas OPD

Strategi ini berhubungan dengan upaya mengatasi minimnya partisipasi masyarakat dalam kelembagaan dengan mensosialisasikan keunggulan program seperti BK Provinsi, Desa Berdaya, dan Lintas OPD. Sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam program-program tersebut.

6. Kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk Menciptakan Call Center

Strategi ini relevan dengan mengatasi kelemahan tidak adanya call center dalam memanggil TRC dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk menciptakan Call Center, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan respons TRC dalam mengatasi bencana.

4.3.6 Dimensi Smart Environment

Tabel 4.18 memperlihatkan analisis Strategi TOWS pada Dimensi Smart Environment (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023b)

Tabel 4.18 Analisis Strategi TOWS Smart Environment

Analisis Strategi TOWS (Threats, Opportunities, Weakness, and Strength)		
Faktor Internal	Kekuatan	Kelemahan
	1. Adanya komitmen pimpinan (Bupati Sampang) 2. Kab. Sampang memiliki lahan RTH yang luas seluas 217,88 Ha (Perda	1. SDM pemerintahan yang terbatas (seperti tenaga pengangkut dan penyapu pada pemilah dan pengolah sampah yang minim dan kurang inovasi)

Analisis Strategi TOWS (Threats, Opportunities, Weakness, and Strength)		
	RTRW no. 4 Tahun 2020) Memiliki regulasi yang mendukung Perda RTRW no. 4 Tahun 2020 3. Koordinasi yang baik dengan pihak terkait (seperti Bappedalitbang, PuPr tata ruang, pihak kecamatan, dinas pertanian, kehutanan, menyesuaikan dengan penetapan jenis RTH yang akan ditetapkan nantinya untuk keberlanjutan dalam peningkatan kualitas RTH)	2. Teknologi pengolah sampah yang kurang up to date 3. Kurangnya kesadaran masyarakat menjaga lingkungan 4. pengendalian SDA yaitu kekurangan air pada saat musim kering, dan kelebihan air pada saat musim hujan (resapan) 5. tata kelola limbah atau masalah penanganan sampah yang belum tertangani dengan baik, belum ada tekonlogi yang diimplementasikan 6. Sarana dan prasarana yang terbatas (armada pengangkut sampah masih kurang dengan luas area penanganan yang luas)
Faktor Eksternal	Strategi SO	Strategi WO
Peluang 1. Dukungan CSR dari pihak ketiga (Mulai dari tahun 2019 dari HCML, Medco Energy, Petronas, Bank Jatim, bankBNI, Bank BRI) 2. dukungan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi yaitu Politeknik Negeri Madura yang fokus pada bidang teknik dan kesehatan sangat menunjang percepatan kemajuan daerah. 3. kerjasama dengan pemerhati lingkungan 4. Sudah ada inisiatif pengambilan sampah secara mandiri oleh forum	1. memberikan kemudahan perizinan 2. pengembangan Taman kota dengan pendanaan dari pihak ketiga (perusahaan CSR) 3. pengembangan kerja sama antara perguruan tinggi dengan DLH dan FPRB dalam penanganan Konservasi tanah, air dan udara seperti menanggulangi abrasi pantai dengan penanaman mangrove dan penanaman lahan lahan kritis dengan tanaman ekonomis 4. mengembangkan smart taman ecopark 5. Sekolah sedekah sampah 6. membentuk komunitas sadar sampah bersama DLH	1. Pengajuan CSR dengan pihak lain 2. Pembekalan Masyarakat untuk kreatifitas pengelolaan sampah organik dan non organik 3. Menggalakan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan 4. Sosialisasi terkait lingkungan kepada masyarakat oleh pemerhati lingkungan

Analisis Strategi TOWS (Threats, Opportunities, Weakness, and Strength)		
pengurangan risiko bencana (FPRB) per hari bisa mencapai 1 ton, berhenti karena kendaraan rusak		
Faktor Eksternal	Strategi ST	Strategi WT
Ancaman 1. Kerusakan lingkungan 2. bencana alam 3. sarana dan prasarana dalam fasilitas umum yang minim	1. kemitraan dengan Forum Sampang Sehat melalui lomba kebersihan lingkungan 2. Peningkatan pengawasan terhadap para pelaku usaha yang berpotensi terhadap pencemaran lingkungan 3. Perancangan teknologi EWS (Early Warning System) bersama perguruan tinggi 4. Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam program pengabdian masyarakat 5. melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam penyusunan grand design sarana prasarana perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan	1. Dampak resiko pembangunan terhadap lingkungan 2. melakukan penataan, pentaatandan pengendaian lingkungan secara berkelanjutan terhadap objek yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan 3. Perancangan teknologi EWS (Early Warning System) bersama perguruan tinggi 4. melakukan penyusunan dokumen tata lingkungan 5. Penyusunan dokumen perancangan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

Berikut adalah rangkuman analisis TOWS pada Dimensi Smart Environment Kabupaten Sampang:

Strategi SO (Strengths-Opportunities):

1. Memberikan kemudahan perizinan:

a. Kaitan dengan Kekuatan: Adanya komitmen pimpinan dapat mendukung upaya memberikan kemudahan perizinan.
b. Kaitan dengan Peluang: Memberikan kemudahan perizinan dapat mendukung pengembangan proyek-proyek berbasis CSR.
2. Pengembangan Taman kota dengan pendanaan dari pihak ketiga (perusahaan CSR):

- a. Kaitan dengan Kekuatan: Kab. Sampang memiliki lahan RTH yang luas, bisa mendukung pengembangan taman kota.
 - b. Kaitan dengan Peluang: Dukungan CSR dari pihak ketiga dapat digunakan untuk pendanaan proyek ini.
3. Pengembangan kerja sama antara perguruan tinggi dengan DLH dan FPRB dalam penanganan konservasi tanah, air, dan udara:
 - a. Kaitan dengan Kekuatan: Koordinasi yang baik dengan pihak terkait dapat memfasilitasi kerja sama ini.
 - b. Kaitan dengan Peluang: Dukungan perguruan tinggi dapat meningkatkan kapasitas dalam penanganan konservasi tanah, air, dan udara.
4. Mengembangkan smart taman ecopark:
 - a. Kaitan dengan Kekuatan: Lahan RTH yang luas dapat digunakan untuk pengembangan taman ecopark.
 - b. Kaitan dengan Peluang: Dukungan CSR dan inovasi teknologi dapat mendukung pengembangan taman ecopark.
5. Sekolah sedekah sampah:
 - a. Kaitan dengan Kekuatan: Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan, dan adanya komitmen pimpinan dapat mendukung program ini.
 - b. Kaitan dengan Peluang: Dukungan masyarakat dan CSR dapat menjadi sumber daya untuk program ini.
6. Membentuk komunitas sadar sampah bersama DLH:
 - a. Kaitan dengan Kekuatan: Koordinasi yang baik dengan pihak terkait dapat mendukung pembentukan komunitas sadar sampah.
 - b. Kaitan dengan Peluang: Dukungan CSR dan partisipasi masyarakat dapat memperkuat komunitas sadar sampah.

Strategi WO (Weaknesses-Opportunities):

1. Pengajuan CSR dengan pihak lain:
 - a. Kaitan dengan Kelemahan: Teknologi pengolahan sampah yang kurang up to date dapat diperbaiki dengan dukungan CSR.
 - b. Kaitan dengan Peluang: Dukungan CSR dapat digunakan untuk meningkatkan teknologi pengolahan sampah.
2. Pembekalan Masyarakat untuk kreativitas pengelolaan sampah organik dan non-organik:
 - a. Kaitan dengan Kelemahan: Kesadaran masyarakat yang kurang dapat ditingkatkan melalui pembekalan ini.

- b. Kaitan dengan Peluang: Partisipasi masyarakat dapat membantu dalam pengelolaan sampah.
- 3. Menggalakan partisipasi masyarakat dalam kebersihan lingkungan:
 - a. Kaitan dengan Kelemahan: Kurangnya kesadaran masyarakat dapat diatasi dengan menggalakan partisipasi.
 - b. Kaitan dengan Peluang: Dukungan masyarakat dapat meningkatkan kebersihan lingkungan.
- 4. Sosialisasi terkait lingkungan kepada masyarakat oleh pemerhati lingkungan:
 - a. Kaitan dengan Kelemahan: Kurangnya kesadaran masyarakat dapat diatasi dengan sosialisasi ini.
 - b. Kaitan dengan Peluang: Dukungan pemerhati lingkungan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat.

Strategi ST (Strengths-Threats):

- 1. Kemitraan dengan Forum Sampang Sehat melalui lomba kebersihan lingkungan:
 - a. Kaitan dengan Kekuatan: Adanya komitmen pimpinan dan koordinasi yang baik dapat mendukung kemitraan ini.
 - b. Kaitan dengan Ancaman: Lomba kebersihan lingkungan dapat menjadi respons terhadap ancaman kerusakan lingkungan.
- 2. Peningkatan pengawasan terhadap para pelaku usaha yang berpotensi terhadap pencemaran lingkungan:
 - a. Kaitan dengan Kekuatan: Koordinasi yang baik dengan pihak terkait dapat memperkuat pengawasan ini.
 - b. Kaitan dengan Ancaman: Pengawasan diperlukan untuk mengatasi ancaman pencemaran lingkungan oleh pelaku usaha.
- 3. Perancangan teknologi EWS (Early Warning System) bersama perguruan tinggi:
 - a. Kaitan dengan Kekuatan: Kolaborasi dengan perguruan tinggi dapat mendukung pengembangan teknologi EWS.
 - b. Kaitan dengan Ancaman: Teknologi EWS dapat menjadi respons terhadap ancaman bencana alam.
- 4. Kerjasama dengan perguruan tinggi dalam program pengabdian masyarakat:
 - a. Kaitan dengan Kekuatan: Kolaborasi dengan perguruan tinggi dapat memperkuat program pengabdian masyarakat.

- b. Kaitan dengan Ancaman: Program ini dapat memberikan respons terhadap ancaman kerusakan lingkungan.
- 5. Melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam penyusunan grand design sarana prasarana perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan:
 - a. Kaitan dengan Kekuatan: Koordinasi dengan perguruan tinggi dapat memastikan grand design berwawasan lingkungan.
 - b. Kaitan dengan Ancaman: Grand design tersebut dapat merespons ancaman terhadap sarana prasarana yang tidak berwawasan lingkungan.

Strategi WT (Weaknesses-Threats):

1. Dampak risiko pembangunan terhadap lingkungan:
 - a. Kaitan dengan Kelemahan: Kurangnya kesadaran masyarakat dan tata kelola limbah yang belum tertangani dapat meningkatkan dampak risiko pembangunan.
 - b. Kaitan dengan Ancaman: Strategi ini dapat membantu mengurangi dampak risiko pembangunan.
2. Melakukan penataan, pentaatan, dan pengendaian lingkungan secara berkelanjutan terhadap objek yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan:
 - a. Kaitan dengan Kelemahan: Sarana dan prasarana yang terbatas dapat menjadi hambatan dalam penataan dan pengendaian lingkungan.
 - b. Kaitan dengan Ancaman: Strategi ini dapat memberikan respons terhadap objek yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan.
3. Perancangan teknologi EWS (Early Warning System) bersama perguruan tinggi:
 - a. Kaitan dengan Kelemahan: Kurangnya teknologi pengolah sampah yang up to date dapat mempengaruhi perancangan EWS.
 - b. Kaitan dengan Ancaman: Teknologi EWS dapat menjadi alat penting untuk merespons ancaman bencana alam.
4. Melakukan penyusunan dokumen tata lingkungan:
 - a. Kaitan dengan Kelemahan: Tata kelola limbah yang belum tertangani dengan baik memerlukan penyusunan dokumen tata lingkungan.

- b. Kaitan dengan Ancaman: Dokumen ini dapat membantu merespons ancaman terhadap tata kelola limbah.
- 5. Penyusunan dokumen perancangan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman yang berwawasan lingkungan:
 - a. Kaitan dengan Kelemahan: Sarana dan prasarana yang terbatas memerlukan perancangan yang berwawasan lingkungan.
 - b. Kaitan dengan Ancaman: Dokumen ini dapat merespons ancaman terhadap sarana dan prasarana yang tidak berwawasan lingkungan.

5. Analisis Pembangunan Visi Smart City

Kabupaten Sampang berada pada titik penting, menghadapi peluang besar dalam merumuskan Visi dan Misi Smart City. Analisis pembangunan harus merinci visi progresif dan misi yang tangguh di enam dimensi kunci yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, Smart Living, dan Smart Environment. Dalam konteks ini, setiap dimensi harus diintegrasikan dengan cermat, menciptakan ekosistem yang harmonis dan memastikan masyarakat merasakan dampak positif secara menyeluruh. Inilah fondasi yang mendasari transformasi holistik menuju smart city yang berkelanjutan.

5.1 Visi dan Misi Smart City

Visi dan Misi Smart City Kabupaten Sampang disusun berdasarkan visi dan misi Kabupaten Sampang yang tercantum pada Dokumen Penajaman RPJMD 2019 – 2024 dan enam dimensi Smart City dari Kementerian Kominfo.

Visi Kabupaten Sampang Smart City adalah:

Sampang Cerdas, Harmonis, dan Berdaya Saing

Visi ini diturunkan menjadi lima Misi:

Misi 1	
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas dengan pemanfaatan teknologi informasi yang inovatif.
Misi 2	
	Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan yang inklusif dengan pendekatan teknologi berbasis digital.
Misi 3	
	Mewujudkan pembangunan yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan secara cerdas.
Misi 4	
	Mengembangkan citra positif dan identitas unik melalui strategi branding berbasis teknologi untuk menarik investasi dan pariwisata.

Misi 5	
	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan nyaman melalui pemanfaatan teknologi yang inovatif.

5.2 Sasaran Smart City Daerah

Pada bagian ini dibahas Sasaran *Smart City* Kabupaten Sampang di masing-masing dimensi. Sasaran tersebut diperoleh berdasarkan hasil FGD Bimtek 1 tanggal 5-6 Juli 2023 melalui pengisian kertas kerja dan diskusi (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023a, 2023b, 2023c).

5.2.1 Sasaran Dimensi Smart Governance

Tabel 5.1 menguraikan dengan lengkap Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan Smart City di Kabupaten Sampang pada dimensi *Smart Governance*, dengan tiga subdimensin yaitu Layanan Publik, Birokrasi, dan Perancangan Kebijakan.

Saat ini masalah yang masih dihadapi oleh Kabupaten Sampang di subdimensi layanan publik adalah akses layanan publik yang belum merata, portal satu data belum menjadi pusat data di Kabupaten Sampang, dan belum adanya layanan publik yang terintegrasi dengan daerah lainnya. Layanan publik yang disediakan di Kabupaten Sampang, selain belum sepenuhnya terintegrasi, juga masih terdapat banyak pelayanan yang menggunakan sistem manual. Akses layanan informasi yang belum merata juga masih menjadi keluhan masyarakat, sehingga pemerintah daerah perlu untuk melakukan perluasan dengan menggunakan kanal-kanal informasi yang telah mereka miliki selama ini. Terkait dengan birokrasi, masalah yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sampang adalah data dan layanan administrasi dan kepegawaian yang masih belum transparan.

Tabel 5.1 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Governance*

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran	Indikator Utama Smart City	
				TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
Smart Governance (G)	G.1 Layanan Publik	G.1.1 Meningkatnya kualitas layanan publik	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 10.2) 4. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 18.3) 5. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. PP No 96/2012 Tentang Pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP No 76/2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik		10.1. Jumlah layanan publik yang dapat diakses secara online
		G.1.2 Meningkatnya kapasitas SDM Penyelenggara layanan		Kesesuaian penempatan pegawai melalui evaluasi pengembangan kemampuan aparatur	10.2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik
		G.1.3 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang layanan publik			18.3. Jumlah fasilitas publik yang terintegrasi dengan teknologi cerdas
		G.1.4 Menyediakan layanan publik berbasis digital yang optimal			18.3. Jumlah fasilitas publik yang terintegrasi dengan teknologi cerdas
		G.1.5 Meningkatnya kualitas layanan pengaduan pelayanan publik		Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	10.2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik
	G.2 Birokrasi	G.2.1 Membuat prosedur birokrasi yang lebih	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. PermanPANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang	Tingkat penggunaan sistem informasi terintegrasi oleh instansi pemerintah	10.2. Persentase layanan yang dapat diakses dan dipenuhi secara daring

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran	Indikator Utama Smart City	
				TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
		sederhana	Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi 4. SE Menpan RB 20/2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negeri		
		G.2.2 Membuat SOP bersama pada OPD yang memiliki pelayanan publik yang sama		Tingkat partisipasi pegawai dalam pelatihan dan pengembangan	
		G.2.3 Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang perencanaan pembangunan		Tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	8.3. Persentase area yang aksesibilitas terhadap konektivitas Internet kota terpenuhi
		G.2.4 Menciptakan sistem data dan informasi terintegrasi lebih optimal.		Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	10.2. Persentase layanan yang dapat diakses dan dipenuhi secara daring
		G.2.5 Diterapkannya sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi untuk mendukung organisasi yang berbasis fungsional dengan mekanisme kerja yang flexible, changeable,		Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	10.2. Persentase layanan yang dapat diakses dan dipenuhi secara daring

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran	Indikator Utama Smart City	
				TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
		moveable			
	G.3 Perancangan Kebijakan	G.3.1 Melaksanakan perumusan kebijakan berdasarkan hasil kelitbangan dan inovasi	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 21.1) 4. PMDN 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 5. Permedagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara		
		G.3.2 Melaksanakan perumusan kebijakan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan			21.1. Jumlah rancangan kebijakan yang melibatkan partisipasi publik dalam proses perumusan
		G.3.3 Mewujudkan konsistensi dan keterpaduan dalam perumusan kebijakan		Persentase kepuasan stakeholder terhadap tingkat kolaborasi di Kabupaten Sampang	21.1. Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan berbasis teknologi dan data
		G.3.4 Melaksanakan proses perumusan kebijakan dengan dukungan dan partisipasi masyarakat		Jumlah proyek kolaboratif antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil yang berhasil dilaksanakan dalam setahun	21.1. Jumlah rancangan kebijakan yang melibatkan partisipasi publik dalam proses perumusan

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran	Indikator Utama Smart City	
				TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
		G.3.5 Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan secara terus-menerus dan mengevaluasi dampaknya secara berkala.	Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah		21.1. Jumlah kebijakan yang direvisi berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

5.2.2 Sasaran Dimensi *Smart Branding*

Tabel 5.2 menguraikan masalah yang masih dihadapi di Kabupaten Sampang, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang digunakan, dan indikator capaian di dimensi *Smart Branding*. Dimensi ini memiliki tiga subdimensi: Pariwisata, Daya Saing Bisnis, dan Wajah (Tampilan) Kota.

Pada subdimensi Pariwisata, kendala utama yang dihadapi adalah Kabupaten Sampang adalah tidak adanya potensi destinasi pariwisata alam dan kurangnya infrastruktur pendukung pariwisata, seperti ketersediaan hotel, akses jalan, dan kelangkaan alat transportasi. Sementara itu, pengembangan potensi pariwisata dan wajah kota juga belum dioptimalkan. Pemerintah daerah perlu menggali potensi wisata budaya dengan membuat program-program pariwisata budaya.

Pada subdimensi Daya Saing Bisnis, perluasan jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, dan akses jalan yang masih rusak menjadi persoalan, sehingga kenyamanan berusaha dan program-program pemerintah yang terkait dengan fasilitasi investasi belum maksimal. Kabupaten Sampang harus bisa menawarkan keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh Kota Surabaya sehingga investor akan lebih memilih menanamkan modalnya di kota ini.

Pada subdimensi Wajah (Tampilan) Kota., masalah yang masih dialami adalah persoalan PKL yang saat ini masih banyak yang berjualan di bahu jalan, meskipun beberapa sentra PKL sudah disediakan. Situasi ini tidak saja merusak perwajahan kota, tetapi juga keamanan bagi pejalan kaki karena jalur pedestrian digunakan juga untuk berjualan, sehingga pejalan kaki harus menggunakan jalan raya untuk berjalan. Kebijakan tegas harus diambil oleh pemerintah daerah terkait dengan PKL, sebagai bagian dari penataan wajah kota.

Tabel 5.2 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Branding*

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran	Indikator Utama Smart City	
				TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
Smart Branding (B)	B.1 Pariwisata	B.1.1 Menyediakan infrastruktur pariwisata yang memadai	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 14.1) 4. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 17b.1)	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata	14.1. Jumlah kunjungan wisatawan ke lokasi wisata alam di Kabupaten Sampang
		B.1.2 Menyediakan jaringan transportasi penunjang pariwisata		Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Sampang	17b.1. Tingkat kepuasan wisatawan terhadap pengalaman ekowisata di Kabupaten Sampang
		B.1.3 Memasarkan pariwisata melalui pariwisata go digital		Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata	14.1. Persentase layanan pariwisata publik yang dapat dibeli secara daring
		B.1.4 Melaksanakan penguatan kapasitas Kelompok Sadar Wisata dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi		Penciptaan lapangan kerja pada sektor pariwisata Kabupaten Sampang	
		B.1.5 Membangun E-Tourism Exchange untuk menjembatani antara wisatawan dan stakeholder di bidang pariwisata (hotel,		Jumlah Destinasi Pariwisata dan Kontribusi Pariwisata terhadap PAD	17b.2. Jumlah produk wisata budaya dan seni yang ditawarkan di Kabupaten Sampang

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran	Indikator Utama Smart City	
				TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
		transportasi, tiket, pertunjukan, kuliner)			
	B.2 Daya Saing Bisnis	B.2.1 Membangun ekosistem investasi yang mudah dan efektif	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 13.4) 4. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 19.5) 5. SDGs (Tujuan 8.2.1.(c))	Persentase kenaikan realisasi investasi	19.5. Tingkat ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk bisnis di Kabupaten Sampang
		B.2.2 Menyediakan Pusat Pengembangan Inovasi Produk dan layanan konsultasi		Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif	
		B.2.3 Menghasilkan SDM yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya		Indeks Desa Membangun (IDM)	
		B.2.4 Melaksanakan pemasaran dan branding yang kolaboratif		Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan usaha mikro	
		B.2.5 Membangun kemitraan strategis		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	
		B.2.6 Meningkatnya pengelolaan sektor		Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	
				Penciptaan lapangan kerja pada sektor pariwisata Kabupaten	

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran	Indikator Utama Smart City	
				TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
		unggulan dan ekonomi kreatif		Sampang	
	B.3 Wajah (Tampilan) Kota	B.3.1 Melakukan penataan ruang kota baik	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025	Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang sehingga terpenuhinya aksesibilitas dan jaringan infrastruktur yang baik	13.4. Jumlah investasi baru yang masuk ke Kabupaten Sampang dalam periode tertentu
		B.3.2 Menyediakan penerangan jalan dan <i>landmark</i> yang memadai dan kreatif		Jumlah area ruang publik yang telah direvitalisasi dalam periode tertentu	
		B.3.3 Mewujudkan kebersihan dan pengelolaan sampah		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemeliharaan dan promosi warisan budaya	
		B.3.4 Menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai			
		B.3.5 Melaksanakan pemugaran dan pelestarian bangunan		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemeliharaan dan promosi warisan budaya	

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran	Indikator Utama Smart City	
				TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
		bersejarah			
		B.3.6 Menyediakan sistem transportasi yang terintegrasi		Kinerja pemenuhan sarana prasarana perhubungan darat maupun laut di Kabupaten Sampang	
		B.3.7 Mengatur Rambu Lalu Lintas dan Penataan Parkir yang Tertib		Indeks kepuasan terhadap pelayanan publik pada sektor transportasi	
		B.3.8 Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

5.2.3 Sasaran Dimensi *Smart Economy*

Tabel 5.3 menguraikan secara detail masalah, sasaran, strategi, dan indikator capaian di dimensi *Smart Economy*. Permasalahan utama yang dihadapi di subdimensi Ekosistem Industri adalah pengembangan ekosistem industri (IKM) untuk berkolaborasi antara Kabupaten Sampang dengan kabupaten lainnya yang belum maksimal.

Subdimensi Kesejahteraan Masyarakat menyoroti ketersediaan kesempatan kerja yang masih kurang, sehingga perlu disinergikan antara pengembangan UMKM dan IKM guna mendorong investasi dan terbukanya lapangan kerja baru.

Subdimensi Ekosistem Transaksi Keuangan, permasalahan yang masih dihadapi adalah penggunaan teknologi finansial yang masih minim, sehingga masyarakat perlu diberikan edukasi penggunaan transaksi digital secara aman dan nyaman.

Tabel 5.3 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Economy*

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
				TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
Smart Economy (E)	Ec.1 Ekosistem Industri	Ec.1.1 Memfasilitasi Lembaga Usaha untuk berbadan Hukum/Akta Hukum	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025	Pertumbuhan jumlah koperasi dan UMKM yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat	5.2. Pertumbuhan terhadap bisnis-bisnis baru
		Ec.1.2 Menyediakan fasilitas pelayanan bagi KUMKM secara online dan offline		Pertumbuhan jumlah koperasi dan UMKM yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat	
		Ec.1.3 Menyediakan saluran distribusi		Jumlah produk kreatif lokal yang berhasil dikembangkan dan dipasarkan secara luas	
		Ec.1.4 Memfasilitasi rantai dan kualitas pasokan serta pengembangan cluster industri		Kontribusi sektor ekonomi baru terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Sampang	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang diperoleh dari ekonomi berbagi
		Ec.1.5 Meminimalisasi Biaya operasi		Jumlah produk kreatif lokal yang berhasil dikembangkan dan dipasarkan secara luas	
	Ec.2 Kesejahteraan	Ec.2.1 Meningkatnya	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025	Tingkat kemiskinan dan indeks gini (pengukuran	

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
				TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
	Masyarakat	pendapatan masyarakat yang semakin merata	3. SDGs (Tujuan 8.5.2)	ketimpangan pendapatan)	
		Ec.2.2 Meningkatnya investasi ekonomis masyarakat (masyarakat mampu menyisihkan pendapatan untuk investasi)		Persentase kenaikan realisasi investasi	
		Ec.2.3 Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat secara layak		Tingkat kemiskinan dan indeks gini (pengukuran ketimpangan pendapatan)	11.1. Tingkat cakupan pelayanan kesehatan dan indikator kesehatan masyarakat
		Ec.2.4 Menurunnya angka kemiskinan		Tingkat kemiskinan dan indeks gini (pengukuran ketimpangan pendapatan)	
		Ec.2.5 Menurunnya jumlah pengangguran		Jumlah pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja	
	Ec.3 Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec.3.1 Meningkatnya layanan transaksi berbasis teknologi digital (dimulai dari pelayanan yang diberikan instansi	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025	Jumlah masyarakat yang memiliki akses ke layanan keuangan digital	

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
				TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
		pemerintah)			
		Ec.3.2 Mengembangkan ekosistem transaksi keuangan digital secara luas		Tingkat literasi keuangan masyarakat berdasarkan survei atau evaluasi	
		Ec.3.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap permodalan usaha ekonomi		Indeks keuangan inklusif dan stabilitas sistem keuangan	
		Ec.3.4 Meningkatnya kemampuan keuangan daerah		Indeks keuangan inklusif dan stabilitas sistem keuangan	

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

5.2.4 Sasaran Dimensi *Smart Living*

Tabel 5.4 menyajikan Sasaran dan Strategi yang ingin dicapai di tiap subdimensi di *Smart Living*. Masalah utama yang masih dihadapi memperbaiki kualitas udara dengan keberadaan RTH dan Taman Kota akan menanggulangi masalah ini. Di subdimensi kesehatan, permasalahan yang muncul adalah belum meratanya ketersediaan Puskesmas dan Pustu di setiap desa sebagai akses ke sarana dan prasarana kesehatan. Terakhir, subdimensi Transportasi, masalah yang dihadapi adalah masih kurangnya kualitas jalan, dampaknya menurunnya jumlah transportasi publik yang menyebabkan mobilitas masyarakat menjadi terbatas.

Tabel 5.4 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Living*

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
				TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
Smart Living (L)	L.1 Harmonisasi Tata Ruang	L.1.1 Membangun perumahan di kawasan pemukiman bagi masyarakat yang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SDGs (Tujuan 7.2.1)	Persentase Warga yang terkena relokasi untuk memfasilitasi penyediaan rumah layak huni	
		L.1.2 Menyediakan sarana dan prasarana permukiman yang berkelanjutan		Persentase perumahan yang telah dilengkapi PSU terstandardisasi	7.10. Penambahan infrastruktur ramah lingkungan, seperti tempat pengisian ulang kendaraan listrik
		L.1.3 Membangun fasilitas wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah		Jumlah area taman kota dan ruang terbuka hijau meningkat	
	L.2 Kesehatan	L.2.1 Menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 11.1) 4. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 11.3)	Jumlah fasilitas kesehatan yang baru dibangun sesuai dengan target perencanaan Penambahan tenaga medis dan paramedis mencapai angka yang telah ditetapkan	11.1. Tingkat penggunaan teknologi kesehatan dalam pemberian layanan kesehatan meningkat

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
				TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
		L.2.2 Meningkatnya lingkungan yang bersih dan sehat		Peningkatan persentase kawasan perumahan maupun permukiman sehat yang diiringi dengan penurunan kawasan kumuh	11.3. Indeks Kualitas Udara (<i>Air Quality Index</i>) memenuhi standar kualitas udara yang ditetapkan
		L.2.3 Menyediakan fasilitas pendidikan bagi masyarakat		Persentase perumahan yang telah dilengkapi PSU terstandarisasi	
		L.2.4 Menyediakan fasilitas sosial dan budaya tempat berkumpul bagi masyarakat		Persentase perumahan yang telah dilengkapi PSU terstandarisasi	
		L.2.5 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Persentase bangunan permukiman yang memenuhi sertifikat layak huni	11.3. Indeks Kualitas Udara (<i>Air Quality Index</i>) memenuhi standar kualitas udara yang ditetapkan
	L.3 Transportasi	L.3.1 Menyediakan Jaringan jalan yang cukup memadai bagi masyarakat untuk mengakses lokasi-lokasi penting ke pusat-pusat perdagangan, pertanian, destinasi wisata dan lokasi strategis lainnya	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 19.6) 4. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 19.11)	Panjang total jalan yang ditingkatkan mencapai target rencana	19.11. Implementasi teknologi pintar yang berhasil mengurangi waktu perjalanan dan

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
				TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
					kepadatan lalu lintas
		L.3.2 Menyediakan moda transportasi umum bagi masyarakat di pedesaan untuk mengakses lahan-lahan produktif pertanian.		Persentase kawasan atau area yang telah dilengkapi PSU terstandardisasi	19.6. Penambahan jumlah unit transportasi publik sesuai dengan kebutuhan

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

5.2.5 Sasaran Dimensi *Smart Society*

Tabel 5.5 menyajikan sasaran yang ingin dicapai di tiga subdimensi *Smart Society*. Di subdimensi Interaksi Masyarakat, partisipasi aktif warga menjadi hal penting agar seluruh komunitas terlibat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan wilayah secara berkelanjutan, sehingga perlu membangun platform digital untuk mendukung warga dalam memberikan masukan dan usulan kebijakan.

Pada subdimensi Ekosistem Belajar/ Pendidikan, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, sekitar 50% sarana dan prasarana Pendidikan di Kabupaten Sampang mengalami kondisi yang rusak, sehingga perlu adanya percepatan perbaikan maupun pemenuhan ketersediaan 120 kepala sekolah yang sudah memasuki masa pensiun dan meninggal dunia.

Secara umum pada subdimensi Keamanan Masyarakat, kabupaten Sampang relatif aman, dengan penerangan jalan dan rambu-rambu yang lengkap, namun kondisi jalan yang rusak masih berpotensi masyarakat mengalami kecelakaan lalu lintas, sehingga infrastruktur fisik jalan perlu diperbaiki.

Tabel 5.5 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Society*

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran	Indikator Utama Smart City	
				TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
Smart Society (S)	S.1 Interaksi Masyarakat	S.1.1 Tersedianya akses internet yang terhubung antar rumah tangga	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SDGs (Tujuan 9.c.1)	Persentase warga yang berpartisipasi dalam platform digital partisipasi publik	
		S.1.2 Tersedianya akses internet bagi masyarakat umum			18.3. Jumlah lokasi di Kabupaten Sampang yang terjangkau akses internet gratis
		S.1.3 Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang teknologi dan manfaatnya			13.4. Persentase masyarakat yang memiliki literasi teknologi sehingga manfaatnya meningkat dalam survei kesadaran teknologi
	S.2 Ekosistem Belajar/ Pendidikan	S.2.1 Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025	Persentase siswa yang lulus ujian nasional di Kabupaten Sampang	
				Rasio siswa per komputer di sekolah-sekolah	
		S.2.2 Mengembangkan program pendidikan berbasis teknologi		Jumlah program pendidikan berbasis teknologi yang berhasil diimplementasikan dalam setahun	

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran	Indikator Utama Smart City	
				TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
				Persentase guru yang telah mengikuti pelatihan teknologi dalam pengajaran	
		S.2.3 Meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat		Jumlah sekolah di daerah terpencil yang berhasil didirikan dalam setahun	
				Persentase siswa penerima beasiswa dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Sampang	
	S.3 Keamanan Masyarakat	S.3.1 Meningkatkan keamanan lingkungan dan pencegahan kejahatan	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 15.1)	Jumlah inisiatif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan yang terlaksana dalam setahun	15.1. Persentase peningkatan kehadiran polisi dan pemantauan CCTV di titik-titik strategis
		S.3.2 Mengurangi angka kecelakaan lalu lintas		Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sampang	
				Jumlah kampanye keselamatan berlalu lintas yang diadakan dalam setahun	
		S.3.3 Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana		Persentase peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran	Indikator Utama Smart City	
				TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
				Jumlah peralatan tanggap darurat yang berhasil diadakan dalam setahun	

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

5.2.6 Sasaran Dimensi *Smart Environment*

Tabel 5.6 menyajikan sasaran yang ingin dicapai dan Strategi yang dilakukan di masing-masing subdimensi *Smart Environment*. Pada subdimensi Proteksi Lingkungan, Kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurangi emisi karbon dioksida untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan kualitas udara masih menjadi persoalan utama.

Pada subdimensi Pengelolaan Sampah dan Limbah, limbah padat dan cair (B3) yang belum diolah dengan baik dan juga sampah plastik masih menjadi isu utama. Pemerintah daerah belum menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi untuk optimalisasi daur ulang sampah.

Pada subdimensi Tata Kelola Energi, secara umum masyarakat dan pemerintah daerah masih menggunakan sumber daya energi tidak terbarukan seperti kompor gas, mobil dan motor berbahan bakar bensin dan solar sebagai permasalahan, karena berakibat kepada menurunnya kualitas udara, sehingga pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti energi surya dan angin untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca perlu dijadikan salah satu program *Smart City* daerah.

Tabel 5.6 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi Smart Environment

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran	INDIKATOR UTAMA SMART CITY		
				TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)	
Smart Environment (En)	En.1 Proteksi Lingkungan	En.1.1 Mengurangi emisi karbon dioksida	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SDGs (Tujuan 13.2.1.(b)) 4. SDGs (Tujuan 7.2.1) 5. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 8.2) 6. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 16.6)	Jumlah emisi karbon dioksida berkurang sebesar 20% pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2020	SDGs (Tujuan 13.2.1.(b))	
				Persentase penggunaan energi terbarukan mencapai 30% dari total kebutuhan energi Kabupaten Sampang pada tahun 2025	SDGs (Tujuan 7.2.1)	
				Luas kawasan hutan dan lahan konservasi bertambah 5% pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2020		
		En.1.2 Melakukan Konservasi Sumber Daya Alam			8.2. Indeks kualitas udara mencapai standar kualitas udara yang sehat berdasarkan peraturan pemerintah	
				En.1.3 Mengendalikan Pencemaran Lingkungan		16.6. Persentase limbah industri yang diolah mencapai 80% pada tahun 2025

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
				TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
	En.2 Pengelolaan Sampah dan Limbah	En.2.1 Mengelola Sampah Berbasis Teknologi	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 16.4) 4. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 16.1) 5. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 16.6)		16.4. Persentase jumlah sampah yang berhasil diolah dengan metode daur ulang mencapai 60% pada tahun 2025
					16.1. Jumlah pusat daur ulang bertambah menjadi 10 unit pada tahun 2025
		En.2.2 Mereduksi Penggunaan Plastik		Persentase pengurangan penggunaan plastik sekali pakai mencapai 50% pada tahun 2025	
				Jumlah bisnis yang menggunakan kemasan ramah lingkungan meningkat 20% pada tahun 2025	
				Jumlah kecelakaan atau insiden akibat limbah B3 berkurang menjadi 0 pada tahun 2025	16.6. Persentase limbah B3 yang diolah dengan metode aman dan sesuai peraturan mencapai 90% pada tahun 2025
	En.3 Tata Kelola Energi	En.3.1 Meningkatkan Penggunaan Energi Terbarukan	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 7.10) 4. SNI ISO 37122:2019		7.10. Jumlah titik pengisian daya listrik untuk kendaraan bertenaga listrik bertambah menjadi 50

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
				TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
			(Indikator 7.5)		titik pada tahun 2025
		En.3.2 Meningkatkan Efisiensi Energi	5. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 12.1)		7.5. Tingkat konsumsi energi per unit output industri berkurang 15% pada tahun 2025
			6. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 19.5)		12.1. Tingkat konsumsi energi per kapita rumah tangga berkurang 10% pada tahun 2025
					19.5. Peningkatan efisiensi bahan bakar transportasi publik sebesar 20% pada tahun 2025

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

6. Penutup

Buku 1 ini berisi Analisis Strategis *Smart City* di Kabupaten Sampang. Bahan utama buku ini bersumber dari data primer yaitu kertas kerja analisis kesiapan *smart city* daerah, kertas kerja analisis masa depan dan sasaran *smart city* daerah, kertas kerja analisis SWOT-TOWS *smart city* daerah per dimensi, dan kertas kerja pemetaan misi dan sasaran RPJMD daerah terhadap dimensi *smart city*.

Dalam penyusunannya, buku ini juga berdasarkan referensi data primer lain yaitu RPJMD 2019-2024 Kabupaten Sampang, RPJPD 2005-2025 Kabupaten Sampang, dan beberapa referensi data sekunder yang tercantum dalam daftar pustaka.

Selanjutnya, Buku I Analisis Strategis Smart City Kabupaten Sampang ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam bimbingan teknis selanjutnya terkait Masterplan Smart City Kabupaten Sampang dan pengambilan keputusan dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Smart City Kabupaten Sampang dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun ke depan.

Daftar Pustaka

- Bank Indonesia Jawa Timur. (2023). *Laporan Perekonomian Jawa Timur*.
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Jawa-Timur-Februari-2023.aspx>
- BPS Kab. Sampang. (2022). *Statistik Daerah Kabupaten Sampang*.
- BPS Kab. Sampang. (2023). *Kabupaten Sampang Dalam Angka*.
- Bupati Sampang. (2019). *Peraturan Bupati nomor 66 Tahun 2019 Tentang SPBE*.
- Bupati Sampang. (2023a). *Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/154/KEP/434.013/2023 tentang Dewan Smart City Kabupaten Sampang*.
- Bupati Sampang. (2023b). *Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/155/KEP/434.013/2023 tentang Tim Pelaksana Smart City Kabupaten Sampang*.
- Direktorat Jenderal Kominfo. (2023). *Guideline Masterplan Smart City Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City)*.
- Direktorat Layanan Aplikasi Kominfo. (2023). *Peran Transformasi Digital dalam Peningkatan Kualitas Layanan Publik melalui Smart City*.
- RPJMD Kab. Sampang. (2022). *Dokumen RPJMD 2019-2024*.
- RPJPD Kab. Sampang. (2010). *Dokumen RPJPD 2005-2025*.
- Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang. (2023a). *Kertas Kerja Analisis Kesiapan Smart City Daerah*.
- Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang. (2023b). *Kertas Kerja Analisis SWOT-TOWS*.
- Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang. (2023c). *Kertas Kerja Analisis Tren dan Perubahan atau Perkembangan Kota*.
- Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang. (2023d). *Kertas Kerja Pemetaan Misi dan Sasaran RPJMD Terhadap Dimensi Smart City*.

Lampiran

L1. Undangan Bimtek 1 pada tanggal 5-6 Juli 2023

1. B - 520 - SC - Permohonan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis I dan LAMPIRAN
2. Undangan Bimtek Smart City Tahap I dari Kabupaten Sampang

L2. Dokumentasi FGD Bimtek 1 hari ke-1 (Rabu, 5 Juli 2023)

	Pembukaan Bimtek 1 yang dihadiri oleh Sekda Kabupaten Sampang (Yuliadi Setiyawan, S.Sos, MM) ketiga dari kanan, Ka. Bappedalitbangda (Ibu Ir. Hj. Umi Hanik Laila, MM) paling kanan, Kadiskominfo (Bpk. Amrin Hidayat, S.Kom., M.A.P.) berdiri, perwakilan Kominfo Pusat (Bpk. Maykada Harjono) keempat dari kanan, dan Pembimbing ahli Smart City (Bpk. Hari Kusdaryanto) nomor dua dari kiri
	Presentasi pembukaan oleh Tim Pembimbing Ahli dari Citiasia, Inc. Bpk. Hari Kusdaryanto (berdiri)



Kelompok *Smart Society*



Kelompok *Smart Governance*



Kelompok *Smart Environment*



Kelompok *Smart Living*



Kelompok *Smart Economy*



Kelompok *Smart Branding*

L3. Dokumentasi FGD Bimtek 1 hari ke-2 (Kamis, 6 Juli 2023)

	Presentasi Bimtek hari ke-2 tanggal 6 Juli 2023 oleh Tim Pembimbing Ahli dari Citiasia, Inc. Bpk. Hari Kusdaryanto (berdiri) tentang kesiapan daerah dalam pembangunan Smart City
	Presentasi pembukaan oleh Tim Pembimbing Ahli dari Citiasia, Inc. Bpk. Hari Kusdaryanto (berdiri) lanjutan
	Antusiasme peserta kelompok per dimensi dalam FGD



Antusiasme peserta kelompok per dimensi dalam FGD (2)

BUKU II
PETA JALAN DAN RENCANA AKSI SMART CITY
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2025 – 2033

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i

Sambutan Bupati Kabupaten Sampang Error! Bookmark not defined.

Sambutan Sekretaris Dewan *Smart City*.....Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR..... vi

1. Pendahuluan..... 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Tujuan 2

 1.3 Landasan Hukum..... 3

 1.4 Kerangka Pikir 5

 1.4.1 Keterhubungan antara Dimensi *Smart City* dengan Sasaran RPD..... 11

 1.4.2 Keterhubungan antara Dimensi *Smart City* dengan SNI ISO 37122 15

2. Arah Pembangunan *Smart City* Daerah..... 20

 2.1 Visi, Misi, dan Sasaran *Smart City* Daerah..... 21

 2.1.1 Visi dan Misi *Smart City* Daerah..... 21

 2.1.2 Sasaran *Smart City* Daerah..... 21

 2.2 Indikator Utama *Smart City* Daerah 34

 2.2.1 Indikator Utama Dimensi *Smart Governance*..... 34

 2.2.2 Indikator Utama Dimensi *Smart Branding* 37

 2.2.3 Indikator Utama Dimensi *Smart Economy*..... 40

 2.2.4 Indikator Utama Dimensi *Smart Living* 43

 2.2.5 Indikator Utama Dimensi *Smart Society* 45

 2.2.6 Indikator Utama Dimensi *Smart Environment* 48

3. Strategi Pembangunan *Smart City* Daerah..... 51

 3.1 Strategi Dimensi *Smart Governance* 52

 3.2 Strategi Dimensi *Smart Branding*..... 55

 3.3 Strategi Dimensi *Smart Economy* 57

 3.4 Strategi Dimensi *Smart Living*..... 59

 3.5 Strategi Dimensi *Smart Society*..... 61

 3.6 Strategi Dimensi *Smart Environment*..... 63

4. Rencana Aksi *Smart City* Daerah..... 66

 4.1 Rencana Aksi Dimensi *Smart Governance* 67

 4.1.1 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028) 67

 4.1.2. Rencana Aksi Jangka Panjang (2029-2033) 74

 4.2 Rencana Aksi Dimensi *Smart Branding* 76

 4.2.1 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028) 77

 4.2.2 Rencana Aksi Jangka Panjang (2029-2033) 81

 4.3 Rencana Aksi Dimensi *Smart Economy* 83

4.3.1 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028)	83
4.3.2 Rencana Aksi Jangka Panjang (2029-2033)	90
4.4 Rencana Aksi Dimensi <i>Smart Living</i>	92
4.4.1 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028)	92
4.4.2 Rencana Aksi Jangka Panjang (2029-2033)	96
4.5 Rencana Aksi Dimensi <i>Smart Society</i>.....	98
4.5.1 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028)	98
4.5.2 Rencana Aksi Jangka Panjang (2029-2033)	103
4.6 Rencana Aksi Dimensi <i>Smart Environment</i>	105
4.6.1 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028)	105
4.6.2 Rencana Aksi Jangka Panjang (2029-2033)	107
5. Peta Jalan Pembangunan Smart City Daerah	110
5.1 Peta Jalan Dimensi <i>Smart Governance</i>.....	111
5.1.1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028).....	112
5.1.2 Peta Jalan Jangka Panjang (2029-2033).....	117
5.2 Peta Jalan Dimensi <i>Smart Branding</i>	119
5.2.1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028).....	119
5.2.2 Peta Jalan Jangka Panjang (2029-2033).....	124
5.3 Peta Jalan Dimensi <i>Smart Economy</i>.....	128
5.3.1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028).....	129
5.3.2 Peta Jalan Jangka Panjang (2029-2033).....	134
5.4 Peta Jalan Dimensi <i>Smart Living</i>.....	136
5.4.1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028).....	137
5.4.2 Peta Jalan Jangka Panjang (2029-2033).....	141
5.5 Peta Jalan Dimensi <i>Smart Society</i>	144
5.5.1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028).....	145
5.5.2 Peta Jalan Jangka Panjang (2029-2033).....	148
5.6 Peta Jalan Dimensi <i>Smart Environment</i>.....	152
5.6.1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028).....	153
5.6.2 Peta Jalan Jangka Panjang (2029-2033).....	155
6. Penutup.....	158
Daftar Pustaka	159

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan model *Smart City Readiness* 5

Tabel 1.2 Pemetaan Misi dan Sasaran RPD terhadap Dimensi Smart City 12

Tabel 1.3 Pemetaan Subdimensi *Smart City* dan SNI ISO 37122:2019..... 15

Tabel 2.1 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Governance* 22

Tabel 2.2 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Branding*..... 26

Tabel 2.3 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Economy* 29

Tabel 2.4 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Living*..... 30

Tabel 2.5 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Society* 32

Tabel 2.6 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Environment*..... 33

Tabel 2.7 Indikator utama sasaran Dimensi *Smart Governance*..... 34

Tabel 2.8 Indikator utama sasaran Dimensi *Smart Branding* 37

Tabel 2.9 Indikator utama sasaran Dimensi *Smart Economy*..... 40

Tabel 2.10 Indikator utama sasaran Dimensi *Smart Living* 43

Tabel 2.11 Indikator utama sasaran Dimensi *Smart Society* 46

Tabel 2.12 Indikator utama sasaran Dimensi *Smart Environment* 48

Tabel 3.1 Strategi Pembangunan pada Dimensi *Smart Governance* 52

Tabel 3.2 Strategi Pembangunan pada Dimensi *Smart Branding*..... 55

Tabel 3.3 Strategi Pembangunan pada Dimensi *Smart Economy* 57

Tabel 3.4 Strategi Pembangunan pada Dimensi *Smart Living*..... 59

Tabel 3.5 Strategi Pembangunan pada Dimensi *Smart Society* 61

Tabel 3.6 Strategi Pembangunan pada Dimensi *Smart Environment*..... 63

Tabel 4.1 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah Smart Governance 67

Tabel 4.2 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Governance 74

Tabel 4.3 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah Smart Branding..... 77

Tabel 4.4 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Branding..... 81

Tabel 4.5 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah Smart Economy 84

Tabel 4.6 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Economy 90

Tabel 4.7 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah Smart Living..... 93

Tabel 4.8 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Living..... 96

Tabel 4.9 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah Smart Society 98

Tabel 4.10 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Society 103

Tabel 4.11 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah Smart Environment 105

Tabel 4.12 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Environment 107

Tabel 5.1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah Smart Governance 112

Tabel 5.2 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Governance..... 117

Tabel 5.3 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah Smart Branding..... 120

Tabel 5.4 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Branding 124

Tabel 5.5 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah Smart Economy..... 129

Tabel 5.6 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Economy.....	134
Tabel 5.7 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah Smart Living	137
Tabel 5.8 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Living	142
Tabel 5.9 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah Smart Society.....	145
Tabel 5.10 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Society.....	149
Tabel 5.11 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah Smart Environment	153
Tabel 5.12 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Environment	156

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahap penyusunan *Master Plan Smart City* 2

Gambar 1.2 Model *Smart City Readiness* 7

Gambar 1.3 Enam Dimensi *Smart City* 8

Gambar 1.4 Kerangka Pikir *Master Plan Smart City* Kabupaten Sampang..... 10

Gambar 1.5 Dimensi dan Subdimensi *Smart City*..... 19

Gambar 3.1 Portal Layanan Kabupaten Sampang 54

Gambar 3.2 Alun-alun Trunojoyo sebagai Ikon Wajah Kota..... 56

1. Pendahuluan

Bagian pendahuluan dari buku 2 ini menguraikan empat subbagian yang berkesinambungan terdiri dari:

1. Latar belakang

Pertama, latar belakang menjadi dasar dan justifikasi mengapa perlu disusun buku 2 *Master Plan Smart City 2025-2033* dan memberikan tahapan penyusunannya.

2. Tujuan

Kedua, tujuan menguraikan arah yang akan dicapai dalam penyusunan buku 2 bagi pemerintah daerah.

3. Landasan Hukum

Ketiga, landasan hukum menguraikan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah dalam upaya menegaskan pentingnya pembangunan *Smart City* di daerah kabupaten/kota.

4. Kerangka Pikir

Keempat, kerangka pikir melihat keterkaitan antara sasaran-sasaran dari RPD 2025-2026 dan sasaran-sasaran dari *Master Plan Smart City* di Kabupaten Sampang.

1.1 Latar Belakang

Buku 2 yang berjudul *Master Plan Smart City Daerah Kabupaten Sampang 2024-2033* ini merupakan lanjutan dari Buku 1 *Analisis Strategis Smart City Daerah Kabupaten Sampang 2025-2033* yang telah ditulis sebelumnya sebagai luaran dari Kegiatan Bimtek 1 (tanggal 5-6 Juli 2023).

Buku 2 berfokus kepada penyusunan *Master Plan Smart City Daerah Kabupaten Sampang 2024-2033*. Buku 2 ditulis dalam dua tahap berdasarkan kegiatan Bimtek 2 dan Bimtek 3 yaitu:

- Tahap 1 menuliskan Buku 2 bagian 1 sebagai luaran dari hasil kegiatan Bimtek 2 (tanggal 3-4 Agustus 2023). Buku ini terdiri dari tiga bab utama dan satu bab penutup. Tiga bab utama berisi Bab 1 Pendahuluan membahas latar belakang, tujuan, landasan hukum, dan kerangka pikir *Master Plan Smart City Daerah*; Bab 2 menggambarkan arah pembangunan *Smart City* daerah yang dijabarkan dalam bentuk visi, misi, sasaran, dan indikator utama (per dimensi); Bab 3 menguraikan strategi pembangunan *Smart City* berdasarkan enam dimensi; dan diakhiri dengan Bab 4 penutup.

- Tahap 2 menuliskan Buku 2 bagian 2. Buku ini pada dasarnya merupakan Buku 2 versi lengkap (berjumlah 6 bab), isinya mencakup Buku 2 bagian 1 (bab 1-3) ditambah dengan 2 bab hasil analisis dari isian instrumen Kertas Kerja Rencana Aksi dan Program (Peta Jalan Pembangunan) Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang sebagai luaran dari hasil kegiatan Bimtek 3 (tanggal 4-5 September 2023). Tambahannya adalah bab 4 Rencana Aksi Smart City Daerah, bab 5 Peta Jalan Pembangunan Smart City Daerah, dan bab 6 Penutup.

Gambar 1.1 memperlihatkan 10 tahap penyusunan Master Plan Smart City Kota/Daerah yang digunakan oleh Kominfo (Direktorat Jenderal Kominfo, 2023). Buku 1 dibuat setelah tahap 3 dan 4 dilaksanakan melalui Bimtek 1 (tanggal 5-6 Juli 2023), sedangkan Buku 2 ditulis setelah tahap 5-7 dilaksanakan melalui Bimtek 2 (tanggal 3-4 Agustus 2023) luaran Buku 2 Bagian 1 dan Bimtek 3 (tanggal 4-5 September 2023) luaran Buku 2 lengkap.



Gambar 1.1 Tahap penyusunan *Master Plan Smart City*
(Sumber: Kemkominfo, 2021)

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Buku 2 Master Plan Smart City Daerah Kabupaten Sampang adalah:

1. Buku ini menjadi panduan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sampang dalam arah dan strategi pembangunan *Smart City* periode 2024-2033.
2. Memastikan bahwa arah pembangunan *Smart City* Daerah telah selaras dengan arah pembangunan daerah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMMD) Kabupaten Sampang 2019-2024 yang selanjutnya dimutakhirkan kembali melalui RPD 2025-2026, dan program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD.

3. Program-program kerja dan rencana-rencana aksi yang disusun dalam *Master Plan Smart City* berikutnya akan dapat memperkaya inovasi-inovasi yang saat ini sudah dijalankan oleh Kabupaten Sampang.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusun *Master Plan Smart City* Daerah Kabupaten Sampang didasarkan kepada peraturan berskala nasional (Kemkominfo, 2021a) dan didukung oleh peraturan-peraturan pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;

14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan;
21. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
22. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
23. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
24. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pantai Utara Agrowisata Sampang Gemilang;
25. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Alih Media Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
26. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
27. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
28. Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/154/KEP/434.013/2023 tentang Dewan Smart City Kabupaten Sampang (Bupati Sampang, 2023a);
29. Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/155/KEP/434.013/2023 tentang Tim Pelaksana Smart City Kabupaten Sampang (Bupati Sampang, 2023b).
30. Penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dan Dirjen Aptika Kominfo pada Rabu, tanggal 11

Oktober 2023 di Gedung Smart Room Sampang sebagai komitmen menuju Sampang Smart City.

1.4 Kerangka Pikir

Sebuah *Master Plan Smart City* akan dapat dijalankan dengan baik apabila memenuhi beberapa kriteria berikut (Kemkominfo, 2021a):

- 1. Sesuai dengan ciri khas dan kebutuhan khusus daerah tersebut;
- 2. Memiliki peluang besar untuk dicapai dengan hasil yang optimal;
- 3. Tujuan jelas, sesuai target, dan bermanfaat;
- 4. Keberlanjutan dalam menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan;
- 5. Dapat diwujudkan secara nyata sesuai kemampuan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Herawati and Djunaedi, 2020) melibatkan perbandingan terhadap lima model pengukuran kesiapan kota cerdas. Studi ini meliputi penerapan berbagai model seperti *Smart City Readiness Guide* dari *Smart City Council*, *Smart City Readiness (Smart Cities Summit)*, *Smart City Readiness Model Based on Technology Organization Environment (TOE) Framework and its effect on adoption decision*, *Kominfo Smart City Readiness Model*, dan juga model pengukuran terakhir dari *Smart City Readiness Singapore*.

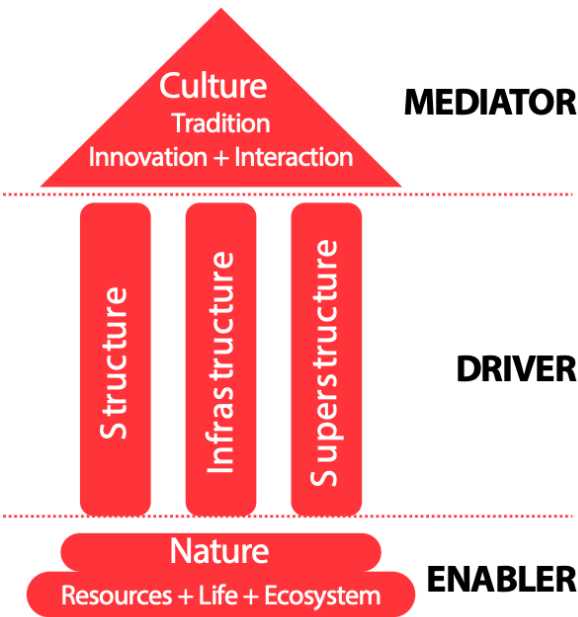
Tabel 1.1 memperlihatkan hasil perbandingan model *Smart City Readiness* (Herawati and Djunaedi, 2020). Berdasarkan kesesuaian kriteria yang ada di kabupaten dan kota di Indonesia seperti potensi alam, struktur, infrastruktur, pembangunan SDM dan selaras juga dengan adaptasi model *Smart City Readiness* yang ditetapkan oleh Kementerian Kominfo.

Tabel 1.1 Perbandingan model *Smart City Readiness*

<i>Smart city Readiness Guide</i>	<i>Smart city Readiness (Smart Cities Summit)</i>	<i>Smart city Readiness Model Based on TOE Framework</i>	<i>Kominfo Smart City Readiness Model</i>	<i>Singapore Readiness</i>
Enabler	Kerjasama pemerintah swasta	Kesiapan teknologi	Potensi alam	<i>Test bedding</i> dan kolaborasi penelitian
Peralatan dan kontrol	Keterbukaan data dan kolaborasi pihak ketiga	Peralatan dan kontrol	Struktur	Keterbukaan data

Smart city Readiness Guide	Smart city Readiness (Smart Cities Summit)	Smart city Readiness Model Based on TOE Framework	Kominfo Smart City Readiness Model	Singapore Readiness
Konektivitas	Sumber informasi bagi layanan publik	Konektivitas	Pembangunan SDM	Investasi dalam litbang
Interoperabilitas	Konektivitas internet	Interoperabilitas	Penyiapan anggaran	Laboratorium uji coba solusi teknologi
Privasi dan keamanan	Smart Kiosks	Manajemen data dan analitik	Infrastruktur	Menumbuhkan industri
Manajemen data	Layanan transportasi cerdas	Layanan dan privasi	Pembangunan infrastruktur fisik dan digital	Keamanan siber
Sumber daya komputer	Keamanan layanan publik	Kesiapan organisasi	Suprastruktur	Membangun kemampuan komputasi
Analitik	Solusi yang berkelanjutan	Tersedianya tenaga ahli	Kebijakan	
	Sistem <i>voting digital</i>	Dukungan dari <i>top management</i>	Kelembagaan	
Tanggung jawab	Kesiapan untuk kendaraan otomatis	Strategi pendanaan	Tata kelola pelaksanaan <i>smart city</i>	
Bangunan		Kesiapan lingkungan	Mediator	
Energi		Keberhasilan warga dalam penggunaan komputer dan internet		
Telekomunikasi		Keterlibatan warga		
Pengelolaan limbah		Kemitraan dan kolaborasi		
Keuangan				
Transportasi				
Pelayanan publik				
Air				
Keamanan Publik				

Kominfo *Smart City Readiness Model* dikembangkan untuk mengukur kesiapan pembangunan *Smart City* di Kabupaten Sampang yang diterapkan oleh Kemkominfo untuk program menuju 100 *Smart City* bagi kota/kabupaten terlihat pada Gambar 1.2 (Kemkominfo, 2021a)



Gambar 1.2 Model Smart City Readiness

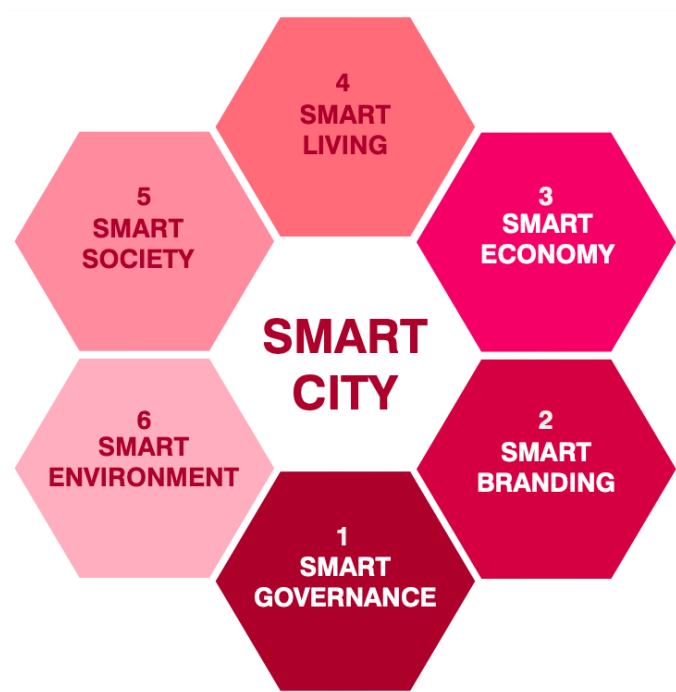
(Sumber: Kemkominfo, 2021)

Atribut-atribut *Smart City Readiness* dari Gambar 1.2 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mediator	Dalam konteks pengembangan <i>Smart City</i> , suatu wilayah memerlukan <i>mediator</i> yang memiliki peran krusial dalam mengarahkan proses ini. Faktor-faktor seperti tradisi, inovasi, dan interaksi bergabung sebagai unsur-unsur penting dalam <i>mediator</i> ini.
Driver	Faktor pendorong yang melibatkan elemen-elemen seperti struktur, infrastruktur, dan suprastruktur, sehingga <i>enabler</i> menjadi efektivitas
Enabler	<i>Enabler</i> menjadi fondasi utama dari kesiapan menuju <i>Smart City</i> di suatu daerah, yang tercermin dari potensi alamnya. Potensi alam atau <i>nature</i> , meliputi sumber daya alam, kondisi lingkungan, serta ekosistem yang membentuk komponen-komponen krusial dalam konsep ini.

Dalam menganalisis kesiapan suatu daerah, maka diperlukan juga dimensi-dimensi pendukung sesuai dengan karakteristik kota atau daerah di Indonesia.

(Kemkominfo, 2021a) telah menetapkan dimensi-dimensi yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat di dalam *Smart City* dapat mewujudkan kehidupan yang nyaman, aman, harmonis, dan sehat secara berkelanjutan.



Gambar 1.3 Enam Dimensi *Smart City*
(Sumber: Kemkominfo, 2021)

Gambar 1.3 mengilustrasikan enam dimensi *Smart City* yang menopang model *Smart City* Readiness dan juga telah diadaptasi oleh (Kemkominfo, 2021a) pada Program Gerakan Menuju 100 *Smart City* untuk kota dan kabupaten di Indonesia mulai tahun 2017.

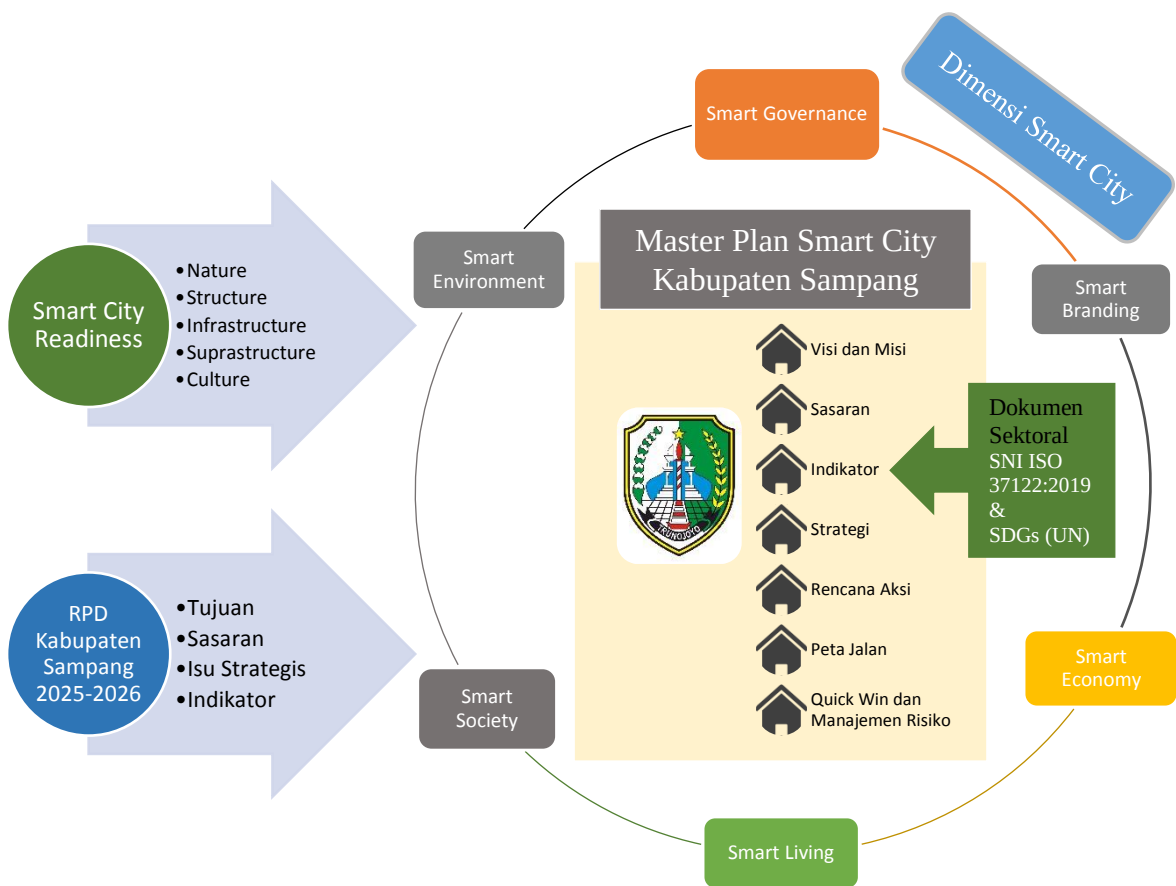
Enam dimensi dapat diuraikan sebagai berikut:

<i>Smart Governance</i>	Merupakan fondasi utama dari kerangka kerja model <i>Smart City</i> . <i>Smart Governance</i> berfungsi sebagai pendorong utama bagi semua unsur lain dalam konsep <i>Smart City</i> . <i>Smart Governance</i> perlu diwujudkan dalam tiga fungsi pemerintahan, yakni kebijakan publik, pengaturan birokrasi, dan penyediaan layanan masyarakat.
<i>Smart Branding</i>	Dalam kerangka model <i>Smart City</i> , <i>Smart Branding</i> memiliki peran penting kedua. Fungsi utama dari <i>Smart Branding</i> adalah untuk mengkomunikasikan nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu kota atau daerah kepada penduduk setempat, wisatawan, dan pelaku bisnis. Proses <i>Smart Branding</i> harus difokuskan pada tiga aspek penting dari wilayah tersebut, yaitu pariwisata, sektor bisnis, dan citra keseluruhan daerah.

Smart Economy	Membentuk sistem <i>Smart Economy</i> merupakan salah satu tugas utama suatu kota (daerah). Hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan lingkungan industri yang sesuai, meningkatkan kesejahteraan penduduknya, serta memfasilitasi kemudahan dan kenyamanan dalam infrastruktur transaksi.
Smart Living	Konsep <i>Smart Living</i> mencakup lingkungan hunian yang memenuhi standar yang sesuai bagi penduduknya. Komponen utama dari <i>Smart Living</i> adalah terwujudnya keseimbangan yang harmonis dalam kehidupan komunitas. Keseimbangan ini perlu tercermin dalam aspek-aspek seperti pengaturan lingkungan permukiman, adanya fasilitas bisnis, serta rekreasi yang tersedia bagi masyarakat.
Smart Society	Konsep <i>Smart Society</i> menciptakan kondisi yang ideal di mana interaksi antara individu, komunitas, dan teknologi digital berjalan secara harmonis. Setiap anggota masyarakat diharapkan memiliki peluang akses ke pendidikan yang ditingkatkan melalui fasilitas belajar digital. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan terhadap aspek keselamatan individu, aset, dan mitigasi risiko bencana untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Smart Environment	Konsep <i>Smart Environment</i> mencerminkan tekad suatu kota (daerah) dalam menjaga kelestarian lingkungan, mengelola limbah, dan menggunakan sumber energi secara bijak. Semua upaya ini bertujuan untuk mendukung kelangsungan hidup seluruh ekosistem yang ada dalam lingkungan tersebut.

Buku 1 Analisis Kesiapan *Smart City* Daerah Kabupaten Sampang merupakan luaran dari penerapan model *Smart City Readiness* ini. Kerangka pikir keterhubungan antara sasaran *Smart City* dan RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kabupaten Sampang 2025-2026 dapat dilihat pada Gambar 1.4.

Terdapat 13 sasaran sebagai revisi dari 5 misi yang didefinisikan pada P-RPJMD Kabupaten Sampang 2019-2024 (Bappedalitbang, 2023; RPJMD Kab. Sampang, 2022), karena P-RPJMD akan berakhir di tahun 2024, maka dimutakhirkan kembali sasaran-sasaran *Smart City* agar selaras dengan sasaran-sasaran yang tertuang pada RPD 2025-2026. Secara prinsip sasaran-sasaran dari RPD 2025-2026 kemudian akan diadaptasi menjadi sasaran-sasaran yang dipetakan ke dalam enam dimensi *Smart City* dari Kominfo. Pemerintah Daerah bersama Tim Pelaksana Pembangunan *Smart City* Kabupaten Sampang telah menentukan arah pembangunan *Master Plan Smart City* yang akan diperbaharui.



Gambar 1.4 Kerangka Pikir Master Plan Smart City Kabupaten Sampang

Pembangunan *Smart City* diawali dengan melakukan analisis kesiapan daerah (*Smart City Readiness*) meliputi aspek *Nature* (Sumber daya alam dan ekosistem), *Structure* (Kualitas SDM daerah dan pemerintah dan kapasitas keuangan daerah), *Infrastructure* (Kesiapan infrastruktur fisik, digital, dan sosial daerah), *Suprastructure* (Kesiapan kebijakan daerah, kelembagaan daerah, dan organisasi masyarakat daerah), dan *Culture* (Kekayaan budaya dan tradisi masyarakat daerah). Penjelasan detail hasil analisis kesiapan daerah Kabupaten Sampang telah diuraikan pada Buku 1 yang memberikan kesimpulan bahwa Kabupaten Sampang telah siap menuju Sampang *Smart City*.

Master Plan Smart City yang disusun harus selaras dengan sasaran-sasaran dari RPD 2025-2026 sebagai revisi dari dokumen Penajaman RPJMD yang akan berakhir tahun 2024. Indikator-indikator yang berasal dari dokumen sektoral terutama SNI ISO 37122: 2019 dan SDGs perlu dimasukkan menjadi indikator-indikator *Smart City* yang nanti menjadi indikator-indikator dalam peta jalan (program kerja) *Smart City* Jangka Pendek (2024), Jangka Menengah (2025-2028), dan Jangka Panjang (2029-2033). Program Quick Win merupakan program unggulan daerah yang dapat dilaksanakan setidaknya dalam 3 bulan,

dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dan program tersebut juga mampu direplikasi. Agar Inovasi Quick Win dapat terlaksana secara efektif dan efisien, maka dibutuhkan juga Manajemen Risiko. Istilah risiko mengacu pada dampak dari ketidakpastian atau ketidakpastian itu sendiri pada pencapaian tujuan. Terdapat dua tahapan Manajemen Risiko yaitu identifikasi risiko (melalui lima pilar risiko) dan analisis risiko (melalui dua faktor yaitu kemungkinan risiko dan dampak risiko). Detail inovasi Quick Win dan Manajemen Risiko dari Kabupaten Sampang dapat dibaca pada buku 4.

1.4.1 Keterhubungan antara Dimensi *Smart City* dengan Sasaran RPD

Jika dipetakan, kelima Misi RPD 2025-2026 Kabupaten Sampang telah selaras dengan keenam dimensi *Smart City* sebagai berikut:

- Misi 1 telah selaras dengan dimensi *Smart Governance*, *Smart Living*, *Smart Environment*, dan *Smart Society*.
- Misi 2 telah selaras dengan dimensi *Smart Economy*, *Smart Governance*, *Smart Society*, *Smart Living*, dan *Smart Branding*.
- Misi 3 telah selaras dengan dimensi *Smart Living*, dan *Smart Environment*.
- Misi 4 telah selaras dengan dimensi *Smart Governance*.
- Misi 5 telah selaras dengan dimensi *Smart Society* dan *Smart Governance*.

Tabel 1.2 memperlihatkan pemetaan misi ke setiap dimensi *Smart City* (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023d).

Tabel 1.2 Pemetaan Misi dan Sasaran RPD terhadap Dimensi Smart City

No	Misi RPD 2025-2026	Tujuan RPD 2025-2026	Sasaran RPD 2025-2026	Indikator RPD 2025-2026	Dimensi Smart City					
					Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
1	Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Terbangunnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan				✓		✓
			Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	✓				✓	
				Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat						
			Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				✓	✓	
2	Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif	Menurunnya angka kemiskinan	Jumlah penduduk miskin			✓	✓		
			Menurunnya jumlah pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)			✓		✓	
			Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan		✓	✓			
				Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan besar dan eceran						
				Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum						
				Persentase Kenaikan realisasi investasi						

No	Misi RPD 2025-2026	Tujuan RPD 2025-2026	Sasaran RPD 2025-2026	Indikator RPD 2025-2026	Dimensi Smart City					
					Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
3	Misi 3: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan	Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)			✓		✓	
			Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)	✓					
			Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Kualitas Pelayanan Jalan				✓		
				Indeks Kinerja Sumber Daya Air						
				Indeks Layanan Perhubungan						
				Indeks Layanan Perumahan dan Permukiman						
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup						✓
				Indeks Ketahanan Daerah						
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	✓					
				Opini BPK	✓					
4	Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan desa yang akuntabel, efektif, dan efisien	Nilai SAKIP						

No	Misi RPD 2025-2026	Tujuan RPD 2025-2026	Sasaran RPD 2025-2026	Indikator RPD 2025-2026	Dimensi Smart City					
					Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
5	Misi 5: Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai, dan bersatu	Meningkatnya toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai, dan bersatu	Meningkatnya ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	Persentase Penyelesaian Konflik Sosial Politik						
				Persentase Penurunan Gangguan ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum						

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

1.4.2 Keterhubungan antara Dimensi *Smart City* dengan SNI ISO 37122

Dengan merujuk kembali pada Gambar 1.4 bahwa sasaran per subdimensi Smart City harus dapat diukur melalui indikator-indikator Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37122:2019. Tabel 1.3 memperlihatkan Pemetaan dimensi dan Subdimensi Smart City dan dikaitkan dengan indikator-indikator SNI ISO 37122:2019 (Kemkominfo, 2021b).

Tabel 1.3 Pemetaan Subdimensi *Smart City* dan SNI ISO 37122:2019

Dimensi	Subdimensi	Indikator SNI ISO 37122:2019	
Smart Governance	Layanan Publik	SNI 10. Pemerintahan (10.1-10.4)	
		10.1.	Jumlah kunjungan daring tahunan ke portal data terbuka kota per 100.000 penduduk
		10.2.	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring
		10.3.	Rata-rata waktu respons terhadap pertanyaan yang dilakukan melalui sistem penyelidikan non-darurat kota (hari)
		10.4.	Rata-rata waktu henti (downtime) infrastruktur teknologi informasi (TI) kota
		SNI 18. Telekomunikasi (18.1-18.3)	
		18.1.	Persentase populasi kota dengan akses ke pita lebar (broadband) berkecepatan memadai
		18.2.	Persentase area kota di bawah zona putih / titik mati / tidak tercover oleh konektivitas telekomunikasi
		18.3.	Persentase area kota yang dicakup oleh konektivitas Internet yang disediakan oleh kota
		SNI 5. Ekonomi (5.1)	
		5.1.	Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka
	Birokrasi	SNI 21. Perencanaan Kota (21.1-21.4)	
		21.1.	Jumlah warga kota per 100.000 penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan
		21.2.	Persentase izin bangunan yang diajukan melalui sistem pengiriman elektronik
		21.3.	Waktu rata-rata untuk persetujuan izin bangunan (hari)
		21.4.	Persentase populasi kota yang hidup dalam kepadatan populasi sedang hingga tinggi
	Perancangan Kebijakan		
Smart Branding	Pariwisata	SNI 14. Rekreasi (14.1)	
		14.1.	Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring
		SNI 17. Budaya (17.1-17.2)	
		17.1.	Jumlah pemesanan daring untuk fasilitas budaya per 100.000 penduduk
		17.2.	Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan

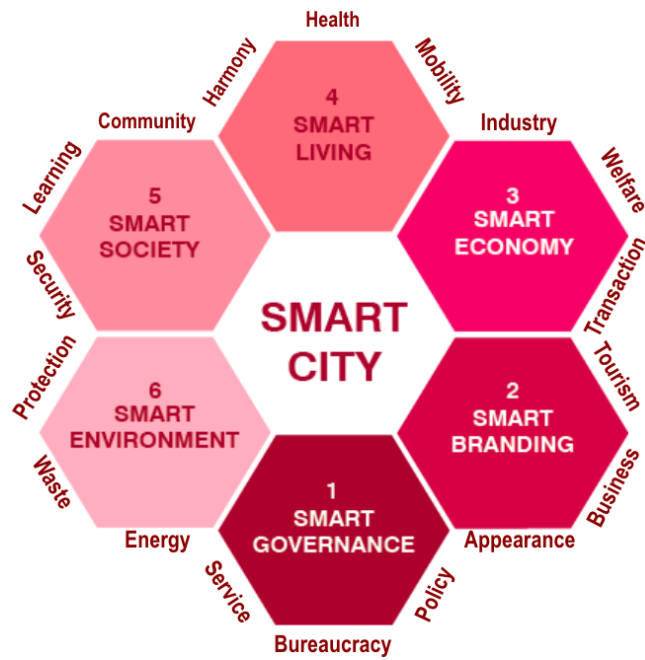
Dimensi	Subdimensi	Indikator SNI ISO 37122:2019	
	Daya Saing Bisnis		
	Wajah (Tampilan) Kota		
Smart Economy	Ekosistem Industri	SNI 20. Pertanian Perkotaan (20.1-20.3)	
		20.1.	Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan
		20.2.	Total limbah makanan kota yang dikumpulkan tahunan dikirim ke fasilitas pemrosesan untuk pengomposan per kapita (dalam ton)
		20.3.	Persentase luas tanah kota yang dicakup oleh sistem pemetaan pemasok makanan daring
	Kesejahteraan Masyarakat	SNI 5. Ekonomi (5.2-5.4)	
		5.2.	Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk
		5.3.	Persentase tenaga kerja yang bekerja di Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
		5.4.	Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian dan pengembangan
	Ekosistem Transaksi Keuangan	SNI 9. Keuangan (9.1-9.2)	
		9.1.	Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri
		9.2.	Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik
Smart Living	Harmonisasi Tata Ruang	SNI 12. Perumahan (12.1-12.2)	
		12.1.	Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar
		12.2.	Persentase rumah tangga dengan pengukur air pintar
	Kesehatan	SNI 11. Kesehatan (11.1-11.3)	
		11.1.	Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan
		11.2.	Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk
		11.3.	Persentase populasi kota yang memiliki akses ke sistem peringatan publik langsung (real-time) untuk saran kualitas udara dan air
	Transportasi	SNI 19. Transportasi (19.1-19.14)	
		19.1.	Persentase jalan umum dan jalan berbayar yang dicakup oleh peringatan dan informasi lalu lintas daring langsung (real-time)
		19.2.	Jumlah pengguna transportasi ekonomi berbagi per 100.000 penduduk
		19.3.	Persentase kendaraan yang terdaftar di kota yang merupakan kendaraan rendah emisi
		19.4.	Jumlah sepeda yang tersedia melalui layanan berbagi sepeda yang disediakan oleh kota per 100.000 penduduk

Dimensi	Subdimensi	Indikator SNI ISO 37122:2019	
		19.5.	Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (real-time) yang dapat diakses publik
		19.6.	Persentase layanan transportasi umum kota yang dicakup oleh sistem pembayaran terpadu
		19.7.	Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan sistem pembayaran elektronik
		19.8.	Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan sistem ketersediaan parkir langsung (real-time)
		19.9.	Persentase lampu lalu lintas yang cerdas
		19.10.	Area kota dipetakan oleh peta jalan interaktif langsung (real-time) sebagai persentase dari total luas kota
		19.11.	Persentase kendaraan yang terdaftar di kota yang merupakan kendaraan otonom (autonomous)
		19.12.	Persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau dikelola untuk komuter
		19.13.	Persentase jalan yang sesuai dengan sistem mengemudi otonom
		19.14.	Persentase armada bus kota yang digerakkan dengan motor
Smart Society	Interaksi Masyarakat	SNI 13. Populasi dan Kondisi Sosial (13.1-13.4)	
		13.1.	Persentase bangunan publik yang dapat diakses oleh orang-orang dengan kebutuhan khusus
		13.2.	Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan alat bantu mobilitas, perangkat, dan teknologi pendampingan bagi warga negara dengan kebutuhan khusus
		13.3.	Persentase penyeberangan pejalan kaki yang ditandai dilengkapi dengan sinyal pejalan kaki yang dapat diakses
		13.4.	Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital
	Ekosistem Belajar/Pendidikan	SNI 6. Pendidikan (6.1-6.3)	
		6.1.	Persentase populasi kota dengan kecakapan profesional di lebih dari satu bahasa
		6.2.	Jumlah komputer, laptop, tablet atau perangkat pembelajaran digital lainnya yang tersedia per 1.000 siswa
		6.3.	Jumlah tingkat pendidikan tinggi sains, teknologi, teknik dan matematika (STEM) per 100.000 penduduk
		SNI 17. Olahraga dan Budaya (17.3-17.4)	
		17.3.	Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk
		17.4.	Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif
	Keamanan Masyarakat	SNI 15. Keamanan (15.1)	
		15.1.	Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital

Dimensi	Subdimensi	Indikator SNI ISO 37122:2019	
Smart Environment	Proteksi Lingkungan	SNI 22. Air Limbah (22.1-22.5)	
		22.1.	Persentase air limbah olahan yang digunakan kembali
		22.2.	Persentase biosolids yang digunakan kembali (massa bahan kering)
		22.3.	Energi yang berasal dari air limbah sebagai persentase dari total konsumsi energi kota
		22.4.	Persentase jumlah total air limbah di perkotaan yang digunakan untuk menghasilkan energi
		22.5.	Persentase jaringan pipa air limbah yang dimonitor oleh system sensor data tracking real-time
		SNI 23. Air (23.1-23.4)	
		23.1.	Persentase air minum yang dilacak oleh stasiun pemantauan kualitas air langsung (real-time)
		23.2.	Jumlah stasiun pemantauan kualitas air lingkungan langsung (real-time) per 100.000 populasi
		23.3.	Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh air cerdas sistem
		23.4.	Persentase bangunan di perkotaan dengan meteran air cerdas
	Pengelolaan Sampah dan Limbah	SNI 8. Lingkungan dan Perubahan Iklim (8.1-8.3)	
		8.1.	Persentase bangunan yang dibangun atau diperbaharui dalam 5 tahun terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip bangunan hijau
		8.2.	Jumlah stasiun pemantauan kualitas udara jarak jauh secara langsung (real-time) per kilometer persegi (km ²)
		8.3.	Persentase bangunan umum yang dilengkapi untuk memantau kualitas udara dalam ruangan
		SNI 16. Limbah Padat (16.1-16.6)	
		16.1.	Persentase pusat pembuangan limbah (kontainer) yang dilengkapi dengan telemetering
		16.2.	Persentase populasi kota yang memiliki pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan pemantauan individu terhadap jumlah sampah rumah tangga
		16.3.	Persentase jumlah total sampah di kota yang digunakan untuk menghasilkan energi
		16.4.	Persentase dari jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota
		16.5.	Persentase tempat sampah umum yang merupakan tempat sampah umum yang difungsikan dengan sensor
		16.6.	Persentase limbah listrik dan elektronik kota yang didaur ulang
	Tata Kelola Energi	SNI 7. Energi (7.1-7.10)	
		7.1.	Persentase energi listrik dan energi termal yang dihasilkan dari pengolahan air limbah, limbah padat dan pengolahan limbah cair lainnya serta sumber daya limbah panas lainnya, sebagai bagian dari total bauran energi kota untuk tahun Tertentu

Dimensi	Subdimensi	Indikator SNI ISO 37122:2019	
		7.2.	Energi listrik dan termal (GJ) yang dihasilkan dari pengolahan air limbah per kapita per tahun
		7.3.	Energi listrik dan panas (GJ) dihasilkan dari limbah padat atau pengolahan limbah cair per kapita per tahun
		7.4.	Persentase listrik kota yang diproduksi menggunakan sistem produksi listrik desentralisasi
		7.5.	Kapasitas penyimpanan jaringan energi kota per total konsumsi energi kota
		7.6.	Persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/lampu
		7.7.	Persentase penerangan jalan yang telah dipugar dan yang baru dipasang
		7.8.	Persentase bangunan umum yang membutuhkan renovasi/perbaikan
		7.9.	Persentase bangunan di kota dengan pengukur energi cerdas
		7.10	Jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik per kendaraan listrik terdaftar

(Sumber: Kemkominfo, 2021)



Gambar 1.5 Dimensi dan Subdimensi Smart City

(Sumber: Kemkominfo, 2021)

Pada Gambar 1.5 menyajikan Dimensi dan Subdimensi Smart City memperlihatkan keterkaitan antara indikator sasaran dari subdimensi Smart City dengan indikator SNI ISO 37122:2019.

2. Arah Pembangunan *Smart City* Daerah

Pembangunan *Smart City* telah menjadi fokus utama bagi berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kabupaten Sampang, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan efisiensi pelayanan publik. Dalam upaya perencanaan ini, pedoman yang diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi dasar yang sangat penting untuk mencapai sasaran tersebut.

Pencapaian beberapa tujuan utama menjadi kunci dalam perencanaan *Smart City*. Pertama, integrasi teknologi informasi secara menyeluruh harus dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan akses layanan publik. Kedua, pemanfaatan data dan analisis cerdas harus menjadi landasan untuk pengambilan keputusan yang lebih optimal. Ketiga, perlu ditingkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui platform digital dalam proses pengambilan keputusan.

Pentingnya integrasi teknologi untuk mencapai konektivitas maksimal terlihat dalam upaya menghubungkan berbagai layanan, seperti transportasi, kesehatan, pendidikan, dan administrasi publik. Kabupaten Sampang harus mengadopsi sistem terintegrasi yang memungkinkan perangkat dan data berkomunikasi dengan efektif, sehingga dapat mengoptimalkan efisiensi dan meningkatkan respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Pengumpulan dan analisis kesiapan daerah menjadi fondasi utama dalam pembentukan *Smart City* yang efektif. Kabupaten Sampang harus membangun infrastruktur data yang kuat, melibatkan penggunaan sensor pintar dan sistem manajemen data yang canggih. Dengan cara ini, keputusan yang diambil dapat didasarkan pada informasi real-time, memastikan respons yang cepat terhadap perubahan lingkungan.

Partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Kabupaten Sampang perlu membangun platform digital yang memudahkan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, menyampaikan keluhan, dan berinteraksi dengan pemerintah setempat. Dengan pendekatan ini, *Smart City* tidak hanya akan menciptakan efisiensi administratif, tetapi juga memberdayakan masyarakat.

Bagian kedua ini akan membahas visi, misi, dan sasaran dan indikator utama sebagai dasar arah pembangunan *Smart City* di Kabupaten Sampang.

2.1 Visi, Misi, dan Sasaran *Smart City* Daerah

Dua subbab berikut akan menguraikan visi, misi, dan sasaran Smart City di Kabupaten Sampang.

2.1.1 Visi dan Misi *Smart City* Daerah

Visi dan Misi *Smart City* Kabupaten Sampang telah selaras dengan visi dan misi Kabupaten Sampang yang tercantum pada RPD 2025-2026 dan enam dimensi *Smart City* dari Kementerian Kominfo. Visi *Smart City* Kabupaten Sampang adalah:

“Sampang Cerdas, Harmonis, dan Berdaya Saing”

Visi tersebut selanjutnya diturunkan menjadi lima Misi Utama:

Misi 1	
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas dengan pemanfaatan teknologi informasi yang inovatif.
Misi 2	
	Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan yang inklusif dengan pendekatan teknologi berbasis digital.
Misi 3	
	Mewujudkan pembangunan yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan secara cerdas.
Misi 4	
	Mengembangkan citra positif dan identitas unik melalui strategi branding berbasis teknologi untuk menarik investasi dan pariwisata.
Misi 5	
	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan nyaman melalui pemanfaatan teknologi yang inovatif.

2.1.2 Sasaran *Smart City* Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Smart City Kabupaten Sampang pada sub-bab 2.1.1 selanjutnya disusunlah sasaran-sasaran yang telah dipetakan langsung ke dalam subdimensi-subdimensi dari enam dimensi *smart city*. Sasaran tersebut diperoleh berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pada kegiatan

Bimtek 1 tanggal 5-6 Juli 2023 melalui pengisian kertas kerja dan dilakukan revisi pada kegiatan Bimtek 2 tanggal 2-3 Agustus 2023 (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023a, 2023b, 2023c).

2.1.2.1 Sasaran Dimensi *Smart Governance*

Tabel 2.1 menguraikan dengan lengkap Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan *Smart City* di Kabupaten Sampang pada dimensi *Smart Governance*, dengan tiga sub-dimensi, yaitu Layanan Publik, Birokrasi, dan Perancangan Kebijakan.

Tabel 2.1 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Governance*

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
Smart Governance (G)	G.1 Layanan Publik	G.1.1 Meningkatnya kualitas layanan publik	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 10.2) 4. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 18.3) 5. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 6. PP No 96/2012 Tentang Pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. PP No 76/2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
		G.1.2 Meningkatnya kapasitas SDM Penyelenggara layanan	
		G.1.3 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang layanan publik	
		G.1.4 Menyediakan layanan publik berbasis digital yang optimal	
		G.1.5 Meningkatnya kualitas layanan pengaduan pelayanan publik	
	G.2 Birokrasi	G.2.1 Membuat prosedur birokrasi yang lebih sederhana	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. PermanPANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi 4. SE Menpan RB 20/2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negeri
		G.2.2 Membuat SOP bersama pada OPD yang memiliki pelayanan publik yang sama	

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
		G.2.3 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang perencanaan pembangunan	
		G.2.4 Menciptakan sistem data dan informasi terintegrasi lebih optimal.	
		G.2.5 Diterapkannya sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi untuk mendukung organisasi yang berbasis fungsional dengan mekanisme kerja yang flexible, changeable, dan moveable	
		G.2.6 Terciptanya budaya kerja Berakhlak	
	G.3 Perancangan Kebijakan	G.3.1 Melaksanakan perumusan kebijakan berdasarkan hasil kelitbangan dan inovasi	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 21.1) 4. PMDN 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 5. Permedagri 86 Tahun 2017 tentang 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
		G.3.2 Melaksanakan perumusan kebijakan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan	
		G.3.3 Mewujudkan konsistensi dan keterpaduan dalam perumusan kebijakan	
		G.3.4 Melaksanakan proses perumusan kebijakan dengan dukungan dan partisipasi masyarakat	
		G.3.5 Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan secara terus-menerus dan mengevaluasi dampaknya secara berkala.	

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
			Pemerintah Daerah

(Sumber: RPJMD 2019-2025 & RPJPD 2005-2025, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Saat ini masalah yang masih dihadapi oleh Kabupaten Sampang di subdimensi Layanan Publik adalah akses layanan publik yang belum merata, portal satu data belum menjadi pusat data di Kabupaten Sampang, dan belum adanya layanan publik yang terintegrasi dengan daerah lainnya. Layanan publik yang disediakan di Kabupaten Sampang, selain belum sepenuhnya terintegrasi, juga masih terdapat banyak pelayanan yang menggunakan sistem manual. Akses layanan informasi yang belum merata juga masih menjadi keluhan masyarakat, sehingga pemerintah daerah perlu untuk melakukan perluasan dengan menggunakan kanal-kanal informasi yang telah mereka miliki selama ini. Terkait dengan birokrasi, masalah yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sampang adalah data dan layanan administrasi dan kepegawaian yang masih belum transparan.

2.1.2.2 Sasaran Dimensi Smart Branding

Tabel 2.2 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi Smart Branding

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
Smart Branding (B)	B.1 Pariwisata	B.1.1 Menyediakan infrastruktur pariwisata yang memadai	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 14.1) 4. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 17b.1)
		B.1.2 Menyediakan jaringan transportasi penunjang pariwisata	
		B.1.3 Memasarkan pariwisata melalui pariwisata go digital	
		B.1.4 Melaksanakan penguatan kapasitas Kelompok Sadar Wisata dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	
		B.1.5 Membangun E-Tourism Exchange untuk menjembatani antara wisatawan dan stakeholder di bidang pariwisata (hotel, transportasi, tiket, pertunjukan, kuliner)	
	B.2 Daya Saing Bisnis	B.2.1 Membangun ekosistem investasi yang mudah dan efektif	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 13.4) 4. SNI ISO 37122:2019

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
		B.2.2 Menyediakan Pusat Pengembangan Inovasi Produk dan layanan konsultasi	(Indikator 19.5) 5. SDGs (Tujuan 8.2.1.(c))
		B.2.3 Menghasilkan SDM yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya	
		B.2.4 Melaksanakan pemasaran dan branding yang kolaboratif	
		B.2.5 Membangun kemitraan strategis	
		B.2.6 Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	
	B.3 Wajah (Tampilan) Kota	B.3.1 Melakukan penataan ruang kota baik	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025
		B.3.2 Menyediakan penerangan jalan dan <i>landmark</i> yang memadai dan kreatif	
		B.3.3 Mewujudkan kebersihan dan pengelolaan sampah	
		B.3.4 Menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai	
		B.3.5 Melaksanakan pemugaran dan pelestarian bangunan bersejarah	
		B.3.6 Menyediakan sistem transportasi yang terintegrasi	
		B.3.7 Mengatur Rambu Lalu Lintas dan Penataan Parkir yang Tertib	
		B.3.8 Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa	

(Sumber: RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

menguraikan masalah yang masih dihadapi di Kabupaten Sampang, sasaran yang ingin dicapai dan dasar pemikiran di dimensi *Smart Branding*. Dimensi ini memiliki tiga subdimensi: Pariwisata, Daya Saing Bisnis, dan Wajah (Tampilan) Kota.

Tabel 2.2 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Branding*

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
Smart Branding (B)	B.1 Pariwisata	B.1.1 Menyediakan infrastruktur pariwisata yang memadai	5. RPJMD 2019-2024 6. RPJPD 2005-2025 7. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 14.1) 8. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 17b.1)
		B.1.2 Menyediakan jaringan transportasi penunjang pariwisata	
		B.1.3 Memasarkan pariwisata melalui pariwisata go digital	
		B.1.4 Melaksanakan penguatan kapasitas Kelompok Sadar Wisata dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	
		B.1.5 Membangun E-Tourism Exchange untuk menjembatani antara wisatawan dan stakeholder di bidang pariwisata (hotel, transportasi, tiket, pertunjukan, kuliner)	
	B.2 Daya Saing Bisnis	B.2.1 Membangun ekosistem investasi yang mudah dan efektif	6. RPJMD 2019-2024 7. RPJPD 2005-2025 8. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 13.4) 9. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 19.5) 10. SDGs (Tujuan 8.2.1.(c))
		B.2.2 Menyediakan Pusat Pengembangan Inovasi Produk dan layanan konsultasi	
		B.2.3 Menghasilkan SDM yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya	
		B.2.4 Melaksanakan pemasaran dan branding yang kolaboratif	
		B.2.5 Membangun kemitraan	

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
		strategis	
		B.2.6 Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	
	B.3 Wajah (Tampilan) Kota	B.3.1 Melakukan penataan ruang kota baik	3. RPJMD 2019-2024 4. RPJPD 2005-2025
		B.3.2 Menyediakan penerangan jalan dan <i>landmark</i> yang memadai dan kreatif	
		B.3.3 Mewujudkan kebersihan dan pengelolaan sampah	
		B.3.4 Menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai	
		B.3.5 Melaksanakan pemugaran dan pelestarian bangunan bersejarah	
		B.3.6 Menyediakan sistem transportasi yang terintegrasi	
		B.3.7 Mengatur Rambu Lalu Lintas dan Penataan Parkir yang Tertib	
		B.3.8 Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa	

(Sumber: RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Di Subdimensi Pariwisata, kendala utama yang dihadapi adalah Kabupaten Sampang adalah tidak adanya potensi destinasi pariwisata alam dan kurangnya infrastruktur pendukung pariwisata, seperti ketersediaan hotel, akses jalan, dan kelangkaan alat transportasi. Sementara itu, pengembangan potensi pariwisata dan wajah kota juga belum dioptimalkan. Pemerintah daerah perlu menggali potensi wisata budaya dengan membuat program-program pariwisata budaya.

Di Subdimensi Daya Saing Bisnis, perluasan jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, dan akses jalan yang masih rusak menjadi persoalan, sehingga

kenyamanan berusaha dan program-program pemerintah yang terkait dengan fasilitasi investasi belum maksimal. Kabupaten Sampang harus bisa menawarkan keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh Kota Surabaya sehingga investor akan lebih memilih menanamkan modalnya di kota ini.

Pada Subdimensi Wajah (Tampilan) Kota, masalah yang masih dialami adalah persoalan PKL yang saat ini masih banyak yang berjualan di bahu jalan, meskipun beberapa sentra PKL sudah disediakan. Situasi ini tidak saja merusak perwajahan kota, tetapi juga keamanan bagi pejalan kaki karena jalur pedestrian digunakan juga untuk berjualan, sehingga pejalan kaki harus menggunakan jalan raya untuk berjalan. Kebijakan tegas harus diambil oleh pemerintah daerah terkait dengan PKL, sebagai bagian dari penataan wajah kota.

2.1.2.3 Sasaran Dimensi *Smart Economy*

Tabel **2.3** menguraikan secara detail masalah, sasaran, dan dasar pemikiran di dimensi Smart Economy. Permasalahan utama yang dihadapi di subdimensi Ekosistem Industri adalah pengembangan ekosistem Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk berkolaborasi antara Kabupaten Sampang dengan kabupaten lainnya yang belum maksimal.

Tabel 2.3 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Economy*

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
Smart Economy (E)	Ec.1 Ekosistem Industri	Ec.1.1 Memfasilitasi Lembaga Usaha untuk berbadan Hukum/Akta Hukum	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025
		Ec.1.2 Menyediakan fasilitas pelayanan bagi KUMKM secara online dan offline	
		Ec.1.3 Menyediakan saluran distribusi	
		Ec.1.4 Memfasilitasi Rantai dan kualitas pasokan serta pengembangan cluster industri	
		Ec.1.5 Meminimalisasi Biaya operasi	
	Ec.2 Kesejahteraan Masyarakat	Ec.2.1 Meningkatnya pendapatan masyarakat yang semakin merata	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SDGs (Tujuan 8.5.2)
		Ec.2.2 Meningkatnya investasi ekonomis masyarakat (masyarakat mampu menyisihkan pendapatan untuk investasi)	
		Ec.2.3 Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat secara layak	
		Ec.2.4 Menurunnya angka kemiskinan	
		Ec.2.5 Menurunnya jumlah pengangguran	
	Ec.3 Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec.3.1 Meningkatnya layanan transaksi berbasis teknologi digital (dimulai dari pelayanan yang diberikan instansi pemerintah)	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025
		Ec.3.2 Mengembangkan ekosistem transaksi keuangan digital secara luas	
		Ec.3.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap permodalan usaha ekonomi	

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
		Ec.3.4 Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	

(Sumber: RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Subdimensi Kesejahteraan Masyarakat menyoroti ketersediaan kesempatan kerja yang masih kurang, sehingga perlu disinergikan antara pengembangan UMKM dan IKM guna mendorong investasi dan terbukanya lapangan kerja baru.

Subdimensi Ekosistem Transaksi Keuangan, permasalahan yang masih dihadapi adalah penggunaan teknologi finansial yang masih minim, sehingga masyarakat perlu diberikan edukasi penggunaan transaksi digital secara aman dan nyaman.

2.1.2.4 Sasaran Dimensi *Smart Living*

Tabel 2.4 menyajikan Sasaran dan dasar pemikiran di tiap subdimensi di Smart Living. Masalah utama yang masih dihadapi memperbaiki kualitas udara dengan keberadaan RTH dan Taman Kota akan menanggulangi masalah ini.

Tabel 2.4 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Living*

Dimensi	SubDimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
Smart Living (L)	L.1 Harmonisasi Tata Ruang	L.1.1 Membangun perumahan di kawasan pemukiman bagi masyarakat yang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SDGs (Tujuan 7.2.1)
		L.1.2 Menyediakan sarana dan prasarana permukiman yang berkelanjutan	
		L.1.3 Membangun fasilitas wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.	
	L.2 Kesehatan	L.2.1 Menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 11.1) 4. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 11.3)
		L.2.2 Meningkatnya lingkungan yang bersih dan sehat	
		L.2.3 Menyediakan fasilitas pendidikan bagi masyarakat	
		L.2.4 Menyediakan fasilitas sosial dan budaya tempat berkumpul bagi masyarakat	

Dimensi	SubDimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
		L.2.5 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	
	L.3 Transportasi	L.3.1 Menyediakan Jaringan jalan yang cukup memadai bagi masyarakat untuk mengakses lokasi-lokasi penting ke pusat-pusat perdagangan, pertanian, destinasi wisata dan lokasi strategis lainnya	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 19.6) 4. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 19.11)
		L.3.2 Menyediakan moda transportasi umum bagi masyarakat di pedesaan untuk mengakses lahan-lahan produktif pertanian.	

(Sumber: RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Di subdimensi kesehatan, permasalahan yang muncul adalah belum meratanya ketersediaan Puskesmas dan Pustu di setiap desa sebagai akses ke sarana dan prasarana kesehatan. Terakhir, subdimensi Transportasi, masalah yang dihadapi adalah masih kurangnya kualitas jalan, dampaknya menurunnya jumlah transportasi publik yang menyebabkan mobilitas masyarakat menjadi terbatas.

2.1.2.5 Sasaran Dimensi *Smart Society*

Tabel 2.5 menyajikan sasaran yang ingin dicapai di tiga subdimensi Smart Society. Di subdimensi Interaksi Masyarakat, partisipasi aktif warga menjadi hal penting agar seluruh komunitas terlibat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan wilayah secara berkelanjutan, sehingga perlu membangun platform digital untuk mendukung warga dalam memberikan masukan dan usulan kebijakan.

Tabel 2.5 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Society*

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
Smart Society (S)	S.1 Interaksi Masyarakat	S.1.1 Tersedianya akses internet yang terhubung antar rumah tangga	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SDGs (Tujuan 9.c.1)
		S.1.2 Tersedianya akses internet bagi masyarakat umum	
		S.1.3 Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang teknologi dan manfaatnya	
	S.2 Ekosistem Belajar/ Pendidikan	S.2.1 Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025
		S.2.2 Mengembangkan program pendidikan berbasis teknologi	
		S.2.3 Meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat	
	S.3 Keamanan Masyarakat	S.3.1 Meningkatkan keamanan lingkungan dan pencegahan kejahatan	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 15.1)
		S.3.2 Mengurangi angka kecelakaan lalu lintas	
		S.3.3 Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	

(Sumber: RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Pada Subdimensi Ekosistem Belajar/Pendidikan, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, sekitar 50% sarana dan prasarana Pendidikan di Kabupaten Sampang mengalami kondisi yang rusak, sehingga perlu adanya percepatan perbaikan maupun pemenuhan ketersediaan 120 kepala sekolah yang sudah memasuki masa pensiun dan meninggal dunia.

Secara umum pada Subdimensi Keamanan Masyarakat, kabupaten Sampang relatif aman, dengan penerangan jalan dan rambu-rambu yang lengkap, namun kondisi jalan yang rusak masih berpotensi masyarakat mengalami kecelakaan lalu lintas, sehingga infrastruktur fisik jalan perlu diperbaiki.

2.1.2.6 Sasaran Dimensi *Smart Environment*

Tabel 2.6 menyajikan sasaran yang ingin dicapai dan Strategi yang dilakukan di masing-masing subdimensi dari dimensi Smart Environment. Pada subdimensi Proteksi Lingkungan, kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurangi emisi karbon dioksida untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan kualitas udara masih menjadi persoalan utama.

Tabel 2.6 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Environment*

Dimensi	SubDimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
Smart Environment (En)	En.1 Proteksi Lingkungan	En.1.1 Mengurangi emisi karbon dioksida	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SDGs (Tujuan 13.2.1.(b)) 4. SDGs (Tujuan 7.2.1) 5. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 8.2) 6. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 16.6)
		En.1.2 Melakukan konservasi Sumber Daya Alam	
		En.1.3 Mengendalikan Pencemaran Lingkungan	
	En.2 Pengelolaan Sampah dan Limbah	En.2.1 Mengelola Sampah Berbasis Teknologi	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 16.4) 4. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 16.1) 5. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 16.6)
		En.2.2 Mereduksi Penggunaan Plastik	
		En.2.3 Meningkatkan Pengelolaan Limbah B3	
	En.3 Tata Kelola Energi	En.3.1 Meningkatkan Penggunaan Energi Terbarukan	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 7.10) 4. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 7.5) 5. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 12.1) 6. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 19.5)
		En.3.2 Meningkatkan Efisiensi Energi	

(Sumber: RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Pada subdimensi Pengelolaan Sampah dan Limbah, limbah padat dan cair (B3) yang belum diolah dengan baik dan juga sampah plastik masih menjadi isu utama. Pemerintah daerah belum menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi untuk optimalisasi daur ulang sampah.

Pada subdimensi Tata Kelola Energi, secara umum masyarakat dan pemerintah daerah masih menggunakan sumber daya energi tidak terbarukan seperti kompor gas, mobil dan motor berbahan bakar bensin dan solar sebagai permasalahan, karena berakibat kepada menurunnya kualitas udara, sehingga pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti energi surya dan angin untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca perlu dijadikan salah satu program Smart City daerah.

2.2 Indikator Utama Smart City Daerah

Bagian ini menganalisis indikator-indikator utama dan referensi indikator pada enam dimensi *Smart City* mencakup *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*. Referensi indikator mengacu kepada RPJMD Kabupaten Sampang 2019-2024 (RPJMD Kab. Sampang, 2022), Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 317122:2019 tentang Perkotaan dan masyarakat berkelanjutan – Indikator untuk kota cerdas (Kemkominfo, 2021b), dan Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2023 (Bappenas, 2019).

2.2.1 Indikator Utama Dimensi Smart Governance

Dimensi *Smart Governance* merupakan dimensi pertama sebagai landasan dari dimensi-dimensi lain. Tabel 2.7 menjelaskan indikator-indikator utama dari tiga subdimensi Layanan Publik, Birokrasi, dan Perancangan Kebijakan.

Tabel 2.7 Indikator utama sasaran Dimensi Smart Governance

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
			TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
Smart Governance (G)	G.1 Layanan Publik	G.1.1 Meningkatnya kualitas layanan publik		10.1. Jumlah layanan publik yang dapat diakses secara online
		G.1.2 Meningkatnya kapasitas SDM Penyelenggara layanan	Kesesuaian penempatan pegawai melalui evaluasi pengembangan kemampuan aparatur	10.2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik
		G.1.3 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang layanan publik		18.3. Jumlah fasilitas publik yang terintegrasi dengan teknologi cerdas
		G.1.4 Menyediakan layanan publik		18.3. Jumlah fasilitas publik yang terintegrasi dengan

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
			TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
		berbasis digital yang optimal		teknologi cerdas
		G.1.5 Meningkatkan kualitas layanan pengaduan pelayanan publik	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	10.2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik
	G.2 Birokrasi	G.2.1 Membuat prosedur birokrasi yang lebih sederhana	Tingkat penggunaan sistem informasi terintegrasi oleh instansi pemerintah	10.2. Persentase layanan yang dapat diakses dan dipenuhi secara daring
		G.2.2 Membuat SOP bersama pada OPD yang memiliki pelayanan publik yang sama	Tingkat partisipasi pegawai dalam pelatihan dan pengembangan	
		G.2.3 Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang perencanaan pembangunan	Tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	8.3. Persentase area yang aksesibilitas terhadap konektivitas Internet kota terpenuhi
		G.2.4 Menciptakan sistem data dan informasi terintegrasi lebih optimal	Persentase desa dengan tata kelola pemerintahan desa yang baik	10.2. Persentase layanan yang dapat diakses dan dipenuhi secara daring
		G.2.5 Diterapkannya sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi untuk mendukung organisasi yang berbasis fungsional dengan mekanisme kerja yang <i>flexible, changeable, moveable</i>	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	10.2. Persentase layanan yang dapat diakses dan dipenuhi secara daring
	G.3 Perancangan Kebijakan	G.3.1 Melaksanakan perumusan kebijakan berdasarkan hasil kelitbangan dan inovasi		
		G.3.2 Melaksanakan perumusan kebijakan dengan prinsip keadilan dan		21.1. Jumlah rancangan kebijakan yang melibatkan partisipasi publik dalam proses perumusan

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
			TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
		kesetaraan		
		G.3.3 Mewujudkan konsistensi dan keterpaduan dalam perumusan kebijakan	Persentase kepuasan stakeholder terhadap tingkat kolaborasi di Kabupaten Sampang	21.1. Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan berbasis teknologi dan data
		G.3.4 Melaksanakan proses perumusan kebijakan dengan dukungan dan partisipasi masyarakat	Jumlah proyek kolaboratif antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil yang berhasil dilaksanakan dalam setahun	21.1. Jumlah rancangan kebijakan yang melibatkan partisipasi publik dalam proses perumusan
		G.3.5 Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan secara terus-menerus dan mengevaluasi dampaknya secara berkala.		21.1. Jumlah kebijakan yang direvisi berdasarkan hasil evaluasi dan umpan balik

(Sumber: FGD Bimtek 1 dan Bimtek 2, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Pada Subdimensi Layanan Publik, indikator awal, yakni meningkatnya penerapan teknologi *E-Government* dengan fokus pada jumlah layanan publik yang tersedia secara *online*, mengacu pada standar SNI ISO 37122:2019 (Indikator 10.1). Ini mencerminkan sejauh mana wilayah tersebut siap dalam menerapkan teknologi untuk meningkatkan akses dan mutu layanan publik. Selanjutnya, peningkatan mutu pelayanan publik dinilai melalui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik (Indikator 10.2). Ini menggambarkan perhatian terhadap persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Dalam konteks Subdimensi Birokrasi, upaya penguatan dalam tata kelola pemerintahan daerah tercermin dalam tingkat penggunaan sistem informasi yang terpadu oleh instansi pemerintah. Ini mencerminkan sampai sejauh mana penerapan teknologi informasi dalam mengelola birokrasi.

Peningkatan Sumber Daya Manusia dinilai melalui tingkat partisipasi pegawai dalam pelatihan dan pengembangan. Indikator ini menyoroti investasi dalam

mengembangkan sumber daya manusia yang berkontribusi pada peningkatan mutu layanan publik.

Indikator tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik mengukur sejauh mana penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam tindakan pemerintahan.

Pada Subdimensi Perancangan Kebijakan, proses pengembangan kebijakan dinilai melalui jumlah rencana kebijakan yang melibatkan partisipasi publik dalam tahap perumusan (Indikator 21.1). Ini mencerminkan keterlibatan pemerintah dalam merespons aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan.

Penerapan kebijakan dinilai melalui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang berbasis teknologi dan data (Indikator 21.1), mencerminkan sampai sejauh mana kebijakan dijalankan dengan efektivitas dan dukungan teknologi.

Evaluasi dan revisi dari kebijakan dinilai dengan jumlah kebijakan yang mengalami revisi berdasarkan hasil evaluasi dan masukan (Indikator 21.1). Ini mencerminkan siklus terus-menerus dalam mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan.

2.2.2 Indikator Utama Dimensi Smart Branding

Dimensi *Smart Branding* membentuk citra yang positif, menyampaikan prinsip-nilai, dan menawarkan keunikan di dalam benak konsumen atau masyarakat. Tabel 2.8 menjelaskan indikator indikator utama pada subdimensi Pariwisata, Daya Saing Bisnis, dan Wajah (Tampilan) Kota.

Tabel 2.8 Indikator utama sasaran Dimensi Smart Branding

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
			TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
Smart Branding (B)	B.1 Pariwisata	B.1.1 Menyediakan infrastruktur pariwisata yang memadai	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata	14.1. Jumlah kunjungan wisatawan ke lokasi wisata alam di Kabupaten Sampang
		B.1.2 Menyediakan jaringan transportasi penunjang pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Sampang	17b.1. Tingkat kepuasan wisatawan terhadap pengalaman ekowisata di Kabupaten Sampang

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
			TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
		B.1.3 Memasarkan pariwisata melalui pariwisata go digital	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisata	14.1. Persentase layanan pariwisata publik yang dapat dibeli secara daring
		B.1.4 Melaksanakan penguatan kapasitas Kelompok Sadar Wisata dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	Penciptaan lapangan kerja pada sektor pariwisata Kabupaten Sampang	
		B.1.5 Membangun E-Tourism Exchange untuk menjembatani antara wisatawan dan stakeholder di bidang pariwisata (hotel, transportasi, tiket, pertunjukan, kuliner)	Jumlah Destinasi Pariwisata dan Kontribusi Pariwisata terhadap PAD	17b.2. Jumlah produk wisata budaya dan seni yang ditawarkan di Kabupaten Sampang
	B.2 Daya Saing Bisnis	B.2.1 Membangun ekosistem investasi yang mudah dan efektif	Persentase kenaikan realisasi investasi	19.5. Tingkat ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk bisnis di Kabupaten Sampang
		B.2.2 Menyediakan Pusat Pengembangan Inovasi Produk dan layanan konsultasi	Persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif Indeks Desa Membangun (IDM)	
		B.2.3 Menghasilkan SDM yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya	Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan usaha mikro	
		B.2.4 Melaksanakan pemasaran dan branding yang kolaboratif	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	
		B.2.5 Membangun kemitraan strategis	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
			TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
		B.2.6 Meningkatkan pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	Penciptaan lapangan kerja pada sektor pariwisata Kabupaten Sampang	
	B.3 Wajah (Tampilan) Kota	B.3.1 Melakukan penataan ruang kota baik	Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang sehingga terpenuhinya aksesibilitas dan jaringan infrastruktur yang baik	13.4. Jumlah investasi baru yang masuk ke Kabupaten Sampang dalam periode tertentu
		B.3.2 Menyediakan penerangan jalan dan <i>landmark</i> yang memadai dan kreatif	Jumlah area ruang publik yang telah direvitalisasi dalam periode tertentu	
		B.3.3 Mewujudkan kebersihan dan pengelolaan sampah	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemeliharaan dan promosi warisan budaya	
		B.3.4 Menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai		
		B.3.5 Melaksanakan pemugaran dan pelestarian bangunan bersejarah	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemeliharaan dan promosi warisan budaya	
		B.3.6 Menyediakan sistem transportasi yang terintegrasi	Kinerja pemenuhan sarana prasarana perhubungan darat maupun laut di Kabupaten Sampang	
		B.3.7 Mengatur Rambu Lalu Lintas dan Penataan Parkir yang Tertib	Indeks kepuasan terhadap pelayanan publik pada sektor transportasi	

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
			TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
		B.3.8 Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	

(Sumber: FGD Bimtek 1 dan Bimtek 2, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Pada Subdimensi Pariwisata, indikator pertama berkaitan dengan peningkatan wisata alam di Kabupaten Sampang. Jumlah kunjungan wisatawan ke lokasi wisata alam diukur dengan menggunakan standar SNI ISO 37122:2019 (Indikator 14.1). Selain itu, penting juga untuk mengembangkan ekowisata dengan memperhatikan tingkat kepuasan wisatawan terhadap pengalaman ekowisata (Indikator 17b.1) dan diversifikasi pariwisata dengan menawarkan produk wisata budaya dan seni (Indikator 17b.2).

Dalam konteks Subdimensi Daya Saing Bisnis, indikator ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk bisnis (Indikator 19.5) menjadi perhatian dalam meningkatkan daya saing bisnis di Kabupaten Sampang. Kinerja ini dapat diukur dengan acuan dari SNI ISO 37122:2019.

Pentingnya dukungan pada UKM dan startup tercermin dalam jumlah UKM dan startup yang berhasil berkembang berdasarkan indikator SDGs Tujuan 8.3.1.(c). Hal ini berarti Kabupaten Sampang harus fokus pada kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekosistem UKM dan startup. Jumlah investasi baru yang masuk ke Kabupaten Sampang (Indikator 13.4) menjadi penanda penting dalam mengukur tingkat daya tarik investasi daerah. Standar SNI ISO 37122:2019 menjadi referensi dalam mengukur pencapaian ini.

Pada Subdimensi Wajah (Tampilan) Kota, ruang publik yang direvitalisasi dan pemeliharaan warisan budaya menjadi indikator dalam menciptakan wajah kota yang menarik. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemeliharaan dan promosi warisan budaya serta tingkat kesesuaian implementasi tata kota dengan perencanaan perlu diperhatikan.

2.2.3 Indikator Utama Dimensi Smart Economy

Dalam upaya membangun konsep Kota Cerdas di Kabupaten Sampang, Tabel 2.9 merupakan indikator inti yang terdapat dalam Dimensi Smart Economy mengilustrasikan sejumlah hal penting yang harus dipertimbangkan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 2.9 Indikator utama sasaran Dimensi Smart Economy

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
			TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
Smart Economy (E)	Ec.1 Ekosistem Industri	Ec.1.1 Memfasilitasi Lembaga Usaha untuk berbadan Hukum/Akta Hukum	Pertumbuhan jumlah koperasi dan UMKM yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat	5.2. Pertumbuhan terhadap bisnis-bisnis baru
		Ec.1.2 Menyediakan fasilitas pelayanan bagi KUMKM secara online dan offline	Pertumbuhan jumlah koperasi dan UMKM yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat	
		Ec.1.3 Menyediakan saluran distribusi	Jumlah produk kreatif lokal yang berhasil dikembangkan dan dipasarkan secara luas	
		Ec.1.4 Memfasilitasi rantai dan kualitas pasokan serta pengembangan cluster industri	Kontribusi sektor ekonomi baru terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Sampang	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang diperoleh dari ekonomi berbagi
		Ec.1.5 Meminimalisasi Biaya operasi	Jumlah produk kreatif lokal yang berhasil dikembangkan dan dipasarkan secara luas	
	Ec.2 Kesejahteraan Masyarakat	Ec.2.1 Meningkatnya pendapatan masyarakat yang semakin merata	Tingkat kemiskinan dan indeks gini (pengukuran ketimpangan pendapatan)	
		Ec.2.2 Meningkatnya investasi ekonomis masyarakat (masyarakat mampu menyisihkan pendapatan untuk investasi)	Persentase kenaikan realisasi investasi	
		Ec.2.3 Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat secara layak	Tingkat kemiskinan dan indeks gini (pengukuran ketimpangan pendapatan)	11.1. Tingkat cakupan pelayanan kesehatan dan indikator kesehatan masyarakat

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
			TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
		Ec.2.4 Menurunnya angka kemiskinan	Tingkat kemiskinan dan indeks gini (pengukuran ketimpangan pendapatan)	
		Ec.2.5 Menurunnya jumlah pengangguran	Jumlah pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja	
	Ec.3 Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec.3.1 Meningkatnya layanan transaksi berbasis teknologi digital (dimulai dari pelayanan yang diberikan instansi pemerintah)	Jumlah masyarakat yang memiliki akses ke layanan keuangan digital	
		Ec.3.2 Mengembangkan ekosistem transaksi keuangan digital secara luas	Tingkat literasi keuangan masyarakat berdasarkan survei atau evaluasi	
		Ec.3.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap permodalan usaha ekonomi	Indeks keuangan inklusif dan stabilitas sistem keuangan	
		Ec.3.4 Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Indeks keuangan inklusif dan stabilitas sistem keuangan	

(Sumber: FGD Bimtek 1 dan Bimtek 2, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Dalam Subdimensi Ekosistem Industri indikator pengembangan industri kreatif diukur dengan menggunakan jumlah produk kreatif lokal yang berhasil dihasilkan dan dipasarkan secara luas. Fokus pada pengembangan produk kreatif lokal mencerminkan usaha untuk merangsang inovasi dan menciptakan peluang ekonomi baru. Indikator kontribusi sektor ekonomi baru terhadap PDRB Kabupaten Sampang pada Diversifikasi Sumber Ekonomi mencerminkan urgensi untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru sebagai cara

mengurangi ketergantungan pada sektor yang sudah ada. Hal ini akan membantu mencapai ekonomi yang lebih tangguh dan beragam. Perkembangan jumlah koperasi dan UMKM yang turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penguatan Koperasi dan UMKM oleh pemerintah daerah menunjukkan perhatian terhadap peran penting sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Subdimensi Kesejahteraan Masyarakat, indikator ketersediaan pekerjaan yang layak dievaluasi melalui tingkat pengangguran terbuka dan tingkat partisipasi angkatan kerja (SDGs - Tujuan 8.5.2). Peningkatan partisipasi angkatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran berkontribusi pada penciptaan peluang kerja yang lebih baik. Indikator tingkat kemiskinan dan indeks gini mencerminkan fokus pada usaha penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan pendapatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pada Subdimensi Ekosistem Transaksi Keuangan, upaya inklusi keuangan dan digitalisasi diukur melalui jumlah masyarakat yang memiliki akses ke layanan keuangan digital dan yang memiliki signifikansi dalam meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi keuangan untuk semua lapisan masyarakat. Tingkat literasi keuangan masyarakat berdasarkan survei atau evaluasi mengindikasikan pentingnya pendidikan dan pemahaman keuangan yang memadai untuk mendukung partisipasi yang lebih aktif dalam sektor ekonomi. Pembangunan Sistem Keuangan dinilai melalui indeks keuangan inklusif dan stabilitas sistem keuangan menunjukkan tujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang stabil dan inklusif.

2.2.4 Indikator Utama Dimensi Smart Living

Smart Living merupakan salah satu dimensi sentral dalam pengembangan kota cerdas yang memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas hidup dan kebahagiaan penduduknya. Di wilayah Kabupaten Sampang, pada

Tabel 2.10 terdapat sejumlah indikator-indikator utama dalam upaya menuju gaya hidup cerdas yang berkelanjutan.

Tabel 2.10 Indikator utama sasaran Dimensi Smart Living

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
			TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
Smart Living	L.1 Harmonisasi	L.1.1 Membangun	Persentase Warga yang terkena	

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
			TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
(L)	Tata Ruang	perumahan di kawasan pemukiman bagi masyarakat yang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang	relokasi untuk memfasilitasi penyediaan rumah layak huni	
		L.1.2 Menyediakan sarana dan prasarana permukiman yang berkelanjutan	Persentase perumahan yang telah dilengkapi PSU terstandardisasi	7.10. Penambahan infrastruktur ramah lingkungan, seperti tempat pengisian ulang kendaraan listrik
		L.1.3 Membangun fasilitas wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah	Jumlah area taman kota dan ruang terbuka hijau meningkat	
	L.2 Kesehatan	L.2.1 Menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat	Jumlah fasilitas kesehatan yang baru dibangun sesuai dengan target perencanaan Penambahan tenaga medis dan paramedis mencapai angka yang telah ditetapkan	11.1. Tingkat penggunaan teknologi kesehatan dalam pemberian layanan kesehatan meningkat
		L.2.2 Meningkatnya lingkungan yang bersih dan sehat	Peningkatan persentase kawasan perumahan maupun permukiman sehat yang diiringi dengan penurunan kawasan kumuh	11.3. Indeks Kualitas Udara (<i>Air Quality Index</i>) memenuhi standar kualitas udara yang ditetapkan
		L.2.3 Menyediakan fasilitas pendidikan bagi masyarakat	Persentase perumahan yang telah dilengkapi PSU terstandardisasi	
		L.2.4 Menyediakan fasilitas sosial dan budaya tempat berkumpul bagi masyarakat	Persentase perumahan yang telah dilengkapi PSU terstandardisasi	
		L.2.5 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Persentase bangunan permukiman yang memenuhi sertifikat layak huni	11.3. Indeks Kualitas Udara (<i>Air Quality Index</i>) memenuhi standar kualitas udara yang ditetapkan
	L.3 Transportasi	L.3.1 Menyediakan Jaringan jalan yang cukup memadai	Panjang total jalan yang ditingkatkan mencapai target	19.11. Implementasi teknologi pintar yang berhasil mengurangi waktu perjalanan dan

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
			TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
		bagi masyarakat untuk mengakses lokasi-lokasi penting ke pusat-pusat perdagangan, pertanian, destinasi wisata dan lokasi strategis lainnya	rencana	kepadatan lalu lintas
		L.3.2 Menyediakan moda transportasi umum bagi masyarakat di pedesaan untuk mengakses lahan-lahan produktif pertanian	Persentase kawasan atau area yang telah dilengkapi PSU terstandardisasi	19.6. Penambahan jumlah unit transportasi publik sesuai dengan kebutuhan

(Sumber: FGD Bimtek 1 dan Bimtek 2, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Pada Subdimensi Harmoni Tata Ruang, pencapaian standar kualitas udara sesuai dengan SNI ISO 37122:2019 (Indikator 11.3) menjadi prioritas utama. Hal ini memiliki keterkaitan langsung dengan kesejahteraan dan kenyamanan penduduk. Selain itu, peningkatan luas area taman dan ruang terbuka hijau juga berperan dalam memperbaiki kualitas udara sekaligus memberikan tempat rekreasi untuk warga.

Pada Subdimensi Kesehatan, kesejahteraan masyarakat menjadi poin penting dalam konsep *Smart Living*. Meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan, termasuk pembangunan fasilitas baru dan peningkatan jumlah tenaga medis erat kaitannya dengan upaya mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs - Tujuan 3). Penerapan teknologi kesehatan (SNI ISO 37122:2019 - Indikator 11.1) memberikan kontribusi dalam meningkatkan efisiensi layanan dan kualitas perawatan.

Pada Subdimensi Transportasi, peningkatan konektivitas menjadi hal yang krusial. Ekspansi jaringan jalan sesuai rencana mendukung mobilitas yang lebih baik. Tambahan unit transportasi publik (SNI ISO 37122:2019 - Indikator 19.6) serta implementasi teknologi cerdas untuk mengelola lalu lintas (SNI ISO 37122:2019 - Indikator 19.11) berkontribusi pada peningkatan efisiensi transportasi dan keselamatan lingkungan.

2.2.5 Indikator Utama Dimensi *Smart Society*

Dalam Tabel 2.11 Indikator utama sasaran Dimensi *Smart Society* di kabupaten Sampang, terlihat bahwa ada beberapa indikator utama yang menjadi kunci dalam mencapai tujuan perkembangan kota cerdas.

Tabel 2.11 Indikator utama sasaran Dimensi *Smart Society*

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
			TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
Smart Society (S)	S.1 Interaksi Masyarakat	S.1.1 Tersedianya akses internet yang terhubung antar rumah tangga	Persentase warga yang berpartisipasi dalam platform digital partisipasi publik	
		S.1.2 Tersedianya akses internet bagi masyarakat umum		18.3. Jumlah lokasi di Kabupaten Sampang yang terjangkau akses internet gratis
		S.1.3 Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang teknologi dan manfaatnya		13.4. Persentase masyarakat yang memiliki literasi teknologi sehingga manfaatnya meningkat dalam survei kesadaran teknologi
	S.2 Ekosistem Belajar/ Pendidikan	S.2.1 Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah	Persentase siswa yang lulus ujian nasional di Kabupaten Sampang	
			Rasio siswa per komputer di sekolah-sekolah	
		S.2.2 Mengembangkan program pendidikan berbasis teknologi	Jumlah program pendidikan berbasis teknologi yang berhasil diimplementasikan dalam setahun	
			Persentase guru yang telah mengikuti pelatihan teknologi dalam pengajaran	
		S.2.3 Meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat	Jumlah sekolah di daerah terpencil yang berhasil didirikan dalam setahun	
			Persentase siswa penerima beasiswa dari keluarga kurang mampu di	

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
			TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
			Kabupaten Sampang	
	S.3 Keamanan Masyarakat	S.3.1 Meningkatkan keamanan lingkungan dan pencegahan kejahatan	Jumlah inisiatif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan yang terlaksana dalam setahun	15.1. Persentase peningkatan kehadiran polisi dan pemantauan CCTV di titik-titik strategis
		S.3.2 Mengurangi angka kecelakaan lalu lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Sampang	
			Jumlah kampanye keselamatan berlalu lintas yang diadakan dalam setahun	
		S.3.3 Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	Persentase peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	
			Jumlah peralatan tanggap darurat yang berhasil diadakan dalam setahun	

(Sumber: FGD Bimtek 1 dan Bimtek 2, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Pada Subdimensi Interaksi Masyarakat, tujuan utamanya adalah meningkatkan partisipasi aktif penduduk dalam pengambilan keputusan publik. Indikator pencapaian meliputi persentase penduduk yang terlibat dalam platform partisipasi publik digital, berdasarkan pada SDGs (Tujuan 9.c.1), serta jumlah pertemuan antara pemerintah dan warga yang berhasil diadakan dalam setahun. Tujuan berikutnya adalah mendorong kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Indikator capaian melibatkan jumlah proyek kolaboratif yang berhasil dilaksanakan dalam setahun dan persentase kepuasan stakeholder terhadap tingkat kolaborasi. Pada Subdimensi ini untuk meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang

Teknologi dan Manfaatnya, indikator pencapaiannya adalah termasuk persentase masyarakat dengan literasi teknologi serta jumlah lokasi di Kabupaten Sampang yang memiliki akses internet gratis. Indikator ini didasarkan pada standar SNI ISO 37122:2019 (Indikator 13.4) dan SNI ISO 37122:2019 (Indikator 18.3).

Dalam Subdimensi Ekosistem Belajar/Pendidikan, fokusnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Indikator pencapaian mencakup persentase siswa yang berhasil lulus ujian nasional serta rasio siswa per komputer di sekolah-sekolah.

Pada Subdimensi Keamanan Masyarakat, tujuan pertama adalah meningkatkan keamanan lingkungan dan mencegah kejahatan. Indikator mencakup persentase peningkatan kehadiran polisi dan pemantauan CCTV di lokasi strategis (SNI ISO 37122:2019 Indikator 15.1), serta jumlah inisiatif masyarakat yang berhasil dijalankan untuk menjaga keamanan lingkungan dalam setahun.

2.2.6 Indikator Utama Dimensi Smart Environment

Dalam konteks Dimensi Smart Environment di Kabupaten Sampang, sejumlah indikator kunci telah ditemukan dari

Tabel 2.12. Indikator-indikator ini ditentukan guna mencapai target lingkungan yang cerdas.

Tabel 2.12 Indikator utama sasaran Dimensi Smart Environment

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
			TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
Smart Environment (En)	En.1 Proteksi Lingkungan	En.1.1 Mengurangi emisi karbon dioksida	Jumlah emisi karbon dioksida berkurang sebesar 20% pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2020	SDGs (Tujuan 13.2.1.(b))
			Persentase penggunaan energi terbarukan mencapai 30% dari total kebutuhan energi Kabupaten Sampang pada tahun 2025	SDGs (Tujuan 7.2.1)
		En.1.2 Melakukan Konservasi Sumber Daya Alam	Luas kawasan hutan dan lahan konservasi bertambah 5% pada tahun 2025 dibandingkan	

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
			TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
			dengan tahun 2020	
		En.1.3 Mengendalikan Pencemaran Lingkungan		8.2. Indeks kualitas udara mencapai standar kualitas udara yang sehat berdasarkan peraturan pemerintah
				16.6. Persentase limbah industri yang diolah mencapai 80% pada tahun 2025
	En.2 Pengelolaan Sampah dan Limbah	En.2.1 Mengelola Sampah Berbasis Teknologi		16.4. Persentase jumlah sampah yang berhasil diolah dengan metode daur ulang mencapai 60% pada tahun 2025
				16.1. Jumlah pusat daur ulang bertambah menjadi 10 unit pada tahun 2025
		En.2.2 Mereduksi Penggunaan Plastik	Persentase pengurangan penggunaan plastik sekali pakai mencapai 50% pada tahun 2025	
			Jumlah bisnis yang menggunakan kemasan ramah lingkungan meningkat 20% pada tahun 2025	
		En.2.3 Meningkatkan Pengelolaan Limbah B3	Jumlah kecelakaan atau insiden akibat limbah B3 berkurang menjadi 0 pada tahun 2025	16.6. Persentase limbah B3 yang diolah dengan metode aman dan sesuai peraturan mencapai 90% pada tahun 2025
	En.3 Tata Kelola Energi	En.3.1 Meningkatkan Penggunaan Energi Terbarukan		7.10. Jumlah titik pengisian daya listrik untuk kendaraan bertenaga listrik bertambah menjadi 50 titik pada tahun 2025
		En.3.2 Meningkatkan Efisiensi Energi		7.5. Tingkat konsumsi energi per unit output industri berkurang 15% pada tahun 2025
				12.1. Tingkat konsumsi energi per kapita rumah tangga berkurang 10% pada tahun 2025

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	INDIKATOR UTAMA SMART CITY	
			TAHAP 1 (RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025)	TAHAP 2 (SNI ISO 37122:2019)
				19.5. Peningkatan efisiensi bahan bakar transportasi publik sebesar 20% pada tahun 2025

(Sumber: FGD Bimtek 1 dan Bimtek 2, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Pada Subdimensi Proteksi Lingkungan, fokus utama adalah pada pengurangan emisi karbon dioksida, dengan tujuan mengurangi emisi hingga 20% pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2020. Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 13.2.1.(b) dan nomor 7.2.1 yang menekankan pada perubahan iklim dan penerapan energi terbarukan. Dalam konteks Konservasi Sumber Daya Alam, langkah krusial adalah peningkatan luas kawasan hutan dan lahan konservasi sebesar 5% pada tahun 2025, yang memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Hal ini erat hubungannya dengan Rencana Pembangunan Daerah dan SDGs (Tujuan 7.2.1), yang menonjolkan signifikansi pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam hal Pengendalian Pencemaran Lingkungan, pencapaian standar kualitas udara yang sehat serta pengolahan limbah industri hingga mencapai 80% pada tahun 2025 adalah sasaran kunci. Acuan utama adalah SNI ISO 37122:2019 (Indikator 8.2) dan (Indikator 16.6), yang mengedepankan kualitas lingkungan serta upaya pengurangan dampak pencemaran.

Pada Subdimensi Pengelolaan Sampah dan Limbah. Upaya meningkatkan pengelolaan sampah dengan pendekatan teknologi dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai menjadi komponen yang sangat penting. Referensi indikator mencakup SNI ISO 37122:2019 (Indikator 16.4) dan (Indikator 16.1).

Pada Subdimensi Tata Kelola Energi, peningkatan penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi menjadi fokus utama. Sasaran mencapai 30% energi terbarukan dari total energi pada tahun 2025 serta peningkatan titik pengisian daya listrik untuk kendaraan bertenaga listrik, merupakan langkah maju sejalan dengan SDGs (Tujuan 7.2.1) dan SNI ISO 37122:2019 (Indikator 7.10). Dalam upaya Peningkatan Efisiensi Energi, berkurangnya konsumsi energi per unit hasil industri dan per kapita rumah tangga menjadi tujuan yang esensial, bersama dengan peningkatan efisiensi bahan bakar pada

transportasi publik. Referensi indikator yang terlibat adalah SNI ISO 37122:2019 (Indikator 7.5), (Indikator 12.1), dan (Indikator 19.5).

3. Strategi Pembangunan *Smart City* Daerah

Pembangunan *Smart City* di Indonesia merupakan suatu tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kabupaten Sampang, dengan tekad kuat berusaha mewujudkan Sampang *Smart City*. Dua puluh poin yang dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi adalah sebagai berikut:

1. Infrastruktur TIK Terintegrasi: Membangun infrastruktur TIK terintegrasi guna meningkatkan konektivitas dan akses informasi bagi masyarakat.
2. Pelayanan Publik Digital: Mengembangkan platform digital untuk pelayanan publik dengan tujuan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi publik.
3. Sensor dan IoT: Melaksanakan sensor dan *Internet of Things* (IoT) untuk memantau serta mengelola aspek-aspek kritis seperti polusi udara, keamanan, dan manajemen limbah.
4. Transportasi Cerdas: Meningkatkan sistem transportasi melalui integrasi teknologi guna mengoptimalkan pergerakan dan mengurangi kemacetan.
5. E-Government dan Transparansi: Menyediakan platform E-Government untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi pemerintahan.
6. Pendidikan Digital: Mengimplementasikan inovasi di sektor pendidikan melalui platform digital dengan tujuan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
7. Energi Berkelanjutan: Mendorong penggunaan energi terbarukan dan teknologi efisiensi energi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
8. Keamanan Siber: Memperkuat keamanan siber guna melindungi data pribadi dan informasi kritis dari ancaman siber.
9. Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan implementasi solusi *Smart City*.
10. Pusat Data Terpusat: Membangun pusat data terpusat berguna dalam mengintegrasikan data dari berbagai sektor dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih baik.
11. Ekosistem Start-up dan Inovasi: Memberikan dukungan kepada start-up lokal agar menciptakan inovasi baru yang mendukung pembangunan *Smart City*.

12. Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan SDM yang diperlukan dalam lingkungan *Smart City*.
13. Ruang Terbuka Hijau dan Lingkungan Ramah: Memberikan prioritas pada pembangunan ruang terbuka hijau dan mempromosikan gaya hidup berkelanjutan.
14. Koneksi Internet Universal: Memastikan akses internet universal untuk meningkatkan konektivitas dan mengurangi kesenjangan digital.
15. Sistem Pembayaran Digital: Meningkatkan penggunaan sistem pembayaran digital untuk memfasilitasi transaksi ekonomi.
16. Monitoring Kualitas Udara dan Air: Menggunakan teknologi untuk aktif memantau dan meningkatkan kualitas udara dan air di wilayah tersebut.
17. Perencanaan Kota Terpadu: Merancang pembangunan kota yang terpadu dengan mempertimbangkan aspek-aspek *Smart City* sejak awal.
18. Perpustakaan Digital dan Akses Informasi: Membangun perpustakaan digital dan memastikan akses mudah terhadap informasi.
19. Perubahan Iklim dan Adaptasi: Mengintegrasikan strategi *Smart City* dengan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim.
20. Kemitraan Publik-Privat: Membangun kemitraan yang kuat antara sektor publik dan swasta untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan layanan *Smart City*.

Bagian tiga ini menguraikan strategi-strategi yang mendukung arah pembangunan *Smart City* di Kabupaten Sampang yang dibagi ke dalam enam dimensi.

3.1 Strategi Dimensi *Smart Governance*

Sasaran per subdimensi yang dihasilkan pada dimensi *Smart Governance* selanjutnya akan disusun ke dalam strategi-strategi per subdimensi seperti terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Strategi Pembangunan pada Dimensi *Smart Governance*

Dimensi	Subdimensi	Strategi
Smart Governance (G)	G.1 Layanan Publik	G.1.S.1 Meningkatkan inovasi pelayanan publik
		G.1.S.2 Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang berorientasi pada pelayanan masyarakat
		G.1.S.3 Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat kepada kepatuhan kepada peraturan pemerintah

Dimensi	Subdimensi	Strategi
	G.2 Birokrasi	G.2.S.1 Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi
		G.2.S.2 Meningkatkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berbasis digital
		G.2.S.3 Meningkatkan kualitas kebijakan daerah
	G.3 Perancangan Kebijakan	G.3.S.1 Meningkatkan Fungsi
		G.3.S.2 Meningkatkan aksesibilitas, kemudahan dan kesederhanaan, serta kepastian pelayanan publik berbasis digital

(Sumber: FGD Bimtek 1 dan Bimtek 2, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Strategi-strategi yang dibuat pada subdimensi Layanan Publik, Birokrasi, dan Perancangan Kebijakan diharapkan mampu memenuhi beberapa harapan dari pemerintah daerah dalam hal ini tata kelola pemerintahan seperti:

- Proses Bisnis setiap Pelayanan Pemerintahan dapat disederhanakan
- Tersedianya call center bagi pelayanan kedaruratan
- Mulai diterapkan *flexible working* dalam pelayanan
- Meningkatkan edukasi teknologi pelayanan kepada pengguna pelayanan
- Sistem pembayaran pajak dan retribusi sudah tidak tunai lagi
- Pelayanan publik yang mudah, cepat, dan transparan

Saat ini dengan dukungan dari Dinas Kominfo Kabupaten Sampang telah memiliki 28 aplikasi seperti terlihat pada Gambar 3.1



Gambar 3.1 Portal Layanan Kabupaten Sampang

(Sumber: Dinas Kominfo Kab. Sampang, 2022¹)

Salah satu aplikasi yang tersedia yaitu SPBE Sampang dibangun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang SPBE dan juga sebagai pemenuhan regulasi nasional dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan yang maksimal kepada pengguna SPBE. Pengguna SPBE dimaksud adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha (Bupati Sampang, 2019).

Hasil reviu selama 5 tahun yang dilakukan oleh Kominfo Kabupaten Sampang menunjukkan bahwa layanan SPBE di Kabupaten Sampang belum memenuhi

¹ <https://sampangkab.go.id/aplikasi-sampang/>

keinginan masyarakat pengguna layanan dalam mengakses layanan yang diberikan dengan indikator kemudahan dan kepuasan dari pengguna layanan, sehingga (Kadiskominfo Kab. Sampang, 2023) berinisiatif mengembangkan *Microservices Infrastructure* (Msi) sebagai aplikasi yang dinamakan Salempang (Satu Akses Layanan Pemerintah Kabupaten Sampang) dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dengan cara memberikan kemudahan akses layanan Pemerintah Kabupaten Sampang bagi masyarakat. Status saat ini Kominfo Kabupaten Sampang sedang melakukan migrasi semua konten yang ada pada layanan pusat data di web sampangkab.go.id ke Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola oleh Kementerian Kominfo RI.

3.2 Strategi Dimensi *Smart Branding*

Sasaran per subdimensi yang dihasilkan pada dimensi *Smart Branding* selanjutnya akan disusun ke dalam strategi-strategi per subdimensi seperti terlihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Strategi Pembangunan pada Dimensi *Smart Branding*

Dimensi	Subdimensi	Strategi
Smart Branding (B)	B.1 Pariwisata	B.1.S.1 Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat
		B.1.S.2 Memajukan perekonomian, melestarikan jati diri bangsa dan melestarikan fungsi dan mutu lingkungan hidup, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa
		B.1.S.3 Meningkatkan keunggulan daya Tarik dan promosi wisata serta ekonomi kreatif
	B.2 Daya Saing Bisnis	B.2.S.1 Meningkatkan digitalisasi pelayanan di MPP
		B.2.S.2 Meningkatkan Daya Saing investasi produk unggulan Sampang
		B.2.S.3 Meningkatkan investasi daerah
	B.3 Wajah (Tampilan) Kota	B.3.S.1 Menonjolkan kearifan lokal yang berciri khas Sampang menjadi branding kabupaten melalui wajah kota dan tata bangunan kota

(Sumber: FGD Bimtek 1 dan Bimtek 2, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Potensi wisata yang berasal dari sumber daya alam di Kabupaten Sampang pada dasarnya sangat mendukung Subdimensi Pariwisata. Wisata alam seperti Pantai Lon Malang, Air terjun Toroan, Camplong, Hutan Kera Nepa, Hutan

mangrove, dan Waduk Klampis belum banyak dikenal wisatawan domestik terutama di wilayah Madura sendiri. Infrastruktur jalan dan jaringan broadband, akses jalan yang mudah, akomodasi penginapan, ketersediaan Pusat Informasi Wisata, keramahan masyarakat sekitar (*hospitality*), dan kemampuan bahasa asing perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah sehingga Ekosistem Pariwisata dapat terwujud.

Pada Subdimensi Daya Saing Bisnis, Kabupaten Sampang memiliki 35 Desa Wisata (SK Bupati). Salah satu Desa Wisata Bira Tengah saat ini sedang mengikuti pemilihan Desa Wisata terfavorit dari Anugrah Desa Wisata Indonesia 2023². Dukungan pemerintah daerah pada pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dibuktikan dengan adanya ketersediaan Manajemen Penanaman Modal (MPP), ketersediaan tempat promosi hasil kerajinan daerah (Dekranasda), program pendampingan pengembangan desa wisata, dan aplikasi informasi pariwisata (*Tourism Book*). Salah satu Desa Taman di Kecamatan Jrengik, para pemuda yang tergabung dalam kelompok saDar Wisata (Pokdarwis) membangun Kafe Sawah Padi-Padi dengan tujuan memaksimalkan potensi alam berupa sawah untuk menunjang produktivitas warga hasil pendampingan dari Disporabudpar Kabupaten Sampang³.



Gambar 3.2 Alun-alun Trunojoyo sebagai Ikon Wajah Kota

Pada Subdimensi Wajah (Tampilan) Kota, Kabupaten Sampang memiliki Kekayaan seni budaya tradisional dan warisan sejarah seperti Alun-alun Trunojoyo (Gambar 3.2) sebagai ikon wajah kota (*Landmark*) Kabupaten Sampang dan juga Krampon Kampoeng Belanda. Adanya dukungan aplikasi

² Desa Wisata Bira Tengah, Kab. Sampang (<https://www.youtube.com/watch?v=lanNXb30wA8>)

³ <https://pariwisata.sampangkab.go.id/berita/view/Cafe-Padi-padi-Akan-Segera-Launching>

media sosial seperti Wonderful Sampang, Sampang Kreatif, Pemkab Sampang, Pariwisata Sampang, Sampang hit, dan Explore Sampang sangat memungkinkan Kabupaten Sampang dikenal keunikannya oleh masyarakat di dalam dan di luar Madura.

3.3 Strategi Dimensi *Smart Economy*

Sasaran per subdimensi yang dihasilkan pada dimensi *Smart Economy* selanjutnya akan disusun ke dalam strategi-strategi per subdimensi seperti terlihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Strategi Pembangunan pada Dimensi *Smart Economy*

Dimensi	Subdimensi	Strategi	
Smart Economy (Ec)	Ec.1 Ekosistem Industri	Ec.1.S.1	Mempercepat pertumbuhan aktivitas industri
		Ec.1.S.2	Meningkatkan kontribusi perdagangan, industri, dan jasa
		Ec.1.S.3	Meningkatkan kontribusi koperasi, Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro
		Ec.1.S.4	Meningkatkan inovasi untuk peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dalam arti luas
	Ec.2 Kesejahteraan Masyarakat	Ec.2.S.1	Menguatkan daya saing dengan peningkatan produktivitas dan inovasi
		Ec.2.S.2	Menyusun konsep CSR dunia usaha untuk masyarakat
		Ec.2.S.3	Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha
		Ec.2.S.4	Meningkatkan sentra usaha/produk ekonomi lokal
		Ec.2.S.5	Meningkatkan ketahanan pangan daerah
	Ec.3 Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec.3.S.1	Membangun sistem pembayaran <i>cashless</i> yang aman
		Ec.3.S.2	Membangun sistem untuk mempermudah jangkauan pelaku usaha
		Ec.3.S.3	Meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah

(Sumber: FGD Bimtek 1 dan Bimtek 2, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Industri primer dari bidang pertanian dan perikanan menjadi tulang punggung di Kabupaten Sampang pada salah satu subdimensi Ekosistem Industri.

Berdasarkan data dari (BPS Kab. Sampang, 2022a) dalam rentang waktu 2016 hingga 2020, sebagian besar aktivitas perdagangan di wilayah Kabupaten Sampang dilakukan oleh usaha perdagangan berskala kecil. Informasi ini dapat ditemukan melalui data Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang. Agrowisata seperti budidaya Jambu Camplong dan kampong Milon Napote. Jambu Camplong merupakan buah jambu yang aslinya tumbuh di tanah Kabupaten Sampang dan hanya berbuah musiman, sayangnya justru Jambu Camplong ini tidak banyak dikenal di tempat asalnya, ironisnya lagi bibit Jambu Camplong ini diproduksi di luar Madura. Pokdarwis Napote Fruit aktif secara mandiri mengelola kampong Milon Napote di Desa Bira Timur. Di bidang Perikanan, kapasitas penangkapan ikan yang tinggi seperti di Sreseh, Camplong, dan Mandangin seharusnya memiliki potensi penghasilan yang cukup tinggi bagi nelayan. Tambak garam juga memerlukan inovasi dalam proses produksinya misalnya fasilitas perlindungan produk dengan proses standarisasi produk seperti sertifikasi halal, uji nutrisi, merk dan disain ulang kemasan.

Pada Subdimensi Kesejahteraan Masyarakat, berdasarkan data dari (BPS Kab. Sampang, 2022b) bahwa tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Sampang pada tahun 2020 mencapai 69.93%. Pada tahun 2021, angka ini meningkat menjadi 70.19%. Dari angka tersebut, terlihat bahwa 70.19% penduduk Kabupaten Sampang yang berusia 15 tahun ke atas aktif berpartisipasi dalam pasar kerja. Sebaliknya, sisanya sebanyak 29.81% terdiri dari individu yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, atau terlibat dalam aktivitas di luar ranah ekonomi yang bukan bersifat pribadi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sampang pada tahun 2021 meningkat 0,10% dibandingkan dengan tahun 2020, naik dari 3,35% menjadi 3,45%. Kenaikan angka TPT ini mengindikasikan peningkatan jumlah penduduk yang mengalami pengangguran, karena lapangan kerja di Kabupaten Sampang memiliki keterbatasan. Salah satu faktornya adalah minimnya industri sekunder di daerah tersebut, yang biasanya menjadi penyedia lapangan pekerjaan utama. Selain itu, pemberlakuan pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19 juga memberi dampak negatif pada situasi ini. Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa angka TPT di Kabupaten Sampang berada di bawah rata-rata TPT Provinsi Jawa Timur. Ini terjadi karena sebagian besar penduduk Kabupaten Sampang bekerja di sektor pertanian, yang relatif kurang terdampak oleh pandemi Covid-19. Faktanya,

tingkat pengangguran yang signifikan di kota-kota besar menandakan bahwa urbanisasi masih menjadi pilihan utama dalam mencari peluang. Namun, tantangannya terletak pada kemampuan kota-kota ini untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia. Di perkotaan, biasanya tenaga kerja terampil yang memiliki keahlian khusus yang lebih mudah terserap, sementara di pedesaan, mayoritas tenaga kerja terlibat dalam sektor pertanian yang tidak memerlukan keterampilan khusus.

Pada Subdimensi Ekosistem Transaksi Keuangan, pemerintah daerah perlu menerapkan *financial technology* yaitu transaksi dengan metode pembayaran *non cash* baik untuk transaksi perdagangan maupun layanan yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan (BPS Kab. Sampang, 2022a) bahwa tabungan dan giro adalah jenis layanan perbankan yang paling diminati oleh penduduk Sampang. Pemerintah daerah juga perlu mendorong dan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk menjual produk-produk pertanian, perikanan, dan wisata melalui aplikasi *e-marketplace* komersial seperti Tokopedia.com, shopee.co.id, bukalapak.com dan lain-lain yang telah memiliki jumlah dan jangkauan pembeli yang luas dengan teknologi *payment gateway* yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3.4 Strategi Dimensi *Smart Living*

Sasaran per subdimensi yang dihasilkan pada dimensi *Smart Living* selanjutnya akan disusun ke dalam strategi-strategi per subdimensi seperti terlihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Strategi Pembangunan pada Dimensi *Smart Living*

Dimensi	Subdimensi	Strategi
Smart Living (L)	L.1 Harmonisasi Tata Ruang	L.1.S.1 Melakukan penataan lingkungan sesuai rencana tata ruang
		L.1.S.2 Meningkatkan pengelolaan tata ruang
		L.1.S.3 Meningkatkan sarana prasarana dasar permukiman
	L.2 Kesehatan	L.2.S.1 Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan rujukan
		L.2.S.2 Meningkatkan kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan
		L.2.S.3 Menurunkan angka kematian Ibu dan Balita
		L.2.S.4 Mempercepat penurunan stunting

Dimensi	Subdimensi	Strategi
		L.2.S.5 Meningkatkan peran stakeholder pembangunan kepemudaan dan keolahragaan
	L.3 Transportasi	L.3.S.1 Mewujudkan transportasi yang menjamin kemudahan mobilitas bagi individual, publik maupun kebutuhan logistik daerah
		L.3.S.2 Menyiapkan sistem jaringan jalan yang cukup memadai bagi masyarakat menuju lokasi tujuan
		L.3.S.3 Menjamin Ketersediaan perlengkapan jalan guna mewujudkan keselamatan pengguna jalan
		L.3.S.4 Mewujudkan transportasi laut yang menjamin kemudahan mobilitas bagi individual, publik maupun kebutuhan logistik daerah
		L.3.S.5 Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah

(Sumber: FGD Bimtek 1 dan Bimtek 2, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Subdimensi Harmoni Tata Ruang, menciptakan lingkungan hunian yang menyenangkan dan seimbang di antara area pemukiman dan adanya pusat bisnis yang didukung oleh fasilitas rekreasi untuk keluarga. Kabupaten Sampang memiliki lahan RTH dengan luas 217,88 Ha (Perda RTRW Nomor 4 Tahun 2020), sedangkan pusat bisnis seperti di kawasan Wahid Hasyim belum dilengkapi dengan tempat rekreasi untuk keluarga. Indikator SNI ISO 37122:2019 (Indikator 12.1) yaitu persentase rumah tangga dengan pengukuran energi pintar dan SNI ISO 37122:2019 (Indikator 12.2) yaitu persentase rumah tangga dengan pengukuran air pintar belum menjadi indikator standar.

Pada Subdimensi Kesehatan, fasilitas dan infrastruktur layanan kesehatan masih membutuhkan peningkatan, walaupun capaiannya mencapai 68,2% yang diartikan sebagai tingkat sedang, tetapi distribusi fasilitas kesehatan belum optimal. Dari total 7 Puskesmas, 31,8% belum memenuhi standar. Dari 57 Puskesmas Pembantu (Pustu), sekitar 50,9% (29 Pustu) berada dalam kondisi baik, 3 Pustu (5,3%) mengalami kerusakan ringan, dan 25 Pustu (43,8%) mengalami kerusakan berat. Jumlah fasilitas olahraga di Kabupaten Sampang tergolong memadai. Namun, perlu dilakukan tinjauan mendalam untuk memastikan apakah 195 fasilitas olahraga yang ada di 180 desa telah terdistribusi secara merata dan dimanfaatkan optimal.

Pada Subdimensi Transportasi, Pemerintah daerah perlu membangun ekosistem transportasi yang mendukung mobilitas bagi individu, publik, dan keperluan logistik yang ramah lingkungan. Terdapat 14 indikator terkait Transportasi dari SNI ISO 37122:2019 yaitu Indikator 19.1-19.14 dengan penekanan kepada indikator kendaraan rendah emisi, kendaraan otonom, sistem parkir *real time*, dan transportasi umum dengan pembayaran terpadu.

3.5 Strategi Dimensi *Smart Society*

Sasaran per subdimensi yang dihasilkan pada dimensi *Smart Society* selanjutnya akan disusun ke dalam strategi-strategi per subdimensi seperti terlihat pada Tabel 3.5.

Pada Subdimensi Interaksi Masyarakat, interaksi masyarakat yang efisien diwujudkan melalui kelompok sosial yang sudah diterapkan di Kabupaten Sampang salah satunya adalah kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Dari 18 Pokdarwis terdapat 4 pokdarwis yang aktif dan berjalan mandiri yaitu: Pokdarwis Putra Lon Malang terletak di Desa Wisata Bira Tengah aktif secara mandiri mengelola DTW Pantai Lon Malang dan Desa Wisata Bira Tengah, Pokdarwis Marparan Jaya aktif mengelola secara mandiri DTW Wisata Mangrove Sreseh spot Marparan, Pokdarwis Klobur Mandiri mengelola DTW Mangrove Sreseh spot Klobur, dan Pokdarwis Napote Fruit aktif secara mandiri mengelola kampong Milon Napote di Desa Bira Timur. Indikator SNI ISO 37122:2019 (Indikator 13.1-13. 4) tentang Populasi dan Kondisi Sosial.

Pada Subdimensi Ekosistem Belajar/Pendidikan, pemerintah daerah perlu mewujudkan ekosistem Pendidikan dengan dukungan teknologi informasi baik pendidikan formal dan informal. Terdapat cikal bakal *Smart* Pesantren di Nahdatul Tulab dan Karang Durin sebagai *best practice* untuk dapat diadopsi oleh 352 Pondok pesantren lain. Indikator SNI ISO 37122:2019 (Indikator 6.1-6.3) tentang Pendidikan juga perlu menjadi pedoman pengukuran.

Tabel 3.5 Strategi Pembangunan pada Dimensi *Smart Society*

Dimensi	Subdimensi	Strategi
Smart Society (S)	S.1 Interaksi Masyarakat	S.1.S.1 Meningkatkan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas serta fasilitasi penanganan konflik di daerah
		S.1.S.2 Meningkatkan pembangunan desa
	S.2 Ekosistem Belajar/Pendidikan	S.2.S.1 Meningkatkan kualitas, partisipasi dan jangkauan pelayanan pendidikan yang merata

Dimensi	Subdimensi	Strategi
		S.2.S.2 Memberikan kesempatan kepada masyarakat putus sekolah dan atau tidak sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan dan pengetahuan program pendidikan kesetaraan
		S.2.S.3 Meningkatkan kebermanfaatan perpustakaan dan keterlibatan masyarakat
	S.3 Keamanan Masyarakat	S.3.S.1 Meningkatkan pemeliharaan Keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) sebagai bentuk deteksi dini dan cegah dini pada pencegahan dan penanganan konflik sosial
		S.3.S.2 Meningkatkan pelayanan pemadaman kebakaran dan Non Kebakaran
		S.3.S.3 Meningkatkan layanan call center kegawatdaruratan dan non kegawatdaruratan terintegrasi
		S.3.S.4 Meningkatkan ketangguhan dan mitigasi risiko bencana

(Sumber: FGD Bimtek 1 dan Bimtek 2, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Pada Subdimensi Keamanan Masyarakat, Kabupaten Sampang telah menempatkan CCTV di taman kota dan lalu lintas jalan utama⁴, namun saat ini penggunaannya terbatas hanya kepada kondisi pengunjung taman kota dan kepadatan lalu lintas, bukan untuk memantau tindak kriminal atau penyebab kecelakaan lalu lintas. Indikator SNI ISO 37122:2019 (Indikator 15.1) tentang Keamanan pada dasarnya sudah diterapkan, sehingga perlu ditambahkan instalasi kamera pengintai di lokasi-lokasi yang memiliki potensi besar terjadinya tindak kriminal, pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas, dan potensi bencana akibat kelalaian atau potensi bencana alam. Beberapa wilayah yang memiliki potensi bencana alam di Kabupaten Sampang mencakup DAS Nodung, terletak di wilayah Kecamatan Banyuates, Ketapang, dan Sokobanah; DAS Kamoning, yang berada di wilayah Kecamatan Robatal, Omben, Kedungdung, Sampang, dan Camplong; DAS Semajid, yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Robatal, Sokobanah, Omben, dan Camplong; serta DAS Blega yang terdapat di Kecamatan Tambelangan, Jrengik, Torjun, dan Kedungdung. Sementara itu, banjir yang terjadi disebabkan oleh dua faktor, yaitu intrusi air laut dan aliran air dari daerah hulu di utara. Ini

⁴ <https://sampangkab.go.id/cctv-streaming/>

mengakibatkan sungai Kali Kemuning yang melewati Kecamatan Sampang menjadi meluap.

3.6 Strategi Dimensi *Smart Environment*

Sasaran per subdimensi yang dihasilkan pada dimensi *Smart Environment* selanjutnya akan disusun ke dalam strategi-strategi per subdimensi seperti terlihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Strategi Pembangunan pada Dimensi *Smart Environment*

Dimensi	Subdimensi	Strategi
Smart Environment (En)	En.1 Proteksi Lingkungan	En.1.S.1 Mengelola sarana dan prasarana keanekaragaman hayati
		En.1.S.2 Meningkatkan Sistem Pengelolaan Air Permukaan
		En.1.S.3 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkualitas
	En.2 Pengelolaan Sampah dan Limbah	En.2.S.1 Meningkatkan sistem pengelolaan sampah anorganik
	En.3 Tata Kelola Energi	En.3.S.1 Meningkatkan konversi energi dengan biomassa
		En.3.S.2 Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi konversi limbah padat menjadi energi

(Sumber: FGD Bimtek 1 dan Bimtek 2, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Pada Subdimensi Proteksi Lingkungan, pengelolaan sumber daya air, udara, dan tanah menjadi prioritas. Dukungan teknologi sangat diperlukan untuk memonitor terjadinya pencemaran ketiga sumber daya tadi. Peningkatan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersebar merata di Kabupaten Sampang dapat membantu mengendalikan tingkat polusi udara, air, dan tanah. Vegetasi di dalam RTH memiliki kemampuan menyerap substansi-substansi pencemar seperti karbon dioksida (CO2), nitrogen dioksida (NO2), dan partikel udara yang halus. Ini berkontribusi pada pengurangan jumlah zat pencemar di atmosfer. Tanaman dan tanah yang ada di RTH dapat berfungsi sebagai penyaring alami yang membersihkan air hujan sebelum sampai ke sistem perairan, sehingga mengurangi potensi terjadinya pencemaran. Vegetasi yang ada di RTH berperan dalam mencegah proses erosi tanah dengan menjaga tanah agar tetap berada pada tempatnya. Ini juga membantu mencegah partikel-partikel tanah masuk ke dalam sumber air, sehingga dapat mengurangi pencemaran di perairan. Indikator SNI ISO 37122:2019 tentang

Air Limbah (Indikator 22.1-22.5) dan Indikator SNI ISO 37122:2019 tentang Air (Indikator 23.1-23.4). Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Kabupaten Sampang Tahun 2021 menggunakan rumus yang dijabarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, diperoleh informasi bahwa kebutuhan pasokan air bersih di Kabupaten Sampang hingga tahun 2024 mencapai jumlah sekitar 96.188.925,3 liter. Apabila dibandingkan dengan perhitungan kebutuhan sebelumnya (standar lokal), terlihat bahwa ketersediaan air mencapai 313.839.253 liter. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kapasitas air masih berlebih atau SURPLUS.

Pada Subdimensi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Sistem pengelolaan sampah dan limbah di Kabupaten Sampang dijalankan melalui sejumlah aspek teknis dan regulasi yang diatur oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman (DLH) dan juga melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sampang. Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga juga diatur dalam Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2018. Pengelolaan limbah di sektor rumah tangga, industri, dan sektor publik didasarkan pada prinsip *Reduce, Reuse, and Recycle* (3R): mengurangi, memanfaatkan, dan memilah. Bagian-bagian seperti Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan, serta Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan berperan utama dalam menjalankan tata kelola ini⁵. Kajian juga memberikan wawasan tentang strategi pengelolaan limbah, termasuk di wilayah pedesaan seperti Disanah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang. Masyarakat memiliki peran dalam pengelolaan limbah rumah tangga, termasuk yang bersifat anorganik, sebagai langkah menjaga lingkungan. Indikator SNI ISO 37122:2019 tentang Limbah Padat (Indikator 16.1-16.6), Indikator SNI ISO 37122:2019 tentang Lingkungan dan Perubahan Iklim (Indikator 8.1-8.3), dan SDGs (Tujuan 12.5) tentang produksi sampah dapat digunakan juga sebagai indikator kinerja.

Pada Subdimensi Tata Kelola Energi, pendekatan komprehensif dalam mengelola energi berkelanjutan diperlukan di Kabupaten Sampang. Langkah ini melibatkan sinkronisasi kerja dengan beragam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dinas terkait, serta memanfaatkan sumber daya lokal guna mencapai tujuan energi berkelanjutan yang telah ditetapkan. Pentingnya mengadopsi kebijakan yang mendorong pemanfaatan energi terbarukan (EBT)

⁵ <https://hmgp.geo.ugm.ac.id/2021/08/27/pengelolaan-sampah-dalam-konteks-pembangunan-berkelanjutan-waste-management-in-the-context-of-waste-management/>

berdasarkan potensi lokal. Melalui kolaborasi bersama Dinas Lingkungan Hidup perlu melakukan identifikasi potensi energi surya, mini hidro, dan biomassa yang ada di Kabupaten Sampang. Pemerintah daerah dapat membentuk tim khusus yang akan bekerjasama dengan Dinas Tata Ruang dan Bangunan untuk merumuskan kebijakan perencanaan tata ruang yang mendukung pengembangan infrastruktur energi berkelanjutan. Selain itu, sebagai rencana aksi dengan meluncurkan program edukasi dengan dukungan dari Dinas Pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat energi terbarukan serta cara efektif menghemat energi. Dalam upaya meningkatkan efisiensi energi, perlu dilakukan kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan guna mendorong adopsi teknologi energi efisien di sektor industri dan komersial. Tidak kalah penting, kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman (DLH) pada upaya pengurangan limbah dan promosi energi ramah lingkungan, kolaborasi ini akan mendorong pengembangan program daur ulang limbah serta penurunan emisi gas rumah kaca.

Dalam pendekatan yang lintas sektoral, peran Dinas Pendidikan memastikan bahwa pendidikan mengenai energi berkelanjutan terintegrasi dalam kurikulum sekolah. Selain itu, Diskominfo akan berperan dalam kampanye kesadaran energi melalui berbagai media dan platform digital. Indikator SNI ISO 37122:2019 tentang Energi (Indikator 7.1-7.10) dan SDGs (Tujuan 7.2.1) tentang Bauran Energi Terbarukan dapat membantu mengukur luaran dari subdimensi ini.

4. Rencana Aksi Smart City Daerah

Bagian 4 mendiskusikan rencana aksi *Smart City* daerah Kabupaten Sampang untuk Jangka Pendek (2024), Jangka Menengah (2025-2028), dan Jangka Panjang (2029-2033). Rencana aksi adalah aktivitas-aktivitas yang harus dilaksanakan per tahun, setelah program kerja disusun dalam bentuk inovasi. Inovasi-inovasi yang dibuat oleh pemerintah daerah dapat merupakan inovasi satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) atau kolaborasi beberapa OPD. Selanjutnya setiap inovasi dilaksanakan dengan menyusun empat rencana aksi yaitu:

1. Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan

Setiap inovasi harus dipastikan telah didukung oleh kebijakan yaitu dalam bentuk peraturan-peraturan dan kelembagaan yaitu tim pelaksana

2. Infrastruktur Pendukung

Setiap inovasi dapat diterapkan dengan baik jika dipenuhi infrastruktur dasar pendukungnya, seperti infrastruktur fisik, teknologi informasi, dan infrastruktur sosial

3. Perangkat Lunak Pendukung

Setiap inovasi juga memerlukan perangkat lunak pendukung yang dapat membantu dalam proses bisnis, perencanaan, pelaksanaan inovasi, maupun laporan. Perangkat lunak diupayakan di tingkat level aplikasi yang relevan dengan inovasi yang akan dibuat

4. Penguatan Literasi

Inovasi yang sudah selesai dibuat atau dalam proses pelaksanaan memerlukan penguatan literasi dalam bentuk sosialisasi dan atau pelatihan sehingga setiap pihak baik pemerintah yang melakukan inisiatif dan masyarakat yang akan menggunakan atau terlibat dalam kegiatan inovasi tersebut dapat berjalan secara optimal

Rencana aksi disusun berdasarkan isian Kertas Kerja Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023d) dan Jangka Panjang (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023e) yang diisi terpisah oleh peserta dan dipimpin oleh koordinator kelompok per dimensi berdasarkan hasil FGD pada Bimtek 2 (2-3 Agustus 2023) dan dipertajam kembali pada Bimtek 3 (4-5 September 2023).

Subbab 4.1-4.6 menyajikan secara detail Rencana Aksi Jangka Pendek (2024), Jangka Menengah (2025-2028), dan Jangka Panjang (2029-2033) pada Pembangunan Smart City di Kabupaten Sampang untuk setiap dimensi Smart City.

4.1 Rencana Aksi Dimensi Smart Governance

Subbab 4.1. menguraikan secara detail Rencana Aksi Jangka Pendek (2024), Jangka Menengah (2025-2028), dan Jangka Panjang (2029-2033) untuk dimensi Smart Governance.

4.1.1 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028)

Subbab 4.1.1. menguraikan Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah (RAJPM) 2024-2028 pada Dimensi Smart Governance seperti terlihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah Smart Governance

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Layanan Publik	Peningkatan aksesibilitas , kemudahan dan kesederhanaan, serta kepastian pelayanan publik berbasis digital	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Salempang (Satu Akses Layanan Pemerintah Kabupaten Sampang)	1. Menyusun Perbup Pengembangan Aplikasi 2. Membentuk Tim Teknis Pengelola Aplikasi 3. Menyusun SOP 4. Menyusun Juknis	2024	Melakukan integrasi kepada sistem dan jaringan berikut: 1. Pusat Data Pemkab Sampang (DRC) 2. Intra Network Pemkab Sampang 3. Network Operating Center Pemkab Sampang 4. Microservices Infrastructure pada Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika	2024	Melakukan instalasi beberapa perangkat lunak berikut: 1. VMWare Server 2. Docker 3. Apache KrakenD 4. API Gateway 5. Java 6. PHP 7. Node.JS 8. React.JS 9. Vue.JS 10. Nuxt.JS 11. Angular.JS 12. Laravel 13. CodeIgniter 14. MySQL 15. PostgreSQL 16. Ms-SQL 17. Sonarqube Tools	2024	Mengadakan bimtek dan sosialisasi berikut: 1. Bimtek Frontend Developer 2. Sosialisasi Sampang Satu Data 3. Sosialisasi Satu Akses Layanan di lingkungan Pemkab Sampang 4. Bimtek Lanjutan Tim Teknis Pengelola Aplikasi 5. Sosialisasi Satu Akses Layanan kepada	2024

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
								19. OWASP ZAP Tools 20. Helium Tools		masyarakat 6. Membuat Survey Kepuasan Masyarakat	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	SAKERA MESEM (Satu pintu Administrasi Kependudukan RAKyot MENjadi SEjahtera dan Membahagiakan V2: Kerjasama pelayanan Adminduk dengan Desa/Kelurahan untuk mendekatkan lokasi pelayanan	1. Membentuk SDM/Tim Teknis 2. Mereviu SOP 3. Menyusun SK Tim Sakera Mesem (Reviu) 4. Menyusun Perjanjian Kerjasama pelayanan Adminduk dengan Desa/Kelurahan 5. Melakukan Koordinasi dengan DPMD, Bappedalitbang, BPPKAD	2024-2029	Memenuhi peralatan pelayanan adminduk (Komputer, Printer, Scanner, dll) - (disediakan oleh Desa/Kel.)	2024-2029	Melakukan instalasi dan deployment: 1. Jaringan Internet 2. Aplikasi Sakera Mesem	2024-2029 2022	Mengadakan pelatihan dan sosialisasi berikut: 1. Sosialisasi akan pentingnya layanan adminduk dan dokumen adminduk kepada aparat pemerintahan desa 2. Pelatihan bagi operator desa	2026 2027
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Rela Berkorban (REaksi Layanan Adminduk BERSama Kelompok ODGJ, Rentan Bencana atau Non bencana): Pelayanan adminduk	1. Membentuk SDM/Tim Teknis 2. Mereviu SOP 3. Menyusun SK Tim Relat Berkorban (Reviu)	2024-2029	1. Mengadakan Mobil Keliling 2. Mengadakan Peralatan perekaman eKTP/pelayanan adminduk	2024-2029	Melakukan instalasi Jaringan Internet	2024-2029	Mengadakan sosialisasi lewat sosial media tentang adanya layanan adminduk keliling untuk kelompok rentan	2024-2029

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
			jemput bola kepada kelompok masyarakat ODGJ, Rentan Bencana dan Non Bencana termasuk juga Lansia, Jompo dan Sakit ke rumah dan atau Fasilitas Kesehatan (RS/Puskesmas)								
		Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	MARLENA TUKU SANTAN (Manajemen layanan adminduk, tujuh dokumen langsung dapat saat pernikahan) kerjasama pelayanan dengan Kemenag untuk layanan bagi pasangan yang baru menikah untuk mendapatkan langsung 7 dokumen (Seven In One/7 in 1) yaitu Buku Nikah 2 dokumen dari	1. Membentuk SDM/Tim Teknis 2. Melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Kemenag 3. Mereviu SOP 4. Menyusun SK Tim Pelayanan	2022 2024	Memenuhi Peralatan pelayanan adminduk (Komputer, Printer, Scanner, dll)	2024-2029	Melakukan instalasi dan deployment: 1. Jaringan Internet 2. Instalasi Aplikasi Pelayanan Terintegrasi	2024-2025	Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan: 1. Sosialisasi kepada calon pengantin perihal inovasi Marlena Tuku Santan (kerjasama dengan KUA) 2. Pelatihan bagi petugas Kemenag/ KUA	2024-2029 2025

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
			Kemenag dan KK/Kartu Keluarga 3 dokumen serta KTP/Kartu Tanda Penduduk 2 dokumen dari Dispendukcapil								
Birokrasi	Penyusunan dokumen sistem akuntabilitas instansi Pemerintah berbasis digital	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	SiPEDAL (Sistem Pengendalian Kinerja Daerah) yaitu sistem informasi untuk pengisian perencanaan daerah dan OPD selama 5 (lima) tahun dan perencanaan kinerja tahunan hingga tahap pengukuran kinerja, dimana output dari aplikasi akan dijadikan dokumen pendukung SAKIP serta sebagai laporan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	1. Membentuk SDM IT 2. Membentuk Tim Evaluasi Kabupaten 3. Menyusun SOP 4. Menyusun Perbup SiPEDAL 5. Membentuk SK Tim 6. Melakukan Integrasi dengan aplikasi kepegawaian dan anggaran 7. Menyusun Perbup reward dan punishment pemanfaatan aplikasi	2023 2024 2024 2025 2025	Melakukan instalasi dan integrasi berikut: 1. Microservices Infrastructure pada Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Jaringan internet	2023 2023 2025	Melakukan instalasi dan deployment: 1. Aplikasi SiPEDAL 2. Web browser 3. MySQL	2023	Melakukan sosialisasi dan pelatihan berikut: 1. Sosialisasi SiPEDAL 2. Pengembangan dan pengintegrasian e Sakip dan SiPEDAL 3. Dokumen petunjuk teknis pengisian 4. Penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat	2023 2024-2029

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Sepatu Barjas (Sistem Pelayanan Pengadaan Terpadu Barang dan Jasa)	1. Membentuk SDM IT dan Tim Pengelola Aplikasi 2. Membentuk SK Tim Pengelola Aplikasi 3. Menyusun Roadmap Pengembangan Aplikasi 4. Membentuk dan mereviu SOP 5. Menelaah Indikator Kematangan UKPBJ	2024	Melakukan instalasi dan integrasi berikut: 1. Database Lokal UKPBJ 2. ISB (Inaproc Service Bus) 3. Indikator Kematangan UKPBJ Level Proaktif 4. Server	2024	Melakukan instalasi dan integrasi berikut: 1. Google Spreadsheet 2. API-ISB 3. DBMS Postgree SQL 4. Backend Framework (Laravel) 5. VCS (Github) 6. Webserver Apache 7. Front End Framework (React Js) 8. MS Excel 9. Tableau 10. Google Data Studio dan Google Analytics	2024	Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan: 1. Sosialisasi dan Bimtek Penggunaan Aplikasi SEPATU BARJAS kepada pihak Internal maupun eksternal 2. Pelatihan Microservices dan Data Analytics kepada SDM IT dan Tim Pengelola Aplikasi	2024
Perancangan Kebijakan	Peningkatan fungsi	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	SIG4TA (Sistem Integrasi Geospasial untuk Sampang Satu Data), yaitu sistem yang memungkinkan integrasi data dan informasi geospasial dalam satu basis data dan	1. Membentuk Tim Teknis Simpul Jaringan 2. Membentuk Tim IT 3. Membentuk Tim geospasial/ Pemetaan 4. Mereviu Kebijakan (SK, Perbup) 5. Merevitalisasi Simpul Jaringan 6. Mengadaptasikan Standar KUGI	2024	1. PDN	2024	Melakukan instalasi dan integrasi berikut: 1. Pengolah Data Spasial: Q GIS/ArcGis 2. Geoportal: SIG4TA 3. GIS Server: Geoserver 4. Penghubung :	2024	Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan: 1. Bimtek kepada Simpul Jaringan 2. Bimtek Peningkatan Kapasitas Tim IT 3. Bimtek Peningkatan Kapasitas	2024 2025

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
			satu sistem referensi, memiliki standar data sesuai kebijakan satu peta, memiliki metadata, serta memiliki kemampuan untuk berbagi pakai data, atau dipertukarkan antar sistem yang saling berinteraksi, serta dapat diakses secara mudah dalam satu geoportal.	(Katalog Unsur Geografis Indonesia) 7. Memenuhi Standar <i>Open Geospatial Consortium (OGC)</i> 8. Mereviu SOP 9. Menyusun Roadmap				5. SIKAMBING 5. Pengelola Meta Data: CatMDEdit/ Notepad++		TIm Geospasial/ Pemetaan	
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	De Sampang Sistem aplikasi pemerintahan (birokrasi) ditujukan untuk Bupati Sampang. Di DE Sampang ini, Bupati selaku pimpinan bisa melihat capaian kinerja, target, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah (OPD) karena seluruh	1. Mereviu Kebijakan (SK, Perbup); Kebijakan Privasi Data; Kebijakan Keamanan Data; Kebijakan Penggunaan Data; Kebijakan Manajemen Risiko; Kebijakan Pengembangan Aplikasi; 2. Menyusun Roadmap	2024	SDM IT	2024	Membangun aplikasi DE Sampang	2024	Melaksanakan sosialisasi ke Kepala OPD	2024

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
			aplikasi dari OPD yang berbeda sudah terkoneksi/teri ntegrasi dengan Dashboard ini selaku rumah besar bagi aplikasi untuk birokrasi yang ada								

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

4.1.2. Rencana Aksi Jangka Panjang (2029-2033)

Subab 4.1.2. menguraikan dengan detail Rencana Aksi Jangka Panjang (RAJP) 2029-2033 pada Dimensi Smart Governance seperti terlihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Governance

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Layanan Publik	Peningkatan aksesibilitas, kemudahan dan kesederhanaan, serta kepastian pelayanan publik berbasis digital	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Salempang (Satu Akses Layanan Pemerintah Kabupaten Sampang)	1. Mereviu Perbup Pengembangan Aplikasi 2. Membentuk Tim Teknis Pengelola Aplikasi 3. Mereviu SOP 4. Mereviu Juknis	2029	Melakukan integrasi kepada sistem dan jaringan berikut: 1. Pusat Data Pemkab Sampang (DRC) 2. Intra Network Pemkab Sampang 3. Network Operating Center Pemkab Sampang 4. Microservices Infrastructure pada Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika	2029	Melakukan instalasi beberapa aplikasi berikut: 1. VMWare Server 2. Docker 3. Apache 4. KrakenID 5. API Gateway 6. Java 7. PHP 8. Node.JS 9. React.JS 10. Vue.JS 11. Nuxt.JS 12. Angular.JS 13. Laravel 14. CodeIgniter 15. MySQL 16. PostgreSQL 17. Ms-SQL 18. Sonarqube Tools 19. OWASP ZAP Tools 20. Helium Tools	2029	Mengadakan bimtek dan sosialisasi berikut: 1. Bimtek Frontend Developer 2. Sosialisasi Sampang Satu Data 3. Sosialisasi Satu Akses Layanan di lingkungan Pemkab Sampang 4. Bimtek Lanjutan Tim Teknis Pengelola Aplikasi 5. Sosialisasi Satu Akses Layanan kepada masyarakat 6. Penyelenggaraa n Survey Kepuasan Masyarakat	2029

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Birokrasi	Penyusunan dokumen sistem akuntabilitas instansi Pemerintah berbasis digital	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	SiPEDAL (Sistem Pengendalian Kinerja Daerah), yaitu sistem informasi untuk pengisian perencanaan daerah dan OPD selama 5 (lima) tahun dan perencanaan kinerja tahunan hingga tahap pengukuran kinerja	1. Review SOP pengembangan aplikasi 2. Mengembangkan fitur layanan	2029 2030	Melakukan instalasi dan integrasi berikut: 1. Microservices Infrastructure pada Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Jaringan internet	2029	Melakukan instalasi dan deployment: 1. Aplikasi SiPEDAL 2. Web browser 3. MySQL 4. API Gateway	2029	Mengadakan bimtek dan sosialisasi berikut: 1. Bimtek Lanjutan Tim Teknis 2. Penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat	2029 2029
Perancangan Kebijakan	Peningkatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berbasis digital	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Big Data Sekumpulan data yang terdiri dari: 1. Data antar instansi pemerintah 2. Data individu dan 3. Data sektor swasta Data tersebut dimanfaatkan	1. Membentuk SDM IT 2. Mereviu Kebijakan (Perbup, SK) 3. Menyusun Roadmap	2029		2029	Mengembangkan aplikasi DE Sampang	2029	Mengadakan bimtek dan sosialisasi berikut: 1. Sosialisasi dan Bimtek kepada pimpinan 2. Sosialisasi dan Bimtek kepada Operator	2029

Subdimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
			untuk kepentingan bersama: pemerintah, individu dan sektor swasta secara terbuka								

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

4.2 Rencana Aksi Dimensi *Smart Branding*

Subbab 4.2. menguraikan secara detail Rencana Aksi Jangka Pendek (2024), Jangka Menengah (2025-2028), dan Jangka Panjang (2029-2033) pada Dimensi Smart Branding.

4.2.1 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028)

Subab 4.2.1. menguraikan Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah (RAJPM) 2024-2028 pada Dimensi Smart Branding seperti terlihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah Smart Branding

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Pariwisata	Pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	SAMPANG GEMILANG: <i>Trunojoyo City Park</i> (Optimalisasi fungsi kawasan Alun-alun Trunojoyo sebagai: 1) taman kota 2) <i>site</i> layanan publik <i>on the street</i> 3) <i>creative centre</i> .	1. Membuat SK desa wisata	2021	1. Mengalokasikan DD untuk mendukung pengembangan dan pembangunan desa wisata 2. Melengkapi kebutuhan sarana pendukung wisata berupa: homestay/ sarana penginapan, restorasi, jalan, sarana kesehatan, jaringan telekomunikasi, PJU 3. Membentuk tourist information centre (TIC) 4. Membangun homestay naik kelas	2024	1. Membentuk Jaringan operator 2. Mengembangkan tourism guiding book of sampang (buku panduan wisata sampang) 3. Mengembangkan aplikasi IKM Smart	2024	Melaksanakan pelatihan dan pendampingan: 1. pelatihan tata kelola destinasi wisata 2. pelatihan home stay 3. pelatihan lifeguard 4. pelatihan kepemanduan 5. pelatihan digital marketing 6. pelatihan pengembangan produk IKM 7. fasilitasi ijin PIRT 8. pendampingan wisata dan usaha UMKM	2024
				2. Membuat SK bupati tentang kewajiban menggunakan produk UMKM	2021						
				3. RIPPARKAB/ PERDA RIPPARKAB	2023						
				4. PERBUB CITY BRANDING	2023						
				5. MOU/blue print lintas sektor	2024						
	Pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi unggulan	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	SEKARPOTE COOLING (wisata desa kreatif berbasis potensi sebagai sarana echoo healing)	1. Menyusun Ranperda RIPPARKAB	2023	1. Menyusun dokumen perencanaan untuk desa wisata prioritas dan percontohan 2. Membangun sarana pendukung untuk desa wisata	2024	1. Melakukan deleniiasi tata ruang pada dokumen RTRW 2. Membangun jaringan Internet	2023	Melaksanakan Sosialisasi pendekatan desa wisata kepada keterlibatan masyarakat setempat	2024
				2. Membuat SK Desa Wisata	2022						
				3. Membuat Perbup Pendamping Wisata	2021						

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
						prioritas (RPPJ, bangunan branding, sarana ruang kreatif dsb) 3. Membangun jaringan penerangan sepanjang jalur nasional pantura 4. Membangun Jaringan air bersih					
			PAS GEMILANG (Pantura Agrowisata Gemilang), Program dan pilot project Percepatan pembangunan sektor kepariwisataan di Kabupaten Sampang, dengan menggunakan sample wilayah lokasi bagian pesisir utara Kabupaten Sampang	1. Membuat Perbup Pantura Agro Wisata (PAS) 2. Membuat SK Kawasan Agropolitan 3. Membuat SK TKPKP	2023	1. Menambah fasilitas edutani 2. Membangun rumah kreatif 3. Membangun homestay 4. Melengkapi sarana pengembangan produk pertanian	2023	1. Membangun aplikasi teknologi pertanian berbasis mekatronika dan IoT 2. Memasarkan melalui e-commerce dan media sosial	2023	Melakukan pendampingan untuk pelaku wisata di wilayah PAS	
	Pemasaran berbasis data dan partisipasi masyarakat	Program pemasaran pariwisata	BAPPER MAS (bank data pariwisata berbasis partisipasi masyarakat)	Meningkatkan jumlah data informasi kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang dapat diakses	2022	1. Membuat mesin layanan akses informasi umum 2. perluasan jaringan wifi gratis untuk masyarakat	2024	Membangun aplikasi bank data pariwisata	2024	Sosialisasi penggunaan data informasi pariwisata kepada masyarakat setempat	2,5M

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
				masyarakat							
Daya Saing Bisnis	Peningkatan Digitalisasi pelayanan di MPP	Program Pelayanan Penanaman Modal	SI-POS (Sistem Informasi Perijinan Online), aplikasi pelayanan perijinan untuk ijin tertentu yang tidak tercakup dalam OSS	1. Membuat SK Penguatan pendamping perijinan di kecamatan 2. Membentuk Lembaga Tenaga pendamping perijinan kecamatan dan desa	2022	Membangun MPP Building	2022	Membangun Aplikasi SI-POS		1. Melakukan Pelatihan dan pendampingan perijinan di tingkat Kecamatan dan desa 2. Melakukan pendampingan untuk pelaku usaha	
			LAPINDES (Layanan Perizinan ke Desa-desa)	1. Membuat SK Penguatan pendamping perijinan tingkat desa 2. Membuat regulasi investasi	2021	Menyediakan Mobil Keliling dan motor	2022	Membangun Aplikasi Lapindes		Melakukan elatihan pendamping perijinan di tingkat desa	
	Peningkatan Daya Saing investasi produk unggulan sampang	Program Promosi Penanaman Modal	BARING SIANG (Business Gathering Investasi Kabupaten sampang)	Prospektus pengembangan produk unggulan		Membangun pusat fasilitas bisnis				Melakukan pendampingan Lembaga bisnis (Forum sampang kreatif, Gapensi, HIPMI dll)	

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Wajah (Tampilan) Kota	Penonjolan kearifan lokal yang berciri khas Sampang menjadi branding kabupaten		TAKSI EKSPRES (TAMAN EDUKASI EKSPRESI DAN REKREASI) 1. Pengaturan wajah kota dengan menampilkan ciri khas budaya lokal 2. Penataan area alun-alun Trunojoyo	1. Membuat Perda tentang RTH 2. Membuat Perda ketertiban umum 3. Membuat Perda RTRW 4. Membuat regulasi tentang tata bangunan berciri khas Sampang	2024	1. Membangun taman/ landscaping 2. Membangun lahan parkir 3. Membangun area PKL 4. Membangun area pelayanan mobile	2024	1. Membuat Data Spasial Kabupaten Sampang 2. Melakukan instalasi Sistem Informasi Geografis (SIG/GIS) 3. Membangun Peta Tematik dan, Peta Topografi berbasis digital	2024	1. Melakukan Studi ke Bandung, Bali, dan Jogja 2. Melakukan Pendampingan Ahli dalam penataan Kota 3. Melakukan Pelatihan GIS bagi Aparatur Sipil Negara	2024
			1. RTBL (Rencana tata bangunan dan lingkungan) 2. Penyeragaman langgam bangunan khas identitas Sampang. Seperti land mark, bentuk tembok pagar perkantoran dan sekolah / fasilitas	1. Membuat Perbup pengaturan PKL dan pengguna manfaat alun Alun Trunojoyo 2. Membuat Perbup pengaturan parkir kawasan alun alun Trunojoyo dan sekitarnya 3. Membuat regulasi pengunjung 4. Membuat regulasi tentang	2024	1. Mengalokasikan CSR untuk penyeragaman kios PKL 2. Menyediakan lahan parkir yang representatif dan teratur 3. Melakukan penataan UMKM 4. Membangun jaringan wifi 5. Mengalokasikan free day	2024	Membangun aplikasi layanan masyarakat mobile keliling	2023	Melaksanakan sosialisasi tata tertib penggunaan alun-alun	2023

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
			umum lainnya	e-retribusi 5. Membentuk paguyuban UMKM							

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

4.2.2 Rencana Aksi Jangka Panjang (2029-2033)

Subab 4.2.2. menguraikan secara detail Rencana Aksi Jangka Panjang (RAJP) 2029-2033 pada Dimensi Smart Branding seperti terlihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Branding

Sub dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Pariwisata	Memajukan perekonomian, melestarikan jati diri bangsa dan melestarikan fungsi dan mutu lingkungan hidup, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	CAMPLONG REBORN (Pengembangan wisata daerah pesisir Camplong)	1. Membuat Peraturan Pemerintah (PP) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010 - 2050 2. Membuat Perbup Penataan Kawasan Camplong	2010-2050 2029	1. Membangun Rest Area Terlengkap dan Ikonik 2. Mebangun kembali Wisata Pantai Camplong 3. Membangun Pasar wisata	2029 2029	1. Membangun Aplikasi Camplong Reborn 2. Membangun Jaringan internet 3. Memanfaatkan Media sosial sebagai sarana marketing	2029	1. FS 2. Master plan 3. CHSE	2029

Sub dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	WISATA MANGROVE SRESEH (WMS) merupakan bentuk kolaborasi antar desa untuk menjadikan desa mereka dalam satu kesatuan paket daya tarik wisata yang bersinergi dengan menggabungkan masing-masing potensi desanya menjadi produk wisata yang layak jual.	Membuat Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan	2021	1. Membangun Desa Wisata 2. Membangun Perkampungan wisata tematik 3. Membangun Home stay 4. Membangun Sarana air bersih 5. Membangun Rumah kreatif 6. Membangun Nursery konservasi mangrove	2025	1. Membangun Aplikasi pengenalan wisata kuliner WMS 2. Membangun Jaringan operator 3. Memanfaatkan Media sosial 4. Membangun aplikasi Panduan konservasi mangrove	2025	1. FS 2. Master plan	2029
Daya Saing Bisnis	Peningkatan digitalisasi pelayanan di MPP	Program pengembangan iklim Penanaman Modal	MPP Digital Aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah yang berbasis elektronik untuk mengakses semua layanan yang saling terintegrasi. Masyarakat dapat mengakses semua layanan menggunakan satu akun MPP Digital dan cukup sekali mengunggah dokumen persyaratan layanan yang dibutuhkan.	1. Membuat Perbup Sampang No. 1 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan 2. Membuat PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah	2022 2021	Membangun MPP Building	2022	Membangun Aplikasi MPP Digital	2029	Melaksanakan Sosialisasi MPP Digital	2029
Wajah (Tampilan) Kota	Penonjolan kearifan lokal yang berciri khas Sampang menjadi branding kabupaten	Program penataan bangunan dan lingkungannya	SAMPANG GEMILANG: <i>Trunojoyo City Park</i> (Optimalisasi fungsi kawasan Alun-alun Trunojoyo sebagai: 1) taman kota 2) <i>site</i> layanan publik <i>on the street</i> 3) <i>creative centre</i> .	1. Menyusun Master Plan 2. Menyusun Perbup Penataan Kawasan Alun-Alun 3. Menyusun Perbup PKL	2022 2024	1. Melengkapi Perangkat keras pendukung informasi digital 2. Membangun Ruang/lokasi kreatifitas	2025 2025	1. Membangun Aplikasi tourism guiding book of sampang (buku panduan wisata sampang)	2025 2025	1. Melaksanakan Sosialisasi penggunaan aplikasi tourism guiding book of sampang	2029

Sub dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
						3. Membangun Masjid iconik		2. Membangun Aplikasi IKM Smart		(buku panduan wisata sampang) 2. Melaksana kan Sosialisasi aplikasi aplikasi IKM Smart	

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

4.3 Rencana Aksi Dimensi Smart Economy

Subbab 4.3. menguraikan secara detail Rencana Aksi Jangka Pendek (2024), Jangka Menengah (2025-2028), dan Jangka Panjang (2029-2033) pada Dimensi Smart Economy.

4.3.1 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028)

Subab 4.3.1. menguraikan Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah (RAJPM) 2024-2028 pada Dimensi Smart Economy seperti terlihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah Smart Economy

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Ekosistem Industri	Percepatan pertumbuhan aktivitas industri	1. Program Pengembangan iklim penanaman modal 2. Program Pelayanan penanaman modal 3. Program Promosi Penanaman Modal	FAIS LAGI ONLINE (Fasilitasi Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara Online)	1. Membentuk Tim Teknis Kegiatan Penanaman Modal Secara Online 2. Menyusun SOP 3. Menyusun Juknis 4. Membentuk SDM/Tim Teknis Peralatan pelayanan Inovasi FAIS LAGI ONLINE (Komputer, Printer, Scanner, dll)	2024	Melakukan instalasi Jaringan Internet	2024-2025	Membangun aplikasi untuk 1. Memfasilitasi Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara Online 2. Melihat Data Pertumbuhan Aktivitas Kegiatan Penanaman Modal Secara Online di Kabupaten Sampang	2024-2025	1. Melakukan sosialisasi Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara Online 2. Mengadakan Bimtek Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara Online	2024
	Percepatan pertumbuhan aktivitas industri	Program perencanaan dan pembangunan industri	Si Istri (Sistem Informasi Simbiosis Industri) - akses untuk suatu industri agar bisa saling bekerjasama dalam pemenuhan kebutuhannya	1. Membentuk Tim Teknis Sistem Informasi Simbiosis Industri 2. Menyusun SOP 3. Menyusun Juknis 4. Membentuk SDM/Tim Teknis Peralatan pelayanan Inovasi SI ISTRI (Komputer, Printer, Scanner, dll)	2024	Melakukan instalasi Jaringan Internet	2024-2025	Instalasi Aplikasi Sistem Informasi Simbiosis Industri untuk mengetahui Data jumlah industri di Kabupaten Sampang	2024-2025	1. Mengadakan Sosialisasi Sistem Informasi Simbiosis Industri 2. Mengadakan Bimtek Sistem Informasi Simbiosis Industri	2024

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Percepatan pertumbuhan aktivitas industri	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengembangan Ekosistem Agrowisata Kampung Milon Napote	1. Menyusun Perbup Pengembangan Ekosistem Agrowisata 2. Membentuk Tim Teknis Pengembangan Ekosistem Agrowisata Kampung Milon Napote 3. Membentuk SDM/Tim Teknis 4. Menyusun SOP 5. Menyusun Juknis	2024	1. Membangun Jaringan Internet 2. Membangun arsitektur Data Pengembangan Ekosistem Agrowisata Kampung Milon Napote	2024-2025	Membangun sistem Smart Farming	2024-2025	1. Mengadakan Sosialisasi Pengembangan Ekosistem Agrowisata Kampung Milon Napote 2. Mengadakan Bimtek Pengembangan Ekosistem Agrowisata Kampung Milon Napote 3. Mengadakan Action Plan Agrowisata Kampung Milon Napote	2024
Kesejahteraan Masyarakat	Penguatan daya saing dengan peningkatan produktifitas dan inovasi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Smart Bartola (Pembibitan Bawang Merah Tanpa Olah Lahan)	1. Membentuk SDM/Tim Teknis 2. Membentuk Tim Teknis Pembibitan Bawang Merah Tanpa Olah Lahan 3. Menyusun SOP 4. Menyusun Juknis	2024	1. Membangun Jaringan Internet 2. Membangun Data Pengembangan Pembibitan Bawang Merah Tanpa Olah Lahan	2024-2025	Membangun sistem Smart Irrigation (IT)	2024-2025	1. Mengadakan Sosialisasi Pembibitan Bawang Merah Tanpa Olah Lahan 2. Mengadakan Bimtek Pembibitan Bawang Merah Tanpa Olah Lahan 3. Mengadakan Action Plan Pembibitan Bawang Merah Tanpa Olah Lahan	2024

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Budidaya Tanaman Sehat (BTS) bertujuan mengedukasi masyarakat agar terbiasa menggunakan bahan pangan lokal yang terkontrol mutu pangannya, dalam artian proses budidaya tanaman akan diawasi dengan melakukan tindakan preventif untuk menghindari penggunaan bahan-bahan kimia (nutrition support) untuk tanaman.	1. Membentuk SDM/Tim Teknis 2. Membentuk Tim Teknis Budidaya Tanaman Sehat (BTS) 3. Menyusun SOP 4. Menyusun Juknis	2024	Membangun Data Pengembangan Budidaya Tanaman Sehat (BTS)	2024-2025	Memanfaatkan aplikasi (Apps): 1. Google Drive 2. Google Map 3. Microsoft Office	2024-2025	1. Mengadakan Sosialisasi Budidaya Tanaman Sehat (BTS) 2. Mengadakan Bimtek Budidaya Tanaman Sehat (BTS) 3. Mengadakan Action Plan Budidaya Tanaman Sehat (BTS)	2024

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	PEMPEK BANG DEDENG (PEndaMpingan n PEngolah iKan BandeNG D'kampoEng banDENG)	1. Membentuk SDM/Tim Teknis 2. Membentuk Tim PEndaMpingan PEngolah iKan BandeNG D'kampoEng ban DENG 3. Menyusun SOP 4. Menyusun Juknis	2024	Membangun Data Pengembangan PEndaMpingan PEngolah iKan BandeNG D'kampoEng banDENG	2024-2025	Memanfaatkan aplikasi (Apps): 1. Google Drive 2. Google Map 3. Microsoft Office	2024-2025	1. Mengadakan Sosialisasi PEndaMpingan PEngolah iKan BandeNG D'kampoEng ban DENG 2. Mengadakan Bimtek PEngolah iKan BandeNG D'kampoEng ban DENG	2024
	Pengembangan komunitas masyarakat cerdas melalui kemitraan dunia usaha dan pemerintah oleh FBKK (Forum Bursa Kerja Khusus)	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	SIAP KERJA (Sistem Informasi Pencari Kerja)	1. Membentuk SDM/Tim Teknis Peralatan pelayanan Inovasi SIAP KERJA (Komputer, Printer, Scanner, dll) 2. membentuk Tim Teknis Sistem Informasi Pencari Kerja 3. Menyusun SOP 4. Menyusun Juknis	2024	1. Membangun Jaringan Internet 2. Membangun Data Sistem Informasi Pencari Kerja	2024-2025	Melakukan instalasi Aplikasi Sistem Informasi Pencari Kerja	2024-2025	1. Mengadakan Sosialisasi Sistem Informasi Pencari Kerja 2. Mengadakan Bimtek Pengisian Sistem Informasi Pencari Kerja	2024
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	SIPADU (Sistem Integrasi Pembiayaan Alternatif dari Dunia Usaha)	1. Membentuk SDM/Tim Teknis Peralatan pelayanan Inovasi SIPADU (Komputer, Printer, Scanner, dll) 2. Membentuk Tim Teknis Sistem Integrasi Pembiayaan Alternatif dari	2024	1. Membangun Jaringan Internet 2. Membangun Data Integrasi Pembiayaan Alternatif dari Dunia Usaha	2024	Melakukan instalasi Aplikasi Sistem Integrasi Pembiayaan Alternatif dari Dunia Usaha	2024-2025	1. Mengadakan Sosialisasi Sistem Integrasi Pembiayaan Alternatif dari Dunia Usaha 2. Mengadakan Bimtek Pengisian Sistem Integrasi Pembiayaan Alternatif dari Dunia Usaha	2024

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
				Dunia Usaha 3. Menyusun SOP 4. Menyusun Juknis							
Ekosistem Transaksi Keuangan	Menyusun konsep CSR industri terpadu untuk masyarakat	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Lentera BPHTB (Layanan Elektronik Terintegrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)	1. Membentuk SDM/Tim Teknis Peralatan pelayanan Inovasi Lentera BPHTB (Komputer, Printer, Scanner, dll) 2. Membentuk Tim Teknis Layanan Elektronik Terintegrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 3. Menyusun SOP 4. Menyusun Juknis	2024	1. Membangun Jaringan Internet 2. Membangun Data Layanan Elektronik Terintegrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2024	Melakukan instalasi Aplikasi Layanan Elektronik Terintegrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2024-2025	1. Mengadakan Sosialisasi Layanan Elektronik Terintegrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2. Mengadakan Bimtek Layanan Elektronik Terintegrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	2024
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	SIPARIS (Sistem Informasi Pendapatan Daerah Real Time Sampang)	1. Membentuk SDM/Tim Teknis Peralatan pelayanan Inovasi SIPARIS (Komputer, Printer, Scanner, dll) 2. Membentuk Tim Teknis Sistem Informasi Pendapatan Daerah Real Time Sampang 3. Menyusun SOP 4. Menyusun Juknis	2024	1. Membangun Jaringan Internet 2. Membangun Data Layanan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Real Time Sampang	2024	Melakukan instalasi Aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah Real Time Sampang	2024-2025	1. Mengadakan Sosialisasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah Real Time Sampang 2. Mengadakan Bimtek Layanan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Real Time Sampang	2024

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
		Program pemberdayaan UMKM	P4USKU (Pusat Pelayanan, pengembangan dan Pembinaan KUMKM)	1. Membentuk Tenaga Pendamping (TP2KUM) 2. Membentuk Tim Teknis pengembangan dan Pembinaan KUMKM 3. Menyusun SOP 4. Menyusun Juknis	2024	1. Membangun Jaringan Internet 2. Membangun Data Pelaku Usaha di Kabupaten Sampang	2024	Membangun aplikasi Pusat Pelayanan, pengembangan, dan Pembinaan KUMKM	2024-2025	1. Melakukan Pembinaan KUMKM 2. Mengadakan Sosialisasi Sampang Satu Data 3. Mengadakan Bimtek Lanjutan Tim Teknis Sistem Informasi Simbiosis Industri 4. Mengadakan Sosialisasi Satu Akses Layanan kepada masyarakat	2024

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

4.3.2 Rencana Aksi Jangka Panjang (2029-2033)

Subab 4.3.2. menguraikan secara detail Rencana Aksi Jangka Panjang (RAJP) 2029-2033 pada Dimensi Smart Economy seperti terlihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Economy

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Ekosistem Industri	Percepatan pertumbuhan aktivitas industri	Program pemberdayaan UMKM	Sreseh Bangkit sebuah upaya meningkatkan nilai jual produk-produk olahan di Kecamatan Sreseh yang kebanyakan berasal dari bahan ikan agar lebih <i>marketable</i> dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dengan melihat potensi komoditas produk olahan yang dapat memenuhi kebutuhan pasar	1. Membentuk Tim Teknis Sreseh Bangkit 2. Menyusun SOP 3. Menyusun Juknis	2029	Membangun Data Pengembangan Inovasi Sreseh Bangkit	2029-2030	Memanfaatkan aplikasi: 1. Google Drive 2. Google Map 3. Microsoft Office	2029	1. Mengadakan Sosialisasi Inovasi Sreseh Bangkit 2. Mengadakan Action Plan Inovasi Sreseh Bangkit	2029
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	GMF (Gubuk Milenial Farm) merupakan wadah dalam rangka percepatan regenerasi petani yang lebih responsif dan akomodatif terhadap perkembangan usaha di sektor pertanian dengan balutan penguasaan IT. Serta menarik minat petani milenial agar kembali melirik usaha pertanian yang diberikan bekal teknologi budidaya sampai dengan pemasaran untuk mengelola usaha tani yang memiliki ekonomis tinggi. GMF diharapkan dapat mendorong para milenial kembali ke desa menggerakkan ekonomi desa melalui pengelolaan usaha pertanian yang lebih baik dan terintegrasi dengan pasar.	1. Membentuk Tim Teknis Gubuk Milenial Farm 2. Menyusun SOP 3. Menyusun Juknis	2029	1. Membangun Jaringan Internet 2. Membangun Data Pengembangan Gubuk Milenial Farm	2029-2030	Membangun aplikasi Smart Irrigation (IT)	2029	1. Mengadakan Sosialisasi Gubuk Milenial Farm 2. Mengadakan Bimtek Gubuk Milenial Farm 3. Mengadakan Action Plan Gubuk Milenial Farm	2029

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Kesejahteraan Masyarakat	Penguatan daya saing dengan peningkatan produktivitas dan inovasi	Program Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	SIAP KERJA (Sistem Informasi Pencari Kerja)	1. Membentuk SDM/Tim Teknis Peralatan pelayanan inovasi SIAP KERJA (Komputer, Printer, Scanner, dll) 2. Mereview SOP Layanan SIAP KERJA (Sistem Informasi Pencari Kerja)	2029	Membangun Jaringan Internet	2029	Mengembangkan fitur layanan Layanan SIAP KERJA (Sistem Informasi Pencari Kerja)	2029	1. Mengadakan Sosialisasi Sistem Informasi Pencari Kerja 2. Mengadakan Bimtek Pengisian Sistem Informasi Pencari Kerja	2029
Ekosistem Transaksi Keuangan	Membangun sistem pembayaran <i>cashless</i> yang aman	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	SIPARIS (Sistem Informasi Pendapatan Daerah Real Time Sampang)	1. Membentuk SDM/Tim Teknis Peralatan pelayanan inovasi SIAP KERJA (Komputer, Printer, Scanner, dll) 2. Mereview SOP Layanan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Real Time Sampang	2029	Membangun Jaringan Internet	2029	Mengembangkan fitur layanan Layanan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Real Time Sampang	2029	1. Mengadakan Sosialisasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah Real Time Sampang 2. Mengadakan Bimtek Layanan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Real Time Sampang	2029

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

4.4 Rencana Aksi Dimensi *Smart Living*

Subbab 4.4 menguraikan secara detail Rencana Aksi Jangka Pendek (2024), Jangka Menengah (2025-2028), dan Jangka Panjang (2029-2033) pada Dimensi Smart Living.

4.4.1 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028)

Subbab 4.4.1 menguraikan Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah (RAJPM) 2024-2028 pada Dimensi Smart Living seperti terlihat pada

Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah Smart Living

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Harmonisasi Tata Ruang	Menata Lingkungan sesuai rencana tata ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Penetapan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci tata Ruang Kabupaten)	SISTA (Sistem Informasi Tata Ruang)	Menetapkan Perda tentang Rencana Tata Ruang (RTL)	2024	Menambahkan Ruang SDM Penataan Ruang	2023 - 2028	Menyediakan media/perangkat untuk menyebarluaskan	2023 - 2028	Melaksanakan Sosialisasi terkait Rencana Tata Ruang	2024
Kesehatan	Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSMZ menjadi RS pendidikan Tipe B	1. Membuat SK Bupati tentang RS Pendidikan 2. Membuat kerjasama dengan Pihak Pendidikan untuk pendampingan RS Pendidikan 3. Membuat kerjasama dengan CSR untuk Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Pendukung	2024-2028	1. Menambahkan Sarana Prasarana Canggih 2. Menambahkan layanan baru 3. Menambahkan jam layanan poli spesialis 4. Menambahkan dokter sub spesialis 5. Menyediakan bangunan rumah sakit yang representatif (relokasi)	2024-2028	Membangun dan mengintegrasikan sistem berikut: 1. SIMRS 2. API Integrasi Alat Kesehatan		1. Mengadakan pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM RS 2. Mengadakan Fellowship 3. Mengadakan Subspesialis	2024
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	ASIKMAS ver.2 (Aplikasi Sistem Informasi Puskesmas)	1. Membuat Perbup tentang pedoman ASIKMAS 2. Menyusun SOP 3. Membentuk Tim ASIKMAS	2024	1. Membangun Jaringan internet sampai desa (Pustu- Polindes) 2. Menyediakan Laptop di masing-masing desa 3. Menyediakan Server	2024	Membangun Aplikasi Asikmas dan melakukan maintenance ASIKMAS	2024	1. Mengadakan Sosialisasi ASIKMAS pada Pemangku kepentingan dan pelaksana 2. Mengadakan Kalakarya antar Puskemas 3. Mengadakan Pelatihan ASIKMAS pada pelaksana	2024

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Mempercepat Penurunan Angka Kematian Ibu, Balita dan Stunting	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jari Kaki Lima V.23 (Jaring risiko berbasis aplikasi kesehatan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat)	1. Melakukan perubahan perubahan Perbup 35/2020 2. Menyusun SOP 3. Menyusun Juknis pengoperasian aplikasi 4. Membentuk tim Jari Kaki Lima V.23	2024	1. Membangun Jaringan internet sampai desa (Pustu- Polindes) 2. Menyediakan laptop di masing-masing desa 3. Menyediakan Server 4. Menyediakan Gelang dan Smart watch untuk screening dan pemantauan 5. Membuat Booklet menu PMT lokal dan edukasi asuhan gizi	2024- 2028	Membangun aplikasi Jari kaki Lima V.23	2024	1. Mengadakan Sosialisasi JARI KAKI LIMA V.23 pada Pemangku kepentingan dan pelaksana 2. Mengadakan Kalakarya antar- Puskemas 3. Mengadakan Pelatihan JARI KAKI LIMA V.23 pada pelaksana	2024
Transportasi	Mewujudkan transportasi yang menjamin kemudahan mobilitas bagi individual, publik	Program Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	"Trans Sampang"	Membentuk dan Menunjuk Perusahaan Angkutan untuk mengelola Angkutan Masal	2025	Membangun terminal Type C	2028	Membangun Aplikasi Trayek	2025	Mengadakan Sosialisasi Penggunaan Trans Sampang	2025
				Menyusun Perda Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2025	Membangun halte sebagai tempat pemberhentian sementara	2025	-	-	-	-
				Menetapkan Trayek	2024	-	2025	-	--	-	2024
	Menjamin ketersediaan perlengkapan jalan guna mewujudkan keselamatan pengguna jalan	Program Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	"Sampang Terang" (Pemenuhan PJU Ruas Jalan Kabupaten dengan KWH Smart yang bisa mendeteksi	Menyusun Perda tentang Alat Penerangan Jalan	-	Membuat Pengadaan dan Pemasangan KWH Smart pada Panel KWH PJU Melakukan Penggantian Lampu PJU Son T ke PJU LED	2025- 2028 2024- 2028	Mengembangkan Aplikasi SAMSON	-	Mengadakan Sosialisasi Perda dan Perbup	-

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
			Lampu mati dalam 1 pusat kontrol)								
			TRALI BESI (Traffic Light Berbasis Sistem Informasi) merupakan lampu lalu lintas yang dilengkapi dengan kamera pendeteksi untuk menghitung kepadatan	Menyusun Perbup tentang pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas	-	Mengadakan Traffic Light cerdas		Mengembangkan Aplikasi CCTV			
				Menyusun SOP		Membangun Ruang Command Center	2025				
	Mewujudkan transportasi laut yang menjamin kemudahan mobilitas bagi individual publik maupun kebutuhan logistik daerah	Program penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	"Angkutan Express" (Penyediaan Angkutan Penyeberangan Bersubsidi guna Kelancaraan Penyeberangan Sampang Pulau Mandangin)	Membentuk dan menunjuk perusahaan pelayaran untuk mengelola Angkutan Penyeberangan	2024	Membangun Terminal Penumpang	2025	Mengembangkan aplikasi SIMPEL			
				Membuat Perda Penyusunan tentang Pelayaran							

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

4.4.2 Rencana Aksi Jangka Panjang (2029-2033)

Subab 4.4.2 menguraikan secara detail Rencana Aksi Jangka Panjang (RAJP) 2029-2033 pada Dimensi Smart Living seperti terlihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Living

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Harmonisasi Tata Ruang	Penataan Lingkungan sesuai rencana tata ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Penetapan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci tata Ruang Kabupaten)	Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	1. Membuat Perda RPIK Nomor 9 Tahun 2023 2. Membentuk Tim Teknis Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) 3. Menyusun kebijakan Penguatan dukungan terhadap kebijakan terkait upaya pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana	2023 2025	1. Menyediakan sarpras jalan 2. Membangun infrastruktur dan penyediaan energi/listrik	2026 2026	Membuat Aplikasi monev dan pelaporan mengenai perkembangan perwilayahan industri	2028-2033	1. Mengadakan Sosialisasi Rencana Kerja Pengembangan KPI 2. Mengadakan Penyusunan Action Plan KPI tahunan per-bidang/urusan/OPD	2025 2025
Kesehatan	Meningkatkan Akses mutu layanan dasar dan rujukan Pendidikan	Program Sistem Informasi layanan kesehatan dasar yang terintegrasi	ASIKMAS Next Level	1. Membuat Perubahan Perbup tentang pedoman ASIKMAS 2. Menyusun SOP ASIKMAS Next Level 3. Membentuk Tim ASIKMAS Next Level	2029	1. Membangun Jaringan internet sampai desa (Pustu- Polindes) 2. Menyediakan Laptop di masing-masing desa 3. Membangun sistem berbasis Server 4. Menambah perangkat keras	2029	Membuat Aplikasi AsikmasNext Level dan melakukan Maintenance ASIK MAS Next Level	2028	1. Mengadakan Sosialisasi ASIKMAS Next Level pada Pemangku kepentingan dan pelaksana 2. Mengadakan Kalakarya antar-Puskemas	2029

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
						dan server pendukung				3. Mengadakan Pelatihan ASIKMAS Next Level pada pelaksana	
Transportasi	Mewujudkan transportasi darat yang menjamin kemudahan mobilitas bagi individual, publik maupun kebutuhan logistik daerah	Program Penyelenggaraan Jalan	Jalan Lintas Selatan Madura (JLSM)	1. Membentuk Tim Percepatan Pembangunan JLSM 2. Mengajukan Permohonan pemakaian lahan ke PT Garam 3. Membuat Berita Acara serah terima aset	2029-2033	1. Menyediakan jalan akses menuju jembatan 2. Membangun jembatan 3. Menyediakan sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan	1. 2029 2. 2033	1. Melakukan instalasi CCTV Pemantau Lalu Lintas 2. Membuat Konektivitas trayek JLSM dengan Google Map	2033	1. Mengadakan Sosialisasi kepada warga terdampak pembangunan JLSM 2. Mengadakan Manajemen rekayasa lalu lintas	2029
	Mewujudkan transportasi laut yang menjamin kemudahan mobilitas bagi individual publik maupun kebutuhan logistik daerah	Program Penyelenggaraan Jalan	"Angkutan Express" (Penyediaan Angkutan Penyeberangan Bersubsidi guna Kelancaraan Penyeberangan Sampang Pulau Mandangin)	1. Menyusun Perubahan Penetapan Tarif Penyeberangan 2. Menambah Jumlah armada dengan kapasitas 100 penumpang 3. Menambah armada kapal Ro-ro menuju Pulau Mandangin	2029	Membangun Fasilitas Pelabuhan	2029-2033	Mengembangkan Aplikasi SIMPEL	2029	Mengadakan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran	2029-2033

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

4.5 Rencana Aksi Dimensi *Smart Society*

Subbab 4.5 menguraikan secara detail Rencana Aksi Jangka Pendek (2024), Jangka Menengah (2025-2028), dan Jangka Panjang (2029-2033) pada Dimensi Smart Society.

4.5.1 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028)

Subbab 4.5.1 menguraikan Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah (RAJPM) 2024-2028 pada Dimensi Smart Society seperti terlihat pada

Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah Smart Society

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Interaksi Masyarakat	Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan meningkatkan Kualitas serta memfasilitasi Penanganan Konflik di Daerah	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik di Daerah	RAMPAK NAONG (Reharmonisasi Penanganan konflik melalui Pembinaan Keagamaan dan Gotong Royong)	1. Membuat SK Kepala Dinas 2. Membuat SK Inovasi Daerah 3. Membuat SK Kepala Daerah	2022	1. Membangun sistem Kolaborasi Jejaring baik internal maupun eksternal Masyarakat 2. Menyediakan dukungan Sarana Komputerisasi	2022	Membangun Aplikasi Panduan Penanganan Konflik Sosial	2023	1. Mengadakan Sosialisasi dalam menjaga toleransi melalui kegiatan pembinaan kehidupan beragama 2. Mengadakan Sosialisasi peningkatan Partisipasi dan kapasitas pemberdayaan masyarakat melalui program-program Dinas Teknis terkait	2023

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Ekosistem Belajar/ Pendidikan	Pengembangan literasi Digital di setiap satuan pendidikan	Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	Sapu Lidi (Satuan Pendidikan dengan Literasi Digital)	1. Membuat SK Satuan Pendidikan 2. Membuat SK Kepala Dinas 3. Membuat SK Inovasi Daerah	2024	Membangun jaringan Internet untuk mendukung pengembangan aplikasi	2024	1. Membangun Aplikasi penilaian 2. Membangun Aplikasi perpustakaan digital	2025	1. Mengadakan Sosialisasi keberadaan Pojok Baca di Satuan Pendidikan 2. Mengadakan Sosialisasi keberadaan Taman Baca di Satuan Pendidikan	2025
	Memberikan kesempatan kepada masyarakat putus sekolah dan /atau tidak sekolah untuk memperoleh layanan Pendidikan dan Pengetahuan melalui Program Pendidikan Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	SILAT PSHT (akSI LAYanan keseTaraan Pemberian keSempatan Harapan masyarakat)	1. Membuat SK Satuan Pendidikan 2. Membuat SK Kepala Dinas 3. Membuat SK Inovasi Daerah	2023	1. Membangun sistem Kolaborasi jejaring Dinas Pendidikan, Kemenag, dan Dewan Pendidikan 2. Membangun Bank Data anak putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah	2023	Membangun Sistem Informasi data anak putus sekolah dan tidak melanjutkan	2024	Membuka kesempatan kepada masyarakat putus sekolah dan/atau tidak sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan dan pengetahuan melalui Program Pendidikan Kesetaraan	2025
	Meningkatkan kebermanfaatan perpustakaan dan pelibatan masyarakat	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	KRAFT (Kelas Kreatif Dispusip)	1. Membuat SK Kepala Dinas 2. Membuat SK Inovasi Daerah 3. Membuat Kemitraan perpustakaan dengan berbagai komunitas	2022	Membangun Instalasi jaringan Internet pendukung	2023	1. Membangun Aplikasi SIM 2. Menyusun Bahan perpustakaan (manual book dan atau ebook)	2023	1. Mengadakan Bimtek SPP TIK (Strategi Pengembangan Perpustakaan Teknologi Informasi dan Komunikasi) 2. Mengadakan Pendamping	2023

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
										an dan monev pada perpustakaan Desa mitra	
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	SISI PENA (Aksi Automasi Perpustakaan Binaan)	1. Membuat SK Kepala Dinas 2. Membuat SK Inovasi Daerah 3. Membuat Kemitraan perpustakaan dengan berbagai komunitas	2023			1. Membangun Aplikasi SIM Informasi 2. Menyusun Bahan perpustakaan (manual book dan atau ebook)	2024	Mengadakan Pembinaan dan pendampingan perpustakaan mitra	2024
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	SIDORA (Kreasi Dongeng Ceria)	1. Membuat SK Kepala Dinas 2. Membuat SK Inovasi Daerah	2022	Membangun sistem Kolaborasi dengan jejaring Dinas pendidikan, Kemenag	2022	Membangun Aplikasi dongeng digital	2024	Mengadakan Sosialisasi perpustakaan melalui Pusling, CFD, Rumpin, medongeng dan sosialisasi budaya baca lainnya	2024
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	dMaca Sampang (Sampang Maca Digital)	1. Membuat SK Kepala Dinas 2. Membuat SK Inovasi Daerah	2021	1. Melengkapi Sarana dan prasarana Komputer/laptop/gawai 2. Melakukan Instalasi jaringan internet	2025	Membangun Aplikasi untuk akses ke koleksi buku digital	2025	Mengadakan Sosialisasi penggunaan aplikasi berbasis mobile untuk kemudahan membaca buku digital	2025
Keamanan Masyarakat	Pencegahan gangguan trantibum linmas melalui pembentukan dan pemberdayaan	Menyelenggarakan ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat	Satlinmas Re-born	Menerapkan Peraturan Bupati Sampang No. 46 Tahun 2022	2022	1. Melengkapi Sarana dan prasarana Komputer/laptop/gawai	2022	Membangun Aplikasi Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satuan	2022	1. Mengadakan Sosialisasi Perbup 2. Mengadakan Bimtek	2025

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Satlinmas					i 2. Melakukan Instalasi jaringan internet		Perlindungan Masyarakat		Pembentukan Satlinmas 3. Mengadakan pemberdayaan/ Peningkatan kapasitas Satlinmas	
	Peningkatan kapasitas masyarakat berbasis komunitas dan pelayanan Penanganan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	JAGA RAGA (Jaga Warga Jaga Keluarga)	1. Membuat SK Pembentukan Destana 2. Membuat SK Inovasi Daerah	2022	1. Melengkapi Sarana dan prasarana Komputer/ laptop/gawai 2. Melakukan Instalasi jaringan internet	2023	Membangun aplikasi DESTANA	2024	Mengadakan Sosialisasi JAGA RAGA	2028
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	LANCENG DARUNA (Layanan Cepat Tanggap Darurat Bencana)	1. Membuat SK TRC 2. Membuat SK Inovasi Daerah 3. Membuat MoU 4. Membuat Perbup Penyelamatan Daerah	2022	1. Melengkapi Sarana dan prasarana Komputer/ laptop/gawai 2. Melakukan Instalasi jaringan internet	2022	Membangun Sistem Informasi Pelayanan Aduan Penyelamatan berbasis Aplikasi Medsos	2024	1. Mengadakan Penguatan TRC dengan pelatihan kedaruratan 2. Mengadakan Sosialisasi dan Pemberian materi kebencanaan ke sekolah-sekolah	2028

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
	Peningkatan pelayanan pemadam kebakaran dan non kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/ Kota	Mellak malam (Patroli Malam) abhereng Si Pakar (Sistem Informasi Pengaduan Kebakaran)	1. Membuat Perbup Sampang No. 121 tahun 2022 tentang SOTK Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah 2. Membuat SK TIM Inovasi 3. Membuat SOP	2023	1. DPA (DAU) 2. GPS Mobil DAMKAR	2023	Membuat Aplikasi Sipakar berbasis Android	2024	Mengadakan Sosialisasi Cara Penggunaan Aplikasi Aaplikasi Sistem Informasi Pengaduan Kebakaran (SIPAKAR)	2024
	Mengintegrasikan sistem informasi kegawatdaruratan	Pelayanan transportasi dan akses pelayanan emergency melalui program 112 terintegrasi	Sampang 112 (call center kegawatdaruratan terpadu)	1. Membuat MoU Instansi terkait (Dinkes, BPBD, DAMKAR, SATPOL PP, DISKOMINFO, dan POLRES) 2. Membuat Perbup Sistem Informasi Kegawat Daruratan yang terintegrasi 3. Membentuk Tim Kegawatdaruratan 4. menyusun SOP 5. Membuat permohonan ke direktorat jenderal	2024	Membangun Ruang untuk call center dan Sarpras	2024	Membuat Aplikasi Call Center terintegrasi	2024	1. Mengadakan Bimtek kepada SDM 2. Mengadakan Sosialisasi ke masyarakat di semua kecamatan dan desa	2024

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
				6. melaksanakan pengawasan pelaksanaan layanan Sampang 112							

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

4.5.2 Rencana Aksi Jangka Panjang (2029-2033)

Subab 4.5.2 menguraikan secara detail Rencana Aksi Jangka Panjang (RAJP) 2029-2033 pada Dimensi Smart Society seperti terlihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Society

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Interaksi Masyarakat	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik di Daerah	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik di Daerah	RAMPAK NAONG (Reharmonisasi Penanganan konflik melalui Pembinaan Keagamaan dan Gotong Royong)	1. Membuat Keputusan Kepala Dinas 2. Membuat SK Inovasi Daerah	2029	1. Peningkatan kualitas kolaborasi Jejaring baik internal maupun eksternal 2. Penguatan komunikasi melalui FGD, Sosialisasi dan unsur pembinaan lainnya 3. Pemberdayaan Masyarakat	2029	1. Sistem Informasi pendukung Rampak Naong 2. Penambahan fitur 3. Jaringan Internet	2029	1. Sarasehan kerukunan umat beragama dan antar kelompok masyarakat 2. Menjaga toleransi keberagaman paham keagamaan melalui berbagai kegiatan pembinaan keagamaan 3. Peningkatan Partisipasi dan kapasitas pemberdayaan	2023

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
										masyarakat melalui program-program Dinas Teknis terkait 4. Harmonisasi sosial masyarakat dan Harkamtibmas	
Ekosistem Belajar/ Pendidikan	Pengembangan literasi Digital di setiap satuan pendidikan	Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	Sapu Lidi (Satuan Pendidikan dengan Literasi Digital)	1. Membuat kebijakan tentang Digitalisasi Perpustakaan 2. Membuat SK pemanfaatan aplikasi digital dalam mengembangkan pembelajaran	2029	1. Menyediakan IT untuk mendukung perpustakaan digital 2. Menyediakan Perpustakaan 3. Menyediakan Pojok Baca 4. Menyediakan Taman Baca	2029	1. Membangun sistem Perpustakaan digital 2. Membangun Taman Baca digital 3. Membangun kelas daring/virtual	2029	1. Mengadakan sosialisasi Pemanfaatan perpustakaan Digital 2. Mengadakan sosialisasi sistem Baca digital	2029
Keamanan Masyarakat	Meningkatkan layanan call center kegawatdaruratan dan non kegawatdaruratan terintegrasi	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Sampang 112 (Call Center Terintegrasi)	1. Mereviu PERBUB Sistem Informasi Kegawat Daruratan yang terintegrasi 2. Mereviu dan penyesuaian SOP Sampang 112	2029	Menambahkan sarpras di Smart Room/command center	2029	Melakukan Peningkatan fungsi dan penambahan fitur layanan Aplikasi Call Center terintegrasi	2029	Melaksanakan Perluasan sosialisasi masyarakat terhadap Call Center	2029

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

4.6 Rencana Aksi Dimensi *Smart Environment*

Subbab 4.6 menguraikan secara detail Rencana Aksi Jangka Pendek (2024), Jangka Menengah (2025-2028), dan Jangka Panjang (2029-2033) pada Dimensi Smart Environment.

4.6.1 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028)

Subab 4.6.1 menguraikan Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah (RAJPM) 2024-2028 pada Dimensi Smart Environment seperti terlihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah Smart Environment

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Proteksi Lingkungan	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Pemanfaatan/ Pengembangan Wisata Lon Malang Berbasis Lingkungan (Pengembangan wisata pesisir pantai menjadi wisata taman keanekaragaman hayati)	1. Membuat SK Tim Kabupaten 2. Membuat Anggaran Pendukung (CSR, APBD Kabupaten)	2024 s/d 2025	Melengkapi sarana dan prasarana pengembangan wisata berbasis lingkungan	2024 s/d 2025	Memanfaatkan Aplikasi Kominfo Sampang	2024 s/d 2025	MelaksanakanSo sialisasi/ Bimtek sekolah sedekah sampah dan pengelolaan lingkungan kepada lembaga di wilayah Kabupaten Sampang	2024 s/d 2025
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Permukaan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Gerakan Sadar Panen Air Hujan (GESAPU) Gerakan masyarakat menampung air hujan untuk persediaan air bersih	1. Membuat SK Tim Kabupaten 2. Membuat Anggaran Pendukung (CSR, APBD Kabupaten)	2024 s/d 2025	Melengkapi sarana dan prasarana GESAPU	2024 s/d 2025	Memanfaatkan Aplikasi Kominfo Sampang	2024 s/d 2025	Melaksanakan Sosialisasi/ Bimtek Teknologi Panen Air Hujan di Desa Pulau Mandangin Kabupaten Sampang	2024 s/d 2025

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Pengelolaan Sampah dan Limbah	Peningkatan sistem pengelolaan sampah anorganik	Program pengelolaan sampah	Sekolah Sedekah Sampah (Triple S) Program kesadaran warga sekolah untuk memilah sampah dan menyedekahkan hasil pemilahan untuk kepentingan sosial sekolah	1. Membuat SK Tim Kabupaten 2. Membuat MOU Lembaga Keuangan (BNI, Pegadaian) 3. Membuat Anggaran Pendukung (CSR, APBD Kabupaten)	2024 s/d 2025	1. Menyediakan Bak Sampah 2. MenyediakanK eranjang Sampah Plastik Ekonomis	2024 s/d 2025	Membangun Aplikasi Induk SISPELING (Sistem Pelayanan Lingkungan).	2024 s/d 2025	Melaksanakan Sosialisasi/ Bimtek sekolah sedekah sampah dan pengelolaan lingkungan kepada lembaga di wilayah Kabupaten Sampang	2024 s/d 2025
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Program Jemput Limbah Tinja Sehat (PELITA Sehat) (Program pemerintah penyediaan sarana instalasi penyediaan air limbah tinja)	1. Membuat SK Tim Inovasi 2. Menyusun SK Tim Kabupaten	2025 s/d 2028	Melengkapi sarana dan prasarana	2025 s/d 2028	Membangun Aplikasi Induk SISPELING (Sistem Pelayanan Lingkungan).	2025 s/d 2028	Melaksanakan Pelatihan teknologi RDF (Refuse-Derived Fuel) kepada petugas DLH	2025 s/d 2028
Tata Kelola Energi	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi konversi limbah padat menjadi energi	Program Pengelolaan Sampah	Recyle Center (Pusat Daur Ulang)	1. Membuat SK Tim Inovasi 2. Menyusun SK Tim Kabupaten	2025 s/d 2028	Melengkapi sarana dan prasarana	2025 s/d 2028	Membangun Aplikasi Induk SISPELING (Sistem Pelayanan Lingkungan).	2025 s/d 2028	Melaksanakan Pelatihan teknologi RDF (Refuse-Derived Fuel) kepada petugas DLH	2025 s/d 2028

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

4.6.2 Rencana Aksi Jangka Panjang (2029-2033)

Subab 4.6.2 menguraikan secara detail Rencana Aksi Jangka Panjang (RAJP) 2029-2033 pada Dimensi Smart Environment seperti terlihat pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Rencana Aksi Jangka Panjang Smart Environment

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
Proteksi Lingkungan	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Edukasi Lingkungan Berbasis Wisata untuk pengembangan ekonomi (Ecofarm, Eco GreenPark)	1. Membuat SK Penetapan Lokasi Eco Farm dan GreenPark 2. Menyusun APBD 3. Mengajukan kerjasama CSR 4. Membuat SK Tim Teknis 5. Membuat PKS antara OPD terkait 6. Membuat Regulasi terkait tutupan lahan dan RTH (Ruang terbuka hijau)	2029-2033	1. Membangun Lahan EcoFarm 2. Membangun Lahan Eco Green Farm 3. Membangun Armada operasional 4. Membangun Green House 5. Melengkapi Mesin pencacah organik 6. Membangun Komposter	2029-2033	Membangun aplikasi Peta/DED pembangunan Smart Eco	2029-2033	1. Mengadakan Pelatihan pembibitan 2. Mengadakan Pelatihan Komposting Biopori dan sumur resapan.	2029-2033
		Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	(SISPELTA) Sistem Jaringan Pemantauan Lingkungan Tepat dan Akurat	1. Membuat SK Peningkatan parameter Akreditasi Laboratorium Lingkungan 2. Membuat SK Pengelolaan LB3 3. Membuat SK Peningkatan manajemen K3 4. Membuat SK Dokumen mutu laboratorium Lingkungan	2029-2033	1. Menambahkan alat AAS (Atomic Absorption Spectrophotometer) 2. Melengkapi Alat pendukung sampling	2029-2033	1. Membangun Sistem jaringan aplikasi dan laporan pemantauan 2. Membangun Bank data dokumen lingkungan hasil pemantauan	2029-2033	1. Mengadakan sosialisasi penggunaan Handbook standard methods 2. Mengadakan sosialisasi ISO/IEC 17025: 2017 3. Mengadakan sosialisasi SNI Analisa masing-masing parameter.	2029-2033

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun							
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun
										4. Mengadakan pelatihan parameter baru.	
Pengelolaan Sampah dan Limbah	Peningkatan sistem pengelolaan sampah anorganik	Program pengelolaan sampah	Sistem jaringan sedekah sampah	1. Membuat SK pembentukan tim sedekah sampah 2. Membuat SK kebijakan Pelayanan berbasis aplikasi 3. Membuat SK pembentukan Program adiwiyata	2029-2033	1. Membangun Sistem Jaringan sedekah sampah 2. Mengadakan Armada pengangkutan 3. Menyediakan Bank sampah induk 1. Membangun Sarana pemilah 2. Membangun Sarana pengolah sampah	2029-2033	Membangun Aplikasi layanan dan pelaporan	2029-2033	1. Mengadakan sosialisasi tentang Sekolah adiwiyata 2. Mengadakan Pelatihan pemilahan sampah. 3. Mengadakan Pelatihan Manajemen keuangan bank sampah	2029-2033
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Black Water Ranger (Pelayanan sedot tinja berbasis sistem aplikasi)	1. Membuat kebijakan Penyedotan berkala 2. Membuat SK untuk Perluasan area layanan dan tim Ranger 3. Membuat SK Layanan dan pelaporan melalui aplikasi	2029-2033	1. Menyediakan Armada tangki tinja 2. Menyediakan IPLT 3. Menyediakan Hardware (Perangkat keras)	2029-2033	1. Membuat Aplikasi IPLT 2. Membuat Aplikasi Sijinja 3. Membuat Database Pelanggan	2029-2033	1. MengadakanB imtek IPLT 2. MengadakanS osialisasi Tarif dan pola layanan (SOP)	2029-2033

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Inovasi	Rencana Aksi/Tahun								
				Pengembangan Kebijakan & Kelembagaan	Tahun	Infrastruktur Pendukung	Tahun	Perangkat Lunak Pendukung	Tahun	Penguatan Literasi	Tahun	
Tata Kelola Energi	Peningkatan Biokonversi biomassa	Program Pengelolaan Sampah	GARPU SANDI (Gerakan Pengurangan Sampah menjadi Energi)	1. Membuat kebijakan Pengurangan sampah skala Kecamatan. 2. Membuat sistem waste zero kabupaten. 3. Membuat BLUD TPA 4. Membuat Jakstrada persampahan. 5. Membuat Perbup pengurangan plastik	SK SK SK SK	2029-2033	1. Melengkapi RDF skala kecamatan 2. Melengkapi RDF skala kabupaten 3. Menyediakan Armada pengangkut sampah 4. Melakukan Perluasan TPA 5. Menyediakan Jembatan timbang	2029-2033	Membangun Aplikasi Jembatan timbang	2029-2033	Mengadakan Bimtek RDF	2029-2033

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

5. Peta Jalan Pembangunan Smart City Daerah

Bagian 5 mendiskusikan Peta Jalan (Program) Pembangunan Smart City Daerah Kabupaten Sampang Jangka Pendek (2024), Jangka Menengah (2025-2028), dan Jangka Panjang (2029-2033). Peta Jalan adalah program kerja yang harus dilaksanakan dalam periode tertentu yaitu Jangka Pendek 1 tahun, Jangka Menengah 3-5 tahun, dan Jangka Panjang 10-20 tahun. Setiap program bisa memiliki lebih dari satu inovasi yang berasal dari inovasi satu OPD atau kolaborasi beberapa OPD. Setiap inovasi harus ditentukan target kinerja dan anggaran per tahun, sumber dana, dan sektor yang mengarahkan (*leading sector*) terutama untuk inovasi kolaborasi antar OPD.

Peta Jalan disusun berdasarkan isian Kertas Kerja Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023f) dan Jangka Panjang (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023g) yang diisi terpisah oleh peserta dan dipimpin oleh koordinator kelompok per dimensi berdasarkan hasil FGD pada Bimtek 2 (2-3 Agustus 2023) dan dipertajam kembali pada Bimtek 3 (4-5 September 2023).

Subbab 5.1-5.6 menyajikan secara detail Peta Jalan Jangka Pendek (2024), Jangka Menengah (2025-2028), dan Jangka Panjang (2029-2033) pada Pembangunan Smart City di Kabupaten Sampang untuk setiap dimensi Smart City.

5.1 Peta Jalan Dimensi *Smart Governance*

Terdapat 8 program/kegiatan/subkegiatan yang ditentukan dari peta jalan pada setiap subdimensi pada dimensi *Smart Governance* sebagai berikut:

1. Subdimensi Layanan Publik mencakup 4 program yaitu:
 - a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas
 - b. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - c. Program Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
 - d. Program Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
2. Subdimensi Birokrasi mencakup 3 program yaitu:
 - a. Program Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - b. Program Penyelenggaraan penataan ruang
 - c. Program yang memfasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
3. Subdimensi Perancangan Kebijakan mencakup 2 program yaitu:
 - a. Program Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Program Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas

Subbab 5.1 menguraikan secara detail Peta jalan Pembangunan Jangka Pendek (2024), Jangka Menengah (2025-2028), dan Jangka Panjang (2029-2033) untuk dimensi *Smart Governance*.

5.1.1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028)

Subbab 5.1.1 menguraikan Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (PJ2PM) 2024-2028 pada Dimensi Smart Governance seperti terlihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah Smart Governance

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Layanan Publik	Peningkatan aksesibilitas, kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian pelayanan publik berbasis digital	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas	Jumlah sistem informasi satu akses layanan yang dibangun	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Salempang (Satu Akses Layanan Pemerintah Kabupaten Sampang)	52	250	70	450	80	150	90	150	100	150	APBD	Diskominfo
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kerjasama Pelayanan Terintegrasi (Desa/ Kelurahan)		SAKERA MESEM (Satu pintu Administrasi KEpendudukan RAkyat MENjadi SEjahtera dan Membahagiakan) V2: Kerjasama pelayanan Adminduk dengan Desa/ Kelurahan untuk mendekatkan lokasi pelayanan	48 Desa/ Kel.	13	70 Desa/ Kel.	15	100 Desa/ Kel.	100	140 Desa/ Kel.	100	186 Desa/ Kel.	20	APBD	Dispendukcapi 1
		Pencatatan, Penatausahaan	Jumlah Pelayanan		Rela Berkorban (REaksi Layanan	100 orang	33	150 orang	35	200 orang	35	250 orang	40	250 orang	40	APBD	Dispendukcapil

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
		dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Rela Berkorban yang dilaksanakan		Adminduk BERSama Kelompok ODGJ, Rentan Bencana atau Non bencana); Pelayanan adminduk jemput bola kepada kelompok masyarakat ODGJ, Rentan Bencana dan Non Bencana termasuk juga Lansia, Jompo dan Sakit ke rumah dan atau Fasilitas Kesehatan (RS/Puskesmas)												
		Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi	Jumlah pelayanan adminduk bagi pasangan yang baru menikah yang dilaksanakan		MARLENA TUKU SANTAN (Manajemen layanan adminduk, tujuh dokumen langsung dapat saat pernikahan) kerjasama pelayanan dengan Kemenag untuk layanan bagi pasangan yang baru menikah untuk mendapatkan langsung 7 dokumen (Seven In One/7 in 1)	3 pasang an	11	5 pasang an	15	10 pasang an	18	15 pasang an	20	20 pasang an	25	APBD	Dispendukcapil

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
		Penduduk yang Beragama Islam			yaitu Buku Nikah 2 dokumen dari Kemenag dan KK/Kartu Keluarga 3 dokumen serta KTP/Kartu Tanda Penduduk 2 dokumen dari Dispendukcapil												
Birokrasi	Peningkatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berbasis digital	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen SAKIP perangkat daerah yang terdigitalisasi	-	SiPEDAL (Sistem Pengendalian Kinerja Daerah) yaitu sistem informasi untuk pengisian perencanaan daerah dan OPD selama 5 (lima) tahun dan perencanaan kinerja tahunan hingga tahap pengukuran kinerja, dimana output dari aplikasi akan dijadikan dokumen pendukung SAKIP serta sebagai laporan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	100%	50	100%	60	100%	70	100%	75	100%	80	APBD	Bappeda Litbang

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
		Program Penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Persentase izin bangunan yang diajukan melalui sistem pengiriman elektronik	E-PAKON ABINEH (E-Pantau KOndisi daN kelAyakan Bangunan gedung InveNtaris pEmerintah)	100	818 Jt	100	2,488 Jt	100	2,488 Jt	100	2,488 Jt	100	2,500 Jt		DPUPR
	Meningkatnya kualitas kebijakan daerah	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan yang diintegrasikan	-	Sepatu Barjas (Sistem Pelayanan Pengadaan Terpadu Barang dan Jasa)	4 layanan	50	4 layanan	50	4 layanan	50	4 layanan	50	4 layanan	50	APBD	Bagian Barjas dan Administrasi Pembangunan
Perancangan Kebijakan	Peningkatan Fungsi	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan Informasi Geospasial dalam Geoportal	-	SIG4TA (Sistem Integrasi Geospasial untuk Sampang Satu Data), yaitu sistem yang memungkinkan integrasi data dan informasi geospasial dalam satu basisdata dan satu sistem referensi, memiliki standar data sesuai kebijakan satu peta, memiliki metadata, serta memiliki kemampuan untuk berbagi pakai data, atau dipertukarkan	100%	150	100%	200	100%	250	100%	300	100%	500	APBD	Bappeda Litbang

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
					antar sistem yang saling berinteraksi, serta dapat diakses secara mudah dalam satu geoportal.												
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas	Persentase aplikasi yang terintegrasi dengan DE Sampang		De Sampang merupakan sistem aplikasi pemerintahan (birokrasi) ditujukan untuk Bupati Sampang. Di DE Sampang ini, Bupati selaku pimpinan bisa melihat capaian kinerja, target, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah (OPD) karena seluruh aplikasi dari OPD yang berbeda sudah terkoneksi/terintegrasi dengan Dashboard ini selaku rumah besar bagi aplikasi untuk birokrasi yang ada.	60%	100	80%	50	90%	50	100%	50	100%	50	APBD	Diskominfo

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

5.1.2 Peta Jalan Jangka Panjang (2029-2033)

Subab 5.1.2 menguraikan Peta Jalan Pembangunan Jangka Panjang (PJ2P) 2029-2033 pada Dimensi Smart Governance seperti terlihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Governance

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Layanan Publik	Peningkatan aksesibilitas, kemudahan dan kesederhanaan , serta kepastian pelayanan publik digital	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Cakupan sistem informasi satu akses layanan yang dibangun	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Salempang (Satu Akses Layanan Pemerintah Kabupaten Sampang)	100%	150 jt	100%	150 jt	100%	150 jt	100%	150 jt	100%	150 jt	APBD	Diskominfo
Birokrasi	Peningkatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berbasis digital	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen SAKIP perangkat daerah yang terdigitalisasi	-	SiPEDAL (Sistem Pengendalian Kinerja Daerah) yaitu sistem informasi untuk pengisian perencanaan daerah dan OPD selama 5 (lima) tahun dan perencanaan kinerja tahunan hingga tahap pengukuran kinerja, dimana output dari aplikasi akan dijadikan	100%	100 jt	100%	50 jt	100%	50 jt	100%	50 jt	100%	50 jt	APBD	Bappeda Litbang

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
					dokumen pendukung SAKIP serta sebagai laporan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah												
Perancangan Kebijakan	Peningkatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berbasis digital	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase sistem informasi yang terintegrasi pada Dashboard Eksekutif	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Big Data (Sekumpulan data yang terdiri dari: 1. Data antar instansi pemerintah 2. Data individu dan 3.Data sektor swasta yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama: pemerintah, individu dan sektor swasta secara terbuka	100%	200 jt	100%	100 jt	100%	100 jt	100%	100 jt	100%	100 jt	APBD	Diskominfo

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

5.2 Peta Jalan Dimensi *Smart Branding*

Terdapat 5 program/kegiatan/subkegiatan yang ditentukan dari peta jalan pada setiap subdimensi pada dimensi Smart Branding sebagai berikut:

- 1. Subdimensi Pariwisata mencakup 2 program yaitu:
 - a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
 - b. Program pemasaran pariwisata
- 2. Subdimensi Daya Saing Bisnis mencakup 2 program yaitu:
 - a. Program Pelayanan Penanaman Modal
 - b. Program Promosi Penanaman Modal
- 3. Subdimensi Wajah (Tampilan) Kota mencakup 1 program yaitu: Program penataan bangunan dan lingkungannya

Subbab 5.2 menguraikan secara detail Peta jalan Pembangunan Jangka Pendek (2024), Jangka Menengah (2025-2028), dan Jangka Panjang (2029-2033) untuk dimensi *Smart Branding*.

5.2.1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028)

Subbab 5.2.1 menguraikan Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (PJ2PM) 2024-2028 pada Dimensi Smart Branding seperti terlihat pada

Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah Smart Branding

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja a	Ang g	Target Kinerja a	Ang g	Target Kinerja a	Ang	Target Kinerja a	Ang	Target Kinerja a	An g		
Pariwisata	Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1. Jumlah kunjungan wisatawan 2. Jumlah desa berpotensi menjadi desa wisata 3. Meningkatnya jumlah pegiat wisata partisipasi masyarakat 4. Jumlah pengembangan destinasi wisata berbasis konservasi pertanian	Persentase layanan rekreasi publik yang dipesan secara daring	SEKARPOTE COOLING (wisata desa kreatif berbasis potensi sebagai sarana echoo healing) PAS GEMILANG (Pantura Agrowisata Gemilang), Program dan pilot project Percepatan pembangunan sektor kepariwisataan di Kabupaten Sampang, dengan menggunakan sample wilayah lokasi bagian pesisir utara Kabupaten	1. 383.506 2. 20 % 1. 10 % 2. 20 %	750 jt	1. 460.207 2. 30 % 1. 35% 2. 15 %	2 M	1. 552.248 2. 35 % 1.40 % 2.20 %	3 M	1. 662.697 2. 40 % 1.45% 2.25 %	3,5 M	1. 795.237 2. 50 % 1.50 % 2.30 %	5 M	1. APBD 2. APBD PROV 3. APBN 4. CSR 5. Hibah Lembaga Pemerintah 6. Organisasi nirlaba 7. Potensi pendapatan pariwisata	DISPORAB UDPAR

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja a	Ang g	Target Kinerja a	Ang g	Target Kinerja a	Ang	Target Kinerja a	Ang	Target Kinerja a	An g		
					Sampang												
		Program pemasaran pariwisata	1. Persentase produk ekraf sebagai daya dukung wisata 2. jumlah layanan Informasi pariwisata yang mudah diakses 3. Jumlah length of stay	1. jumlah pemesan daring untuk fasilitas budaya per 100.000 penduduk 2. Persentase catatan budaya kota yang telah di digitalisasi	BAPPER MAS (bank data pariwisata berbasis partisipasi masyarakat)	1. 20 % 2. 2 3. 20%	500 jt	1. 30 % 2. 3 3. 25%	1 M	1. 35 % 2. 4 3. 30%	2 M	1. 40 % 2. 5 3.35%	2,5M	1. 50 % 2. 5 3. 40%	3 M	1. APBD 2. APBD PROV 3. APBN 4. CSR 5. Hibah Lembaga Pemerintah 6. Organisasi nirlaba 7. Potensi pendapatan pariwisata	DISPORAB UDPAR
Daya Saing Bisnis	Peningkatan digitalisasi pelayanan di MPP	Program Pelayanan Penanaman Modal	1. Tercapainya realisasi penanaman modal 2. Persentase perijinan yang diterbitkan tepat waktu		SI-POS SI-POS (SISTEM INFORMASI PERIJINAN ONLINE), aplikasi pelayanan perijinan untuk ijin tertentu yang tidak tercover dalam OSS	35%	30 jt	40%	100 jt	45%	100 jt	50%	100 jt			1. APBD 2. APBD PROV 3. APBN 4. CSR 5. Hibah Lembaga Pemerintah	
					LAPINDES (Layanan Perizinan ke Desa-desa) Pelayanan Publik jemput bola kepada para pelaku usaha di desa-desa di	35%	5 jt	40%	30 jt	45%	30 jt	50%	30 jt				

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerj a	An g	Target Kinerj a	An g	Target Kinerj a	Ang	Target Kinerj a	Ang	Target Kinerj a	An g		
					Kabupaten Sampang, Pelayanan yang teraintegrasi sangat memudahkan pelaku usaha di desa-desa dalam penguruasan layanan												

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerj a	An g	Target Kinerj a	An g	Target Kinerj a	Ang	Target Kinerj a	Ang	Target Kinerj a	An g		
	Peningkatan Daya Saing investasi produk unggulan Sampang	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor		BARING SIANG (Business Gathering Investasi Kabupaten Sampang) mempromosik an peluang Investasi yang ada di Kabupaten Sampang dan memfasilitasi langsung permasalahan yang terjadi pada calon investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Sampang dan para investor yang ada di Kabupaten Sampang.	Menari k Minat Investor	300j t	20 %	400j t	30%	500jt	40%	550jt	50%	605j t	1. APBD 2. APBD PROV 3. APBN 4. CSR 5. Hibah Lembaga Pemerintah	
						Peningk atan Jumlah NIB	300j t		400j t		500jt		550jt		605j t		
						Persent ase UM											
						Jumlah UK											
						Jumlah UM											

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerj a	An g	Target Kinerj a	An g	Target Kinerj a	Ang	Target Kinerj a	Ang	Target Kinerj a	An g		
Wajah (Tampilan) Kota	Penonjolan kearifan lokal yang berciri khas Sampang menjadi branding kabupaten	Program penataan bangunan dan lingkunganny a	presentasi desain khusus bangunan berciri khas daerah	1. jumlah kota per 100.00 0 orang pendu duk per tahun yang terliba t dalam proses perenc anaan kota 2. persen tase ijin bangu nan yang diajuk an melalu i sistem pengiri man elektro nik	SAMPANG GEMILANG: Trunojoyo City Park (Optimalisasi fungsi kawasan Alun- alun Trunojoyo sebagai: 1) taman kota 2) site layanan publik on the street 3) creative centre. Note: creative centre: pusat aktivitas kegiatan dan kreativitas masyarakat : seni, budaya, fotografi dsb	1. 2 2. 30%	1 M	1. 3 2. 40%	750 jt	1. 4 2. 50 %	1 M	1. 5 2. 65%	450		450 Jt	1. APBD 2. APBD PROV 3. APBN 4. CSR 5. Hibah Lembaga Pemerintah	PUPR

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

5.2.2 Peta Jalan Jangka Panjang (2029-2033)

Subab 5.2.2 menguraikan Peta Jalan Pembangunan Jangka Panjang (PJ2P) 2029-2033 pada Dimensi Smart Branding seperti terlihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Branding

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Pariwisata	Memajukan perekonomian, melestarikan jati diri bangsa dan melestarikan fungsi dan mutu lingkungan hidup, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 1. Pengelolaan Daya Tarik WisataKabupaten/Kota 2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota 3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota 4. Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten	1.Jumlah kunjungan wisatawan 2.Jumlah length of stay 3.jumlah pengembangan destinasi wisata berbasis konservasi	Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	CAMPLONG REBORN (Pengembangan wisata daerah pesisir Camplong)	1. FS 100% 2. Penyusunan masterplan dan dokumen perencanaan lain100% 3. penyusunan rencana manajemen baru100%	1. 150 juta 2. 500 juta 3. 300 juta	1. pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana 80 % 2. penataan manajemen kelembagaan dan pengelolaan “camplong reborn” 1 manajemen kelembagaan (100%)	3 M 200 juta	1. penataan lokasi baru (100%) 2. penambahan wahana modern tahap 2 3.ktivasi camplong reborn 100% 4. kegiatan event tahunan 100%	100 juta 500 jt 200 juta 500 juta	pengembangan berkelanjutan 100%	1,3 M	.pengembangan berkelanjutan dan evaluasi 100 %	2,6 M	APBD APBD PROV APBN	DISPORABU DPA

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
		/Kota															
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 2. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan	1.Persentase produk ekraf sebagai daya dukung wisata 2.jumlah layanan Informasi pariwisata yang mudah di akses	Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	WISATA MANGROVE SRESEH (WMS) merupakan bentuk kolaborasi antar desa untuk menjadikan desa desa mereka dalam satu kesatuan paket daya tarik wisata yang bersinergi dengan menggabungkan masing-masing potensi desanya menjadi produk wisata yang layak jual.	1.penyiapan dokumen perncanaan 100%	1. 300 juta	pengembangan ecotourism berwawasan lingkungan 100%	600 juta	1.pembangunan jaringan sanitasi dan air bersih 100%	750 juta	pemberdayaan potensi ekonomi kreatif	800 juta	pembangunan amenities 100%	2 M	APBD APBD PROV APBN DD	DISPORABU DPAR DPMD BAPPELITBANGDA
Daya Saing Bisnis	Peningkatan digitalisasi pelayanan di MPP	Program pengembangan iklim Penanaman Modal	1. Persentase Ijin yang diterbitkan tepat waktu 2. Persentas	Bisnis Branding	MPP DIGITAL Aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah yang berbasis	1.100%	180 jt	1.100%	190 jt	1.100%	200 jt	1.100%	220 jt	1.100%	250 jt	APBD	DPMPTSP
						2.100%		2.100%		2.100%		2.100%		2.100%			

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
			e pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti		elektronik untuk mengakses semua layanan yang saling terintegrasi. Masyarakat dapat mengakses semua layanan menggunakan satu akun MPP Digital dan cukup sekali mengunggah dokumen persyaratan layanan yang dibutuhkan												

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Wajah (Tampilan) Kota	Penonjolan kearifan lokal yang berciri khas Sampang menjadi branding kabupaten melalui wajah kota dan tata bangunan kota	Program penataan bangunan dan lingkungannya a. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkunganya didaerah dan kabupaten b. Penyusunan rencana dan teknis penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah Kabupaten / Kota	Persentase penataan ruang	1. jumlah kota per 100.000 orang penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencanaan kota 2. presentasi ijin bangunan yang diajukan melalui sistem pengiriman elektronik	SAMPANG GEMILANG IKONIK <i>Trunojoyo City Park</i> (Optimalisasi fungsi kawasan Alun-alun Trunojoyo sebagai: 1) taman kota 2) <i>site layanan publik on the street</i> 3) <i>creative centre</i> .	100	5 M	100	5 M	100	5 M	100	750 jt	100	750 jt	APBD APBD PROV APBN	DPUPR DISPORABU DPAR

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

5.3 Peta Jalan Dimensi *Smart Economy*

Terdapat 11 program/kegiatan/subkegiatan yang ditentukan dari peta jalan pada setiap subdimensi pada dimensi Smart Economy sebagai berikut:

1. Subdimensi ekosistem Industri mencakup 5 program yaitu:
 - a. Program Pengembangan iklim penanaman modal
 - b. Program Pelayanan penanaman modal
 - c. Program Promosi Penanaman Modal
 - d. Program perencanaan dan pembangunan industry
 - e. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Subdimensi Kesejahteraan Masyarakat mencakup 3 program yaitu:
 - a. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
 - b. Program Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - c. Program Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
3. Subdimensi Ekosistem Transaksi Keuangan mencakup 3 program yaitu:
 - a. Program Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - c. Program pemberdayaan UMKM

Subbab 5.3 menguraikan secara detail Peta jalan Pembangunan Jangka Pendek (2024), Jangka Menengah (2025-2028), dan Jangka Panjang (2029-2033) untuk dimensi *Smart Economy*.

5.3.1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028)

Subbab 5.3.1 menguraikan Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (PJ2PM) 2024-2028 pada Dimensi Smart Economy seperti terlihat pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah Smart Economy

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.		
Ekosiste m Industri	Percepatan pertumbuhan aktivitas industri	Program Pengemban gan iklim penanama n modal	Jumlah potensi investasi	5.2.Tingkat kelangsunga n bisnis baru per 100.000 penduduk	FAIS LAGI ONLINE (Fasilitasi Pengisian Laporan Kegiatan Penanama n Modal Secara Online)	6 Jenis	211 Jt	6 Jenis	510 Jt	8 Jenis	510 Jt	10 Jenis	550 Jt	12	550 Jt	APBD	DPMTSPSP
		Program Pelayanan penanama n modal	Persentase ijin yang diterbitkan tepat waktu			100	213 Jt	100	735 Jt	100	735 Jt	100	735 Jt	100	750 Jt	APBD	DPMTSPSP
		Program Promosi Penanama n Modal	Jumlah investor (PMDN/ PMA)			2900 investor	158 Jt	2900 investor	435 Jt	3000 investor	435 Jt	3000 investor	435 Jt	3100 investor	440 Jt	APBD	DPMTSPSP
		Program perencanaan dan pembangu nan industri	Persentase IKM yang memiliki produk berstandari sasi industri	5.2.Tingkat kelangsunga n bisnis baru per 100.000 penduduk	Si Istri (Sistem Informasi Simbiosis Industri)	54,72	511 Jt	54,72	5,714 Jt	55	5,714 Jt	55,7	5,714 Jt	56	5,750 Jt	APBD	Diskopind ag

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja a	Angg.	Target Kinerja a	Angg.	Target Kinerja a	Angg.	Target Kinerja a	Angg.	Target Kinerja a	Angg.		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan pendapatan Agrowisata Kampung Milon Napote	20.1. Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Pengembangan Ekosistem Agrowisata Kampung Milon Napote	10%	60 jt	10%	60 jt	10%	60 jt	10%	60 jt	10%	60 jt	APBD	
Kesejahteraan Masyarakat	Penguatan daya saing dengan peningkatan produktivitas dan inovasi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kenaikan produktivitas bawang merah	20.1. Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Smart Bartola (Pembibitan Bawang Merah Tanpa Olah Lahan)	10%	24,6jt	10%	25 jt	10%	25 jt	10%	25 jt	10%	25 jt	APBD	Disperta KP
			Jumlah entitas yang mengembangkan budidaya tanaman sehat	20.1. Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	BTS (Budidaya Tanaman Sehat) bertujuan mengedukasi masyarakat agar terbiasa menggunakan bahan pangan lokal yang terkontrol mutu pangannya , dalam	5 entitas	25 jt	7 entitas	35 jt	9 entitas	45 jt	11 entitas	55 jt	13 entitas	65 jt	APBD	Disperta KP

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
					artian proses budidaya tanaman akan diawasi dengan melakukan tindakan preventif untuk menghindari penggunaan bahan-bahan kimia (nutrition support) untuk tanaman.												
		Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah produk olahan ikan yang bermutu		PEMPEK BANG DEDENG (PEndaMpi ngan PEngolah iKan BandeNG D'kampoen gbanDENG	-	-	10 produk	100 jt	13 produk	125 jt	17 produk	150 jt	20 produk	175 jt		Dinas Perikanan
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja	5.3. Persentase tenaga kerja yang bekerja di Sektor Teknologi Informasi dan	SIAP KERJA (Sistem Informasi Pencari Kerja)	-	-	300 pencari kerja	50 jt	350 pencari kerja	50 jt	400 pencari kerja	50 jt	450 pencari kerja	50 jt	APBD	Disnaker
						-	-	50 pemberi kerja		55 pemberi kerja		60 pemberi kerja		65 pemberi kerja			

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.		
			Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Komunikasi (TIK)													
	Menyusun konsep CSR dunia usaha untuk masyarakat	Penyusuna n Perencanaa n dan Pendanaan	Jumlah Badan Usaha yang merealisasi kan pembiayaa n pembangu nan melalui CSR	-	SIPADU (Sistem Integrasi Pembiayaa n Alternatif dari Dunia Usaha)	-	-	9 badan usaha	50 jt	9 badan usaha	24 jt	9 badan usaha	24 jt	9 badan usaha	24 jt	APBD	Bappeda Litbang
Ekosiste m Transaksi Keuanga n	Membangu n sistem pembayara n <i>cashless</i> yang aman	Pembinaan dan Pengawasa n Pengelolaa n Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase capaian PAD	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	Lentera BPHTB (Layanan Elektronik Terintegras i Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)	100%	20 jt	100%	20 jt	100%	20 jt	100%	20 jt	100%	20 jt	APBD	BPPKAD
		Program Pengelolaa n Pendapata n Daerah	Persentase komponen PAD yang tercatat secara realtime	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulka n dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri	SIPARIS (S istem Informasi Pendapata n Daerah Real Time Sampang)	80%	100 jt	85%	50 jt	90%	50 jt	95%	50 jt	100%	50 jt	APBD	BPPKAD

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja a	Angg.	Target Kinerja a	Angg.	Target Kinerja a	Angg.	Target Kinerja a	Angg.	Target Kinerja a	Angg.		
	Membangun sistem untuk mempermudah jangkauan pelaku usaha	Program pemberdayaan UMKM	Jumlah unit usaha produktif bernilai tambah yang memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten.	5.1 Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	P4USKU (Pusat Pelayanan, pengembangan dan Pembinaan KUMKM)	200 pelaku usaha	200 jt	200 pelaku usaha	200 jt	200 pelaku usaha	200 jt	200 pelaku usaha	200 jt	200 pelaku usaha	200 jt		Diskopindag

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

5.3.2 Peta Jalan Jangka Panjang (2029-2033)

Subbab 5.3.2 menguraikan Peta Jalan Pembangunan Jangka Panjang (PJ2P) 2029-2033 pada Dimensi Smart Economy seperti terlihat pada Tabel 5.6.

Tabel 5.6 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Economy

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Ekosistem Industri	Percepatan pertumbuhan aktivitas industri	Program pemberdayaan UMKM	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	5.2.Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Sreseh Bangkit sebuah upaya meningkatkan nilai jual produk-produk olahan di Kecamatan Sreseh yang kebanyakan berasal dari bahan ikan agar lebih <i>marketable</i> dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dengan melihat potensi komoditas produk olahan yang dapat memenuhi kebutuhan pasar	10 Unit Usaha	100 Jt	10 Unit Usaha	100 Jt	10 Unit Usaha	100 Jt	10 Unit Usaha	100 Jt	10 Unit Usaha	100 Jt	APBD	Diskopinding

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kenaikan jumlah kelompok petani milenial	20.1. Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	GMF (Gubuk Milenial Farm) merupakan wadah dalam rangka percepatan regenerasi petani yang lebih responsif dan akomodatif terhadap perkembangan usaha di sektor pertanian dengan balutan penguasaan IT.	5 Kelompok	100 jt	5 Kelompok	100 jt	5 Kelompok	100 jt	5 Kelompok	100 jt	5 Kelompok	100 jt	APBD	Disperta KP
Kesejahteraan Masyarakat	Penguatan daya saing dengan peningkatan produktivitas dan inovasi	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	5.3. Persentase tenaga kerja yang bekerja di Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Pengembangan Layanan SIAP KERJA (Sistem Informasi Pencari Kerja)	1000 jiwa	75 Jt	1000 jiwa	25 Jt	1000 jiwa	25 Jt	1000 jiwa	25 Jt	1000 jiwa	25 Jt	APBD	DPMPTSP
Ekosistem Transaksi Keuangan	Membangun sistem pembayaran <i>cashless</i> yang aman	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase komponen PAD yang tercatat secara realtime	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi	SIPARIS (Sistem Informasi Pendapatan Daerah Real Time Sampang)	80%	100 jt	85%	50 jt	90%	50 jt	95%	50 jt	100%	50 jt	APBD	BPPKAD

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
				sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri													

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

5.4 Peta Jalan Dimensi *Smart Living*

Terdapat 6 program/kegiatan/subkegiatan yang ditentukan dari peta jalan pada setiap subdimensi pada dimensi Smart Living sebagai berikut:

1. Subdimensi Harmonisasi Tata Ruang mencakup 1 program yaitu:
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Penetapan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci tata Ruang Kabupaten)
2. Subdimensi Kesehatan mencakup 1 program yaitu:
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Subdimensi Transportasi mencakup 4 program yaitu:

a. Program Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

b. Program Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C

c. Program Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

d. Program Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Subbab 5.4 menguraikan secara detail Peta jalan Pembangunan Jangka Pendek (2024), Jangka Menengah (2025-2028), dan Jangka Panjang (2029-2033) untuk dimensi Smart Living.

5.4.1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028)

Subbab 5.4.1 menguraikan Peta Jalan Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah (PJ2PM) 2024-2028 pada Dimensi Smart Living seperti terlihat pada

Tabel 5.7.

Tabel 5.7 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah Smart Living

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikat or SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.		
Harmonisasi Tata Ruang	Penataan Lingkungan sesuai rencana tata ruang	Program Penyelengg aaraan Penataan Ruang (Penetapan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci tata Ruang Kabupaten)	Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang		SISTA (Sistem Informasi Tata Ruang)	4/15	600 jt	7/15	900 jt	10/15	900jt	13/15	900 jt	15/15	600 jt	APBD	DPUPR

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikat or SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.		
Kesehatan	Meningkatka n akses dan mutu layanan kesehatan	Program Pemenuha n Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	● Persentase BOR ● Persentase pemenuhan dokter spesialis ● Jumlah Layanan Sub Spesialis ● pendapatan BLUD	11.1. Persentas e populasi kota yang masuk dalam file kesehata n terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehata n	RSMZ menjadi RS pendidikan Tipe B	Layana n Jantun g	197	Layana n Bedah Digestif	226	Layana n Radio Nuklir	260	Layana n Radiote rapi	325	Layana n Saraf	382	BLUD	RSMZ
						BOR 85 %		BOR 85 % spesialis 100%		BOR 85 % spesialis 100%		BOR 85 % spesialis 100%		spesialis 100%			
						Spesialis 100%		Subspesialis 100%		Subspesialis 100%		Subspesialis 100%		Subspesialis 100%			
						Subspesialis 100%		Pendapat an Blud 197		Pendapat an Blud 226		Pendapat an Blud 260		Pendapat an Blud 325			
		Program Pemenuha n Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pencatatan dan pelaporan online		ASIKMAS ver.2 (Aplikasi Sistem Informasi Puskesmas)	100 %	500 jt	100 %	500 jt	100 %	500 jt	100 %	500 jt	100 %	500 jt	APBD (BLUD)	DINKES KB

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikat or SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.		
	Mempercepat Penurunan Angka Kematian Ibu, Balita dan Stunting	Program Pemenuha n Upaya Kesehatan Peroranga n dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup 2. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup 3. Prevalensi Stunting	11.1. Persentas e populasi kota yang masuk dalam file kesehata n terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehata n	Jari Kaki Lima V.23 (Jaring risiko berbasis aplikasi kesehatan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat)	105 per 100.000 kelahiran hidup 3,2 per 1.000 kelahiran hidup 6,5%	2,5 M	87 per 100.000 kelahiran hidup 2,8 per 1.000 kelahiran hidup 6,3%	3 M	75 per 100.000 kelahiran hidup 2,5 per 1.000 kelahiran hidup 6,1%	3,5 M	62 per 100.000 kelahiran hidup 2,3 per 1.000 kelahiran hidup 5,8%	3,5 M	60 per 100.000 kelahiran hidup 2,1 per 1.000 kelahiran hidup 5,5%	3,5 M	APBD dan CSR	DINKES KB
Transportasi	Mewujudkan transportasi yang menjamin kemudahan mobilitas bagi individual, publik maupun kebutuhan logistik daerah 2. Menyiapkan sistem jaringan jalan yang cukup memadai bagi	Penyediaa n Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupate n/Kota	Tersedianya Angkutan Um um Bersubsidi	Persentas e armada bus kota yang digerakka n dengan motor	"Trans Sampang" merupakan penyediaan angkutan umum yang melayani wilayah Kabupaten Sampang dimulai thn 2025	-	-	4 unit	500 Jt	8 unit		8 unit		8 unit		APBD	DISHUB

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikat or SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.		
	masyarakat menuju lokasi tujuan	Pembangu nan Terminal Penumpang Tipe C	Tersedianya Terminal Type C					1 Dok	300 Jt	2 Dok	200 Jt	1 Ha		3 Paket		APBD	DISHUB
	3.Menjamin Ketersediaan perlengkapan jalan guna mewujudkan keselamatan pengguna jalan	Penyediaan Perlengkap an Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Perlengkapan Jalan yang Tercukupi	Persentas e penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajem en kinerja cahaya/la mpu	"Sampang Terang" (Pemenuha n PJU ruas Jalan Kabupaten dengan KWH Smart yang bisa deteksi lampu mati dalam 1 pusat kontrol sekaligus penambah an/pemas angan PJU)	46 titik	700jt	600	6 M	600	6 M	600	6 M	600	6 M	APBD	DISHUB
					Persentase lampu lalu lintas yang cerdas	TRALI BESI (Traffic Light Berbasis Sistem Informasi) merupakan lampu lalu lintas yang dilengkapi			1 paket	700jt	1 paket	700jt	1 paket	700jt			

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikat or SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.		
					dengan kamera pendeteksi untuk menghitun g kepadatan												
	Mewujudkan transportasi laut yang menjamin kemudahan mobilitas bagi individual, publik maupun kebutuhan logistik daerah	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujua n Pengopera sian untuk Kapal yang Melayani Penyebera ngan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Tersedianya Angkutan Penyeberangan Bersubsidi	-	"Angkutan Express" (Penyedian Angkutan Penyebera ngan Bersubsidi guna Kelancara n Penyebera ngan Sampang - Pulau Mandangin)			2 unit	500 Jt	2 unit	500 Jt	2 unit	500 Jt	2 unit	500 Jt	APBD	DISHUB

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

5.4.2 Peta Jalan Jangka Panjang (2029-2033)

Subab 5.4.2 menguraikan Peta Jalan Pembangunan Jangka Panjang (PJ2P) 2029-2033 pada Dimensi Smart Living seperti terlihat pada

Tabel 5.8.

Tabel 5.8 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Living

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leadin g Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Harmonisa si Tata Ruang	Penataan Lingkungan sesuai rencana tata ruang	Program Penyelenggara an Penataan Ruang (Penetapan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci tata Ruang Kabupaten)	Jumlah Kawasan yang dikembang kan untuk kegiatan industri		Kawasan Peruntuka n Industri (KPI)	1 kawasan	5 M	1 Kawasan	5 M	2 Kawasan	10 M	2 Kawasan	10 M	3 Kawasan	15 M	APBD	Bapped alitbang
Kesehatan	Meningkatka n akses dan mutu layanan kesehatan	Sistem Informasi layanan kesehatn dasar yang terintegrasi	Cakupan pencatatan dan pelaporan online	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring	ASIKMAS Next Level	100 %	500 jt	100 %	500 jt	100 %	500 jt	100 %	500 jt	100 %	500 jt	APBD (BLUD)	DINKE S

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leadin g Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
				yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan													
Transportasi	Mewujudkan transportasi darat yang menjamin kemudahan mobilitas bagi individual, publik maupun kebutuhan logistik daerah	Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	19.5. Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (real-time) yang dapat diakses publik	Jalan Lintas Selatan Madura (JLSM)	4 km	92 miliar	1 km	25 miliar	1 km	25 miliar	5 km	108,3 miliar	4,3 km	93,2 miliar	APBN APBD dan	DPUPR dan DISHUB
			Jumlah jembatan yang dibangun			1 jembatan (jembatan labuhan	141,2 miliar	1 jembatan (jembatan marparan)	93,5 miliar	2 jembatan (jembatan Datar dan Rabah)	13,1 miliar	1 jembatan (jembatan Dengpadeng)	55,2 miliar	-	-		

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leadin g Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg .	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
			Mewujudk an transporta si laut yang menjamin kemudaha n mobilitas bagi individual, publik maupun kebutuhan logistik daerah	Penetapan Lintas Penyeberan gan dan Persetujua n Pengoperas ian untuk Kapal yang Melayani Penyeberan gan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Tersediany a Angkuta n Penyeberan gan Bersubsidi dan Kapal Barang "Angkutan Express" (Penyedia n Angkutan Penyebera ngan Bersubsid i guna Kelancara n Penyebera ngan Sampang - Pulau Mandangin	4 unit	500 Jt	4 unit	500 Jt	4 unit	500 Jt	4 unit	500 Jt	4 unit	500 Jt	APBN dan APBD	DPUPR dan DISHUB

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

5.5 Peta Jalan Dimensi *Smart Society*

Terdapat 12 program/kegiatan/subkegiatan yang ditentukan dari peta jalan pada setiap subdimensi pada dimensi Smart Society sebagai berikut:

1. Subdimensi Interaksi Masyarakat mencakup 1 program yaitu:

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitas Penanganan Konflik di Daerah

2. Subdimensi Ekosistem Belajar/Pendidikan mencakup 6 program yaitu:
 - a. Program Pendampingan dan fasilitas dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
 - b. Program Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
 - c. Program Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
 - d. Program Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
 - e. Program Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
 - f. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
3. Subdimensi Keamanan Masyarakat mencakup 5 program yaitu:
 - a. Program Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat
 - b. Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - c. Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
 - d. Program Pelayanan transportasi dan akses pelayanan emergency melalui program 112 terintegrasi
 - e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Subbab 5.5 menguraikan secara detail Peta jalan Pembangunan Jangka Pendek (2024), Jangka Menengah (2025-2028), dan Jangka Panjang (2029-2033) untuk dimensi Smart Society.

5.5.1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028)

Subbab 5.5.1 menguraikan Peta Jalan Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah (PJ2PM) 2024-2028 pada Dimensi Smart Society seperti terlihat pada Tabel 5.9.

Tabel 5.9 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah Smart Society

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)							
						2024		2025		2026		2027	
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.
Interaksi Masyarakat	Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatakatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik di Daerah	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah desa konflik yang ditangani	SNI 15. Keamanan	RAMPAK NAONG (Reharmonisasi Penanganan melalui Pembinaan keagamaan dan gotong royong	2 Desa/Kel	10 jt/desa	2 Desa/Kel	10 jt/desa	2 Desa/Kel	10 jt/desa	2 Desa/Kel	10 jt/desa
Ekosistem Belajar /Pendidikan	Meningkatkan kualitas, partisipasi dan jangkauan pelayanan pendidikan yang merata	Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	13.4. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital	Sapu Lidi (Satuan Pendidikan dengan Literasi Digital)	20.000 org	40 jt	30.000 org	60 jt	40.000 org	80 jt	50.000 org	100 jt
	Memberikan kesempatan kepada masyarakat putus sekolah dan /atau tidak sekolah untuk memperoleh layanan Pendidikan dan Pengetahuan melalui Program Pendidikan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyenggarakan Proses Belajar	13.4. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital	SILAT PSHT (akSI LAYanan keseTaraan Pemberian kesempatan Harapan masyarakat)	34 satuan pendidikan	50 jt	34 satuan pendidikan	50 jt	34 satuan pendidikan	50 jt	34 satuan pendidikan	50 jt

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)							
						2024		2025		2026		2027	
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.
	Kesetaraan												
	Meningkatkan kebermanfaatan perpustakaan dan pelibatan masyarakat	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Persentase populasi kota dengan kecakapan profesional di lebih dari satu bahasa	KRAFT (Kelas Kreatif Dispusip)->PSHT	260 orang	50 Jt	300 orang	75 Jt	300 orang	100 Jt	300 orang	125 Jt
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		SISI PENA (Aksi Automasi Perpustakaan Binaan)	2 perpustakaan	30 Jt	2 perpustakaan	50 jt	3 perpustakaan	75 jt	3 perpustakaan	100 jt
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan		SIDORA (Kreasi Dongeng Ceria)	142 lokus	82 jt	142 lokus	90 jt	145 lokusssss	95 Jt	145 lokus	100 jt
		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Layanan Perpustakaan Digital		dMaca Sampang (Sampang Maca Digital)	-	-	1	100 jt	1	150 jt	1	150 jt

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)							
						2024		2025		2026		2027	
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.
Keamanan Masyarakat	Peningkatan pemeliharaan Keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) sebagai bentuk deteksi dini dan cegah dini pada pencegahan dan penanganan konflik sosial	Menyelenggarakan ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat	Menurunnya angka gangguan Tibum - Transmas 1. Terbentuknya Satlinmas Desa 2. Pemberdayaan Satlimas Desa/Kel	SNI 15. Keamanan	Satlinmas Reborn	186 Satlinmas Desa/Kel	10 jt/desa	47 Desa	20 jt/Desa	47 Desa	20 jt/desa	47 Desa	20 Jt/desa
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan desa yg terdampak bencana alam yg terfasilitasi	SNI 15. Keamanan	JAGARAGA (Jaga keluarga jaga warga)	13 desa/kel	50 juta	13 desa/kel	50 juta	13 desa/kel	50 juta	13 desa/kel	50 juta
			Persentase kejadian darurat bencana yang terlayani		LANCENG DARUNA (Layanan Cepat Tanggap Darurat Bencana)	100%	15 juta	100%	15 juta	100%	15 juta	100%	15 juta
	Peningkatan pelayanan pelayan Pemadaman kebakaran dan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran yang Ditangani	SNI 15. Keamanan	1. Melakukan (Patroli malam) abhereng Si Pakar (Sistem Informasi Pengaduan Kebakaran)	100 kali	150 jt	100 kali	150 jt	100 kali	150 jt	100 kali	150 jt
	Meningkatkan layanan call center	Pelayanan transportasi dan akses pelayanan	Persentase kegawatdaruratan dan non		Sampang 112 (Call Center Kegawatdaruratan	100%	250 jt	100%	100 jt	100%	100 jt	100%	100 jt

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)							
						2024		2025		2026		2027	
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.
	keawatdaruratan dan non keawatdaruratan terintegrasi	emergency melalui program 112 terintegrasi Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	keawatdarurat anyang ditangani		Terpadu)								

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

5.5.2 Peta Jalan Jangka Panjang (2029-2033)

Subab 5.5.2 menguraikan Peta Jalan Pembangunan Jangka Panjang (PJ2P) 2029-2033 pada Dimensi Smart Society seperti terlihat pada Tabel 5.10.

Tabel 5.10 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Society

Sub Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Interaksi Masyarakat	Meningkatkan Kewaspadaan	Peningkatan Kewaspadaan	Jumlah desa konflik yang	SNI 15. Keamanan	RAMPAK NAONG (Reharmonisasi	2 Desa/Kel	10 jt/ desa	2 Desa/ Kel	10 jt/ desa	2 Desa/ Kel	10 jt/ desa	2 Desa/ Kel	10 jt/ desa	2 Desa/Kel	10 jt/ desa	AP BD	Bakesbangpol

Sub Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik di Daerah	Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik di Daerah	ditangan		Penanganan melalui Pembinaan keagamaan dan gotong royong												
Ekosistem Belajar/Pendidikan	Memberikan kesempatan kepada masyarakat putus sekolah dan /atau tidak sekolah untuk memperoleh layanan Pendidikan dan Pengetahuan melalui Program	Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	13.4. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan	Sapu Lidi (Satuan Pendidikan dengan Literasi Digital)	meningkatkan Perpustakaan digital	100 jt	MengembangkanLiterasi Digital	100 jt	Meningkatkan Pojok Baca digital	100 jt	Meningkatkan Taman Baca digital	100 jt	dimanfaatkannya kelas daring/virtual	100 jt	APBD, APBN	Disdik

Sub Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	Pendidikan Kesetaraan Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dijangkau dan dipenuhi oleh jalur Pendidikan Formal Memberikan pelayanan pendidikan bagi setiap warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan			digital													

Sub Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	an sepanjang hayat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman melalui Program Pendidikan Kesetaraan																
Keamanan Masyarakat	Meningkatkan layanan call center kegawatdaruratan dan non kegawatdaruratan terintegrasi	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase kegawatdaruratan dan non kegawatdaruratan yang ditangani		Sampang 112 (Call Center Terintegrasi)	100%	100 jt	100%	100 jt	100%	100 jt	100%	100 jt	100%	100 jt	APBD	Diskominfo

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

5.6 Peta Jalan Dimensi *Smart Environment*

Terdapat 5 program/kegiatan/subkegiatan yang ditentukan dari peta jalan pada setiap subdimensi pada dimensi Smart Environment sebagai berikut:

- 1. Subdimensi Proteksi Lingkungan mencakup 2 program yaitu:
 - a. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 - b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
- 2. Subdimensi Pengelolaan Sampah dan Limbah mencakup 2 program yaitu:
 - a. Program pengelolaan sampah
 - b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
- 3. Subdimensi Tata Kelola Energi mencakup 1 program yaitu:
Program pengelolaan sampah

Subbab 5.6 menguraikan secara detail Peta jalan Pembangunan Jangka Pendek (2024), Jangka Menengah (2025-2028), dan Jangka Panjang (2029-2033) untuk dimensi Smart Environment.

5.6.1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028)

Subab 5.6.1 menguraikan dengan detail Peta Jalan Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah (PJ2PM) 2024-2028 pada Dimensi Smart Environment seperti terlihat pada Tabel **5.11**.

Tabel 5.11 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah Smart Environment

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leadin g Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerj a	Ang g.	Target Kinerj a	Ang g.	Target Kinerj a	Ang g.	Target Kinerj a	Ang g.		
Proteksi Lingkungan	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	Persentase bangunan yang dibangun atau diperbaiki dalam 5 tahun terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip bangunan hijau	Pemanfaatan/ Pengembangan Wisata Lon Malang Berbasis Lingkungan (Pengembangan wisata pesisir pantai menjadi wisata taman keanekaragaman hayati)	20%	20 jt	40%	150jt	60%	100. jt	80%	50.jt	100%	50 jt	APBD	DLH PERKIM
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Permukaan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Jumlah sistem penyediaan air minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan yang dibangun	Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh air cerdas sistem	Gerakan Sadar Panen Air Hujan (GESAPU) (Gerakan masyarakat menampung air hujan untuk persediaan air bersih)	20 Unit (25 RT)	2 M	20 Unit (25 RT)	2 M	20 Unit (25 RT)	2 M	20 Unit (25 RT)	2 M	20 Unit (25 RT)	2 M	APBN	PUPR

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leadin g Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerj a	Ang g.	Target Kinerj a	Ang g.	Target Kinerj a	Ang g.	Target Kinerj a	Ang g.		
Pengelolaan Sampah dan Limbah	Peningkata n sistem pengelolaan sampah anorganik	Program pengelolaan sampah	Jumlah masyarakat , kelompok masyarakat /pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat .	Presentasi pusat pembuan gan limbah (kontainer yang dilengkapi dengan telemeteri ng)	Sekolah Sedekah Sampah (Triple S) (Program kesadaran warga sekolah untuk memilah sampah dan menyedekahkan hasil pemilahan untuk kepentingan sosial sekolah)	10 kelompok	200 jt	20 kelom pok	150 jt	30 kelom pok	50 jt	40 kelom pok	50 jt	50 kelom pok	50 jt	APBD	DLH PERKI
		Program pengelolaan dan pengemban gan sistem air limbah	Kapasitas instalasi pengelolaan lumpur tinja terbangun	Presentas e air limbah olahan yang digunaka n kembali	Program Jemput Limbah Tinja Sehat (PELITA Sehat) (Program pemerintah penyediaan sarana instalasi penyediaan air limbah tinja)	-	-	15 m3/ha ri	10 M	15 m3/ha ri	150 jt	15 m3/ha ri	100 jt	15 m3/ha ri	100 jt	APBN dan APBD	DLH PERKI M DAN PUPR

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leadin g Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerj a	Ang g.	Target Kinerj a	Ang g.	Target Kinerj a	Ang g.	Target Kinerj a	Ang g.		
Tata Kelola Energi	Peningkata n Biokonversi biomassa	Program Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Persentas e jumlah total sampah di Kota yang digunaka n untuk menghasil kan energi	Recycle Center (Pusat Daur Ulang)	-	-	30 TON/ hari	1.5 M	30 TON/ hari	200 jt	10 TO N/ hari	150 jt	10 TO N/ hari	100. jt	APBD	DLH PERKI M

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

5.6.2 Peta Jalan Jangka Panjang (2029-2033)

Subab 5.6.2 menguraikan Peta Jalan Pembangunan Jangka Panjang (PJ2P) 2029-2033 pada Dimensi Smart Environment seperti terlihat pada Tabel 5.12.

Tabel 5.12 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Environment

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikat or Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja a	Angg.	Target Kinerja a	Angg.	Target Kinerja a	Angg.	Target Kinerja a	Angg.	Target Kinerja a	Angg.		
Proteksi Lingkung an	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Program Pengelolaan Keanekarag	Jumlah kluster Edukasi	Persentase bangunan yang	Edukasi Lingkungan Berbasis	2 Kluste r	2,5 M	2 Kluste r	2,5 M	2 Kluste r	3 M	2 Kluste r	3 M	2 Kluste r	1 M	APBD, CSR	DLH Perkim

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikat or Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.		
	Keanekarag aman Hayati	aman Hayati	Lingkun gan Berbasi s Wisata yang dibangu n	dibangun atau diperbahar ui dalam 5 tahun terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip bangunan hijau	Wisata untuk pengemban gan ekonomi (Ecofarm, Eco GreenPark)												
	Peningkatan Laboratoriu m Lingkungan	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten /kota	Cakupa n industri yang tarpanta u kualitas lingkung annya	Persentase Jaringan Pipa air limbah yang dimonitor oleh sistem sensor data tracking real time	Sistem Jaringan Pemantaua n Lingkungan Tepat dan Akurat (SISPELTA)	100%	500 jt	100%	300 jt	100%	300 jt	100%	300 jt	100%	300 jt	APBD	DLH Perkim
Pengelolaa n Sampah dan Limbah	Peningkatan sistem pengelolaan sampah anorganik	Program pengelolaan sampah	Persenta se peningk atan jumlah nasabah sedekah sampah yang menggu nakan sistem	Presentasi pusat pembuanga n limbah (kontainer yang dilengkapi dengan telemeterin g)	Sistem jaringan sedekah sampah	20%	500 jt	20%	100 jt	20%	100 jt	15%	100 jt	10%	100 jt	APBD	DLH Perkim

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikat or Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/ Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.		
			aplikasi														
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Persenta se rumah tangga yang terlayani sedot tinja tepat waktu	22.1. Presentase air limbah olahan yang digunakan kembali	Black Water Ranger (Pelayanan sedot tinja berbasis sistem aplikasi)	100%	500 jt	100%	200 jt	100%	200 jt	100%	200 jt	100%	200 jt	APBD	DLH Perkim
Tata Kelola Energi	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi konversi limbah padat menjadi energi	Program Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikonversi menjadi energi	Persentase jumlah total sampah di Kota yang digunakan untuk menghasilkan energi	GARPU SANDI (Gerakan Pengurangan Sampah menjadi Energi)	30 ton/hari	3 miliar	30 ton/hari	1 miliar	30 ton/hari	1 miliar	30 ton/hari	1 miliar	30 ton/hari	1 miliar	APBD	DLH Perkim

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

6. Penutup

Buku 2 ini berisi Master Plan Smart City Daerah Kabupaten Sampang versi lengkap dengan penambahan rencana aksi dan peta jalan jangka pendek dan menengah (2024-2028) dan Jangka Panjang (2029-2033). Bahan utama buku ini bersumber dari data primer:

1. Bimtek 1 (5-6 Juli 2023) sebagai dasar Smart City Readiness yaitu kertas kerja analisis kesiapan smart city daerah, kertas kerja analisis masa depan dan sasaran smart city daerah, kertas kerja analisis SWOT-TOWS smart city daerah per dimensi, dan kertas kerja pemetaan misi dan sasaran RPJMD daerah terhadap dimensi smart city.
2. Bimtek 2 (2-3 Agustus 2023) yaitu Kertas Kerja Program dan Kertas Kerja Rencana Aksi
3. Bimtek 3 (4-5 September 2023) yaitu Kertas Kerja Quick Win dan Manajemen Risiko sebagai lanjutan ke buku 3

Buku 2 Master Plan Smart City Daerah ini diharapkan dapat menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan Smart City di Kabupaten Sampang. Demikian tujuan buku 2 ini disusun, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.

Daftar Pustaka

- Bappedalitbang, 2023. Cascading Kinerja Pembangunan Kabupaten Sampang.
- Bappenas, 2019. Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030.
- BPS Kab. Sampang, 2022a. Statistik Daerah Kabupaten Sampang.
- BPS Kab. Sampang, 2022b. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sampang.
- Bupati Sampang, 2023a. Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/154/KEP/434.013/2023 tentang Dewan Smart City Kabupaten Sampang.
- Bupati Sampang, 2023b. Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/155/KEP/434.013/2023 tentang Tim Pelaksana Smart City Kabupaten Sampang.
- Bupati Sampang, 2019. Peraturan Bupati nomor 66 Tahun 2019 Tentang SPBE.
- Direktorat Jenderal Kominfo, 2023. Guideline Masterplan Smart City Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City).
- Herawati, M., Djunaedi, A., 2020. Ketersediaan Data dalam Mendukung Smart City Readiness di Kota Surakarta. *Journal of Regional and Rural Development Planning* 4, 63–73. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.1.63-73>
- Kadiskominfo Kab. Sampang, 2023. Rencana Penerapan Akses Satu Layanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sampang.
- Kemkominfo, 2021a. Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City.
- Kemkominfo, 2021b. Standar Nasional Indonesia ISO 37122:2019 - Indikator Kota Cerdas.
- Kristiningrum, E., Kusumo, H., 2021. Indicators of Smart City Using SNI ISO 37122:2019. *IOP Conf Ser Mater Sci Eng* 1096, 1–8. <https://doi.org/10.1088/1757-899x/1096/1/012013>
- Perpres Nomor 95 tentang SPBE, 2018. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- RPJMD Kab. Sampang, 2022. Dokumen RPJMD 2019-2024.
- Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023a. Kertas Kerja Analisis Kesiapan Smart City Daerah.
- Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023b. Kertas Kerja Analisis SWOT-TOWS.
- Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023c. Kertas Kerja Analisis Masa Depan dan Sasaran Smart City.
- Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023d. Kertas Kerja Rencana Aksi Jangka Pendek dan Menengah per Dimensi.
- Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023e. Kertas Kerja Rencana Aksi Jangka Panjang per Dimensi.
- Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023f. Kertas Kerja Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah per Dimensi.
- Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023g. Kertas Kerja Peta Jalan Jangka Panjang per Dimensi.

BUKU III
EXECUTIVE SUMMARY
MASTERPLAN SMART CITY
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2024 – 2033

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
1. Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Landasan Hukum	2
2. Visi dan Misi Smart City	4
2.1 Visi dan Misi Smart City	4
2.2 Sasaran Smart City	5
2.2.1 Sasaran Dimensi <i>Smart Governance</i>	5
2.2.2 Sasaran Dimensi <i>Smart Branding</i>	7
2.2.3 Sasaran Dimensi <i>Smart Economy</i>	9
2.2.4 Sasaran Dimensi <i>Smart Living</i>	10
2.2.5 Sasaran Dimensi <i>Smart Society</i>	11
2.2.6 Sasaran Dimensi <i>Smart Environment</i>	12
3. Strategi Pembangunan <i>Smart City</i> Daerah.....	14
3.1 Strategi Dimensi <i>Smart Governance</i>	14
3.2 Strategi Dimensi <i>Smart Branding</i>	17
3.3 Strategi Dimensi <i>Smart Economy</i>	18
3.4 Strategi Dimensi <i>Smart Living</i>	21
3.5 Strategi Dimensi <i>Smart Society</i>	23
3.6 Strategi Dimensi <i>Smart Environment</i>	25
4. Peta Jalan Pembangunan Smart City Daerah	28
4.1 Peta Jalan Dimensi <i>Smart Governance</i>	29
4.1.1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028).....	30
4.1.2 Peta Jalan Jangka Panjang (2029-2033).....	35
4.2 Peta Jalan Dimensi <i>Smart Branding</i>	37
4.2.1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028).....	38
4.2.2 Peta Jalan Jangka Panjang (2029-2033).....	43
4.3 Peta Jalan Dimensi <i>Smart Economy</i>	46
4.3.1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028).....	47
4.3.2 Peta Jalan Jangka Panjang (2029-2033).....	53
4.4 Peta Jalan Dimensi <i>Smart Living</i>	55
4.4.1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028).....	56
4.4.2 Peta Jalan Jangka Panjang (2029-2033).....	60
4.5 Peta Jalan Dimensi <i>Smart Society</i>	63
4.5.1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028).....	64

4.5.2 Peta Jalan Jangka Panjang (2029-2033).....	69
4.6 Peta Jalan Dimensi <i>Smart Environment</i>.....	72
4.6.1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028).....	73
4.6.2 Peta Jalan Jangka Panjang (2029-2033).....	75
6. Penutup	78
Daftar Pustaka.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Governance* 5

Tabel 2.2 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Branding* 7

Tabel 2.3 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Economy* 9

Tabel 2.4 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Living*..... 10

Tabel 2.5 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Society* 11

Tabel 2.6 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Environment*..... 12

Tabel 3.1 Strategi Pembangunan pada Dimensi *Smart Governance* 14

Tabel 3.2 Strategi Pembangunan pada Dimensi *Smart Branding*..... 17

Tabel 3.3 Strategi Pembangunan pada Dimensi *Smart Economy* 19

Tabel 3.4 Strategi Pembangunan pada Dimensi *Smart Living*..... 21

Tabel 3.5 Strategi Pembangunan pada Dimensi *Smart Society* 23

Tabel 3.6 Strategi Pembangunan pada Dimensi *Smart Environment*..... 25

Tabel 4.1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah *Smart Governance* 30

Tabel 4.2 Peta Jalan Jangka Panjang *Smart Governance*..... 36

Tabel 4.3 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah *Smart Branding*..... 38

Tabel 4.4 Peta Jalan Jangka Panjang *Smart Branding* 43

Tabel 4.5 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah *Smart Economy*..... 48

Tabel 4.6 Peta Jalan Jangka Panjang *Smart Economy*..... 53

Tabel 4.7 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah *Smart Living* 56

Tabel 4.8 Peta Jalan Jangka Panjang *Smart Living* 61

Tabel 4.9 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah *Smart Society* 64

Tabel 4.10 Peta Jalan Jangka Panjang *Smart Society*..... 69

Tabel 4.11 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah *Smart Environment* 73

Tabel 4.12 Peta Jalan Jangka Panjang *Smart Environment* 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahap penyusunan *Masterplan Smart City*..... 1

Gambar 3.1 Portal Layanan Kabupaten Sampang 16

Gambar 3.2 Alun-alun Trunojoyo sebagai Ikon Wajah Kota Kabupaten Sampang..... 18

1. Pendahuluan

Bagian pendahuluan ini akan menguraikan tiga subbab yang terdiri dari latar belakang, tujuan, dan landasan hukum Rangkuman Eksekutif Pembangunan Smart City di Kabupaten Sampang.

1.1 Latar Belakang

Buku 3 berisi rangkuman eksekutif yang singkat, namun komprehensif tentang rencana pembangunan Smart City di Kabupaten Sampang 2024-2033. Sumber referensi utama buku ini adalah dari Buku 1 Analisis Strategis Smart City Daerah Kabupaten Sampang 2024-2033 dan Buku 2 Masterplan Smart City Daerah Kabupaten Sampang 2024-2033.

Gambar 1.1 memperlihatkan 10 tahap penyusunan *Masterplan Smart City* Kota/Daerah yang digunakan oleh Kominfo (Direktorat Jenderal Kominfo, 2023). Buku 1 dibuat setelah tahap 3 dan 4 dilaksanakan melalui Bimtek 1 (tanggal 5-6 Juli 2023), sedangkan Buku 2 ditulis setelah tahap 5-7 dilaksanakan melalui Bimtek 2 (tanggal 3-4 Agustus 2023) luaran Buku 2 Bagian 1 dan Bimtek 3 (tanggal 4-5 September 2023) luaran Buku 2 lengkap.



Gambar 1.1 Tahap penyusunan *Masterplan Smart City*

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Buku 3 Executive Summary Pembangunan Smart City Daerah Kabupaten Sampang adalah:

1. Buku ini memberikan panduan singkat namun mendalam kepada pembaca tentang Pembangunan *Smart City* di Kabupaten Sampang periode 2024-2033.
2. Memastikan bahwa Rencana Pembangunan *Smart City* Daerah Kabupaten Sampang telah didokumentasikan secara lengkap tentang poin-poin utama mencakup visi, misi, sasaran, strategi, dan terakhir peta jalan (program) terdiri dari Jangka Pendek (2024), Jangka Menengah (2025-2028), dan Jangka Panjang (2029-2033).

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam menyusun *Master Plan Smart City* Daerah Kabupaten Sampang didasarkan kepada peraturan berskala nasional (Kemkominfo, 2021) dan didukung oleh peraturan-peraturan pemerintah daerah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan;
21. Penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang dan Dirjen Aptika Kominfo pada tanggal 11 Oktober 2023 di Smart Room Sampang.
22. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
23. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
24. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
25. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pantai Utara Agrowisata Sampang Gemilang;
26. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Pedoman Alih Media Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
27. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
28. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang;
29. Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/154/KEP/434.013/2023 tentang Dewan Smart City Kabupaten Sampang (Bupati Sampang, 2023a);
30. Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/155/KEP/434.013/2023 tentang Tim Pelaksana Smart City Kabupaten Sampang (Bupati Sampang, 2023b).

2. Visi dan Misi Smart City

Pembangunan *Smart City* di suatu daerah merupakan langkah progresif untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan efisiensi layanan publik. Strategi yang efektif dalam mencapai tujuan ini melibatkan integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memantau, mengelola, dan mengoptimalkan berbagai aspek kehidupan kota. Dalam pengembangan *Smart City*, fokus diberikan pada infrastruktur digital yang kuat, penggunaan data dan analitik cerdas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci kesuksesan dalam mewujudkan visi *Smart City* yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada solusi berbasis teknologi.

2.1 Visi dan Misi Smart City

Visi dan Misi *Smart City* Kabupaten Sampang telah selaras dengan visi dan misi Kabupaten Sampang yang tercantum pada RPJMD 2019 – 2024 dan enam dimensi *Smart City* dari Kementerian Kominfo. Visi *Smart City* Kabupaten Sampang adalah:

“Sampang Cerdas, Harmonis, dan Berdaya Saing”

Visi tersebut selanjutnya diturunkan menjadi enam Misi Utama:

Misi 1	
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas dengan pemanfaatan teknologi informasi yang inovatif.
Misi 2	
	Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan yang inklusif dengan pendekatan teknologi berbasis digital.
Misi 3	
	Mewujudkan pembangunan yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan secara cerdas.

Misi 4	
	Mengembangkan citra positif dan identitas unik melalui strategi branding berbasis teknologi untuk menarik investasi dan pariwisata.
Misi 5	
	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan nyaman melalui pemanfaatan teknologi yang inovatif.

2.2 Sasaran Smart City

Berdasarkan Visi dan Misi Smart City Kabupaten Sampang pada sub-bab 2.1. selanjutnya disusunlah sasaran-sasaran yang telah dipetakan langsung ke dalam subdimensi-subdimensi dari enam dimensi *smart city*. Sasaran tersebut diperoleh berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pada kegiatan Bimtek 1 tanggal 5-6 Juli 2023 melalui pengisian kertas kerja dan dilakukan revisi pada kegiatan Bimtek 2 tanggal 2-3 Agustus 2023 (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023a, 2023b, 2023c).

2.2.1 Sasaran Dimensi *Smart Governance*

Tabel 2.1 menguraikan dengan lengkap Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan *smart city* di Kabupaten Sampang pada dimensi Smart Governance, dengan tiga sub-dimensi, yaitu Layanan Publik, Birokrasi, dan Perancangan Kebijakan.

Tabel 2.1 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Governance*

Dimensi	Subdimensi	Sasaran
Smart Governance (G)	G.1 Layanan Publik	G.1.1 Meningkatnya kualitas layanan publik
		G.1.2 Meningkatnya kapasitas SDM Penyelenggara layanan
		G.1.3 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang layanan publik
		G.1.4 Menyediakan layanan publik berbasis digital yang optimal

Dimensi	Subdimensi	Sasaran
	G.2 Birokrasi	G.1.5 Meningkatnya kualitas layanan pengaduan pelayanan publik
		G.2.1 Membuat prosedur birokrasi yang lebih sederhana
		G.2.2 Membuat SOP bersama pada OPD yang memiliki pelayanan publik yang sama
		G.2.3 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang perencanaan pembangunan
		G.2.4 Menciptakan sistem data dan informasi terintegrasi lebih optimal.
		G.2.5 Diterapkannya sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi untuk mendukung organisasi yang berbasis fungsional dengan mekanisme kerja yang flexible, changeable, dan moveable
		G.2.6 Terciptanya budaya kerja berakhlak
	G.3 Perancangan Kebijakan	G.3.1 Melaksanakan perumusan kebijakan berdasarkan hasil kelitbangan dan inovasi
		G.3.2 Melaksanakan perumusan kebijakan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan
		G.3.3 Mewujudkan konsistensi dan keterpaduan dalam perumusan kebijakan
		G.3.4 Melaksanakan proses perumusan kebijakan dengan dukungan dan partisipasi masyarakat
		G.3.5 Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan secara terus-menerus dan mengevaluasi dampaknya secara berkala.

(Sumber: RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Saat ini masalah yang masih dihadapi oleh Kabupaten Sampang di subdimensi Layanan Publik adalah akses layanan publik yang belum merata, portal satu data belum menjadi pusat data di Kabupaten Sampang, dan belum adanya layanan publik yang terintegrasi dengan daerah lainnya. Layanan publik yang disediakan di Kabupaten Sampang, selain belum sepenuhnya terintegrasi, juga masih terdapat banyak pelayanan yang menggunakan sistem manual. Akses

layanan informasi yang belum merata juga masih menjadi keluhan masyarakat, sehingga pemerintah daerah perlu untuk melakukan perluasan dengan menggunakan kanal-kanal informasi yang telah mereka miliki selama ini. Terkait dengan subdimensi Birokrasi, masalah yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Sampang adalah data dan layanan administrasi dan kepegawaian yang masih belum transparan.

2.2.2 Sasaran Dimensi *Smart Branding*

Tabel 2.2 menguraikan masalah yang masih dihadapi di Kabupaten Sampang, sasaran yang ingin dicapai, strategi yang digunakan, dan indikator capaian di dimensi *Smart Branding*. Dimensi ini memiliki tiga subdimensi: Pariwisata, Daya Saing Bisnis, dan Wajah (Tampilan) Kota.

Tabel 2.2 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Branding*

Dimensi	Sub Dimensi	Sasaran
Smart Branding (B)	B.1 Pariwisata	B.1.1 Menyediakan infrastruktur pariwisata yang memadai
		B.1.2 Menyediakan jaringan transportasi penunjang pariwisata
		B.1.3 Memasarkan pariwisata melalui pariwisata go digital
		B.1.4 Melaksanakan penguatan kapasitas Kelompok Sadar Wisata dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
		B.1.5 Membangun E-Tourism Exchange untuk menjembatani antara wisatawan dan stakeholder di bidang pariwisata (hotel, transportasi, tiket, pertunjukan, kuliner)
	B.2 Daya Saing Bisnis	B.2.1 Membangun ekosistem investasi yang mudah dan efektif
		B.2.2 Menyediakan Pusat Pengembangan Inovasi Produk dan layanan konsultasi
		B.2.3 Menghasilkan SDM yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya
		B.2.4 Melaksanakan pemasaran dan branding yang kolaboratif
		B.2.5 Membangun kemitraan strategis

Dimensi	Sub Dimensi	Sasaran
		B.2.6 Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif
	B.3 Wajah (Tampilan) Kota	B.3.1 Melakukan penataan ruang kota baik
		B.3.2 Menyediakan penerangan jalan dan <i>landmark</i> yang memadai dan kreatif
		B.3.3 Mewujudkan kebersihan dan pengelolaan sampah
		B.3.4 Menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai
		B.3.5 Melaksanakan pemugaran dan pelestarian bangunan bersejarah
		B.3.6 Menyediakan sistem transportasi yang terintegrasi
		B.3.7 Mengatur Rambu Lalu Lintas dan Penataan Parkir yang Tertib
		B.3.8 Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa

(Sumber: RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Di subdimensi Pariwisata, kendala utama yang dihadapi adalah Kabupaten Sampang adalah tidak adanya potensi destinasi pariwisata alam dan kurangnya infrastruktur pendukung pariwisata, seperti ketersediaan hotel, akses jalan, dan kelangkaan alat transportasi. Sementara itu, pengembangan potensi pariwisata dan wajah kota juga belum dioptimalkan. Pemerintah daerah perlu menggali potensi wisata budaya dengan membuat program-program pariwisata budaya.

Di Subdimensi Daya Saing Bisnis, perluasan jaringan telekomunikasi, jaringan listrik, dan akses jalan yang masih rusak menjadi persoalan, sehingga kenyamanan berusaha dan program-program pemerintah yang terkait dengan fasilitasi investasi belum maksimal. Kabupaten Sampang harus bisa menawarkan keunggulan komparatif yang tidak dimiliki oleh Kota Surabaya sehingga investor akan lebih memilih menanamkan modalnya di kota ini.

Di subdimensi Wajah (Tampilan) Kota, masalah yang masih dialami adalah persoalan PKL yang saat ini masih banyak yang berjualan di bahu jalan,

meskipun beberapa sentra PKL sudah disediakan. Situasi ini tidak saja merusak perwajahan kota, tetapi juga keamanan bagi pejalan kaki karena jalur pedestrian digunakan juga untuk berjualan, sehingga pejalan kaki harus menggunakan jalan raya untuk berjalan. Kebijakan tegas harus diambil oleh pemerintah daerah terkait dengan PKL, sebagai bagian dari penataan wajah kota.

2.2.3 Sasaran Dimensi *Smart Economy*

Tabel 2.3 menguraikan secara detail masalah, sasaran, strategi, dan indikator capaian di dimensi Smart Economy. Permasalahan utama yang dihadapi di subdimensi Ekosistem Industri adalah pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk berkolaborasi antara Kabupaten Sampang dengan kabupaten lainnya masih belum maksimal.

Tabel 2.3 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Economy*

Dimensi	Sub Dimensi	Sasaran
Smart Economy (Ec)	Ec.1 Ekosistem Industri	Ec.1.1 Memfasilitasi Lembaga Usaha untuk berbadan Hukum/Akta Hukum
		Ec.1.2 Menyediakan fasilitasi pelayanan bagi KUMKM secara online dan offline
		Ec.1.3 Menyediakan saluran distribusi
		Ec.1.4 Memfasilitasi Rantai dan kualitas pasokan serta pengembangan cluster industri
		Ec.1.5 Meminimalisasi Biaya operasi
	Ec.2 Kesejahteraan Masyarakat	Ec.2.1 Meningkatnya pendapatan masyarakat yang semakin merata
		Ec.2.2 Meningkatnya investasi ekonomis masyarakat (masyarakat mampu menyisihkan pendapatan untuk investasi)
		Ec.2.3 Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat secara layak
		Ec.2.4 Menurunnya angka kemiskinan
		Ec.2.5 Menurunnya jumlah pengangguran

Dimensi	Sub Dimensi	Sasaran
	Ec.3 Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec.3.1 Meningkatnya layanan transaksi berbasis teknologi digital (dimulai dari pelayanan yang diberikan instansi pemerintah)
		Ec.3.2 Mengembangkan ekosistem transaksi keuangan digital secara luas
		Ec.3.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap permodalan usaha ekonomi
		Ec.3.4 Meningkatnya kemampuan keuangan daerah

(Sumber: RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Subdimensi Kesejahteraan Masyarakat menyoroti ketersediaan kesempatan kerja yang masih kurang, sehingga perlu disinergikan antara pengembangan UMKM dan IKM guna mendorong investasi dan terbukanya lapangan kerja baru.

Subdimensi Ekosistem Transaksi Keuangan, permasalahan yang masih dihadapi adalah penggunaan teknologi finansial yang masih minim, sehingga masyarakat perlu diberikan edukasi penggunaan transaksi digital secara aman dan nyaman.

2.2.4 Sasaran Dimensi Smart Living

Tabel 2.4 menyajikan Sasaran dan Strategi yang ingin dicapai di tiap subdimensi di Smart Living. Masalah utama yang masih dihadapi memperbaiki kualitas udara dengan keberadaan RTH dan Taman Kota akan menanggulangi masalah ini.

Tabel 2.4 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi Smart Living

Dimensi	Sub Dimensi	Sasaran
Smart Living (L)	L.1 Harmonisasi Tata Ruang	L.1.1 Membangun perumahan di kawasan pemukiman bagi masyarakat yang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang
		L.1.2 Menyediakan sarana dan prasarana permukiman yang berkelanjutan
		L.1.3 Membangun fasilitas wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
	L.2 Kesehatan	L.2.1 Menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat

Dimensi	Sub Dimensi	Sasaran
		L.2.2 Meningkatnya lingkungan yang bersih dan sehat
		L.2.3 Menyediakan fasilitas pendidikan bagi masyarakat
		L.2.4 Menyediakan fasilitas sosial dan budaya tempat berkumpul bagi masyarakat
		L.2.5 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	L.3 Transportasi	L.3.1 Menyediakan Jaringan jalan yang cukup memadai bagi masyarakat untuk mengakses lokasi-lokasi penting ke pusat-pusat perdagangan, pertanian, destinasi wisata dan lokasi strategis lainnya
		L.3.2 Menyediakan moda transportasi umum bagi masyarakat di pedesaan untuk mengakses lahan-lahan produktif pertanian.

(Sumber: RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Di subdimensi Kesehatan, permasalahan yang muncul adalah belum meratanya ketersediaan Puskesmas dan Pustu di setiap desa sebagai akses ke sarana dan prasarana kesehatan. Terakhir, subdimensi Transportasi, masalah yang dihadapi adalah masih kurangnya kualitas jalan, dampaknya menurunnya jumlah transportasi publik yang menyebabkan mobilitas masyarakat menjadi terbatas.

2.2.5 Sasaran Dimensi *Smart Society*

Tabel 2.5 menyajikan sasaran yang ingin dicapai di tiga sub-dimensi Smart Society. Di subdimensi Interaksi Masyarakat, partisipasi aktif warga menjadi hal penting agar seluruh komunitas terlibat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan wilayah secara berkelanjutan, sehingga perlu membangun platform digital untuk mendukung warga dalam memberikan masukan dan usulan kebijakan.

Tabel 2.5 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi *Smart Society*

Dimensi	Subdimensi	Sasaran
Smart Society (S)	S.1 Interaksi Masyarakat	S.1.1 Tersedianya akses internet yang terhubung antar rumah tangga
		S.1.2 Tersedianya akses internet bagi masyarakat umum
		S.1.3 Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang teknologi dan manfaatnya

Dimensi	Subdimensi	Sasaran
	S.2 Ekosistem Belajar/ Pendidikan	S.2.1 Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah
		S.2.2 Mengembangkan program pendidikan berbasis teknologi
		S.2.3 Meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat
	S.3 Keamanan Masyarakat	S.3.1 Meningkatkan keamanan lingkungan dan pencegahan kejahatan
		S.3.2 Mengurangi angka kecelakaan lalu lintas
		S.3.3 Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

(Sumber: RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Pada subdimensi Ekosistem Belajar/Pendidikan, pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, sekitar 50% sarana dan prasarana Pendidikan di Kabupaten Sampang mengalami kondisi yang rusak, sehingga perlu adanya percepatan perbaikan maupun pemenuhan ketersediaan 120 kepala sekolah yang sudah memasuki masa pensiun dan meninggal dunia.

Secara umum pada subdimensi Keamanan Masyarakat, kabupaten Sampang relatif aman, dengan penerangan jalan dan rambu-rambu yang lengkap, namun kondisi jalan yang rusak masih berpotensi masyarakat mengalami kecelakaan lalu lintas, sehingga infrastruktur fisik jalan perlu diperbaiki.

2.2.6 Sasaran Dimensi Smart Environment

Tabel 2.6 menyajikan sasaran yang ingin dicapai dan Strategi yang dilakukan di masing-masing subdimensi Smart Environment. Pada subdimensi Proteksi Lingkungan, kesadaran masyarakat akan pentingnya mengurangi emisi karbon dioksida untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan kualitas udara masih menjadi persoalan utama.

Tabel 2.6 Sasaran pembangunan daerah pada Dimensi Smart Environment

Dimensi	Subdimensi	Sasaran
Smart Environment (En)	En.1 Proteksi Lingkungan	En.1.1 Pengurangan emisi karbon dioksida
		En.1.2 Konservasi Sumber Daya Alam

Dimensi	Subdimensi	Sasaran
		En1.3 Pengendalian Pencemaran Lingkungan
	En.2 Pengelolaan Sampah dan Limbah	En.2.1 Pengelolaan Sampah Berbasis Teknologi
		En.2.2 Reduksi Penggunaan Plastik
		En.2.3 Peningkatan Pengelolaan Limbah B3
	En.3 Tata Kelola Energi	En.3.1 Peningkatan Penggunaan Energi Terbarukan
		En.3.2 Peningkatan Efisiensi Energi

(Sumber: RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Pada subdimensi Pengelolaan Sampah dan Limbah, limbah padat dan cair (B3) yang belum diolah dengan baik dan juga sampah plastik masih menjadi isu utama. Pemerintah daerah belum menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi untuk optimalisasi daur ulang sampah.

Pada subdimensi Tata Kelola Energi, secara umum masyarakat dan pemerintah daerah masih menggunakan sumber daya energi tidak terbaharukan seperti kompor gas, mobil dan motor berbahan bakar bensin dan solar sebagai permasalahan, karena berakibat kepada menurunnya kualitas udara, sehingga pemanfaatan sumber energi terbarukan seperti energi surya dan angin untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca perlu dijadikan salah satu program Smart City daerah.

3. Strategi Pembangunan Smart City Daerah

Bagian 3 ini menguraikan strategi pembangunan *Smart City* berdasarkan enam dimensi Smart City pada Kabupaten Sampang sebagai berikut:

1. Dimensi Smart Governance terdiri dari 8 strategi (G.1.S.1. – G.1.S.3., G.2.S1. –G.2.S.3., dan G.3.S.1. – G.1.S.2.)
2. Dimensi Smart Branding terdiri dari 7 strategi (B.1.S.1. – B.1.S.3., B.2.S1. – B.2.S.3., dan B.3.S.1.)
3. Dimensi Smart Economy terdiri dari 12 strategi (Ec.1.S.1. – Ec.1.S.4., Ec.2.S1. –Ec.2.S.5., dan Ec.3.S.1. - Ec.3.S.3.)
4. Dimensi Smart Living terdiri dari 13 strategi (L.1.S.1. – L.1.S.3., L.2.S1. - L.2.S.5., dan L.3.S.1. - L.3.S.5.)
5. Dimensi Smart Society terdiri dari 9 strategi (S.1.S.1. – S.1.S.2., S.2.S1. - S.2.S.3., dan S.3.S.1. - S.3.S.4.)
6. Dimensi Smart Environment terdiri dari 6 strategi (En.1.S.1. – En.1.S.3., En.2.S1., dan En.3.S.1. - En.3.S.2.)

Subab 3.1. – 3.6. akan menyajikan penjelasan detail terkait strategi-strategi *Smart City* setiap dimensi.

3.1 Strategi Dimensi Smart Governance

Sasaran per subdimensi yang dihasilkan pada dimensi *Smart Governance* selanjutnya akan disusun ke dalam strategi-strategi per subdimensi seperti terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Strategi Pembangunan pada Dimensi Smart Governance

Dimensi	Subdimensi	Strategi	
Smart Governance (G)	G.1 Layanan Publik	G.1.S.1	Meningkatkan inovasi pelayanan publik
		G.1.S.2	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang berorientasi pada pelayanan masyarakat
		G.1.S.3	Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat kepada kepatuhan kepada peraturan pemerintah
	G.2 Birokrasi	G.2.S.1	Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi
		G.2.S.2	Meningkatkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berbasis digital
		G.2.S.3	Meningkatkan kualitas kebijakan daerah

Dimensi	Subdimensi	Strategi	
	G.3 Perancangan Kebijakan	G.3.S.1	Meningkatkan Fungsi
		G.3.S.2	Meningkatkan aksesibilitas, kemudahan dan kesederhanaan, serta kepastian pelayanan publik berbasis digital

(Sumber: FGD Bimtek 1 dan Bimtek 2, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Strategi-strategi yang dibuat pada subdimensi Layanan Publik, Birokrasi, dan Perancangan Kebijakan diharapkan mampu memenuhi beberapa harapan dari pemerintah daerah dalam hal ini tata kelola pemerintahan seperti:

- Proses Bisnis setiap Pelayanan Pemerintahan dapat disederhanakan
- Tersedianya call center bagi pelayanan kedaruratan
- Mulai diterapkan *flexible working* dalam pelayanan
- Meningkatkan edukasi teknologi pelayanan kepada pengguna pelayanan
- Sistem pembayaran pajak dan retribusi sudah tidak tunai lagi
- Pelayanan publik yang mudah, cepat, dan transparan

Saat ini dengan dukungan dari Dinas Kominfo Kabupaten Sampang telah memiliki 28 aplikasi seperti terlihat pada Gambar 3.1.





Gambar 3.1 Portal Layanan Kabupaten Sampang

(Sumber: Dinas Kominfo Kab. Sampang, 2022¹)

Salah satu aplikasi yang tersedia yaitu SPBE Sampang dibangun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2019 tentang SPBE dan juga sebagai pemenuhan regulasi nasional dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan yang maksimal kepada pengguna SPBE. Pengguna SPBE dimaksud adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha (Bupati Sampang, 2019).

Hasil reviu selama 5 tahun yang dilakukan oleh Kominfo Kabupaten Sampang menunjukkan bahwa layanan SPBE di Kabupaten Sampang belum memenuhi keinginan masyarakat pengguna layanan dalam mengakses layanan yang diberikan dengan indikator kemudahan dan kepuasan dari pengguna layanan, sehingga (Kadiskominfo Kab. Sampang, 2023) berinisiatif mengembangkan *Microservices Infrastructure* (Msi) sebagai aplikasi yang dinamakan Salempang (Satu Akses Layanan Pemerintah Kabupaten Sampang) dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dengan cara memberikan kemudahan akses layanan Pemerintah Kabupaten Sampang bagi masyarakat. Status saat ini Kominfo Kabupaten Sampang sedang melakukan migrasi semua konten yang ada pada layanan pusat data di web sampangkab.go.id ke Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola oleh Kementerian Kominfo RI.

¹ <https://sampangkab.go.id/aplikasi-sampang/>

3.2 Strategi Dimensi *Smart Branding*

Sasaran per subdimensi yang dihasilkan pada dimensi *Smart Branding* selanjutnya akan disusun ke dalam strategi-strategi per subdimensi seperti terlihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Strategi Pembangunan pada Dimensi *Smart Branding*

Dimensi	Subdimensi	Strategi	
Smart Branding (B)	B.1 Pariwisata	B.1.S. 1	Mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat
		B.1.S. 2	Memajukan perekonomian, melestarikan jati diri bangsa dan melestarikan fungsi dan mutu lingkungan hidup, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa
		B.1.S. 3	Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata serta ekonomi kreatif
	B.2 Daya Saing Bisnis	B.2.S. 1	Meningkatkan digitalisasi pelayanan di MPP
		B.2.S. 2	Meningkatkan Daya Saing investasi produk unggulan Sampang
		B.2.S. 3	Meningkatkan investasi daerah
	B.3 Wajah (Tampilan) Kota	B.3.S. 1	Menonjolkan kearifan lokal yang berciri khas Sampang menjadi branding kabupaten melalui wajah kota dan tata bangunan kota

(Sumber: FGD Bimtek 1 dan Bimtek 2, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Potensi wisata yang berasal dari sumber daya alam di Kabupaten Sampang pada dasarnya sangat mendukung Subdimensi Pariwisata. Wisata alam seperti Pantai Lon Malang, Air terjun Toroan, Camplong, Hutan Kera Nepa, Hutan Mangrove, dan Waduk Klampis belum banyak dikenal wisatawan domestik terutama di wilayah Madura sendiri. Infrastruktur jalan dan jaringan broadband, akses jalan yang mudah, akomodasi penginapan, ketersediaan Pusat Informasi Wisata, keramahan masyarakat sekitar (*hospitality*), dan kemampuan bahasa asing perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah sehingga Ekosistem Pariwisata dapat terwujud.

Pada Subdimensi Daya Saing Bisnis, Kabupaten Sampang memiliki 35 Desa Wisata (SK Bupati). Salah satu Desa Wisata Bira Tengah saat ini sedang mengikuti pemilihan Desa Wisata terfavorit dari Anugrah Desa Wisata

Indonesia 2023². Dukungan pemerintah daerah pada pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dibuktikan dengan adanya ketersediaan Manajemen Penanaman Modal (MPP), ketersediaan tempat promosi hasil kerajinan daerah (Dekranasda), program pendampingan pengembangan desa wisata, dan aplikasi informasi pariwisata (*Tourism Book*). Salah satu Desa Taman di Kecamatan Jrengik, para pemuda yang tergabung dalam kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) membangun Kafe Sawah Padi-Padi dengan tujuan memaksimalkan potensi alam berupa sawah untuk menunjang produktivitas warga hasil pendampingan dari Disporabudpar Kabupaten Sampang³.



Gambar 3.2 Alun-alun Trunojoyo sebagai Ikon Wajah Kota Kabupaten Sampang

Pada Subdimensi Wajah (Tampilan) Kota, Kabupaten Sampang memiliki Kekayaan seni budaya tradisional dan warisan sejarah seperti Alun-alun Trunojoyo (Gambar 3.2) sebagai ikon wajah kota (*Landmark*) Kabupaten Sampang dan juga Krampon Kampoeng Belanda. Adanya dukungan aplikasi media sosial seperti Wonderful Sampang, Sampang Kreatif, Pemkab Sampang, Pariwisata Sampang, Sampang hit, dan Explore Sampang sangat memungkinkan Kabupaten Sampang dikenal keunikannya oleh masyarakat di dalam dan di luar Madura.

3.3 Strategi Dimensi *Smart Economy*

Sasaran per subdimensi yang dihasilkan pada dimensi *Smart Economy* selanjutnya akan disusun ke dalam strategi-strategi per subdimensi seperti terlihat pada Tabel 3.3.

² Desa Wisata Bira Tengah, Kab. Sampang (<https://www.youtube.com/watch?v=lanNXb30wA8>)

³ <https://pariwisata.sampangkab.go.id/berita/view/Cafe-Padi-padi-Akan-Segera-Launching>

Tabel 3.3 Strategi Pembangunan pada Dimensi *Smart Economy*

Dimensi	Subdimensi	Strategi	
Smart Economy (Ec)	Ec.1 Ekosistem Industri	Ec.1.S.1	Mempercepat pertumbuhan aktivitas industri
		Ec.1.S.2	Meningkatkan kontribusi perdagangan, industri, dan jasa
		Ec.1.S.3	Meningkatkan kontribusi koperasi, Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro
		Ec.1.S.4	Meningkatkan inovasi untuk peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian dalam arti luas
	Ec.2 Kesejahteraan Masyarakat	Ec.2.S.1	Menguatkan daya saing dengan peningkatan produktivitas dan inovasi
		Ec.2.S.2	Menyusun konsep CSR dunia usaha untuk masyarakat
		Ec.2.S.3	Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Peluang Usaha
		Ec.2.S.4	Meningkatkan sentra usaha/produk ekonomi lokal
		Ec.2.S.5	Meningkatkan ketahanan pangan daerah
	Ec.3 Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec.3.S.1	Membangun sistem pembayaran <i>cashless</i> yang aman
		Ec.3.S.2	Membangun sistem untuk mempermudah jangkauan pelaku usaha
		Ec.3.S.3	Meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah

(Sumber: FGD Bimtek 1 dan Bimtek 2, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Industri primer dari bidang pertanian dan perikanan menjadi tulang punggung di Kabupaten Sampang pada salah satu subdimensi Ekosistem Industri. Berdasarkan data dari (BPS Kab. Sampang, 2022a) dalam rentang waktu 2016 hingga 2020, sebagian besar aktivitas perdagangan di wilayah Kabupaten Sampang dilakukan oleh usaha perdagangan berskala kecil. Informasi ini dapat ditemukan melalui data Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang. Agrowisata seperti budidaya Jambu

Camplong dan kampung Milon Napote. Jambu Camplong merupakan buah Jambu yang aslinya tumbuh di tanah Kabupaten Sampang dan hanya berbuah musiman, sayangnya justru Jambu Camplong ini tidak banyak dikenal di tempat asalnya, ironisnya lagi bibit Jambu Camplong ini diproduksi di luar Madura. Pokdarwis Napote Fruit aktif secara mandiri mengelola kampung Milon Napote di Desa Bira Timur. Di bidang Perikanan, kapasitas penangkapan ikan yang tinggi seperti di Sreseh, Camplong, dan Mandangin seharusnya memiliki potensi penghasilan yang cukup tinggi bagi nelayan. Tambak garam juga memerlukan inovasi dalam proses produksinya misalnya fasilitas perlindungan produk dengan proses standarisasi produk seperti sertifikasi halal, uji nutrisi, merk dan redesain kemasan.

Pada Subdimensi Kesejahteraan Masyarakat, berdasarkan data dari (BPS Kab. Sampang, 2022b) bahwa tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Sampang pada tahun 2020 mencapai 69.93%. Pada tahun 2021, angka ini meningkat menjadi 70.19%. Dari angka tersebut, terlihat bahwa 70.19% penduduk Kabupaten Sampang yang berusia 15 tahun ke atas aktif berpartisipasi dalam pasar kerja. Sebaliknya, sisanya sebanyak 29.81% terdiri dari individu yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga, atau terlibat dalam aktivitas di luar ranah ekonomi yang bukan bersifat pribadi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sampang pada tahun 2021 meningkat 0,10% dibandingkan dengan tahun 2020, naik dari 3,35% menjadi 3,45%. Kenaikan angka TPT ini mengindikasikan peningkatan jumlah penduduk yang mengalami pengangguran, karena lapangan kerja di Kabupaten Sampang memiliki keterbatasan. Salah satu faktornya adalah minimnya industri sekunder di daerah tersebut, yang biasanya menjadi penyedia lapangan pekerjaan utama. Selain itu, pemberlakuan pembatasan aktivitas akibat pandemi Covid-19 juga memberi dampak negatif pada situasi ini. Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa angka TPT di Kabupaten Sampang berada di bawah rata-rata TPT Provinsi Jawa Timur. Ini terjadi karena sebagian besar penduduk Kabupaten Sampang bekerja di sektor pertanian, yang relatif kurang terdampak oleh pandemi Covid-19. Faktanya, tingkat pengangguran yang signifikan di kota-kota besar menandakan bahwa urbanisasi masih menjadi pilihan utama dalam mencari peluang. Namun, tantangannya terletak pada kemampuan kota-kota ini untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia. Di perkotaan, biasanya tenaga kerja terampil yang memiliki keahlian khusus yang lebih mudah terserap, sementara di pedesaan,

mayoritas tenaga kerja terlibat dalam sektor pertanian yang tidak memerlukan keterampilan khusus.

Pada Subdimensi Ekosistem Transaksi Keuangan, pemerintah daerah perlu menerapkan *financial technology* yaitu transaksi dengan metode pembayaran *non cash* baik untuk transaksi perdagangan maupun layanan yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan (BPS Kab. Sampang, 2022a) bahwa tabungan dan giro adalah jenis layanan perbankan yang paling diminati oleh penduduk Sampang. Pemerintah daerah juga perlu mendorong dan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk menjual produk-produk pertanian, perikanan, dan wisata melalui aplikasi *e-marketplace* komersial seperti Tokopedia.com, shopee.co.id, bukalapak.com dan lain-lain yang telah memiliki jumlah dan jangkauan pembeli yang luas dengan teknologi *payment gateway* yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3.4 Strategi Dimensi Smart Living

Sasaran per subdimensi yang dihasilkan pada dimensi *Smart Living* selanjutnya akan disusun ke dalam strategi-strategi per subdimensi seperti terlihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Strategi Pembangunan pada Dimensi Smart Living

Dimensi	SubDimensi	Strategi	
Smart Living (L)	L.1 Harmonisasi Tata Ruang	L.1.S.1	Melakukan penataan lingkungan sesuai rencana tata ruang
		L.1.S.2	Meningkatkan pengelolaan tata ruang
		L.1.S.3	Meningkatkan sarana prasarana dasar permukiman
	L.2 Kesehatan	L.2.S.1	Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan rujukan
		L.2.S.2	Meningkatkan kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan
		L.2.S.3	Menurunkan angka kematian Ibu dan Balita
		L.2.S.4	Mempercepat penurunan stunting
		L.2.S.5	Meningkatkan peran stakeholder pembangunan kepemudaan dan keolahragaan
	L.3 Transportasi	L.3.S.1	Mewujudkan transportasi yang menjamin kemudahan mobilitas bagi individual, publik maupun kebutuhan logistik daerah

Dimensi	SubDimensi	Strategi
		L.3.S.2 Menyiapkan sistem jaringan jalan yang cukup memadai bagi masyarakat menuju lokasi tujuan
		L.3.S.3 Menjamin Ketersediaan perlengkapan jalan guna mewujudkan keselamatan pengguna jalan
		L.3.S.4 Mewujudkan transportasi laut yang menjamin kemudahan mobilitas bagi individual, publik maupun kebutuhan logistik daerah
		L.3.S.5 Meningkatkan pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah

(Sumber: FGD Bimtek 1 dan Bimtek 2, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Subdimensi Harmonisasi Tata Ruang, menciptakan lingkungan hunian yang menyenangkan dan seimbang di antara area pemukiman dan adanya pusat bisnis yang didukung oleh fasilitas rekreasi untuk keluarga. Kabupaten Sampang memiliki lahan RTH dengan luas 217,88 Ha (Perda RTRW Nomor 4 Tahun 2020), sedangkan pusat bisnis seperti di kawasan Wahid Hasyim belum dilengkapi dengan tempat rekreasi untuk keluarga. Indikator SNI ISO 37122:2019 (Indikator 12.1) yaitu persentase rumah tangga dengan pengukuran energi pintar dan SNI ISO 37122:2019 (Indikator 12.2) yaitu persentase rumah tangga dengan pengukuran air pintar belum menjadi indikator standar pada P-RPJMD 2019-2024.

Pada Subdimensi Kesehatan, fasilitas dan infrastruktur layanan kesehatan masih membutuhkan peningkatan, walaupun capaiannya mencapai 68,2% yang diartikan sebagai tingkat sedang, tetapi distribusi fasilitas kesehatan belum optimal. Dari total 7 Puskesmas, 31,8% belum memenuhi standar. Dari 57 Puskesmas Pembantu (Pustu), sekitar 50,9% (29 Pustu) berada dalam kondisi baik, 3 Pustu (5,3%) mengalami kerusakan ringan, dan 25 Pustu (43,8%) mengalami kerusakan berat. Jumlah fasilitas olahraga di Kabupaten Sampang tergolong memadai. Namun, perlu dilakukan tinjauan mendalam untuk memastikan apakah 195 fasilitas olahraga yang ada di 180 desa telah terdistribusi secara merata dan dimanfaatkan optimal.

Pada Subdimensi Transportasi, Pemerintah daerah perlu membangun ekosistem transportasi yang mendukung mobilitas bagi individu, publik, dan keperluan logistik yang ramah lingkungan. Terdapat 14 indikator terkait Transportasi dari SNI ISO 37122:2019 yaitu Indikator 19.1-19.14 dengan

penekanan kepada indikator kendaraan rendah emisi, kendaraan otonom, sistem parkir *real time*, dan transportasi umum dengan pembayaran terpadu.

3.5 Strategi Dimensi *Smart Society*

Sasaran per subdimensi yang dihasilkan pada dimensi *Smart Society* selanjutnya akan disusun ke dalam strategi-strategi per subdimensi seperti terlihat pada Tabel 3.5.

Pada Subdimensi Interaksi Masyarakat, interaksi masyarakat yang efisien diwujudkan melalui kelompok sosial yang sudah diterapkan di Kabupaten Sampang salah satunya adalah kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Dari 18 Pokdarwis terdapat 4 pokdarwis yang aktif dan berjalan mandiri yaitu: Pokdarwis Putra Lon Malang terletak di Desa Wisata Bira Tengah aktif secara mandiri mengelola DTW Pantai Lon Malang dan Desa Wisata Bira Tengah, Pokdarwis Marparan Jaya aktif mengelola secara mandiri DTW Wisata Mangrove Sreseh spot Marparan, Pokdarwis Klobur Mandiri mengelola DTW Mangrove Sreseh spot Klobur, dan Pokdarwis Napote Fruit aktif secara mandiri mengelola kampung Milon Napote di Desa Bira Timur. Indikator SNI ISO 37122:2019 (Indikator 13.1-13. 4) tentang Populasi dan Kondisi Sosial.

Pada Subdimensi Ekosistem Belajar/Pendidikan, pemerintah daerah perlu mewujudkan ekosistem Pendidikan dengan dukungan teknologi informasi baik pendidikan formal dan informal. Terdapat cikal bakal *Smart Pesantren* di Nahdatul Tulab dan Karang Durin sebagai *best practice* untuk dapat diadopsi oleh 352 Pondok pesantren lain. Indikator SNI ISO 37122:2019 (Indikator 6.1-6.3) tentang Pendidikan juga perlu menjadi pedoman pengukuran.

Tabel 3.5 Strategi Pembangunan pada Dimensi *Smart Society*

Dimensi	Subdimensi	Strategi	
Smart Society (S)	S.1 Interaksi Masyarakat	S.1.S.1	Meningkatkan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas serta fasilitasi penanganan konflik di daerah
		S.1.S.2	Meningkatkan pembangunan desa
	S.2 Ekosistem Belajar/Pendidikan	S.2.S.1	Meningkatkan kualitas, partisipasi dan jangkauan pelayanan pendidikan yang merata
		S.2.S.2	Memberikan kesempatan kepada masyarakat putus sekolah dan atau tidak sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan dan pengetahuan program pendidikan kesetaraan

Dimensi	Subdimensi	Strategi	
	S.3 Keamanan Masyarakat	S.2.S.3	Meningkatkan kebermanfaatan perpustakaan dan keterlibatan masyarakat
		S.3.S.1	Meningkatkan pemeliharaan Keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) sebagai bentuk deteksi dini dan cegah dini pada pencegahan dan penanganan konflik sosial
		S.3.S.2	Meningkatkan pelayanan pemadaman kebakaran dan Non Kebakaran
		S.3.S.3	Meningkatkan layanan call center kegawatdaruratan dan non kegawatdaruratan terintegrasi
		S.3.S.4	Meningkatkan ketangguhan dan mitigasi risiko bencana

(Sumber: FGD Bimtek 1 dan Bimtek 2, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Pada Subdimensi Keamanan Masyarakat, Kabupaten Sampang telah menempatkan CCTV di taman kota dan lalu lintas jalan utama⁴, namun saat ini penggunaannya terbatas hanya kepada kondisi pengunjung taman kota dan kepadatan lalu lintas, bukan untuk memantau tindak kriminal atau penyebab kecelakaan lalu lintas. Indikator SNI ISO 37122:2019 (Indikator 15.1) tentang Keamanan pada dasarnya sudah diterapkan, sehingga perlu ditambahkan instalasi kamera pengintai di lokasi-lokasi yang memiliki potensi besar terjadinya tindak kriminal, pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas, dan potensi bencana akibat kelalaian atau potensi bencana alam. Beberapa wilayah yang memiliki potensi bencana alam di Kabupaten Sampang mencakup DAS Nodung, terletak di wilayah Kecamatan Banyuates, Ketapang, dan Sokobanah; DAS Kamoning, yang berada di wilayah Kecamatan Robatal, Omben, Kedungdung, Sampang, dan Camplong; DAS Semajid, yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Robatal, Sokobanah, Omben, dan Camplong; serta DAS Blega yang terdapat di Kecamatan Tambelangan, Jrengik, Torjun, dan Kedungdung. Sementara itu, banjir yang terjadi disebabkan oleh dua faktor, yaitu intrusi air laut dan aliran air dari daerah hulu di utara. Ini mengakibatkan sungai Kali Kemuning yang melewati Kecamatan Sampang menjadi meluap.

⁴ <https://sampangkab.go.id/cctv-streaming/>

3.6 Strategi Dimensi *Smart Environment*

Sasaran per subdimensi yang dihasilkan pada dimensi *Smart Environment* selanjutnya akan disusun ke dalam strategi-strategi per subdimensi seperti terlihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Strategi Pembangunan pada Dimensi *Smart Environment*

Dimensi	Subdimensi	Strategi	
Smart Environment (En)	En.1 Proteksi Lingkungan	En.1.S.1	Mengelola sarana dan prasarana keanekaragaman hayati
		En.1.S.2	Meningkatkan Sistem Pengelolaan Air Permukaan
		En.1.S.3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkualitas
	En.2 Pengelolaan Sampah dan Limbah	En.2.S.1	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah anorganik
	En.3 Tata Kelola Energi	En.3.S.1	Meningkatkan konversi energi dengan biomassa
		En.3.S.2	Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi konversi limbah padat menjadi energi

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

Pada Subdimensi Proteksi Lingkungan, pengelolaan sumber daya air, udara, dan tanah menjadi prioritas. Dukungan teknologi sangat diperlukan untuk memonitor terjadinya pencemaran ketiga sumber daya tadi. Peningkatan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tersebar merata di Kabupaten Sampang dapat membantu mengendalikan tingkat polusi udara, air, dan tanah. Vegetasi di dalam RTH memiliki kemampuan menyerap substansi-substansi pencemar seperti karbon dioksida (CO2), nitrogen dioksida (NO2), dan partikel udara yang halus. Ini berkontribusi pada pengurangan jumlah zat pencemar di atmosfer. Tanaman dan tanah yang ada di RTH dapat berfungsi sebagai penyaring alami yang membersihkan air hujan sebelum sampai ke sistem perairan, sehingga mengurangi potensi terjadinya pencemaran.

Vegetasi yang ada di RTH berperan dalam mencegah proses erosi tanah dengan menjaga tanah agar tetap berada pada tempatnya. Ini juga membantu mencegah partikel-partikel tanah masuk ke dalam sumber air, sehingga dapat mengurangi pencemaran di perairan. Indikator SNI ISO 37122:2019 tentang Air Limbah (Indikator 22.1-22.5) dan Indikator SNI ISO 37122:2019 tentang Air (Indikator 23.1-23.4). Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sampang Tahun 2021 (RPJMD Kab. Sampang, 2022) menggunakan

rumus yang dijabarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, diperoleh informasi bahwa kebutuhan pasokan air bersih di Kabupaten Sampang hingga tahun 2024 mencapai jumlah sekitar 96.188.925,3 liter. Apabila dibandingkan dengan perhitungan kebutuhan sebelumnya (standar lokal), terlihat bahwa ketersediaan air mencapai 313.839.253 liter. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kapasitas air masih berlebih atau SURPLUS.

Pada Subdimensi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Sistem pengelolaan sampah dan limbah di Kabupaten Sampang dijalankan melalui sejumlah aspek teknis dan regulasi yang diatur oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman (DLH) dan juga melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sampang. Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga juga diatur dalam Peraturan Bupati No. 50 Tahun 2018. Pengelolaan limbah di sektor rumah tangga, industri, dan sektor publik didasarkan pada prinsip *Reduce, Reuse, and Recycle* (3R): mengurangi, memanfaatkan, dan memilah. Bagian-bagian seperti Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan, serta Seksi Kebersihan Jalan dan Lingkungan berperan utama dalam menjalankan tata kelola ini⁵. Kajian juga memberikan wawasan tentang strategi pengelolaan limbah, termasuk di wilayah pedesaan seperti Disanah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang. Masyarakat memiliki peran dalam pengelolaan limbah rumah tangga, termasuk yang bersifat anorganik, sebagai langkah menjaga lingkungan. Indikator SNI ISO 37122:2019 tentang Limbah Padat (Indikator 16.1-16.6), Indikator SNI ISO 37122:2019 tentang Lingkungan dan Perubahan Iklim (Indikator 8.1-8.3), dan SDGs (Tujuan 12.5) tentang produksi sampah dapat digunakan juga sebagai indikator kinerja.

Pada Subdimensi Tata Kelola Energi, pendekatan komprehensif dalam mengelola energi berkelanjutan diperlukan di Kabupaten Sampang. Langkah ini melibatkan sinkronisasi kerja dengan beragam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dinas terkait, serta memanfaatkan sumber daya lokal guna mencapai tujuan energi berkelanjutan yang telah ditetapkan. Pentingnya mengadopsi kebijakan yang mendorong pemanfaatan energi terbarukan (EBT) berdasarkan potensi lokal. Melalui kolaborasi bersama Dinas Lingkungan

⁵ <https://hmgp.geo.ugm.ac.id/2021/08/27/pengelolaan-sampah-dalam-konteks-pembangunan-berkelanjutan-waste-management-in-the-context-of-waste-management/>

Hidup perlu melakukan identifikasi potensi energi surya, mini hidro, dan biomassa yang ada di Kabupaten Sampang.

Pemerintah daerah dapat membentuk tim khusus yang akan bekerjasama dengan Dinas Tata Ruang dan Bangunan untuk merumuskan kebijakan perencanaan tata ruang yang mendukung pengembangan infrastruktur energi berkelanjutan. Selain itu, sebagai rencana aksi dengan meluncurkan program edukasi dengan dukungan dari Dinas Pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat energi terbarukan serta cara efektif menghemat energi.

Dalam upaya meningkatkan efisiensi energi, perlu dilakukan kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan guna mendorong adopsi teknologi energi efisien di sektor industri dan komersial. Tidak kalah penting, kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman (DLH) pada upaya pengurangan limbah dan promosi energi ramah lingkungan, kolaborasi ini akan mendorong pengembangan program daur ulang limbah serta penurunan emisi gas rumah kaca.

Dalam pendekatan yang lintas sektoral, peran Dinas Pendidikan memastikan bahwa pendidikan mengenai energi berkelanjutan terintegrasi dalam kurikulum sekolah. Selain itu, Diskominfo akan berperan dalam kampanye kesadaran energi melalui berbagai media dan platform digital. Indikator SNI ISO 37122:2019 tentang Energi (Indikator 7.1-7.10) dan SDGs (Tujuan 7.2.1) tentang Bauran Energi Terbarukan dapat membantu mengukur luaran dari subdimensi ini.

4. Peta Jalan Pembangunan Smart City Daerah

Bagian 4 mendiskusikan peta jalan (program) pembangunan Smart City Kabupaten Sampang dalam Jangka Pendek (2024), Jangka Menengah (2025-2028), dan Jangka Panjang (2029-2033). Peta jalan adalah program kerja yang harus dilaksanakan dalam periode tertentu yaitu Jangka Pendek 1 tahun, Jangka Menengah 3-5 tahun, dan Jangka Panjang 10-20 tahun. Setiap program bisa memiliki lebih dari satu inovasi yang berasal dari inovasi satu OPD atau kolaborasi beberapa OPD. Setiap inovasi harus ditentukan target kinerja dan anggaran per tahun, sumber dana, dan sektor yang mengarahkan (*leading sector*) terutama untuk inovasi kolaborasi antar OPD.

Peta jalan pembangunan Smart City di Kabupaten Sampang disusun berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pada Bimtek 2 (tanggal 2-3 Agustus 2023) melalui pengisian kertas kerja dan dilakukan penajaman pada Bimtek 3 (tanggal 4-5 September 2023). Rangkuman peta jalan dari Buku 3 Executive Summary ini merujuk kepada hasil lengkap peta jalan dan rencana aksi yang telah dituliskan sebelumnya pada Buku 2 Masterplan Smart City Kabupaten Sampang.

Subbab 4.1-4.6 merangkum Peta Jalan Pembangunan Jangka Pendek (2024), Jangka Menengah (2025-2028), dan Jangka Panjang (2029-2033) pada setiap dimensi Smart City.

4.1 Peta Jalan Dimensi *Smart Governance*

Terdapat 8 program/kegiatan/subkegiatan yang ditentukan dari peta jalan pada setiap subdimensi pada dimensi *Smart Governance* sebagai berikut:

1. Subdimensi Layanan Publik mencakup 4 program yaitu:
 - a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas
 - b. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - c. Program Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
 - d. Program Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
2. Subdimensi Birokrasi mencakup 3 program yaitu:
 - a. Program Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - b. Program Penyelenggaraan penataan ruang
 - c. Program yang memfasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
3. Subdimensi Perancangan Kebijakan mencakup 2 program yaitu:
 - a. Program Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Program Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas

Subbab 5.1. menguraikan secara detail Peta jalan Pembangunan Jangka Pendek (2024), Jangka Menengah (2025-2028), dan Jangka Panjang (2029-2033) untuk dimensi *Smart Governance*.

4.1.1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028)

Subab 4.1.1 menguraikan Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (PJ2PM) 2024-2028 pada Dimensi Smart Governance seperti terlihat pada

Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah Smart Governance

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Layanan Publik	Peningkatan aksesibilitas, kemudahan dan kesederhanaan serta kepastian pelayanan publik berbasis digital	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas	Jumlah sistem informasi satu akses layanan yang dibangun	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Salempang (Satu Akses Layanan Pemerintah Kabupaten Sampang)	52	250	70	450	80	150	90	150	100	150	APBD	Diskominfo
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kerjasama Pelayanan Terintegrasi (Desa/ Kelurahan)		SAKERA MESEM (Satu pintu Administrasi Kependudukan Rakyat Menjadi Sejahtera dan Membahagiakan) V2: Kerjasama pelayanan Adminduk dengan Desa/ Kelurahan untuk mendekatkan lokasi pelayanan	48 Desa/ Kel.	13	70 Desa/ Kel.	15	100 Desa/ Kel.	100	140 Desa/ Kel.	100	186 Desa/ Kel.	20	APBD	Dispendukcapil

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
		Pencatatan, Penatausahaa n dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pelayanan Rela Berkorban yang dilaksanaka n		Rela Berkorban (REaksi Layanan Adminduk BERSama Kelompok ODGJ, Rentan BencanA atau Non bencana): Pelayanan adminduk jemput bola kepada kelompok masyarakat ODGJ, Rentan Bencana dan Non Bencana termasuk juga Lansia, Jompo dan Sakit ke rumah dan atau Fasilitas Kesehatan (RS/Puskesmas)	100 orang	33	150 orang	35	200 orang	35	250 orang	40	250 orang	40	APBD	Dispendukcapi 1
		Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggara kan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Ko ta dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi	Jumlah pelayanan adminduk bagi pasangan yang baru menikah yang dilaksanaka n		MARLENA TUKU SANTAN (Manajemen layanan adminduk, tujuh dokumen langsung dapat saat pernikahan) kerjasama pelayanan dengan Kemenag untuk layanan bagi pasangan yang baru menikah untuk mendapatkan langsung 7 dokumen (Seven In One/7 in 1)	3 pasang an	11	5 pasang an	15	10 pasang an	18	15 pasang an	20	20 pasang an	25	APBD	Dispendukcapi 1

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
		Penduduk yang Beragama Islam			yaitu Buku Nikah 2 dokumen dari Kemenag dan KK/Kartu Keluarga 3 dokumen serta KTP/Kartu Tanda Penduduk 2 dokumen dari Dispendukcapil												
Birokrasi	Peningkatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berbasis digital	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen SAKIP perangkat daerah yang terdigitalisasi	-	SiPEDAL (Sistem Pengendalian Kinerja Daerah) yaitu sistem informasi untuk pengisian perencanaan daerah dan OPD selama 5 (lima) tahun dan perencanaan kinerja tahunan hingga tahap pengukuran kinerja, dimana output dari aplikasi akan dijadikan dokumen pendukung SAKIP serta sebagai laporan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan	100%	50	100%	60	100%	70	100%	75	100%	80	APBD	Bappeda Litbang

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
					pembangunan daerah												
		Program Penyelenggara an penataan ruang	Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Persentase izin bangunan yang diajukan melalui sistem pengiriman elektronik	E-PAKON ABINEH (E-Pantau KONdisi daN kelAyakan Bangunan gedung InveNtaris pEmerintaH)	100	818 Jt	100	2,488 Jt	100	2,488 Jt	100	2,488 Jt	100	2,500 Jt		DPUPR
	Meningkatny a kualitas kebijakan daerah	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembanguna n yang diintegrasika n	-	Sepatu Barjas (Sistem Pelayanan Pengadaan Terpadu Barang dan Jasa)	4 layanan	50	4 layanan	50	4 layanan	50	4 layanan	50	4 layanan	50	APBD	Bagian Barjas dan Administrasi Pembangunan
Perancan gan Kebijakan	Peningkatan Fungsi	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan Informasi Geospasial dalam Geoportal	-	SIG4TA (Sistem Integrasi Geospasial untuk Sampang Satu Data), yaitu sistem yang memungkinkan integrasi data dan informasi geospasial dalam satu basisdata	100%	150	100%	200	100%	250	100%	300	100%	500	APBD	Bappeda Litbang

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
					dan satu sistem referensi, memiliki standar data sesuai kebijakan satu peta, memiliki metadata, serta memiliki kemampuan untuk berbagi pakai data, atau dipertukarkan antar sistem yang saling berinteraksi, serta dapat diakses secara mudah dalam satu geoportal.												

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
		Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas	Persentase aplikasi yang terintegrasi dengan DE Sampang		De Sampang merupakan sistem aplikasi pemerintahan (birokrasi) ditujukan untuk Bupati Sampang. Di DE Sampang ini, Bupati selaku pimpinan bisa melihat capaian kinerja, target, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah (OPD) karena seluruh aplikasi dari OPD yang berbeda sudah terkoneksi/terintegrasi dengan Dashboard ini selaku rumah besar bagi aplikasi untuk birokrasi yang ada.	60%	100	80%	50	90%	50	100%	50	100%	50	APBD	Diskominfo

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

4.1.2 Peta Jalan Jangka Panjang (2029-2033)

Subab 4.1.2 menguraikan Peta Jalan Pembangunan Jangka Panjang (PJ2P) 2029-2033 pada Dimensi Smart Governance seperti terlihat pada

Tabel **4.2.**

Tabel 4.2 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Governance

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Layanan Publik	Peningkatan aksesibilitas, kemudahan dan kesederhanaan , serta kepastian pelayanan publik digital	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Cakupan sistem informasi satu akses layanan yang dibangun	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Salempang (Satu Akses Layanan Pemerintah Kabupaten Sampang)	100%	150 jt	100%	150 jt	100%	150 jt	100%	150 jt	100%	150 jt	APBD	Diskominfo
Birokrasi	Peningkatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berbasis digital	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen SAKIP perangkat daerah yang terdigitalisasi	-	SiPEDAL (Sistem Pengendalian Kinerja Daerah) yaitu sistem informasi untuk pengisian perencanaan daerah dan OPD selama 5 (lima) tahun dan perencanaan kinerja tahunan hingga tahap pengukuran kinerja, dimana output dari aplikasi akan dijadikan dokumen pendukung SAKIP serta sebagai laporan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	100%	100 jt	100%	50 jt	100%	50 jt	100%	50 jt	100%	50 jt	APBD	Bappeda Litbang

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Perancangan Kebijakan	Peningkatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berbasis digital	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase sistem informasi yang terintegrasi pada Dashboard Eksekutif	10.2. Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Big Data (Sekumpulan data yang terdiri dari: 1. Data antar instansi pemerintah 2. Data individu dan 3.Data sektor swasta yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama: pemerintah, individu dan sektor swasta secara terbuka	100%	200 jt	100%	100 jt	100%	100 jt	100%	100 jt	100%	100 jt	APBD	Diskominfo

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

4.2 Peta Jalan Dimensi Smart Branding

Terdapat 5 program/kegiatan/subkegiatan yang ditentukan dari peta jalan pada setiap subdimensi pada dimensi Smart Branding sebagai berikut:

1. Subdimensi Pariwisata mencakup 2 program yaitu:
- a. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata

b. Program pemasaran pariwisata

2. Subdimensi Daya Saing Bisnis mencakup 2 program yaitu:
- a. Program Pelayanan Penanaman Modal

b. Program Promosi Penanaman Modal
3. Subdimensi Wajah (Tampilan) Kota mencakup 1 program yaitu: Program penataan bangunan dan lingkungannya

Subbab 4.2 menguraikan secara detail Peta jalan Pembangunan Jangka Pendek (2024), Jangka Menengah (2025-2028), dan Jangka Panjang (2029-2033) untuk dimensi *Smart Branding*.

4.2.1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028)

Subab 4.2.1. menguraikan Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (PJ2PM) 2024-2028 pada Dimensi Smart Branding seperti terlihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah Smart Branding

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerj a	An g	Target Kinerj a	An g	Target Kinerj a	Ang	Target Kinerj a	Ang	Target Kinerj a	An g		
Pariwisata	Pengembanga n pariwisata berbasis masyarakat	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	1. Jumlah kunjungan wisatawan 2. Jumlah desa berpotensi menjadi desa wisata 3. Meningkatnya jumlah pegiat wisata partisipasi masyarakat 4. Jumlah pengembanga n destinasi	Persentase layanan rekreasi publik yang dipesan secara daring	SEKARPOTE COOLING (wisata desa kreatif berbasis potensi sebagai sarana echoo healing) PAS GEMILANG (Pantura Agrowisata Gemilang), Program dan	1. 383.50 6 2. 20 % 1. 10 %	750 jt	1. 460.20 7 2. 30 % 1. 35% 2. 15 %	2 M	1. 552.24 8 2. 35 % 1.40 % 2.20 %	3 M	1. 662. 697 2. 40 % 1.45% 2.25 %	3,5 M	1. 795.23 7 2. 50 % 1.50 % 2.30 %	5 M	1. APBD 2. APBD PROV 3. APBN 4. CSR 5. Hibah Lembaga Pemerintah 6. Organisasi nirlaba 7. Potensi pendapatan pariwisata	DISPORAB UDPAR

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Ang	Target Kinerja	Ang	Target Kinerja	Ang	Target Kinerja	Ang	Target Kinerja	Ang		
			wisata berbasis konservasi pertanian		pilot project Percepatan pembangunan sektor kepariwisataan di Kabupaten Sampang, dengan menggunakan sample wilayah lokasi bagian pesisir utara Kabupaten Sampang	2. 20 %											
		Program pemasaran pariwisata	1. Persentase produk ekraf sebagai daya dukung wisata 2. jumlah layanan Informasi pariwisata yang mudah diakses 3. Jumlah length of stay	1. jumlah pemesan daring untuk fasilitas budaya per 100.000 penduduk 2. Persentase catatan budaya kota yang telah di digitalisasi	BAPPER MAS (bank data pariwisata berbasis partisipasi masyarakat)	1. 20 % 2. 2 3. 20%	500 jt	1. 30 % 2. 3 3. 25%	1 M	1. 35 % 2. 4 3. 30%	2 M	1. 40 % 2. 5 3.35%	2,5M	1. 50 % 2. 5 3. 40%	3 M	1. APBD 2. APBD PROV 3. APBN 4. CSR 5. Hibah Lembaga Pemerintah 6. Organisasi nirlaba 7. Potensi pendapatan pariwisata	DISPORAB UDPAR
Daya Saing Bisnis	Peningkatan digitalisasi pelayanan di MPP	Program Pelayanan Penanaman Modal	1. Tercapainya realisasi penanaman modal 2. Persentase perijinan yang diterbitkan		SI-POS SI-POS (SISTEM INFORMASI PERIJINAN ONLINE), aplikasi pelayanan perijinan	35%	30 jt	40%	100 jt	45%	100 jt	50%	100 jt			1. APBD 2. APBD PROV 3. APBN 4. CSR 5. Hibah Lembaga Pemerintah	

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerj a	An g	Target Kinerj a	An g	Target Kinerj a	Ang	Target Kinerj a	Ang	Target Kinerj a	An g		
			tepat waktu		untuk ijin tertentu yang tidak tercover dalam OSS LAPINDES (Layanan Perizinan ke Desa-desa) Pelayanan Publik jemput bola kepada para pelaku usaha di desa- desa di Kabupaten Sampang, Pelayanan yang terintegrasi sangat memudahkan pelaku usaha di desa-desa dalam pengurusan layanan	35%	5 jt	40%	30 jt	45%	30 jt	50%	30 jt				

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerj a	An g	Target Kinerj a	An g	Target Kinerj a	Ang	Target Kinerj a	Ang	Target Kinerj a	An g		
	Peningkatan Daya Saing investasi produk unggulan Sampang	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor		BARING SIANG (Business Gathering Investasi Kabupaten Sampang) mempromosik an peluang Investasi yang ada di Kabupaten Sampang dan memfasilitasi langsung permasalahan yang terjadi pada calon investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Sampang dan para investor yang ada di Kabupaten Sampang.	Menari k Minat Investor	300j t	20 %	400j t	30%	500jt	40%	550jt	50%	605j t	1. APBD 2. APBD PROV 3. APBN 4. CSR 5. Hibah Lembaga Pemerintah	
						Peningk atan Jumlah NIB	300j t		400j t		500jt		550jt		605j t		
						Persent ase UM											
						Jumlah UK											
						Jumlah UM											

Sub-Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerj a	An g	Target Kinerj a	An g	Target Kinerj a	Ang	Target Kinerj a	Ang	Target Kinerj a	An g		
Wajah (Tampilan) Kota	Penonjolan kearifan lokal yang berciri khas Sampang menjadi branding kabupaten	Program penataan bangunan dan lingkunganny a	presentasi desain khusus bangunan berciri khas daerah	1. jumlah kota per 100.00 0 orang pendu duk per tahun yang terliba t dalam proses perenc anaan kota 2. persen tase ijin bangu nan yang diajuk an melalu i sistem pengiri man elektro nik	SAMPANG GEMILANG: Trunojoyo City Park (Optimalisasi fungsi kawasan Alun- alun Trunojoyo sebagai: 1) taman kota 2) site layanan publik on the street 3) creative centre. Note: creative centre: pusat aktivitas kegiatan dan kreativitas masyarakat : seni, budaya, fotografi dsb	1. 2 2. 30%	1 M	1. 3 2. 40%	750 jt	1. 4 2. 50 %	1 M	1. 5 2. 65%	450		450 Jt	1. APBD 2. APBD PROV 3. APBN 4. CSR 5. Hibah Lembaga Pemerintah	PUPR

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

4.2.2 Peta Jalan Jangka Panjang (2029-2033)

Subbab 4.2.2 menguraikan Peta Jalan Pembangunan Jangka Panjang (PJ2P) 2029-2033 pada Dimensi Smart Branding seperti terlihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Branding

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Pariwisata	Memajukan perekonomian, melestarikan jati diri bangsa dan melestarikan fungsi dan mutu lingkungan hidup, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 1. Pengelolaan Daya Tarik WisataKabupaten/Kota 2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten /Kota 3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten /Kota 4. Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten	1.Jumlah kunjungan wisatawan 2.Jumlah length of stay 3.jumlah pengembangan destinasi wisata berbasis konservasi	Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	CAMPLONG REBORN (Pengembangan wisata daerah pesisir Camplong)	1. FS 100% 2. Penyusunan masterplan dan dokumen perencanaan lain 100% 3. penyusunan rencana manajemen baru100%	1. 150 juta 2. 500 juta 3. 300 juta	1. pembangunan dan revitalisasi sarana dan prasarana 80 % 2. penataan manajemen kelembagaan dan pengelolaan “camplong reborn” 1 manajemen kelembagaan (100%)	3 M 200 juta	1. penataan lokasi baru (100%) 2. penambahan wahana modern tahap 2 3.ktivasi camplong reborn 100% 4. kegiatan eventuak tahunan 100%	100 juta 500 jt 200 juta 500 juta	pengembangan berkelanjutan 100%	1,3 M	.pengembangan berkelanjutan dan evaluasi 100 %	2,6 M	APBD APBD PROV APBN	DISPORABU DPA

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
		/Kota															
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 2. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan	1.Persentase produk ekraf sebagai daya dukung wisata 2.jumlah layanan Informasi pariwisata yang mudah di akses	Persentase layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	WISATA MANGROVE SRESEH (WMS) merupakan bentuk kolaborasi antar desa untuk menjadikan desa desa mereka dalam satu kesatuan paket daya tarik wisata yang bersinergi dengan menggabungkan masing-masing potensi desanya menjadi produk wisata yang layak jual.	1.penyiapan dokumen perencanaan 100%	300 juta	pengembangan ecotourism berwawasan lingkungan 100%	600 juta	1.pembangunan jaringan sanitasi dan air bersih 100%	750 juta	pemberdayaan potensi ekonomi kreatif	800 juta	pembangunan amenities 100%	2 M	APBD APBD PROV APBN DD	DISPORABU DPAR DPMD BAPPELITBA NGDA
Daya Saing Bisnis	Peningkatan digitalisasi pelayanan di MPP	Program pengembangan iklim Penanaman Modal	1. Persentase Ijin yang diterbitkan tepat waktu 2. Persentase	Bisnis Branding	MPP DIGITAL Aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah yang berbasis elektronik	1.100%	180 jt	1.100%	190 jt	1.100%	200 jt	1.100%	220 jt	1.100%	250 jt	APBD	DPMP TSP
						2.100%		2.100%		2.100%		2.100%		2.100%			

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
			pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti		untuk mengakses semua layanan yang saling terintegrasi. Masyarakat dapat mengakses semua layanan menggunakan satu akun MPP Digital dan cukup sekali mengunggah dokumen persyaratan layanan yang dibutuhkan												

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikato r Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Wajah (Tampilan) Kota	Penonjolan kearifan lokal yang berciri khas Sampang menjadi branding kabupaten melalui wajah kota dan tata bangunan kota	Program penataan bangunan dan lingkungannya a. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkunganya didaerah dan kabupaten b. Penyusunan rencana dan teknis penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah Kabupaten / Kota	Persentas e penataan ruang	1. ju mlah kota per 100.000 orang penduduk per tahun yang terlibat dalam proses perencan aan kota 2. pr esentasi ijin bangun an yang diajukan melalui sistem pengirima n elektronik	SAMPANG GEMILANG IKONIK <i>Trunojoyo City Park</i> (Optimalisas i fungsi kawasan Alun-alun Trunojoyo sebagai: 1) taman kota 2) <i>site</i> layanan publik <i>on the street</i> 3) <i>creative centre</i> .	100	5 M	100	5 M	100	5 M	100	750 jt	100	750 jt	APBD APBD PROV APBN	DPUPR DISPORABU DPAR

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

4.3 Peta Jalan Dimensi *Smart Economy*

Terdapat 11 program/kegiatan/subkegiatan yang ditentukan dari peta jalan pada setiap subdimensi pada dimensi Smart Economy sebagai berikut:

1. Subdimensi ekosistem Industri mencakup 5 program yaitu:

- a. Program Pengembangan iklim penanaman modal
 - b. Program Pelayanan penanaman modal
 - c. Program Promosi Penanaman Modal
 - d. Program perencanaan dan pembangunan industry
 - e. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
2. Subdimensi Kesejahteraan Masyarakat mencakup 3 program yaitu:
- a. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
 - b. Program Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - c. Program Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
3. Subdimensi Ekosistem Transaksi Keuangan mencakup 3 program yaitu:
- a. Program Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - b. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - c. Program pemberdayaan UMKM

Subbab 4.3 menguraikan secara detail Peta jalan Pembangunan Jangka Pendek (2024), Jangka Menengah (2025-2028), dan Jangka Panjang (2029-2033) untuk dimensi *Smart Economy*.

4.3.1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028)

Subbab 4.3.1 menguraikan Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (PJ2PM) 2024-2028 pada Dimensi Smart Economy seperti terlihat pada

Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah Smart Economy

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja a	Angg.	Target Kinerja a	Angg.	Target Kinerja a	Angg.	Target Kinerja a	Angg.	Target Kinerja a	Angg.		
Ekosistem Industri	Percepatan pertumbuhan aktivitas industri	Program Pengembangan iklim penanaman modal	Jumlah potensi investasi	5.2.Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	FAIS LAGI ONLINE (Fasilitasi Pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal Secara Online)	6 Jenis	211 Jt	6 Jenis	510 Jt	8 Jenis	510 Jt	10 Jenis	550 Jt	12	550 Jt	APBD	DPMTSPSP
		Program Pelayanan penanaman modal	Persentase ijin yang diterbitkan tepat waktu			100	213 Jt	100	735 Jt	100	735 Jt	100	735 Jt	100	750 Jt	APBD	DPMTSPSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor (PMDN/ PMA)			2900 investor	158 Jt	2900 investor	435 Jt	3000 investor	435 Jt	3000 investor	435 Jt	3100 investor	440 Jt	APBD	DPMTSPSP
	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase IKM yang memiliki produk berstandarisasi industri	5.2.Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Si Istri (Sistem Informasi Simbiosis Industri)	54,72	511 Jt	54,72	5,714 Jt	55	5,714 Jt	55,7	5,714 Jt	56	5,750 Jt	APBD	Diskopindag	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan pendapatan Agrowisata Kampung Milon Napote	20.1. Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Pengembangan Ekosistem Agrowisata Kampung Milon Napote	10%	60 jt	10%	60 jt	10%	60 jt	10%	60 jt	10%	60 jt	APBD		

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.		
Kesejahte raan Masyarak at	Penguatan daya saing dengan peningkata n produktivit as dan inovasi	Program Penyediaan dan Pengemban gan Sarana Pertanian	Persentase kenaikan produktivit as bawang merah	20.1. Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	Smart Bartola (Pembibita n Bawang Merah Tanpa Olah Lahan)	10%	24,6jt	10%	25 jt	10%	25 jt	10%	25 jt	10%	25 jt	APBD	Disperta KP
			Jumlah entitas yang mengemba ngkan budidaya tanaman sehat	20.1. Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	BTS (Budidaya Tanaman Sehat) bertujuan meneduka si masyaraka t agar terbiasa mengguna kan bahan pangan lokal yang terkontrol mutu pangannya , dalam artian proses budidaya tanaman akan diawasi dengan melakukan tindakan preventif untuk menghinda	5 entitas	25 jt	7 entitas	35 jt	9 entitas	45 jt	11 entitas	55 jt	13 entitas	65 jt	APBD	Disperta KP

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
					ri penggunaan bahan-bahan kimia (nutrition support) untuk tanaman.												
		Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah produk olahan ikan yang bermutu		PEMPEK BANG DEDENG (PEndaMpi ngan PENGolah iK an BandeNG D'kam poEn gbanDENG	-	-	10 produk	100 jt	13 produk	125 jt	17 produk	150 jt	20 produk	175 jt		Dinas Perikanan
		Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	5.3. Persentase tenaga kerja yang bekerja di Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	SIAP KERJA (Sistem Informasi Pencari Kerja)	-	-	300 pencari kerja	50 jt	350 pencari kerja	50 jt	400 pencari kerja	50 jt	450 pencari kerja	50 jt	APBD	Disnaker
	Menyusun konsep CSR dunia usaha untuk	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Badan Usaha yang merealisasi	-	SIPADU (Sistem Integrasi Pembiayaa n Alternatif	-	-	9 badan usaha	50 jt	9 badan usaha	24 jt	9 badan usaha	24 jt	9 badan usaha	24 jt	APBD	Bappeda Litbang

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
	masyarakat		kan pembiayaan pembangunan melalui CSR		dari Dunia Usaha)												
Ekosistem Transaksi Keuangan	Membangun sistem pembayaran <i>cashless</i> yang aman	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase capaian PAD	9.2. Persentase pembayaran ke kota yang dibayar secara elektronik berdasarkan faktur elektronik	Lentera BPHTB (Layanan Elektronik Terintegrasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)	100%	20 jt	100%	20 jt	100%	20 jt	100%	20 jt	100%	20 jt	APBD	BPPKAD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase komponen PAD yang tercatat secara realtime	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang dikumpulkan dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapatan sumber sendiri	SIPARIS (Sistem Informasi Pendapatan Daerah Real Time Sampang)	80%	100 jt	85%	50 jt	90%	50 jt	95%	50 jt	100%	50 jt	APBD	BPPKAD
	Membangun sistem untuk memperluas jangkauan pelaku usaha	Program pemberdayaan UMKM	Jumlah unit usaha produktif bernilai tambah yang memiliki akses pasar,	5.1 Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan	P4USKU (Pusat Pelayanan, pengembangan dan Pembinaan KUMKM)	200 pelaku usaha	200 jt	200 pelaku usaha	200 jt	200 pelaku usaha	200 jt	200 pelaku usaha	200 jt	200 pelaku usaha	200 jt		Diskopindag

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja a	Angg.	Target Kinerja a	Angg.	Target Kinerja a	Angg.	Target Kinerja a	Angg.	Target Kinerja a	Angg.		
			akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen ” standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten.	data terbuka													

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

4.3.2 Peta Jalan Jangka Panjang (2029-2033)

Subab 4.3.2 menguraikan Peta Jalan Pembangunan Jangka Panjang (PJ2P) 2029-2033 pada Dimensi Smart Economy seperti terlihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Economy

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.		
Ekosiste m Industri	Percepata n pertumbuhan aktivitas industri	Program pemberday aan UMKM	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampin gan Terhadap Usaha Mikro	5.2.Tingkat kelangsung an bisnis baru per 100.000 penduduk	Sreseh Bangkit sebuah upaya meningkatka n nilai jual produk-produk olahan di Kecamatan Sreseh yang kebanyakan berasal dari bahan ikan agar lebih <i>marketable</i> dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dengan melihat potensi komoditas produk olahan yang dapat memenuhi kebutuhan pasar	10 Unit Usaha	100 Jt	10 Unit Usaha	100 Jt	10 Unit Usaha	100 Jt	10 Unit Usaha	100 Jt	10 Unit Usaha	100 Jt	APBD	Diskopinda g

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kenaikan jumlah kelompok petani milenial	20.1. Persentase tahunan dari anggaran kota yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian perkotaan	GMF (Gubuk Milenial Farm) merupakan wadah dalam rangka percepatan regenerasi petani yang lebih responsif dan akomodatif terhadap perkembangan usaha di sektor pertanian dengan balutan penguasaan IT.	5 Kelompok ok	100 jt	5 Kelompok ok	100 jt	5 Kelompok ok	100 jt	5 Kelompok ok	100 jt	5 Kelompok ok	100 jt	APBD	Disperta KP
Kesejahteraan Masyarakat	Penguatan daya saing dengan peningkatan produktivitas dan inovasi	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	5.3. Persentase tenaga kerja yang bekerja di Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Pengembangan Layanan SIAP KERJA (Sistem Informasi Pencari Kerja)	1000 jiwa	75 Jt	1000 jiwa	25 Jt	1000 jiwa	25 Jt	1000 jiwa	25 Jt	1000 jiwa	25 Jt	APBD	DPMPTSP
Ekosistem Transaksi Keuangan	Membangun sistem pembayaran <i>cashless</i>	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase komponen PAD yang tercatat secara	9.1. Jumlah pendapatan tahunan yang	SIPARIS (Sistem Informasi Pendapatan Daerah Real	80%	100 jt	85%	50 jt	90%	50 jt	95%	50 jt	100%	50 jt	APBD	BPPKAD

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.		
n	yang aman		realtime	dikumpul k an dari ekonomi berbagi sebagai persentase dari pendapata n sumber sendiri	Time Sampang)												

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

4.4 Peta Jalan Dimensi Smart Living

Terdapat 6 program/kegiatan/subkegiatan yang ditentukan dari peta jalan pada setiap subdimensi pada dimensi Smart Living sebagai berikut:

1. Subdimensi Harmonisasi Tata Ruang mencakup 1 program yaitu:

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang (Penetapan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci tata Ruang Kabupaten)
2. Subdimensi Kesehatan mencakup 1 program yaitu:

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Subdimensi Transportasi mencakup 4 program yaitu:

a. Program Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

b. Program Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C

- c. Program Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
- d. Program Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Subbab 4.4 menguraikan secara detail Peta jalan Pembangunan Jangka Pendek (2024), Jangka Menengah (2025-2028), dan Jangka Panjang (2029-2033) untuk dimensi Smart Living.

4.4.1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028)

Subab 4.4.. menguraikan Peta Jalan Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah (PJ2PM) 2024-2028 pada Dimensi Smart Living seperti terlihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah Smart Living

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikat or SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.		
Harmonisasi Tata Ruang	Penataan Lingkungan sesuai rencana tata ruang	Program Penyelengg araan Penataan Ruang (Penetapan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci tata Ruang Kabupaten)	Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang		SISTA (Sistem Informasi Tata Ruang)	4/15	600 jt	7/15	900 jt	10/15	900jt	13/15	900 jt	15/15	600 jt	APBD	DPUPR

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikat or SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/ Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.		
Kesehatan	Meningkatka n akses dan mutu layanan kesehatan	Program Pemenuha n Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Persentase BOR - Persentase pemenuhan dokter spesialis - Jumlah Layanan Sub Spesialis - pendapatan BLUD	11.1. Persentas e populasi kota yang masuk dalam file kesehata n terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehata n	RSMZ menjadi RS pendidikan Tipe B	Layana n Jantun g	197	Layana n Bedah Digestif	226	Layana n Radio Nuklir	260	Layana n Radiote rapi	325	Layana n Saraf	382	BLUD	RSMZ
						BOR 85 %		BOR 85 % spesialis 100%		BOR 85 % spesialis 100%		BOR 85 % spesialis 100%		BOR 85 % spesialis 100%			
		Program Pemenuha n Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pencatatan dan pelaporan online		ASIKMAS ver.2 (Aplikasi Sistem Informasi Puskesmas)	100 %	500 jt	100 %	500 jt	100 %	500 jt	100 %	500 jt	100 %	500 jt	APBD (BLUD)	DINKES KB

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikat or SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/ Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.		
	Mempercepat Penurunan Angka Kematian Ibu, Balita dan Stunting	Program Pemenuha n Upaya Kesehatan Peroranga n dan Upaya Kesehatan Masyaraka t	1. Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup 2. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup 3. Prevalensi Stunting	11.1. Persentas e populasi kota yang masuk dalam file kesehata n terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehata n	Jari Kaki Lima V.23 (Jaring risiko berbasis aplikasi kesehatan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat)	105 per 100.00 0 kelahir an hidup 3,2 per 1.000 kelahir an hidup 6,5%	2,5 M	87 per 100.00 0 kelahira n hidup 2,8 per 1.000 kelahira n hidup 6,3%	3 M	75 per 100.00 0 kelahir an hidup 2,5 per 1.000 kelahir an hidup 6,1%	3,5 M	62 per 100.00 0 kelahir an hidup 2,3 per 1.000 kelahir an hidup 5,8%	3,5 M	60 per 100.00 0 kelahir an hidup 2,1 per 1.000 kelahir an hidup 5,5%	3,5 M	APBD dan CSR	DINKES KB
Transportasi	Mewujudkan transportasi yang menjamin kemudahan mobilitas bagi individual, publik maupun kebutuhan logistik daerah 2. Menyiapkan sistem jaringan jalan yang cukup memadai bagi masyarakat menuju lokasi tujuan	Penyediaa n Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupate n/Kota	Tersedianya Angkutan Um um Bersubsidi	Persentas e armada bus kota yang digerakka n dengan motor	"Trans Sampang" merupakan penyediaan angkutan umum yang melayani wilayah Kabupaten Sampang dimulai thn 2025	-	-	4 unit	500 Jt	8 unit		8 unit		8 unit		APBD	DISHUB
		Pembangu nan Terminal Penumpang	Tersedianya Terminal Type C						1 Dok	300 Jt	2 Dok	200 Jt	1 Ha		3 Paket		APBD

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikat or SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/ Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
		g Tipe C															
	3.Menjamin Ketersediaan perlengkapan jalan guna mewujudkan keselamatan pengguna jalan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota	Perlengkapan Jalan yang Tercukupi	Persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/lampu	"Sampang Terang" (Pemenuhan PJU ruas Jalan Kabupaten dengan KWH Smart yang bisa deteksi lampu mati dalam 1 pusat kontrol sekaligus penambahan/pemasangan PJU)	46 titik	700jt	800	6 M	800	6 M	800	6 M	800	6 M	APBD	DISHUB
				Persentase lampu lalu lintas yang cerdas	TRALI BESI (Traffic Light Berbasis Sistem Informasi) merupakan lampu lalu lintas yang dilengkapi dengan kamera pendeteksi untuk menghitung			1 paket	700jt	1 paket	700jt	1 paket	700jt				

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikat or SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/ Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.		
					kepadatan												
	Mewujudkan transportasi laut yang menjamin kemudahan mobilitas bagi individual, publik maupun kebutuhan logistik daerah	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Tersedianya Angkutan Penyeberangan Bersubsidi	-	"Angkutan Express" (Penyedian Angkutan Penyeberangan Bersubsidi guna Kelancaran Penyeberangan Sampang - Pulau Mandangin)			2 unit	500 Jt	2 unit	500 Jt	2 unit	500 Jt	2 unit	500 Jt	APBD	DISHUB

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

4.4.2 Peta Jalan Jangka Panjang (2029-2033)

Subab 4.4.2 menguraikan Peta Jalan Pembangunan Jangka Panjang (PJ2P) 2029-2033 pada Dimensi Smart Living seperti terlihat pada

Tabel 4.8.

Tabel 4.8 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Living

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leadin g Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja a	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Harmonisa si Tata Ruang	Penataan Lingkungan sesuai rencana tata ruang	Program Penyelenggara an Penataan Ruang (Penetapan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci tata Ruang Kabupaten)	Jumlah Kawasan yang dikembang kan untuk kegiatan industri		Kawasan Peruntuka n Industri (KPI)	1 kawasa n	5 M	1 Kawasan	5 M	2 Kawasan	10 M	2 Kawasan	10 M	3 Kawasan	15 M	APBD	Bapped alitbang
Kesehatan	Meningkatka n akses dan mutu layanan kesehatan	Sistem Informasi layanan kesehatn yang terintegrasi	Cakupan pencatatan dan pelaporan online	11.1. Persentase populasi kota yang masuk dalam file kesehatan terpadu daring yang dapat diakses oleh penyedia layanan kesehatan	ASIKMAS Next Level	100 %	500 jt	100 %	500 jt	100 %	500 jt	100 %	500 jt	100 %	500 jt	APBD (BLUD)	DINKE S

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leadin g Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Transportasi	Mewujudkan transportasi darat yang menjamin kemudahan mobilitas bagi individual, publik maupun kebutuhan logistik daerah	Program Penyelenggaraa n Jalan	Panjang jalan yang dibangun	19.5. Persentase jalur transportas i umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (real-time) yang dapat diakses publik	Jalan Lintas Selatan Madura (JLSM)	4 km	92 miliar	1 km	25 miliar	1 km	25 miliar	5 km	108,3 miliar	4,3 km	93,2 miliar	APBN dan APBD	DPUPR dan DISHUB
			Jumlah jembatan yang dibangun			1 jembatan (jembatan labuhan	141,2 miliar	1 jembatan (jembatan marparan)	93,5 miliar	2 jembatan (jembatan Datar dan Rabah)	13,1 miliar	1 jembatan (jembatan Dengpaden g)	55,2 miliar	-	-		
			Mewujudk an transporta si laut yang menjamin kemudaha n mobilitas bagi individual, publik maupun kebutuhan logistik daerah	Penetapan Lintas Penyeberan gan dan Persetujua n Pengoperas ian untuk Kapal yang Melayani Penyeberan gan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Tersediany a Angkuta n Penyeberan gan Bersubsidi dan Kapal Barang "Angkutan Express" (Penyedia n Angkutan Penyebera ngan Bersubsid i guna Kelancara n Penyebera ngan Sampang – Pulau Mandangi	4 unit	500 Jt	4 unit	500 Jt	4 unit	500 Jt	4 unit	500 Jt	4 unit	500 Jt	APBN dan APBD	DPUPR dan DISHUB

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leadin g Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja a	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
					n												

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

4.5 Peta Jalan Dimensi Smart Society

Terdapat 12 program/kegiatan/subkegiatan yang ditentukan dari peta jalan pada setiap subdimensi pada dimensi Smart Society sebagai berikut:

1. Subdimensi Interaksi Masyarakat mencakup 1 program yaitu:

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitasi Penanganan Konflik di Daerah
2. Subdimensi Ekosistem Belajar/Pendidikan mencakup 6 program yaitu:

- a. Program Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital
 - b. Program Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
 - c. Program Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
 - d. Program Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
 - e. Program Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
 - f. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
3. Subdimensi Keamanan Masyarakat mencakup 5 program yaitu:
- a. Program Penyelenggaraan ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat
 - b. Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - c. Program Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
 - d. Program Pelayanan transportasi dan akses pelayanan emergency melalui program 112 terintegrasi
 - e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas

Subbab 4.5 menguraikan secara detail Peta jalan Pembangunan Jangka Pendek (2024), Jangka Menengah (2025-2028), dan Jangka Panjang (2029-2033) untuk dimensi Smart Society.

4.5.1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028)

Subbab 4.5.1 menguraikan Peta Jalan Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah (PJ2PM) 2024-2028 pada Dimensi Smart Society seperti terlihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah Smart Society

Sub Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikat or SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leadin g Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerj a	Ang gg.	Target Kinerj a	Ang g.	Target Kinerj a	Ang gg.	Target Kinerj a	Ang g.	Target Kinerj a	Ang g.		
Interaksi Masyarakat	Meningkat kan Kewaspada an Nasional dan Peningkata katan Kualitas serta Fasilitasi Penangana n Konflik di Daerah	Peningkata n Kewaspada an Nasional dan Peningkata n Kualitas serta Fasilitasi Penangana n Konflik di Daerah	Jumlah desa konflik yang ditangani	SNI 15. Keaman an	RAMPAK NAONG (Reharmonis asi Penanganan melalui Pembinaan keagamaan dan gotong royong	2 Desa/Ke l	10 jt/d esa	2 Desa/Ke l	10 jt/d esa	2 Desa/Ke l	10 jt/d esa	2 Desa/Ke l	10 jt/d esa	2 Desa/Ke l	10 jt/d esa	APBD	Bakesba ngpol
Ekosistem Belajar/Pen didikan	Meningkat kan kualitas, partisipasi dan jangkauan pelayanan pendidikan yang merata	Pendampin gan dan fasilitasi dalam penyelengg aaraan edukasi literasi digital	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	13.4. Persenta se anggara n kota yang dialokasi kan untuk penyedia an program yang ditujuka n untuk menjem batani kesenjan gan digital	Sapu Lidi (Satuan Pendidikan dengan Literasi Digital)	20.000 org	40 jt	30.000 org	60 jt	40.000 org	80 jt	50.000 org	100 jt	60.000 org	120 jt	APBD/ APBN	Disdik
	Memberika n	Penyelengg aaraan	Jumlah Satuan	13.4. Persenta	SILAT PSHT (akSI	34 satuan	50 jt	34 satuan	50 jt	34 satuan	50 jt	34 satuan	50 jt	34 satuan	50 jt	APBD/ APBN	Disdik

Sub Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikat or SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leadin g Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerj a	An gg.	Target Kinerj a	Ang g.	Target Kinerj a	An gg.	Target Kinerj a	Ang g.	Target Kinerj a	Ang g.		
	kesempata n kepada masyarakat putus sekolah dan /atau tidak sekolah untuk memperoleh layanan Pendidikan dan Pengetahua n melalui Program Pendidikan Kesetaraan	Proses Belajar bagi Peserta Didik	Pendidikan yang Menyelenggara kan Proses Belajar	se anggara n kota yang dialokasi kan untuk penyedia an program yang ditujuka n untuk menjem batani kesenjan gan digital	Layanan keseTaraan Pemberian kesempatan Harapan masyarakat)	pendidi kan		pendidi kan		pendidi kan		pendidi kan		pendidi kan			
	Meningkatk an kebermanfa tan perpustaka an dan pelibatan masyarakat	Pengemban gan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Ko ta yang Dikembangkan	Persenta se populasi kota dengan kecakap an profesio nal di lebih dari satu bahasa	KRAFT (Kelas Kreatif Dispusip)- >PSHT	260 orang	50 Jt	300 orang	75 Jt	300 orang	100 Jt	300 orang	125 Jt	300 orang	150 Jt	APBD/ APBN	Dispusi p
		Pembinaa n Perpusta kaan pada Satuan Pendidika n Dasar di Seluruh Wilayah	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar		SISI PENA (Aksi Automasi Perpustaka an Binaan)	2 perpust akaan	30 Jt	2 perpust akaan	50 jt	3 perpust akaan	75 jt	3 perpust akaan	100 jt	3 perpust akaan	150 jt	APBD/ APBN	Dispusi p

Sub Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikat or SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leadin g Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerj a	An gg.	Target Kinerj a	Ang g.	Target Kinerj a	An gg.	Target Kinerj a	Ang g.	Target Kinerj a	Ang g.		
		Kabupate n/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpusta kaan	Nasional Perpustakaan														
		Sosialisas i Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidika n Dasar dan Pendidika n Khusus serta Masyarak at	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan		SIDORA (Kreasi Dongeng Ceria)	142 lokus	82 jt	142 lokus	90 jt	145 lokussss	95 Jt	145 lokus	100 jt	145 lokus	150 jt	APBD/ APBN	Dispusi p
		Pengemb angsan dan Pemeliha raan Layanan Perpusta kaan Elektroni k	Layanan Perpustakaan Digital		dMaca Sampang (Sampang Maca Digital)	-	-	1	100 jt	1	150 jt	1	150 jt	1	200 jt	APBD/ APBN	Dispusi p
Keamanan Masyarakat	Peningkata n pemelihara an Keamanan dan ketertiban masyaraka	Menyelengg arakan ketertiban Umum dan ketenterama n masyarakat	Menurunnya angka gangguan Tibum Transmas 1. Terbentu knya Satlinma	SNI 15. Keamana n	Satlinmas Reborn	186 Satlinm as Desa/K el	10 jt/d esa	47 Desa	20 jt/D esa	47 Desa	20 jt/d esa	47 Desa	20 Jt/d esa	45 Desa	25 jt/D esa		

Sub Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikat or SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leadin g Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerj a	An gg.	Target Kinerj a	Ang g.	Target Kinerj a	An gg.	Target Kinerj a	Ang g.	Target Kinerj a	Ang g.		
	t (Harkamtib mas) sebagai bentuk deteksi dini dan cegah dini pada pencegahan dan penanganan konflik sosial		s Desa 2. Pemberd ayaan Satlimas Desa/Kel														
		Pelayanan Pencegaha n dan Kesiapsiag aan Terhadap Bencana	Cakupan desa yg terdampak bencana alam yg terfasilitasi	SNI 15. Keaman an	JAGARAGA (Jaga keluarga jaga warga)	13 desa/ke l	50 juta	13 desa/ke l	50 juta	13 desa/ke l	50 juta	13 desa/ke l	50 juta	13 desa/ke l	50 juta	APBD/ APBD Prov	BPBD
			Persentase kejadian darurat bencana yang terlayani		LANCENG DARUNA (Layanan Cepat Tanggap Darurat Bencana)	100%	15 juta	100%	15 juta	100%	15 juta	100%	15 juta	100%	15 juta	APBD	BPBD
	Peningkata n pelayanan Pemadama n kebakaran dan Non Kebakaran	Pencegaha n, Pengendali an, Pemadama n, Penyelama tan dan Penangana n Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Kejadian Kebakaran dan Non Kebakaran ya ng Ditangani	SNI 15. Keaman an	1. Mellak malem (Patroli malem) abhereng Si Pakar (Sistem Informasi Pengaduan Kebakaran)	100 kali	150 jt	100 kali	150 jt	100 kali	150 jt	100 kali	150 jt	100 kali	150 jt	APBD	Dinas Damkar dan PD
	Meningkat kan	Pelayanan transporta	Persentase kegawatdaru		Sampang 112	100%	250 jt	100%	100 jt	100%	100 jt	100%	100 jt	100%	100 jt	APBD	Diskomi nfo

Sub Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikat or SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumb er Dana	Leadin g Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerj a	An gg.	Target Kinerj a	Ang g.	Target Kinerj a	An gg.	Target Kinerj a	Ang g.	Target Kinerj a	Ang g.		
	layanan call center kegawatda ruratan dan non kegawatda ruratan terintegrasi	si dan akses pelayanan emergency melalui program 112 terintegrasi Pengemba ngan dan Pengelolaa n Ekosistem Kabupaten / Kota Cerdas dan Kota Cerdas	ratan dan non kegawatdaruratan yang ditangani		(Call Center Kegawatda ruratan Terpadu)												

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

4.5.2 Peta Jalan Jangka Panjang (2029-2033)

Subab 4.5.2 menguraikan Peta Jalan Pembangunan Jangka Panjang (PJ2P) 2029-2033 pada Dimensi Smart Society seperti terlihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Society

Sub Dimensi	Strategi	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)					Sumber	Leading Sector
						2029	2030	2031	2032	2033		

		n		37122		Target Kinerja	An gg.	Target Kinerja	An gg.	Target Kinerja	An gg.	Target Kinerja	An gg.	Target Kinerja	An gg.	Da na	
Interaksi Masyarakat	Meningkatkan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitas Penanganan Konflik di Daerah	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas serta Fasilitas Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah desa konflik yang ditangan	SNI 15. Keamanan	RAMPAK NAONG (Reharmonisasi Penanganan melalui Pembinaan keagamaan dan gotong royong	2 Desa/Kel	10 jt/ desa	2 Desa/Kel	10 jt/ desa	2 Desa/Kel	10 jt/ desa	2 Desa/Kel	10 jt/ desa	2 Desa/Kel	10 jt/ desa	AP BD	Bakes bangpol
Ekosistem Belajar/Pendidikan	Memberikan kesempatan kepada masyarakat putus sekolah dan /atau tidak sekolah untuk memperoleh layanan Pendidikan dan Pengetahuan melalui Program Pendidikan	Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	13.4. Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital	Sapu Lidi (Satuan Pendidikan dengan Literasi Digital)	mengembangkan Perpustakaan digital	10 0 jt	Mengembangkan Literasi Digital	10 0 jt	Mengembangkan Pojok Baca digital	10 0 jt	Mengembangkan Taman Baca digital	10 0 jt	dimanfaatkannya kelas daring/virtual	10 0 jt	AP BD, AP BN	Disdik

Sub Dimensi	Strategi	Progra m/ Kegiata n	Indikator Kinerja	Indika tor SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Su mb er Da na	Leadin g Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	An gg.	Target Kinerja	An gg.	Target Kinerja	An gg.	Target Kinerja	An gg.	Target Kinerja	An gg.		
	an Kesetara an Memenu hi kebutuha n belajar masyara kat yang tidak dapat dijangka u dan dipenuhi oleh jalur Pendidik an Formal Memberi kan pelayana n pendidik an bagi setiap warga masyara kat untuk mempero leh pendidik an sepanjang hayat sesuai																

Sub Dimensi	Strategi	Progra m/ Kegiata n	Indikator Kinerja	Indika tor SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Su mb er Da na	Leadin g Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	An gg.	Target Kinerja	An gg.	Target Kinerja	An gg.	Target Kinerja	An gg.	Target Kinerja	An gg.		
	dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan zaman melalui Program Pendidikan Kesetaraan																
Keamanan Masyarakat	Meningkatkan layanan call center kegawatdaruratan dan non kegawatdaruratan terintegrasi	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Persentase kegawatdaruratan dan non kegawatdaruratan yang ditangani		Sampang 112 (Call Center Terintegrasi)	100%	100 jt	100%	100 jt	100%	100 jt	100%	100 jt	100%	100 jt	APBD	Diskominfo

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

4.6 Peta Jalan Dimensi *Smart Environment*

Terdapat 5 program/kegiatan/subkegiatan yang ditentukan dari peta jalan pada setiap subdimensi pada dimensi Smart Environment sebagai berikut:

1. Subdimensi Proteksi Lingkungan mencakup 2 program yaitu:

a. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
2. Subdimensi Pengelolaan Sampah dan Limbah mencakup 2 program yaitu:

a. Program pengelolaan sampah

b. Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
3. Subdimensi Tata Kelola Energi mencakup 1 program yaitu:

Program pengelolaan sampah

Subbab 4.6 menguraikan secara detail Peta jalan Pembangunan Jangka Pendek (2024), Jangka Menengah (2025-2028), dan Jangka Panjang (2029-2033) untuk dimensi Smart Environment.

4.6.1 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah (2024-2028)

Subbab 4.6.1 menguraikan dengan detail Peta Jalan Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah (PJ2PM) 2024-2028 pada Dimensi Smart Environment seperti terlihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Peta Jalan Jangka Pendek dan Menengah Smart Environment

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leadin g Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerj a	Ang g.	Target Kinerj a	Ang g.	Target Kinerj a	Ang g.	Target Kinerj a	Ang g.		

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
Proteksi Lingkungan	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	Persentase bangunan yang dibangun atau diperbaiki dalam 5 tahun terakhir sesuai dengan prinsip-prinsip bangunan hijau	Pemanfaatan/ Pengembangan Wisata Lon Malang Berbasis Lingkungan (Pengembangan wisata pesisir pantai menjadi wisata taman keanekaragaman hayati)	20%	20 jt	40%	150jt	60%	100. jt	80%	50.jt	100%	50 jt	APBD	DLH PERKIM
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Permukaan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Jumlah sistem penyediaan air minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan yang dibangun	Persentase jaringan distribusi air kota yang dipantau oleh air cerdas sistem	Gerakan Sadar Panen Air Hujan (GESAPU) (Gerakan masyarakat menampung air hujan untuk persediaan air bersih)	20 Unit (25 RT)	2 M	20 Unit (25 RT)	2 M	20 Unit (25 RT)	2 M	20 Unit (25 RT)	2 M	20 Unit (25 RT)	2 M	APBN	PUPR

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumbe r Dana	Leadin g Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Ang g.	Target Kinerj a	Ang g.	Target Kinerj a	Ang g.	Target Kinerj a	Ang g.	Target Kinerj a	Ang g.		
Pengelolaan Sampah dan Limbah	Peningkata n sistem pengelolaan sampah anorganik	Program pengelolaan sampah	Jumlah masyarakat , kelompok masyarakat /pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat .	Presentasi pusat pembuan gan limbah (kontainer yang dilengkapi dengan telemeteri ng)	Sekolah Sedekah Sampah (Triple S) (Program kesadaran warga sekolah untuk memilah sampah dan menyedekahkan hasil pemilahan untuk kepentingan sosial sekolah)	10 kelompok	200 jt	20 kelom pok	150 jt	30 kelom pok	50 jt	40 kelom pok	50 jt	50 kelompok	50 jt	APBD	DLH PERKI
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Kapasitas instalasi pengelolaan lumpur tinja terbangun	Presentas e air limbah olahan yang digunaka n kembali	Program Jemput Limbah Tinja Sehat (PELITA Sehat) (Program pemerintah penyediaan sarana instalasi penyediaan air limbah tinja)	-	-	15 m3/ha ri	10 M	15 m3/ha ri	150 jt	15 m3/ha ri	100 jt	15 m3/ha ri	100 jt	APBN dan APBD	DLH PERKI M DAN PUPR
Tata Kelola Energi	Peningkata n Biokonversi biomassa	Program Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Persentas e jumlah total sampah di Kota yang digunaka n untuk menghasil kan	Recycle Center (Pusat Daur Ulang)	-	-	30 TON/ hari	1.5 M	30 TON/ hari	200 jt	10 TO N/ hari	150 jt	10 TO N/ hari	100. jt	APBD	DLH PERKI M

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2024		2025		2026		2027		2028			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
				energi													

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

4.6.2 Peta Jalan Jangka Panjang (2029-2033)

Subab 4.6.2 menguraikan Peta Jalan Pembangunan Jangka Panjang (PJ2P) 2029-2033 pada Dimensi Smart Environment seperti terlihat pada Tabel 4.12.

Tabel 4.12 Peta Jalan Jangka Panjang Smart Environment

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikat or Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.		
Proteksi Lingkungana	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah kluster Edukasi Lingkungan Berbasis Wisata yang Berbasis Wisata yang	Persentase bangunan yang dibangun atau diperbaharui dalam 5 tahun terakhir	Edukasi Lingkungan Berbasis Wisata untuk pengembangan ekonomi (Ecofarm,	2 Kluster	2,5 M	2 Kluster	2,5 M	2 Kluster	3 M	2 Kluster	3 M	2 Kluster	1 M	APBD, CSR	DLH Perkim

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikat or Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/ Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.	Target Kinerja	Angg.		
			dibangun	sesuai dengan prinsip-prinsip bangunan hijau	Eco GreenPark)												
	Peningkatan Laboratorium Lingkungan	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten /kota	Cakupan industri yang tarpantau kualitas lingkungannya	Persentase Jaringan Pipa air limbah yang dimonitor oleh sistem sensor data tracking real time	Sistem Jaringan Pemantauan Lingkungan Tepat dan Akurat (SISPELTA)	100%	500 jt	100%	300 jt	100%	300 jt	100%	300 jt	100%	300 jt	APBD	DLH Perkim
Pengelolaan Sampah dan Limbah	Peningkatan sistem pengelolaan sampah anorganik	Program pengelolaan sampah	Persentase peningkatan jumlah nasabah sedekah sampah yang menggunakan sistem aplikasi	Presentasi pusat pembuangan limbah (kontainer yang dilengkapi dengan telemetering)	Sistem jaringan sedekah sampah	20%	500 jt	20%	100 jt	20%	100 jt	15%	100 jt	10%	100 jt	APBD	DLH Perkim
		Program pengelolaan dan pengembangan sistem	Persentase rumah tangga yang	22.1. Presentase air limbah olahan yang	Black Water Ranger (Pelayanan sedot tinja	100%	500 jt	100%	200 jt	100%	200 jt	100%	200 jt	100%	200 jt	APBD	DLH Perkim

Sub Dimensi	Strategi	Program/ Kegiatan	Indikat or Kinerja	Indikator SNI 37122	Inovasi	Target Kinerja/Anggaran (dalam juta rupiah)										Sumber Dana	Leading Sector
						2029		2030		2031		2032		2033			
						Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.	Target Kinerj a	Angg.		
		air limbah	terlayani sedot tinja tepat waktu	digunakan kembali	berbasis sistem aplikasi)												
Tata Kelola Energi	Peningkatan Pemanfaata n Teknologi konversi limbah padat menjadi energi	Program Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dikonver si menjadi energi	Persentase jumlah total sampah di Kota yang digunakan untuk menghasilk an energi	GARPU SANDI (Gerakan Penguranga n Sampah menjadi Energi)	30 ton/ha ri	3 miliar	30 ton/ha ri	1 miliar	30 ton/ha ri	1 miliar	30 ton/ha ri	1 miliar	30 ton/ha ri	1 miliar	APBD	DLH Perkim

(Sumber: FGD Bimtek 2 dan Bimtek 3, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

6. Penutup

Buku 3 Executive Summary ini merupakan rangkuman dari Buku 1 Analisis Strategis Smart City Daerah Kabupaten Sampang dan Buku 2 Masterplan Smart City Daerah Kabupaten Sampang. Bahan utama buku ini bersumber dari data primer:

1. Bimtek 1 (5-6 Juli 2023) sebagai dasar *Smart City Readiness* yaitu kertas kerja analisis masa depan dan sasaran *smart city* daerah, kertas kerja analisis SWOT-TOWS *smart city* daerah per dimensi, dan kertas kerja pemetaan misi dan sasaran RPJMD daerah terhadap dimensi *smart city* dengan luaran Buku 1 Analisis Strategis Smart City Daerah Kabupaten Sampang
2. Bimtek 2 (2-3 Agustus 2023) yaitu Kertas Kerja Program dan Kertas Kerja Rencana Aksi dengan luaran Buku 2 Masterplan Smart City Daerah Kabupaten Sampang

Buku 3 ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat dan komprehensif tentang Pembangunan Smart City di Kabupaten Sampang tahun 2024-2033.

Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.

Daftar Pustaka

BPS Kab. Sampang, 2022a. Statistik Daerah Kabupaten Sampang.

BPS Kab. Sampang, 2022b. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sampang.

Bupati Sampang, 2023a. Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/154/KEP/434.013/2023 tentang Dewan Smart City Kabupaten Sampang.

Bupati Sampang, 2023b. Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.45/155/KEP/434.013/2023 tentang Tim Pelaksana Smart City Kabupaten Sampang.

Bupati Sampang, 2019. Peraturan Bupati nomor 66 Tahun 2019 Tentang SPBE.

Direktorat Jenderal Kominfo, 2023. Guideline Masterplan Smart City Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City).

Kadiskominfo Kab. Sampang, 2023. Rencana Penerapan Akses Satu Layanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sampang.

Kemkominfo, 2021. Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City.

RPJMD Kab. Sampang, 2022. Dokumen RPJMD 2019-2024.

Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023a. Kertas Kerja Analisis Kesiapan Smart City Daerah.

Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023b. Kertas Kerja Analisis SWOT-TOWS.

Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023c. Kertas Kerja Analisis Masa Depan dan Sasaran Smart City.

BUKU IV
QUICK WIN SMART CITY
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2024 – 2033

DAFTAR ISI

Halaman Sampul i

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR..... iv

1. Visi dan Prioritas RPJMD 1

 1.1 Visi, Misi, dan Sasaran RPJMD 1

 1.2 Pemetaan Misi dan Sasaran RPJMD Terhadap Dimensi Smart City 6

2. Visi dan Sasaran Smart City Daerah..... 9

 2.1 Visi Smart City Daerah 9

 2.2 Sasaran Jangka Pendek Smart Governance 10

 2.3 Sasaran Jangka Pendek Smart Branding..... 12

 2.4 Sasaran Jangka Pendek Smart Economy..... 13

 2.5 Sasaran Jangka Pendek Smart Living..... 14

 2.6 Sasaran Jangka Pendek Smart Society 15

 2.7 Sasaran Jangka Pendek Smart Environment 16

3. Profil Quick Win Smart City Daerah 18

 3.1 Profil Quick Win Smart Governance..... 18

 3.2 Profil Quick Win Smart Branding 23

 3.3 Profil Quick Win Smart Economy 25

 3.4 Profil Quick Win Smart Living 27

 3.5 Profil Quick Win Smart Society..... 31

 3.6 Profil Quick Win Smart Environment..... 32

4. Manajemen Risiko Quick Win..... 35

 4.1 Manajemen Risiko Quick Win Smart Governance..... 39

 4.2 Manajemen Risiko Quick Win Smart Branding..... 43

 4.3 Manajemen Risiko Quick Win Smart Economy..... 50

 4.4 Manajemen Risiko Quick Win Smart Living 60

 4.5 Manajemen Risiko Quick Win Smart Society..... 65

 4.6 Manajemen Risiko Quick Win Smart Environment..... 70

5. Penutup..... 77

Daftar Pustaka..... 78

Lampiran 79

 L1. Penandatanganan Komitmen Bersama menuju Sampang Smart City..... 79

 L2. Undangan Bimtek 4 pada tanggal 11-13 Oktober 2023 81

 L3. Dokumentasi FGD Bimtek 4 hari ke-1 (Rabu, 11 Oktober 2023)..... 82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Penajaman 2019-2024..... 3

Tabel 1.2 Keterkaitan Visi dengan RPJMD dan RPJP Provinsi..... 4

Tabel 1.3 Pemetaan Misi dan Sasaran RPJMD Terhadap Dimensi Smart City 7

Tabel 2.1 Sasaran Jangka Pendek *Smart Governance* 10

Tabel 2.2 Sasaran Jangka Pendek *Smart Branding*..... 12

Tabel 2.3 Sasaran Jangka Pendek *Smart Economy* 13

Tabel 2.4 Sasaran Jangka Pendek *Smart Living*..... 15

Tabel 2.5 Sasaran Jangka Pendek *Smart Society*..... 16

Tabel 2.6 Sasaran Jangka Pendek *Smart Environment*..... 16

Tabel 3.1 Profil Quick Win *Smart Governance*..... 18

Tabel 3.2 Profil Quick Win *Smart Branding* 23

Tabel 3.3 Profil Quick Win *Smart economy* 25

Tabel 3.4 Profil Quick Win *Smart Living* 27

Tabel 3.5 Profil Quick Win *Smart Society* 31

Tabel 3.6 Profil Quick Win *Smart Environment* 32

Tabel 4.1 Kategori dan Subkategori dalam Identifikasi Risiko 36

Tabel 4.2 Tingkat Kemungkinan Risiko..... 37

Tabel 4.3 Tingkat Dampak Risiko 37

Tabel 4.4 Tingkat Risiko..... 37

Tabel 4.5 Matriks Tingkat Risiko 38

Tabel 4.6 Manajemen Risiko Quick Win *Smart Governance*..... 39

Tabel 4.7 Manajemen Risiko Quick Win *Smart Branding* 43

Tabel 4. 8 Manajemen Risiko Quick Win Smart Economy 50

Tabel 4.9 Manajemen Risiko Quick Win Smart Living..... 60

Tabel 4.10 Manajemen Risiko Quick Win *Smart Society*..... 65

Tabel 4.11 Manajemen Risiko Quick Win Smart Environment 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Enam Dimensi *Smart City* 4

Gambar 4.1 Lima pilar identifikasi Risiko pada Inovasi Quick Win 36

1. Visi dan Prioritas RPJMD

Bagian pendahuluan ini akan menguraikan dua subbab yang terdiri dari visi, misi, dan sasaran RPJMD, serta Pemetaan Misi dan Sasaran RPJMD Penajaman 2019-2024 terhadap Dimensi *Smart City* di Kabupaten Sampang.

1.1 Visi, Misi, dan Sasaran RPJMD

Visi dan Misi pembangunan daerah yang diuraikan pada subbab ini berasal dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 (RPJMD Kab. Sampang, 2022).

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Periode Tahun 2019-2024 adalah:

“Sampang Hebat Bermartabat”

Terdapat dua pokok Visi Kabupaten Sampang pada periode tahun 2019-2024 yaitu:

1.	Hebat
	Kabupaten Sampang berusaha untuk mencapai keberhasilan yang dilakukan melalui proses perubahan yang cepat, tepat, dan bermanfaat dengan semangat bangkit Bersama dan bersatu menuju masyarakat sejahtera. Kondisi hebat diindikasikan oleh terwujudnya sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, serta tercapainya pembangunan ekonomi yang inklusif.
2.	Bermartabat
	Kabupaten Sampang berusaha untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang mandiri, maju, berakhlak mulia yang senantiasa berlandaskan taqwa kepada Allah SWT/Tuhan yang Maha Esa. Kondisi tersebut diindikasikan oleh terwujudnya masyarakat yang harmonis.

Visi **Hebat** diturunkan ke dalam tiga misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
1	Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan manusia yang sehat dan cerdas yaitu penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menurun, akses prasarana dasar perumahan dan permukiman membaik, daya saing pemuda dan olah raga yang baik, jumlah penduduk yang terkendali, serta tetap mengutamakan kesetaraan gender dan perlindungan anak.

Misi 2	Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif
	Misi ini untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan usaha mikro, meningkatkan kemampuan keuangan daerah, mengembangkan sektor unggulan dan ekonomi kreatif, meningkatkan ketahanan pangan, dan mendorong kemajuan dan kemandirian desa.
Misi 3	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan
	Misi Mewujudkan pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan secara berkelanjutan.

Visi **Bermartabat** diturunkan ke dalam dua misi pembangunan daerah sebagai berikut:

Misi 4	Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik
	Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kabupaten Sampang yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung dengan kompetensi aparat yang profesional dan sistem berbasis informasi teknologi (IT) menuju tatakelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>).
Misi 5	Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai, dan bersatu
	Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan warga Kabupaten Sampang yang berkepribadian dan berbudaya yang dicirikan oleh terpeliharanya seni dan warisan budaya dan meningkatnya suasana tenteram, tertib, dan aman.

Tabel 1.1 Memperlihatkan secara lengkap 1 visi, 5 misi (M1-M5), 5 tujuan (T1-T5), dan 13 sasaran (S1-S13) dari penajaman RPJMD 2019-2024 yang dilakukan oleh (Bappedalitbang, 2023) Kabupaten Sampang.

Tabel 1.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Penajaman 2019-2024

Visi		Misi		Tujuan		Sasaran	
Sampang	Hebat	M1.	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	T1.	Terbangunnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing	S1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
						S2.	Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat
						S3.	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak
		M2.	Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif	T2.	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif	S4.	Menurunnya angka kemiskinan
						S5.	Menurunnya jumlah pengangguran
						S6.	Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif
	Bermartabat	M3.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	T3.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan	S7.	Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa
						S8.	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah
						S9.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah
						S10.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana
		M4.	Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik	T4.	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik	S11.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
						S12.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan desa yang akuntabel, efektif, dan efisien
		M5.	Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai, dan bersatu	T5.	Meningkatnya toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai, dan bersatu	S13.	Meningkatnya ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik

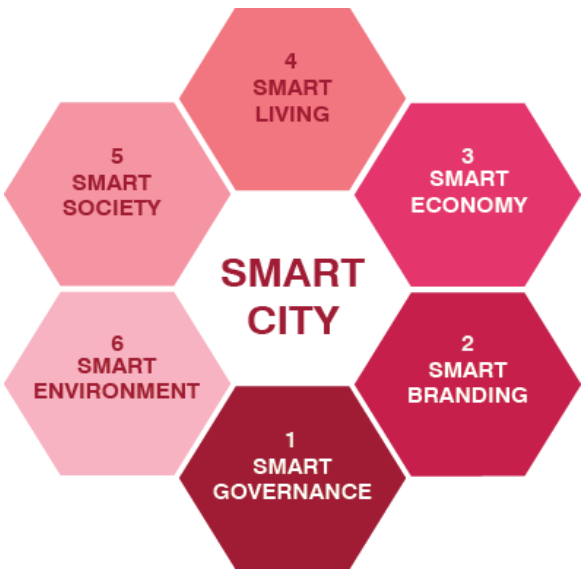
(Sumber: RPJMD Penajaman 2019-2024, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

Rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sampang 2019-2024 memiliki keterkaitan dan keselarasan dengan visi RPJPD Sampang 2005–2025 (RPJPD Kab. Sampang, 2010), visi RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024, visi RPJP Provinsi Jawa Timur 2005-2025, dan visi RPJMN 2020 - 2024 seperti terlihat pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Keterkaitan Visi dengan RPJMD dan RPJP Provinsi

Visi RPJMN 2020 - 2024	Visi RPJP Jatim 2005-2025	Visi RPJMD Jatim 2019-2024	Visi RPJPD Sampang 2005- 2025	Visi RPJMD Sampang 2019-2024
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Terwujudnya Jawa Timur sebagai pusat agribisnis terkemuka, berdaya saing global dan berkelanjutan	Terwujudnya Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan gotong royong	Membangun Sampang Bersatu, Berkualitas, dan Berdaya Saing, Untuk Kesejahteraan Umat	Sampang Hebat Bermartabat

Dari kelima Misi akan dipetakan sesuai dengan keenam dimensi di dalam *Smart City* yang terdiri dari *Smart Governance* (Tata Kelola Pemerintahan), *Smart Branding* (Tata Kelola Peningkatan Daya Saing Daerah), *Smart Economy* (Tata Kelola Perekonomian), *Smart Living* (Tata Kelola Kehidupan Masyarakat), *Smart Society* (Tata Kelola Ekosistem Masyarakat), dan *Smart Environment* (Tata Kelola Lingkungan). Keenam dimensi ini akan menjadi dasar untuk pengembangan *Smart City* di Kabupaten Sampang. Gambar 1.1 memperlihatkan enam dimensi *Smart city* mengacu kepada Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City (Kemkominfo, 2021).



Gambar 1.1 Enam Dimensi *Smart City*

(Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2023)

Keenam dimensi *Smart City* masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

<i>Smart Governance</i>	Merupakan fondasi utama dari kerangka kerja model <i>Smart City</i> . <i>Smart Governance</i> berfungsi sebagai pendorong utama bagi semua unsur lain dalam konsep <i>Smart City</i> . <i>Smart Governance</i> perlu diwujudkan dalam tiga fungsi pemerintahan, yakni kebijakan publik, pengaturan birokrasi, dan penyediaan layanan masyarakat.
<i>Smart Branding</i>	Dalam kerangka model <i>Smart City</i> , <i>Smart Branding</i> memiliki peran penting kedua. Fungsi utama dari <i>Smart Branding</i> adalah untuk mengkomunikasikan nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu kota atau daerah kepada penduduk setempat, wisatawan, dan pelaku bisnis. Proses <i>Smart Branding</i> harus difokuskan pada tiga aspek penting dari wilayah tersebut, yaitu pariwisata, sektor bisnis, dan citra keseluruhan daerah.
<i>Smart Economy</i>	Membentuk sistem <i>Smart Economy</i> merupakan salah satu tugas utama suatu kota (daerah). Hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan lingkungan industri yang sesuai, meningkatkan kesejahteraan penduduknya, serta memfasilitasi kemudahan dan kenyamanan dalam infrastruktur transaksi.
<i>Smart Living</i>	Konsep <i>Smart Living</i> mencakup lingkungan hunian yang memenuhi standar yang sesuai bagi penduduknya. Komponen utama dari <i>Smart Living</i> adalah terwujudnya keseimbangan yang harmonis dalam kehidupan komunitas. Keseimbangan ini perlu tercermin dalam aspek-aspek seperti pengaturan lingkungan permukiman, adanya fasilitas bisnis, serta rekreasi yang tersedia bagi masyarakat.
<i>Smart Society</i>	Konsep <i>Smart Society</i> menciptakan kondisi yang ideal di mana interaksi antara individu, komunitas, dan teknologi digital berjalan secara harmonis. Setiap anggota masyarakat diharapkan memiliki peluang

	akses ke pendidikan yang ditingkatkan melalui fasilitas belajar digital. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran penting dalam memastikan perlindungan terhadap aspek keselamatan individu, aset, dan mitigasi risiko bencana untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Smart Environment	Konsep <i>Smart Environment</i> mencerminkan tekad suatu kota (daerah) dalam menjaga kelestarian lingkungan, mengelola limbah, dan menggunakan sumber energi secara bijak. Semua upaya ini bertujuan untuk mendukung kelangsungan hidup seluruh ekosistem yang ada dalam lingkungan tersebut.

Jika dipetakan, maka kelima Misi penajaman RPJMD 2019-2024 Kabupaten Sampang telah selaras dengan keenam dimensi *Smart City* sebagai berikut:

- Misi 1 telah selaras dengan dimensi *Smart Governance*, *Smart Living*, *Smart Environment*, dan *Smart Society*.
- Misi 2 telah selaras dengan dimensi *Smart Economy*, *Smart Governance*, *Smart Society*, *Smart Living*, dan *Smart Branding*.
- Misi 3 telah selaras dengan dimensi *Smart Living*, dan *Smart Environment*.
- Misi 4 telah selaras dengan dimensi *Smart Governance*.
- Misi 5 telah selaras dengan dimensi *Smart Society* dan *Smart Governance*.

1.2 Pemetaan Misi dan Sasaran RPJMD Terhadap Dimensi Smart City

Tabel 1.3 memperlihatkan pemetaan misi ke setiap dimensi *Smart City* (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023a).

Tabel 1.3 Pemetaan Misi dan Sasaran RPJMD Terhadap Dimensi Smart City

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Dimensi Smart City					
				Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
1	Misi 1: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Terbangunnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				✓		✓
			Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat	✓				✓	
			Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak				✓	✓	
2	Misi 2: Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan melalui pengembangan agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif	Menurunnya angka kemiskinan			✓	✓		
			Menurunnya jumlah pengangguran			✓		✓	
			Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif		✓	✓			
			Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa			✓		✓	
			Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	✓					
3	Misi 3: Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur secara komprehensif dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah				✓		
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan penanganan bencana						✓

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Dimensi Smart City					
				Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
4	Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	✔					
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan desa yang akuntabel, efektif, dan efisien	✔					
5	Misi 5: Mewujudkan harmonisasi kehidupan masyarakat yang waspada, tanggap, tertib, damai, dan bersatu	Meningkatnya toleransi kehidupan masyarakat untuk mewujudkan suasana waspada, tanggap, tertib, damai, dan bersatu	Meningkatnya ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta penyelesaian konflik sosial politik	✔				✔	

(Sumber: FGD Bimbingan Teknis I tanggal 5-6 Juli 2023 dan direvisi dari dokumen RPJMD Penajaman 2019-2024, Kabupaten Sampang, diolah kembali)

2. Visi dan Sasaran Smart City Daerah

Pembangunan Smart City di suatu daerah merupakan langkah progresif untuk meningkatkan kualitas hidup warga dan efisiensi layanan publik. Strategi yang efektif dalam mencapai tujuan ini melibatkan integrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memantau, mengelola, dan mengoptimalkan berbagai aspek kehidupan kota. Dalam pengembangan Smart City, fokus diberikan pada infrastruktur digital yang kuat, penggunaan data dan analitik cerdas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci kesuksesan dalam mewujudkan visi Smart City yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada solusi berbasis teknologi.

2.1 Visi Smart City Daerah

Visi dan Misi Smart City Kabupaten Sampang telah selaras dengan visi dan misi Kabupaten Sampang yang tercantum pada RPJMD Penajaman 2019 – 2024 dan enam dimensi Smart City dari Kementerian Kominfo. Visi Smart City Kabupaten Sampang adalah:

“Sampang Cerdas, Harmonis, dan Berdaya Saing”

Visi tersebut selanjutnya diturunkan menjadi lima Misi Utama:

Misi 1	
	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas dengan pemanfaatan teknologi informasi yang inovatif.
Misi 2	
	Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan perdesaan yang inklusif dengan pendekatan teknologi berbasis digital.
Misi 3	
	Mewujudkan pembangunan yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan secara cerdas.
Misi 4	
	Mengembangkan citra positif dan identitas unik melalui strategi branding berbasis teknologi untuk menarik investasi dan pariwisata.
Misi 5	
	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing serta kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan nyaman melalui pemanfaatan teknologi yang inovatif.

Berdasarkan Visi dan Misi Smart City Kabupaten Sampang pada subbab 2.1. selanjutnya disusunlah sasaran-sasaran jangka pendek *smart city* yang telah dipetakan langsung ke dalam subdimensi-subdimensi dari enam dimensi *smart city*. Sasaran tersebut diperoleh berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) pada kegiatan Bimtek 1 tanggal 5-6 Juli 2023 melalui pengisian kertas kerja, selanjutnya dilakukan revisi pada kegiatan Bimtek 2 tanggal 2-3 Agustus 2023, dan dimatangkan kembali saat Bimtek 4 tanggal 11-12 Oktober 2023 (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023b, 2023c, 2023d).

2.2 Sasaran Jangka Pendek *Smart Governance*

Tabel 2.1 menguraikan dengan lengkap Sasaran jangka pendek yang ingin dicapai dalam pembangunan *smart city* di Kabupaten Sampang pada dimensi *Smart Governance*, dengan tiga sub-dimensi, yaitu Layanan Publik, Birokrasi, dan Perancangan Kebijakan.

Tabel 2.1 Sasaran Jangka Pendek *Smart Governance*

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
Smart Governance (G)	G.1 Layanan Publik	G.1.1 Meningkatnya kualitas layanan publik	1. RPJMD 2019-2024
		G.1.2 Meningkatnya kapasitas SDM Penyelenggara layanan	2. RPJPD 2005-2025
		G.1.3 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang layanan publik	3. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 10.2)
		G.1.4 Menyediakan layanan publik berbasis digital yang optimal	4. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 18.3)
		G.1.5 Meningkatnya kualitas layanan pengaduan pelayanan publik	5. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
	G.2 Birokrasi	G.2.1 Membuat prosedur birokrasi yang lebih sederhana	6. PP No 96/2012 Tentang Pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
			7. PP No 76/2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
			1. RPJMD 2019-2024
			2. RPJPD 2005-2025
			3. PermanPANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
			4. SE Menpan RB 20/2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negeri

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
		G.2.2 Membuat SOP bersama pada OPD yang memiliki pelayanan publik yang sama	
		G.2.3 Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang perencanaan pembangunan	
		G.2.4 Menciptakan sistem data dan informasi terintegrasi lebih optimal.	
		G.2.5 Diterapkannya sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi untuk mendukung organisasi yang berbasis fungsional dengan mekanisme kerja yang flexible, changeable, dan moveable	
		G.2.6 Terciptanya budaya kerja Berakhlak	
	G.3 Perancangan Kebijakan	G.3.1 Melaksanakan perumusan kebijakan berdasarkan hasil kelitbangan dan inovasi	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 21.1) 4. PMDN 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 5. Permedagri 86 Tahun 2017 tentang 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
		G.3.2 Melaksanakan perumusan kebijakan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan	
		G.3.3 Mewujudkan konsistensi dan keterpaduan dalam perumusan kebijakan	
		G.3.4 Melaksanakan proses perumusan kebijakan dengan dukungan dan partisipasi masyarakat	
		G.3.5 Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan secara terus-menerus dan mengevaluasi dampaknya secara berkala.	

(Sumber: RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

2.3 Sasaran Jangka Pendek *Smart Branding*

Tabel 2.2 menguraikan dengan lengkap Sasaran jangka pendek yang ingin dicapai dalam pembangunan *smart city* di Kabupaten Sampang pada dimensi *Smart Branding*. Dimensi ini memiliki tiga subdimensi: Ekosistem Pariwisata, Daya Saing Bisnis, dan Wajah (Tampilan) Kota.

Tabel 2.2 Sasaran Jangka Pendek *Smart Branding*

Dimensi	SubDimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
Smart Branding (B)	B.1 Pariwisata	B.1.1 Menyediakan infrastruktur pariwisata yang memadai	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 14.1) 4. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 17b.1)
		B.1.2 Menyediakan jaringan transportasi penunjang pariwisata	
		B.1.3 Memasarkan pariwisata melalui pariwisata go digital	
		B.1.4 Melaksanakan penguatan kapasitas Kelompok Sadar Wisata dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi	
		B.1.5 Membangun E-Tourism Exchange untuk menjembatani antara wisatawan dan stakeholder di bidang pariwisata (hotel, transportasi, tiket, pertunjukan, kuliner)	
	B.2 Daya Saing Bisnis	B.2.1 Membangun ekosistem investasi yang mudah dan efektif	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 13.4) 4. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 19.5) 5. SDGs (Tujuan 8.2.1.(c))
		B.2.2 Menyediakan Pusat Pengembangan Inovasi Produk dan layanan konsultasi	
		B.2.3 Menghasilkan SDM yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya	
		B.2.4 Melaksanakan pemasaran dan branding yang kolaboratif	
		B.2.5 Membangun kemitraan strategis	
		B.2.6 Meningkatnya pengelolaan sektor unggulan dan ekonomi kreatif	

Dimensi	SubDimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
	B.3 Wajah (Tampilan) Kota	B.3.1 Melakukan penataan ruang kota baik	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025
		B.3.2 Menyediakan penerangan jalan dan <i>landmark</i> yang memadai dan kreatif	
		B.3.3 Mewujudkan kebersihan dan pengelolaan sampah	
		B.3.4 Menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai	
		B.3.5 Melaksanakan pemugaran dan pelestarian bangunan bersejarah	
		B.3.6 Menyediakan sistem transportasi yang terintegrasi	
		B.3.7 Mengatur Rambu Lalu Lintas dan Penataan Parkir yang Tertib	
		B.3.8 Meningkatnya Kemajuan dan Kemandirian Desa	

(Sumber: RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

2.4 Sasaran Jangka Pendek *Smart Economy*

Tabel 2.3 menguraikan dengan lengkap Sasaran jangka pendek yang ingin dicapai dalam pembangunan *Smart City* di Kabupaten Sampang pada dimensi *Smart Economy*. Dimensi ini memiliki tiga subdimensi: Ekosistem Industri, Kesejahteraan Masyarakat, dan Ekosistem Transaksi Keuangan.

Tabel 2.3 Sasaran Jangka Pendek *Smart Economy*

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
Smart Economy (E)	Ec.1 Ekosistem Industri	Ec.1.1 Memfasilitasi Lembaga Usaha untuk berbadan Hukum/Akta Hukum	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025
		Ec.1.2 Menyediakan fasilitas pelayanan bagi KUMKM secara online dan offline	
		Ec.1.3 Menyediakan saluran distribusi	
		Ec.1.4 Memfasilitasi Rantai dan kualitas pasokan serta pengembangan cluster industri	

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
		Ec.1.5 Meminimalisasi Biaya operasi	
	Ec.2 Kesejahteraan Masyarakat	Ec.2.1 Meningkatnya pendapatan masyarakat yang semakin merata	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SDGs (Tujuan 8.5.2)
		Ec.2.2 Meningkatnya investasi ekonomis masyarakat (masyarakat mampu menyisihkan pendapatan untuk investasi)	
		Ec.2.3 Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat secara layak	
		Ec.2.4 Menurunnya angka kemiskinan	
		Ec.2.5 Menurunnya jumlah pengangguran	
	Ec.3 Ekosistem Transaksi Keuangan	Ec.3.1 Meningkatnya layanan transaksi berbasis teknologi digital (dimulai dari pelayanan yang diberikan instansi pemerintah)	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025
		Ec.3.2 Mengembangkan ekosistem transaksi keuangan digital secara luas	
		Ec.3.3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap permodalan usaha ekonomi	
		Ec.3.4 Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	

(Sumber: RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

2.5 Sasaran Jangka Pendek *Smart Living*

Tabel 2.4 menguraikan dengan lengkap Sasaran jangka pendek yang ingin dicapai dalam pembangunan *smart city* di Kabupaten Sampang pada dimensi *Smart Living*. Dimensi ini memiliki tiga subdimensi: Harmonisasi Tata Ruang, Kesehatan, dan Transportasi.

Tabel 2.4 Sasaran Jangka Pendek *Smart Living*

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
Smart Living (L)	L.1 Harmonisasi Tata Ruang	L.1.1 Membangun perumahan di kawasan pemukiman bagi masyarakat yang sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SDGs (Tujuan 7.2.1)
		L.1.2 Menyediakan sarana dan prasarana permukiman yang berkelanjutan	
		L.1.3 Membangun fasilitas wilayah yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.	
	L.2 Kesehatan	L.2.1 Menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 11.1) 4. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 11.3)
		L.2.2 Meningkatnya lingkungan yang bersih dan sehat	
		L.2.3 Menyediakan fasilitas pendidikan bagi masyarakat	
		L.2.4 Menyediakan fasilitas sosial dan budaya tempat berkumpul bagi masyarakat	
		L.2.5 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	
	L.3 Transportasi	L.3.1 Menyediakan Jaringan jalan yang cukup memadai bagi masyarakat untuk mengakses lokasi-lokasi penting ke pusat-pusat perdagangan, pertanian, destinasi wisata dan lokasi strategis lainnya	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 19.6) 4. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 19.11)
		L.3.2 Menyediakan moda transportasi umum bagi masyarakat di pedesaan untuk mengakses lahan-lahan produktif pertanian.	

(Sumber: RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

2.6 Sasaran Jangka Pendek *Smart Society*

Tabel 2.5 menguraikan dengan lengkap sasaran jangka pendek yang ingin dicapai dalam pembangunan *smart city* di Kabupaten Sampang pada dimensi *Smart Society*. Dimensi ini memiliki tiga subdimensi: Interaksi Masyarakat, Ekosistem Belajar/Pendidikan, dan Keamanan Masyarakat.

Tabel 2.5 Sasaran Jangka Pendek *Smart Society*

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
Smart Society (S)	S.1 Interaksi Masyarakat	S.1.1 Tersedianya akses internet yang terhubung antar rumah tangga	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SDGs (Tujuan 9.c.1)
		S.1.2 Tersedianya akses internet bagi masyarakat umum	
		S.1.3 Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang teknologi dan manfaatnya	
	S.2 Ekosistem Belajar/ Pendidikan	S.2.1 Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025
		S.2.2 Mengembangkan program pendidikan berbasis teknologi	
		S.2.3 Meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat	
	S.3 Keamanan Masyarakat	S.3.1 Meningkatkan keamanan lingkungan dan pencegahan kejahatan	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 15.1)
		S.3.2 Mengurangi angka kecelakaan lalu lintas	
		S.3.3 Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana	

(Sumber: RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

2.7 Sasaran Jangka Pendek *Smart Environment*

Tabel 2.6 menguraikan dengan lengkap Sasaran jangka pendek yang ingin dicapai dalam pembangunan *smart city* di Kabupaten Sampang pada dimensi *Smart Environment*. Dimensi ini memiliki tiga subdimensi: Proteksi Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah, dan Tata Kelola Energi.

Tabel 2.6 Sasaran Jangka Pendek *Smart Environment*

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
Smart Environment (En)	En.1 Proteksi Lingkungan	En.1.1 Mengurangi emisi karbon dioksida	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SDGs (Tujuan 13.2.1.(b)) 4. SDGs (Tujuan 7.2.1) 5. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 8.2) 6. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 16.6)
		En.1.2 Melakukan konservasi Sumber Daya Alam	
		En.1.3 Mengendalikan Pencemaran Lingkungan	
	En.2 Pengelolaan Sampah dan Limbah	En.2.1 Mengelola Sampah Berbasis Teknologi	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 16.4) 4. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 16.1) 5. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 16.6)
		En.2.2 Mereduksi Penggunaan Plastik	
		En.2.3 Meningkatkan Pengelolaan	

Dimensi	Subdimensi	Sasaran	Dasar Pemikiran
		Limbah B3	
	En.3 Tata Kelola Energi	En.3.1 Meningkatkan Penggunaan Energi Terbarukan	1. RPJMD 2019-2024 2. RPJPD 2005-2025 3. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 7.10)
		En.3.2 Meningkatkan Efisiensi Energi	4. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 7.5) 5. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 12.1) 6. SNI ISO 37122:2019 (Indikator 19.5)

(Sumber: RPJMD 2019-2024 & RPJPD 2005-2025, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

3. Profil Quick Win Smart City Daerah

Bagian 3 ini membahas profil Program Quick Win *Smart City* Kabupaten Sampang per dimensi yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Program Quick Win merupakan inisiatif unggulan Pemerintah Daerah, terutama dalam mewujudkan gagasan Smart City di wilayahnya. Keunggulan dari program Quick Win terlihat dalam dampak yang sangat konkret, jelas, dan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh semua pihak yang terlibat. Selain itu, Quick Win dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu dalam kurun waktu tiga bulan setelah dimulai. Melalui program ini, Quick Win memacu percepatan pencapaian sasaran pembangunan Smart City di enam dimensi utama, yakni *Smart Governance*, *Smart Branding*, *Smart Economy*, *Smart Living*, *Smart Society*, dan *Smart Environment*. Oleh karena itu, Quick Win juga bisa disebut sebagai sebuah inovasi daerah yang signifikan.

Subbab 3.1-3.6 menguraikan secara detail profil Quick Win setiap dimensi yang merupakan hasil isian kertas kerja Profil Quick Win oleh (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023e) saat FGD pada Bimtek 3 tanggal 4-5 September 2023 dan dipertajam kembali pada Bimtek 4 tanggal 11-12 Oktober 2023.

3.1 Profil Quick Win Smart Governance

Program Quick Win **Salempang (Satu Akses Layanan Pemerintah Kabupaten Sampang)** pada dimensi *Smart Governance* seperti terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Profil Quick Win Smart Governance

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	Salempang (Satu Akses Layanan Pemerintah Kabupaten Sampang)
2. Penjelasan singkat	Inovasi ini akan membangun sebuah aplikasi yang menawarkan berbagai layanan, baik layanan administrasi pemerintah maupun layanan publik dalam dalam satu platform atau satu akses layanan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai hal tanpa harus keluar dari aplikasi tersebut, sehingga masyarakat dapat mengakses, berinteraksi, dan melakukan transaksi dengan mudah, meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Keberadaan banyaknya aplikasi layanan yang ada di OPD-OPD yang berdiri sendiri dapat menimbulkan beberapa kelemahan antara lain: 1. Pengguna akan merasa kebingungan dan kesulitan dalam mengakses layanan yang mereka butuhkan

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
	2. Pengguna harus mengingat banyak nama pengguna, kata sandi, dan alamat URL untuk setiap aplikasi 3. Berbagai aplikasi yang tidak terintegrasi mengakibatkan duplikasi data yang tidak efisien 4. Kesulitan dalam melacak dan memantau transaksi atau penggunaan layanan secara keseluruhan 5. Pengalaman pengguna yang kurang memuaskan. Dengan menyediakan satu akses layanan, maka dapat mengatasi kebingungan pengguna, mengurangi duplikasi data yang tidak perlu, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik secara keseluruhan. Lebih dari itu, dapat memanfaatkan data yang terintegrasi untuk melakukan analisis yang lebih baik dan mengambil keputusan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan pelayanan yang lebih baik. Pengembangan infrastruktur microservices yang memungkinkan integrasi dan koordinasi yang mulus antara berbagai aplikasi dalam satu environment hosting yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sampang. Dengan itu, akan tercapainya langkah penyatuan data yang lebih baik, pemrosesan yang efisien, dan memungkinkan penggunaan layanan terpadu di seluruh platform. Pemanfaatan fasilitas PDN akan lebih menjamin realibility layanan karena dukungan infrastruktur yang lebih baik (telah memenuhi standar Tier-3). Selanjutnya aplikasi-aplikasi yang telah dimigrasikan ke PDN akan dirubah arsitekturnya yang semula di-develop mengikuti arsitektur Monolitik menjadi arsitektur Microservices.
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	Kode Status dalam siklus manajemen inovasi: 3 Persentase Penyelesaian: 20% Sejak tahun 2023 Dinas Kominfo telah memanfaatkan fasilitas PDN, selanjutnya aplikasi-aplikasi yang telah dimigrasikan ke PDN akan dirubah arsitekturnya yang semula di-develop mengikuti arsitektur Monolitik menjadi arsitektur Microservices. Persentase proses migrasi ke PDN telah mencapai 20% dan dilihat delink berikut: https://diskominfo.sampangkab.go.id/list-aplikasi-yang-telah-dimigrasikan-ke-pusat-data-nasional-pdn 1. Kebutuhan/masalah dalam proses perumusan 2. Ide/konsep inovasi awal dalam proses penulisan/penggambaran 3. Rencana pembangunan/implementasi dalam pembuatan 4. Inovasi dan komponen pendukungnya dalam pembangunan 5. Implementasi Inovasi sedang berlangsung 6. Evaluasi dan rencana pengembangan lebih lanjut sedang berlangsung Keterangan tambahan status (url) : https://diskominfo.sampangkab.go.id/list-aplikasi-yang-telah-dimigrasikan-ke-pusat-data-nasional-pdn

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
4. Manfaat dari inovasi	Peningkatan Pengalaman Pengguna: Dengan arsitektur microservices, super apps dapat memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan responsif. Setiap layanan dalam super apps dapat dioptimalkan untuk tujuan tertentu, memungkinkan aplikasi untuk menyediakan antarmuka yang halus, cepat, dan fokus pada kebutuhan pengguna. Pengguna akan merasakan peningkatan dalam navigasi, waktu respon, dan kinerja keseluruhan aplikasi. Fitur yang Lebih Relevan: Setiap layanan mikro dalam super apps dapat fokus pada tujuan bisnis tertentu. Ini memungkinkan super apps untuk menyediakan berbagai fitur yang lebih relevan dan bervariasi, yang disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan pengguna. Pengguna akan mendapatkan akses ke fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan mereka, meningkatkan nilai dan utilitas aplikasi. Skalabilitas dan Ketersediaan yang Lebih Baik: Arsitektur microservices memungkinkan skalabilitas horizontal, yang berarti layanan-layanan dalam super apps dapat ditingkatkan secara independen sesuai dengan permintaan. Ini memastikan ketersediaan aplikasi yang lebih tinggi, terutama pada saat lonjakan lalu lintas atau penggunaan puncak. Pengguna akan mengalami lebih sedikit gangguan dan layanan yang lebih dapat diandalkan. Pembaruan dan Peningkatan yang Cepat: Setiap layanan mikro dapat dikelola dan ditingkatkan secara independen oleh tim yang khusus mengelola layanan tersebut. Ini memungkinkan super apps untuk melakukan pembaruan dan peningkatan dengan lebih cepat, tanpa mempengaruhi keseluruhan aplikasi. Pengguna akan mendapatkan manfaat dari fitur baru dan perbaikan yang lebih cepat diimplementasikan. Keamanan yang Ditingkatkan: Dengan pemisahan fungsi ke dalam layanan-layanan terisolasi, super apps dapat menerapkan lapisan keamanan yang sesuai untuk setiap layanan. Ini membantu melindungi data dan mengurangi risiko dampak jika terjadi pelanggaran keamanan. Pengguna akan merasa lebih percaya diri dalam menggunakan aplikasi untuk transaksi dan pertukaran informasi sensitif. Kustomisasi dan Fleksibilitas: Arsitektur microservices memungkinkan penggunaan teknologi yang beragam untuk setiap layanan. Ini memberikan fleksibilitas dalam pengembangan dan pemeliharaan, serta memungkinkan super apps untuk mengadaptasi solusi terbaru dan terbaik untuk setiap aspek bisnis. Pengguna akan mengalami peningkatan dalam fitur dan kualitas aplikasi seiring berjalannya waktu.

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
	Pemantauan dan Pemecahan Masalah yang Lebih Efektif: Setiap layanan dapat dipantau secara independen, memungkinkan tim teknis untuk mengidentifikasi masalah lebih cepat dan merespons dengan cepat jika ada masalah. Hal ini dapat mengurangi waktu henti aplikasi dan memberikan pengalaman yang lebih lancar bagi pengguna.
5. Keunikan/kreativitas	Dengan Salempang masyarakat cuma mengakses 1 domain saja yaitu sampangkab.go.id Salempang akan menyediakan berbagai fitur, layanan administrasi pemerintah dan layanan publik seperti layanan kesehatan, pendidikan, UMKM, pariwisata dan informasi lain seputar Kabupaten Sampang.
6. Kemitraan	Jawaban: Dalam pembangunan, implementasi dan evaluasi, Salempang mendapat pendampingan dari TP2D yang dibentuk oleh Bupati Sampang dan akademisi dari kampus yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sampang. TP2D ini juga merupakan anggota dari Dewan Smart City Kabupaten Sampang, sehingga terlibat secara langsung terhadap pengembangan Smart City di Kabupaten Sampang. Perguruan tinggi yang sudah melakukan kerjasama dengan Kabupaten Sampang antara lain, Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Politeknik Negeri Madura (Poltera), dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), dimana kerjasama akan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan sistem. Kemitraan dengan stakeholders ini dilakukan oleh Diskominfo mulai dari tahap perencanaan inovasi, pengembangan, implementasi, dan evaluasi.
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	Peluang untuk pengembangan/peningkatan dari sisi produk inovasi, ruang lingkup/jangkaun, replikasi, penyebaran dan lain lain Jawaban: Peluang pengembangan layanan kepada masyarakat tidak hanya G2G, G2E tapi juga G2B, G2C. Peningkatan Integrasi Layanan akan terus dikembangkan dengan menambah lebih banyak layanan yang dapat memberikan manfaat tambahan kepada pengguna dan kerja sama dengan penyedia layanan untuk mengintegrasikannya. Misalnya, integrasikan layanan pembayaran, logistik, atau sistem keanggotaan. Dengan demikian, pengguna dapat mengakses berbagai layanan melalui satu platform yang sama.
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	Memastikan keberlangsungan (sustainability) implementasi dan pengembangan dari inovasi, disusun kebijakan/regulasi terkait pembangunan aplikasi, kelembagaan, penyediaan infrastruktur, sumber daya dan kompetensi.

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
	Jawaban: • Fase 1 - Infrastructure Base • Fase 2 - Converter Base and Portal Basic • Fase 3 - Integration Repository List • Fase 4 - ML Portal Engine • Fase 5 - Scalibility for Zero Downtime
9. Sumber daya yang digunakan	Sumber daya yang diperlukan dalam perencanaan, pembangunan, implementasi dari inovasi. Bentuknya dapat berupa pendanaan, tenaga ahli, sarana dan bentuk lain. Pilihan pilihan sumber penyediaan yang ada. Pembangunan Salempang ini didukung dengan alokasi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Diskominfo yang digunakan untuk membayar tim programmer. Dalam pengembangan aplikasi ini Diskominfo akan merekrut SDM professional yang terdiri dari programmer, sistem analis, dan personal design. Total SDM yang direkrut oleh Diskominfo adalah 10 orang, dan dibagi ke dalam dua bidang: pengembang sistem aplikasi 5 orang, dan 5 orang untuk pengembangan jaringan dan teknisi komputer. Kerja dari SDM Diskominfo ini juga didukung oleh TP2D
10.Analisa Risiko	Uraian singkat dari perkiraan adanya dampak lain (selain manfaat dan keuntungan di atas) dari inovasi yang perlu diantisipasi, ditanggulangi, dimitigasi atau dikelola dengan cara cara lain sesuai kaidah manajemen risiko Jawaban: Butuh waktu lama untuk mengkonversikan semua layanan dari arsitektur monolithic ke arsitektur microservices

(Sumber: FGD Bimtek 3 dan Bimtek 4, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

3.2 Profil Quick Win Smart Branding

Program Quick Win **SAMPANG GEMILANG: Alun-alun Trunojoyo Park** pada dimensi *Smart Branding* seperti terlihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Profil Quick Win Smart Branding

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	SAMPANG GEMILANG: Alun-alun Trunojoyo Park
2. Penjelasan singkat	Salah satu kendala pengembangan kepariwisataan di Madura khususnya Kabupaten Sampang adalah kondisi sosial masyarakat yang sangat sulit menerima perubahan terkait dengan adat istiadat, tradisi dan agama yang dianggap bertentangan dan akan menimbulkan konflik dan merubah tatanan sosial. Pemerintah Kabupaten Sampang menciptakan strategi baru dalam menumbuhkembangkan sektor kepariwisataan yaitu dengan cara merubah pola pikir masyarakat untuk berkegiatan memanfaatkan potensi daerah. Inovasi ini Merupakan salah satu cara dalam mengembangkan kepariwisataan dan mengembangkan pariwisata sebagai daya ungkit ekonomi masyarakat yang berfokus pada pengembangan alun-alun Trunojoyo dan masjid ikonik sebagai destinasi baru pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dengan berkonsep mengedepankan wajah kota. Kawasan Alun-alun Trunojoyo dipilih menjadi lokasi program ini karena merupakan kawasan yang berada dipusat perbelanjaan, pendopo Bupati, masjid ikonik nantinya selain itu kawasan yang dilewati oleh mereka yang melakukan perjalanan ke Kabupaten Pamekasan atau Kabupaten Sumenep dengan harapan dapat menangkap wisatawan. Inovasi ini merupakan bentuk dari program kolaboratif lintas sektoral yang bertujuan untuk menyatukan berbagai perspektif kegiatan yang di akomodir melalui OPD serta stakeholder terkait diantaranya; melalui Disporabudpar memberikan fasilitasi konten hiburan baik berupa eventual atau seni pertunjukan yang dapat mewadahi para pelaku ekonomi kreatif, seniman dan budayawan untuk melakukan kegiatan pada lokasi/ venue yang tersedia di alun alun Trunojoyo, Dinas Lingkungan Hidup dan Permukiman (DLH PERKIM) terkait dengan pertamanan dan kebersihan kawasan ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) terkait untuk fasilitas fisik seperti jalan, gorong-gorong, saluran air kotor, pengadaan bangunan fasilitas lainnya, Dinas Perhubungan (DISHUB) mengatur parkir dan angkutan wisata, Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan (Diskopindag) untuk mewadahi dan mengatur kegiatan PKL dan UMKM, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP) bertugas

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
	mengatur penertiban dan penataan lokasi alun alun, DPMPSTSP untuk penertiban usaha, Corporate Social Responsibility (CSR) terkait pembangunan Alun-alun dan pertamanan.
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	Kode Status: 5 (Implementasi Inovasi sedang berlangsung), dengan Persentase Penyelesaian 60% 1. Kebutuhan/masalah dalam proses perumusan 2. Ide/konsep inovasi awal dalam proses penulisan/penggambaran 3. Rencana pembangunan/implementasi dalam pembuatan 4. Inovasi dan komponen pendukungnya dalam pembangunan 5. Implementasi Inovasi sedang berlangsung 6. Evaluasi dan rencana pengembangan lebih lanjut sedang berlangsung
4. Manfaat dari inovasi	Inovasi ini memberikan manfaat antara lain: • Wisatawan domestik dan luar negeri: bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sampang, manfaat yang mereka bisa dapatkan antara lain: (1). Memberikan pengalaman berwisata di Kabupaten Sampang. (2). Memperkenalkan situs bangunan ikonik kota serta sesuai dengan kearifan lokal madura. • Memberikan ruang dan wadah untuk menuangkan ragam kegiatan dan kreativitas masyarakat yang akan berdampak pada meningkatnya laju aktivitas ekonomi sosial dan budaya masyarakat berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. • Pemerintah kota: (1). Naiknya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Sampang. (2). <i>Multiplier effect</i> dari sektor pariwisata berupa pendapatan bagi sektor pariwisata (hotel, kuliner, dan sebagainya), dan tentunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten dari sektor pariwisata
5. Keunikan/kreativitas	Media ajang pelestarian dan mencerminkan keragaman Madura diantaranya: musik, fashion, kria serta ajang kreatif lainnya dipertunjukkan di kawasan <i>Alun-alun Trunojoyo Park</i> dan Masjid Ikonik.
6. Kemitraan	UMKM, pegiat ekonomi kreatif, CSR, OPD, PMI, SAMSAT,
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	kawasan alun alun Trunojoyo sebagai pusat kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif serta keragaman budaya Madura yang ikonik
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	1. Penyusunan regulasi 2. Kemitraan dan Kolaborasi program lintas sektoral 3. Menjadi program prioritas daerah 4. Komitmen seluruh stake holder 5. Menjaga fungsi ruang terbuka lebih optimal dan berkelanjutan

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
9. Sumber daya yang digunakan	Inovasi sudah diimplementasikan berikut beberapa tahapannya: Perencanaan: (1). Kesiapan infrastruktur pendukung, seperti penyiapan <i>portable</i> toilet, panggung portable (yang bisa dibongkar dan dipasang) (2). Persiapan untuk penataan lalu lintas, dengan kawasan ini bukan 100 persen kawasan jalan kaki (fasilitas jalan untuk lalu lintas kendaraan bermotor). (3). Pendataan untuk komunitas ekonomi kreatif yang akan terlibat di dalam kegiatan ini. Pembangunan: (1). Pembangunan infrastruktur pendukung di lokasi. (2). Pembuatan MoU antara pemerintah Kabupaten Sampang (diwakili oleh Disporabudpar) dengan komunitas ekonomi kreatif untuk komitmen di inovasi ini. Implementasi: (1). Pembuatan jadwal bagi para pengisi atraksi di kalangan ekonomi kreatif. (2). Alokasi anggaran untuk komunitas kreatif/anggaran pendukung untuk inovasi ini. (3) Alokasi anggaran untuk pengembangan pembangunan sekitar kawasan Alun-alun Trunojoyo Park.
10. Analisa Risiko	1. Mitigasi lalu lintas 2. Mitigasi bencana dan lingkungan 3. Keamanan dan ketertiban 4. Resiko kerusakan infrastruktur

(Sumber: FGD Bimtek 3 dan Bimtek 4, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

3.3 Profil Quick Win Smart Economy

Program Quick Win **Budidaya Tanaman Sehat (BTS)** pada dimensi *Smart economy* seperti terlihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Profil Quick Win Smart economy

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	Budidaya Tanaman Sehat (BTS)
2. Penjelasan singkat	Deskripsi Budidaya Tanaman Sehat merupakan metode budidaya yang diadopsi dari salah satu prinsip Pengendalian Hama Terpadu, dimana dalam membudidayakan tanaman yang memadukan semua teknologi budidaya berbasis ramah lingkungan, sehingga dihasilkan tanaman yang sehat, lingkungan yang lestari dan produk yang aman dikonsumsi. Berawal dari produk aman konsumsi ini maka akan menjadi makanan yang sehat dan mendukung pola hidup sehat generasi milenial kita.

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
	Budidaya Tanaman Sehat dimaksudkan untuk mengoptimalkan ruang pada lingkungan di beberapa lembaga pendidikan dan instansi perkantoran dengan memanfaatkan peran seluruh komponen agroekosistem seperti musuh alami dan mikroorganisme menguntungkan yang berasosiasi dengan tanaman, sehingga kesehatan tanaman, tanah dan lingkungan akan semakin meningkat. Hal tersebut diharapkan secara signifikan akan semakin mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia sintetis yang dapat mencemari lingkungan dan meninggalkan residu pada produk hasil pertanian. Selain itu secara estetis dapat menghiasi ruang pada lingkungan pendidikan dan instansi perkantoran dengan penghijauan Budidaya Tanaman Sehat. Adapun prinsip Budidaya Tanaman Sehat, meliputi: 1. Perbaikan kesuburan tanah. Perbaikan kesuburan tanah dapat dilakukan dengan penggunaan pupuk organik dan kapur pertanian 2. Pengolahan tanah yang tepat 3. Penggunaan bibit varietas unggul 4. Penanaman Refugia (mikrohabitat buatan yang ditanam dalam lahan pertanian sebagai salah satu upaya konservasi musuh alami terutama parasitoid dan predator di pertanaman) 5. Pengendalian hama dan penyakit
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	Kode Status dalam siklus manajemen inovasi: 3 Persentase Penyelesaian (progres waktu/pekerjaan): 50% 1. Kebutuhan/masalah dalam proses perumusan 2. Ide/konsep inovasi awal dalam proses penulisan/penggambaran 3. Rencana pembangunan/implementasi dalam pembuatan 4. Inovasi dan komponen pendukungnya dalam pembangunan 5. Implementasi Inovasi sedang berlangsung 6. Evaluasi dan rencana pengembangan lebih lanjut sedang berlangsung
4. Manfaat dari inovasi	Penerima manfaat: Masyarakat dan lembaga pendidikan Dampak/keuntungan/manfaat: Tanaman yang sehat, lingkungan lestari, produknya aman dikonsumsi dengan keterlibatan semua pihak.
5. Keunikan/kreativitas	Memadukan semua teknologi budidaya yang berbasis ramah lingkungan dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam lokal, dan dipelopori oleh petani milenial.

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
6. Kemitraan	1. DISPERTA KP; 2. DLH PERKIM; 3. GAPOKTAN; 4. DISKOPINDAG; 5. DISDIK; 6. CABDIN PROVINSI JAWA TIMUR; 7. KEMENAG; 8. FPRB (Forum Pengurangan Risiko Bencana); 9. Paguyuban Mamin Sekkar Pote; 10.HPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia).
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	Peluang untuk pengembangan/peningkatan dari sisi produk inovasi, ruang lingkup/jangkauan, replikasi, penyebaran dan lain lain Inovasi diterapkan ke petani milenial, fasilitasi dengan <i>offtaker</i> , pengembangan pupuk anorganik yang dihasilkan dengan limbah sampah
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	1. Disusun Peraturan Bupati tentang Sistem Pertanian Organik 2. Dikembangkan di setiap kelurahan dan desa 3. Dikembangkan pada institusi pendidikan
9. Sumber daya yang digunakan	Keterlibatan CSR, peran masyarakat untuk mengembangkan inovasi, peningkatan peran gapoktan untuk melakukan edukasi ke sekolah dan masyarakat
10. Analisa Risiko	1. Mencegah dan mengendalikan degradasi, pencemaran dan kerusakan lingkungan 2. Adanya limbah plastik 3. Kerusakan produk akibat fermentasi mikroba

(Sumber: FGD Bimtek 3 dan Bimtek 4, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

3.4 Profil Quick Win Smart Living

Program Quick Win **JARI KAKI LIMA V.23 (Jaring Resiko berbasis Aplikasi Kesehatan Terintegrasi dengan Melibatkan Masyarakat Versi 2023)** pada dimensi *Smart Living* seperti terlihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Profil Quick Win Smart Living

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	Program Jari Kaki Lima V.23 (Jaring Resiko Berbasis Aplikasi Kesehatan Terintegrasi dengan Melibatkan Masyarakat Versi 2023)
2. Penjelasan singkat	Program JARI KAKI LIMA V.23 (Jaring Resiko berbasis Aplikasi Kesehatan Terintegrasi dengan Melibatkan Masyarakat Versi 2023) merupakan inovasi program yang dirancang untuk melaksanakan pendataan kesehatan keluarga pada 168 desa di Kabupaten Sampang.

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
	Pendataan dilaksanakan mengacu pada Indikator Keluarga Sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Inovasi ini berangkat dari permasalahan pendataan status kesehatan keluarga utamanya pada keluarga dengan ibu hamil dan atau balita yang belum terlaksana dengan optimal sehingga berdampak pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Inovasi program yang diusulkan melibatkan mitra dari Politeknik Negeri Madura dalam hal pengembangan sistem aplikasi Jari Kaki Lima V.23. Target pendataan diawali dengan mendata keluarga dengan Ibu hamil dan atau balita di 186 desa Kabupaten Sampang. Dinas Kesehatan bersama dengan mitra dari Politeknik Negeri Madura memberikan pendampingan pada kader dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam program JARI KAKI LIMA V.23 agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan optimal. Alur skema pelaksanaan serangkaian program JARI KAKI LIMA adalah sebagai berikut: 1. Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang bersama mitra telah melakukan penandatanganan kerjasama dan <i>focus grup discussion</i> (FGD) untuk menyamakan persepsi antara program Dinkes & KB Kabupaten Sampang yang sudah berjalan dengan rekacipta yang diusulkan oleh pengusul dari Politeknik Negeri Madura. Hasil FGD antara pengusul dan mitra sebagai berikut: a. Dinkes & KB Kabupaten Sampang memiliki program Jari Kaki Lima yang berfokus pada pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) pada tahun 2019 yang selanjutnya akan dikembangkan pada pendataan kesehatan keluarga dengan menggunakan 12 Indikator Keluarga Sehat (IKS) b. Bersamaan dengan itu, sasaran program Jari Kaki Lima dapat meningkatkan cakupan pendataan kesehatan masyarakat secara komprehensif utamanya pada keluarga dengan ibu hamil dan balita sehingga didapatkan data kesehatan masyarakat resiko tinggi agar memudahkan dalam pemantauan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 2. Pelaksanaan program Jari Kaki Lima V.23 sebagai inovasi program pendataan kesehatan masyarakat berbasis keluarga secara komprehensif dengan membantu Dinkes & KB Kabupaten Sampang selaku mitra melalui sasaran keluarga. Inovasi ini berangkat dari permasalahan pendataan status kesehatan masyarakat menggunakan indikator keluarga sehat serta aplikasi program Jari Kaki Lima yang belum optimal. Program Jari Kaki Lima V.23 melibatkan pemangku kepentingan dari Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang dan Politeknik Negeri Madura serta mahasiswa dengan mengimplementasikan (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) MBKM. Inovasi program Jari Kaki Lima V.23 diharapkan dapat meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat berbasis keluarga menggunakan Indikator Keluarga Sehat (IKS) sehingga dapat menjaring kesehatan masyarakat resiko tinggi agar lebih mudah dalam melaksanakan pemantauan dan pemeriksaan kesehatan.

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
	Aplikasi JARI KAKI LIMA bermanfaat sebagai sistem data dan pelaporan pemeriksaan kesehatan masyarakat. Aplikasi diinput oleh kader dan tenaga kesehatan. Pada aplikasi ini menampilkan data hasil pengisian formulir keluarga sehat, hasil pemeriksaan kesehatan, rekomendasi tempat pemeriksaan kesehatan terdekat, materi edukasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait keluarga sehat, dan <i>Warning System</i> pada kasus yang ditemukan di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Diharapkan penanganan kasus dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan tepat.
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	Kode Status dalam siklus manajemen inovasi: 3 Persentase Penyelesaian (progres waktu/pekerjaan) 50% 1. Kebutuhan/masalah dalam proses perumusan 2. Ide/konsep inovasi awal dalam proses penulisan/ penggambaran 3. Rencana pembangunan/implementasi dalam pembuatan 4. Inovasi dan komponen pendukungnya dalam pembangunan 5. Implementasi Inovasi sedang berlangsung 6. Evaluasi dan rencana pengembangan lebih lanjut sedang berlangsung Tahap pengembangan aplikasi Jari Kaki Lima saat ini mencapai 50%. Hal ini sesuai dengan aplikasi saat ini akan dilakukan pengembangan dengan menambah Indikator Keluarga Sehat (IKS)
4. Manfaat dari inovasi	Manfaat untuk eksternal: 1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit dan pencegahan penyakit sehingga terbentuk kesadaran untuk mengoptimalkan pencegahan penyakit dimulai dari keluarga. 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan diri dan lingkungan yang terlihat dari kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. 3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang terlihat dengan meningkatnya derajat kesehatan meliputi indikator Mortalitas (kematian), Morbiditas (kesakitan), serta perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat. 4. Pemantauan masyarakat dengan resiko tinggi penyakit dapat terlaksana dengan optimal dengan melibatkan keluarga dan masyarakat sekitar. Manfaat untuk internal: 1. Dapat memberikan arah yang terukur dan sistematis sebagai upaya meningkatkan kesehatan keluarga berdasarkan Indeks Keluarga Sehat (IKS) 2. Terlaksananya perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi program deteksi dini resiko penyakit pada masyarakat berdasarkan Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Sampang dapat lebih optimal dengan dibuatnya manajemen sistem informasi “JARI KAKI LIMA V.23”. 3. Menurunkan angka kesakitan dan kematian, yang berdampak pada peningkatan kualitas SDM serta dapat meningkatkan jumlah cakupan & mencapai Kabupaten Sampang Sehat melalui pendekatan keluarga

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
5. Keunikan /kreativitas	Program JARI KAKI LIMAV.23 bermanfaat sebagai sistem data dan pelaporan status kesehatan masyarakat berdasarkan Indikator Keluarga Sehat (IKS) dengan melibatkan masyarakat dan tenaga kesehatan di setiap desa. Formulir keluarga sehat yang tersedia pada aplikasi diinput oleh kader dan tenaga kesehatan yang hasilnya akan dilaporkan pada Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Pada aplikasi ini menampilkan data hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat secara <i>real time</i>. Puskesmas dan Dinas Kesehatan mendapatkan <i>Warning System</i> berdasarkan desa atau kecamatan yang perlu mendapatkan pemantauan. Masyarakat dengan status kesehatan tertentu seperti ibu hamil, balita, penderita Tuberkulosis, penderita hipertensi, keluarga dengan odg mendapatkan notifikasi melalui SMS otomatis yang dikirimkan kepada nomor HP kepala keluarga sebagai pengingat dalam melaksanakan pemeriksaan rutin di Puskesmas maupun di posyandu. Data master aplikasi juga dapat diakses oleh Dinkes & KB dan Politeknik Negeri Madura.
6. Kemitraan	Dalam proses perencanaan, pengembangan aplikasi dan evaluasi sistem Dinkes & KB Kabupaten Sampang bermitra dengan Politeknik Negeri Madura melalui penandatanganan MoU. Tim ahli dari Politeknik Negeri Madura terdiri dari dosen Jurusan kesehatan dan dosen Jurusan Teknik Listrik Industri yang berperan dalam pengembangan inovasi program Jari Kaki Lima V.23 utamanya pada pengembangan dan rancangan aplikasi.
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	Pengembangan selanjutnya dilakukan dengan penambahan konten dan fitur layanan/<i>stakeholder</i> baik di tingkat regional maupun nasional. Misalnya: input hasil pemeriksaan setiap individu, notifikasi hasil pemeriksaan, warning system pada temuan kasus dan pelaporan secara realtime.
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	1. Keberlangsungan implementasi dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati dan Surat Kerja Sama antara Dinas Kesehatan & KB Kabupaten Sampang dengan Politeknik Negeri Madura 2. Peningkatan infrastruktur pendukung dengan menempatkan sistem layanan pada <i>hosting</i> berbeda.
9. Sumber daya yang digunakan	1. Anggaran 2. SDM 3. Infrastruktur 4. Dukungan Masyarakat
10. Analisa Risiko	1. Tidak tersedia database yang dibutuhkan, sehingga berpotensi terjadi <i>troubleshooting</i> pada <i>hosting</i> internal. Mitigasi yang bisa dilakukan antara lain: komunikasi teknis masing-masing OPD dan dilakukan sistem monitoring secara <i>real time</i>. Sehingga, secara tepat bisa diketahui sumber masalah dan bisa dicari solusinya. 2. Potensi data yang diretas oleh <i>hackers</i>. Mitigasi yang bisa dilakukan antara lain penggunaan sistem <i>device</i> Shopos untuk proteksi keamanan data.

(Sumber: FGD Bimtek 3 dan Bimtek 4, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

3.5 Profil Quick Win Smart Society

Program Quick Win **SILAT PSHT (akSI LAYanan keseTaraan Pemberian keSempatan Harapan masyarakat”** pada dimensi *Smart Society* seperti terlihat pada **Tabel 3.5**.

Tabel 3.5 Profil Quick Win Smart Society

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	“ <i>SILAT PSHT</i> ” (akSI LAYanan keseTaraan Pemberian keSempatan Harapan masyarakat)
2. Penjelasan singkat	1. Memberikan kesempatan masyarakat yang berpotensi untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM); 2. Potensi masyarakat belum berkembang maksimal karena berasal dari keluarga tidak mampu; 3. Mengantisipasi terjadinya masyarakat dan/atau anak tidak sekolah karena faktor ekonomi; 4. Memberi kesempatan kepada masyarakat putus sekolah dan/atau tidak sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan dan pengetahuan melalui Program Pendidikan Kesetaraan.
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	1. Implementasi Inovasi sedang berlangsung 2. Evaluasi dan rencana pengembangan lebih lanjut sedang berlangsung
4. Manfaat dari inovasi	1. Membantu masyarakat untuk dapat menuntaskan pendidikannya melalui Pendidikan Kesetaraan 2. Memberikan peluang dan kesempatan bagi masyarakat yang putus sekolah dan tidak melanjutkan serta tidak memiliki ijazah formal untuk menuntaskan pendidikannya melalui Pendidikan Kesetaran 3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Sampang. 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memberikan kesempatan pelayanan Pendidikan dan Pengetahuan
5. Keunikan/kreativitas	IPM di bidang Pendidikan yang masih rendah disebabkan kurang tuntasnya Masyarakat Sampang menyelesaikan Pendidikan Formal. Hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang putus sekolah dan tidak melanjutkan serta tidak memiliki ijazah formal. Dinas Pendidikan mengalami kendala untuk mendapatkan data Masyarakat dengan kondisi tersebut karena tidak memiliki akses data sasaran yang maksimal. Untuk itu dengan adanya inovasi Silat PSHT akan lebih efisien dan efektif dalam melaksanakan Pendataan untuk penuntasan Pendidikan melalui Pendidikan kesetaraan dan kolaborasi dengan stakeholder (Cabang Dinas Pendidikan, Kemenag, Dewan Pendidikan, Korbiddikcam, Pengawas, Penilik dan Lembaga)
6. Kemitraan	Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Cabang Dinas Pendidikan, Kemenag, Dewan Pendidikan, Kecamatan dan Desa untuk melaksanakan Pendataan untuk masyarakat yang putus sekolah dan tidak melanjutkan serta tidak memiliki ijazah formal untuk menuntaskan pendidikannya melalui Pendidikan Kesetaraan

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	1. Membantu Masyarakat untuk mendapatkan Pendidikan sampai tuntas 2. Memperoleh Pendidikan vokasi 3. Membantu dan meningkatkan kemandirian Masyarakat 4. Meningkatkan IPM bidang Pendidikan
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	1. Adanya surat edaran Dinas Pendidikan ke Korbiddikcam, Pengawas, Penilik dan Lembaga untuk memperoleh data masyarakat yang putus sekolah dan tidak melanjutkan serta tidak memiliki ijazah formal untuk menuntaskan pendidikannya melalui Pendidikan Kesetaran 2. Adanya Kerjasama dengan Cabang Dinas Pendidikan, Kemenag dan Dewan Pendidikan untuk memperoleh data masyarakat yang putus sekolah dan tidak melanjutkan serta tidak memiliki ijazah formal untuk menuntaskan pendidikannya melalui Pendidikan Kesetaran 3. Tersedianya bank data masyarakat yang putus sekolah dan tidak melanjutkan serta tidak memiliki ijazah formal 4. Optimalisasi Lembaga Masyarakat/PKBM dalam meningkatkan IPM di bidang Pendidikan 5. Tersedianya dana operasional dan SDM yang kompeten
9. Sumber daya yang digunakan	1. Tersedianya pendidik dan sarana prasarana yang memadai 2. Terjaminnya keberlangsungan Lembaga untuk melaksanakan pembelajaran 3. Tersedianya dana operasional dan SDM yang kompeten
10. Analisa Risiko	1. Masih rendahnya tingkat kesadaran dan motivasi masyarakat akan pentingnya pendidikan 2. Keterbatasan petugas pendataan sehingga ada penduduk di pelosok yang tidak terdata 3. Keterbatasan pendidik dan sarana prasarana pendukung 4. Keterbatasan anggaran

(Sumber: FGD Bimtek 3 dan Bimtek 4, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

3.6 Profil Quick Win *Smart Environment*

Program Quick Win **TRIPLE S (Sekolah Sedekah Sampah)** pada dimensi *Smart Environment* seperti terlihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Profil Quick Win *Smart Environment*

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	TRIPLE S (Sekolah Sedekah Sampah)
2. Penjelasan singkat	1. Persoalan sampah tidak bisa hanya diselesaikan dengan pendekatan teknis-operasional saja. Lebih dari itu, tata kelola sampah perlu pendekatan baru yaitu normatif sekaligus implementatif.

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
	2. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang melihat ajaran Islam sebagai solusi untuk memecahkan persoalan lingkungan hidup, termasuk persoalan sampah. Dalam hal ini, poin-poin kunci di dalam ajaran Islam seperti konsep kebersihan adalah sebagian dari iman, diberikan pemaknaan baru yang relevan dengan isu ini. Dengan demikian, dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan bagi siapapun untuk mulai melakukan apa yang disebut dengan <i>responsible consumption</i> atau konsumsi yang bertanggung jawab. Dalam konteks ini, mengelola sampah melalui skema sedekah sampah adalah bentuk tanggung jawab tersebut. 3. Secara implementatif, konsep dari Triple S merupakan gerakan pengumpulan sampah “layak jual” dari tempat tinggal pelajar, sekolah atau tempat lainnya yang “disedekahkan” BAZNAS melalui sekolah. Hasil dari penjualan sampah yang terkumpul digunakan untuk membantu sesama di lingkungan sekolah.
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	Kode Status dalam siklus manajemen inovasi: 4 Persentase Penyelesaian (progres waktu/pekerjaan): 66,6% 1. Kebutuhan/masalah dalam proses perumusan 2. Ide/konsep inovasi awal dalam proses penulisan/ penggambaran 3. Rencana pembangunan/implementasi dalam pembuatan 4. Inovasi dan komponen pendukungnya dalam pembangunan 5. Implementasi Inovasi sedang berlangsung 6. Evaluasi dan rencana pengembangan lebih lanjut sedang berlangsung Keterangan tambahan status (url):
4. Manfaat dari inovasi	Penerima manfaat: Siswa dan warga sekolah Dampak/keuntungan/manfaat: 1. Melatih kesadaran sejak dini dari perilaku aktif siswa dan warga sekolah dalam mengelola sampah serta lingkungan yang tepat, benar dan bijak 2. Berdirinya gerakan sedekah sumber daya sampah di semua lembaga pendidikan mulai tingkatan SD, SMP, SMA/Sederajat di Kabupaten Sampang. 3. Terbentuknya sumber pendanaan alternatif untuk kegiatan dakwah dan kesejahteraan di lingkungan sekolah. 4. Melahirkan SDM Amil melalui Organisasi Intra Sekolah (OSIS)

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
	5. DINAS PUPR 6. BUMN (PT. PEGADAIAN DAN BNI) 7. FPRB 8. BAZNAS 9. DISKOPINDAG
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	Hasil sampah dijadikan produk olahan seperti paving, pupuk, pupuk cair dan lain-lain. Peluang untuk pengembangan/peningkatan dari sisi produk inovasi, ruang lingkup/jangkauan, replikasi, penyebaran dan lain lain
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	1. Akan dibuatkan regulasi (Peraturan Bupati) 2. Kegiatan ini akan diformulasikan sebagai kegiatan wajib bagi semua lembaga pendidikan di Kabupaten Sampang 3. Upaya pengembangan berikutnya akan di-scale-up hingga pada area publik
9. Sumber Daya yang digunakan	Sumberdaya yang diperlukan dalam perencanaan, pembangunan, implementasi dari inovasi. 1. Pendanaan, CSR dan APBD 2. Tenaga ahli 3. Sarana dan prasarana dalam bentuk lain, yaitu tempat sampah yang representatif 4. Pilihan sumber penyediaan yang ada.
10. Analisa Risiko	1. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kesadaran pentingnya pengelolaan sampah di lingkungan sekolah 2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan

(Sumber: FGD Bimtek 3 dan Bimtek 4, Kabupaten Sampang. Telah diolah kembali)

4. Manajemen Risiko Quick Win

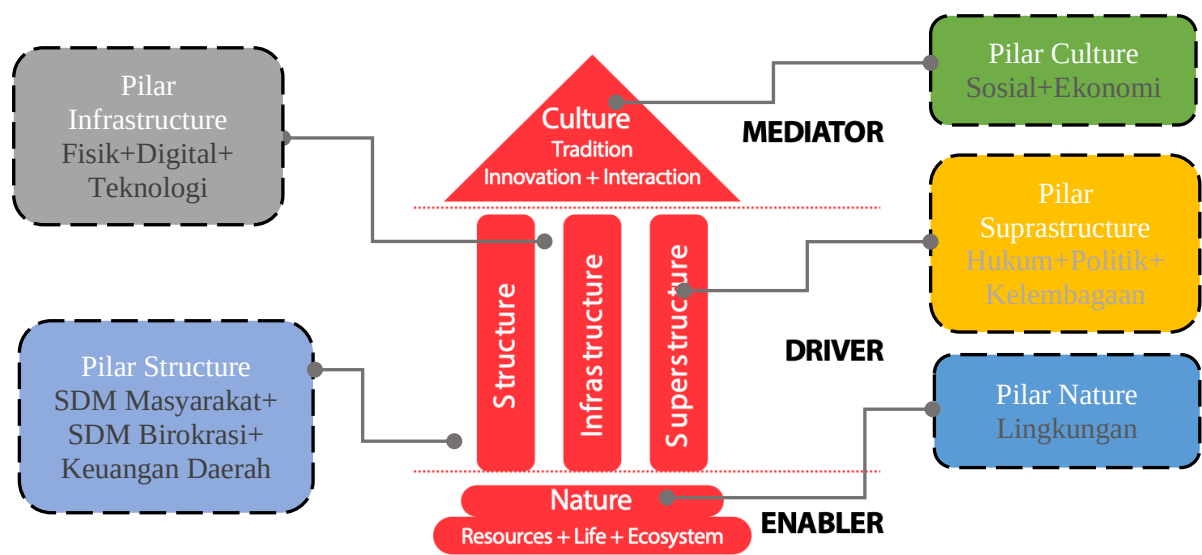
Bagian 4 mendiskusikan Manajemen Risiko untuk setiap program Quick Win pada setiap dimensi Smart City.

Standar Manajemen Risiko menurut ISO31000:2018 (British Standards Institution., 2018) mendefinisikan bahwa risiko sebagai "risk is the effect of uncertainty on objectives". Dalam konteks ini, "risiko" mengacu pada dampak dari ketidakpastian atau ketidakpastian itu sendiri pada pencapaian tujuan. Beberapa poin penting:

1. Risiko adalah dampak (*effect*): Ini menekankan bahwa risiko adalah tentang hasil yang tidak diinginkan atau kerugian yang dapat terjadi. Risiko tidak selalu negatif artinya risiko juga dapat merujuk pada peluang atau hasil positif.
2. Ketidakpastian (*uncertainty*): Risiko muncul karena ketidakpastian. Ketidakpastian adalah kurangnya informasi yang lengkap atau ketidakmampuan untuk meramalkan hasil dengan pasti. Dalam konteks manajemen risiko, penting untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
3. Tujuan (*objectives*): Risiko selalu dikaitkan dengan tujuan atau sasaran tertentu. Risiko ada karena ada upaya untuk mencapai sesuatu. Oleh karena itu, risiko harus dilihat sebagai sesuatu yang mempengaruhi kesuksesan dalam mencapai tujuan tersebut.

Menurut buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City dari Kominfo (Kemkominfo, 2021) Manajemen Risiko adalah langkah-langkah yang melibatkan pengenalan, evaluasi, pengaturan, dan usaha untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima. Dalam hal ini Pemerintah Daerah melakukan Manajemen Risiko, terutama dalam implementasi Quickwins Smart City bertujuan untuk mengurangi, menghindari, atau meminimalkan risiko yang mungkin menghambat kinerjanya dan mencegah pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Tahap pertama dalam Manajemen Risiko adalah dengan mengidentifikasi adanya risiko. Identifikasi risiko Quick Win mengacu kepada Lima pilar identifikasi Risiko seperti terlihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Lima pilar identifikasi Risiko pada Inovasi Quick Win

Selanjutnya pilar-pilar diistilahkan menjadi kategori dan subkategori dalam kertas kerja Manajemen Risiko seperti yang terlihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Kategori dan Subkategori dalam Identifikasi Risiko

Kategori	Subkategori	Deskripsi
Nature	Lingkungan	Lingkungan hidup hayati
Structure	SDM Masyarakat	Kualitas sumber daya manusia di daerah
	SDM Birokrasi	Kualitas dan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah daerah
	Keuangan Daerah	Keuangan yang dapat dikelola atau diatur oleh pemerintah daerah
Infrastructure	Fisik	Infrastruktur yang berfungsi untuk mendorong pada kegiatan sosial, budaya dan ekonomi
	Digital	Infrastruktur yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
	Teknologi	Segala sesuatu yang dapat mempercepat, mempermudah layanan dan prosedur operasi terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras
Suprastructure	Hukum	Hukum positif
	Politik	Kebijakan publik, dan aspek politik lainnya
	Kelembagaan	Organisasi pemerintah daerah dan organisasi yang ada di masyarakat
Culture	Sosial	Tatanan sosial yang ada di masyarakat
	Ekonomi	Aspek perekonomian masyarakat

Setelah mengidentifikasi adanya risiko tahapan selanjutnya adalah melakukan Analisis risiko. Secara mendasar, analisis risiko adalah suatu proses untuk mengevaluasi tingkat risiko yang terkait. Evaluasi ini dilakukan dengan memperhatikan dua faktor, yakni kemungkinan terjadinya risiko dan dampak

yang diakibatkan dari risiko tersebut apabila terjadi. Penilaian risiko kemudian dihitung berdasarkan hasil perkalian antara skor kemungkinan dan skor dampak dari risiko. Dalam kerangka analisis risiko Quick win Smart City, **Tabel 4.2** menilai tingkat kemungkinan terjadinya risiko:

Tabel 4.2 Tingkat Kemungkinan Risiko

Tingkat	Kemungkinan	Deskripsi
1	Kecil	Kemungkinan terjadi 1-2 kali dalam satu periode
2	Sedang	Kemungkinan terjadi 3-4 kali dalam satu periode
3	Besar	Kemungkinan terjadi =>5 kali dalam satu periode
Keterangan: 1 Periode = 1 tahun		

Faktor kedua adalah tingkat dampak yang ditimbulkan jika sebuah risiko terjadi. Tingkat dampak terjadinya risiko dalam diklasifikasikan pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Tingkat Dampak Risiko

Tingkat	Dampak	Deskripsi
1	Kecil	Dampak baik dari segi finansial maupun non-finansial tidak begitu signifikan, tidak menimbulkan sejumlah besar masalah atau kerusakan.
2	Sedang	Dampak baik dari segi finansial maupun non-finansial besar dan menimbulkan sejumlah besar masalah atau kerusakan sehingga perlu mendapatkan tindakan lebih lanjut
3	Besar	Dampak baik dari segi finansial maupun non-finansial sangat buruk, serius, dan kerusakan yang tidak diinginkan

Setelah kedua faktor ditentukan barulah tingkat risiko dapat dihitung dengan rumus berikut:

Tingkat Risiko = Tingkat Kemungkinan Risiko x Tingkat Dampak Risiko

Secara detail tingkat risiko diklasifikasikan pada Tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4 Tingkat Risiko

Tingkat	Deskripsi	Aksi
=>7	Tinggi	Harus ada tindakan perbaikan dalam maksimum 3 bulan ke depan
4-6	Sedang	Harus ada tindakan perbaikan dalam maksimum 6 bulan ke depan
1-3	Rendah	Memerlukan perhatian

Matriks tingkat risiko dikaitkan dengan tingkat kemungkinan dan tingkat dampak dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5 Matriks Tingkat Risiko
Tingkat Kemungkinan

Tingkat Dampak	Tingkat Kemungkinan		
	1	2	3
	1	Rendah	Rendah
	2	Rendah	Sedang
	3	Rendah	Sedang
			Tinggi

Subbab 4.1-4.6 menguraikan secara detail Manajemen Risiko dari setiap Inovasi Daerah Quick Win setiap dimensi yang merupakan hasil isian kertas kerja Manajemen Risiko oleh (Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023f) saat kegiatan FGD pada Bimtek 3 tanggal 4-5 September 2023 dan dipertajam kembali pada Bimtek 4 tanggal 11-12 Oktober 2023.

4.1 Manajemen Risiko Quick Win *Smart Governance*

Subbab 4.1. menguraikan Manajemen Risiko Program Quick Win **Salempang (Satu Akses Layanan Pemerintah Kabupaten Sampang)** pada Dimensi Smart Governance seperti terlihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Manajemen Risiko Quick Win *Smart Governance*

Kota/Kabupaten	Sampang
Dimensi	Smart Governance
Program Quick Win	Salempang (Satu Akses Layanan Pemerintahan Kabupaten Sampang)
Keterangan	Sebuah aplikasi yang menawarkan berbagai layanan, baik layanan administrasi pemerintah maupun layanan publik dalam dalam satu platform atau satu akses layanan yang memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai hal tanpa harus keluar dari aplikasi tersebut
Manfaat	Kemudahan mengakses layanan dan interoperabilitas mencakup: 1. Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses, berinteraksi, dan melakukan transaksi dengan mudah, 2. Meningkatkan efisiensi serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari 3. Meningkatkan kualitas dan pemanfaatan data pemerintah.

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
1	Structure	SDM	Kualitas literasi teknologi masyarakat (gagap teknologi)	Layanan melalui aplikasi kurang dimanfaatkan oleh masyarakat	Tidak optimalnya sosialisasi yang dilakukan sehingga layanan tidak dapat dikenal masyarakat	Mendorong masyarakat untuk mengenal teknologi	2	2	4	Dinas Kominfo dan perangkat daerah terkait	6 bulan	SDM untuk Literasi digital dan pengembangan aplikasi dan Anggaran untuk mendukung pengembangan aplikasi	Mengembangkan Aplikasi yang user friendly	Melakukan Literasi Digital
2		SDM Pemerintahan (Birokrasi)	Kualitas dan kapasitas perangkat daerah masih gagap teknologi	Akselerasi implementasi satu akses layanan tidak tercapai tepat waktu	Sikap kurang kooperatif dalam mengintegrasikan layanan mereka kedalam satu akses yang terpadu	Mendorong perangkat daerah untuk ahli dalam menerapkan teknologi dalam sebuah layanan/aplikasi	1	2	2		6 bulan	SDM dari tenaga yang ahli di bidang teknologi dan anggaran pelatihan	Pemerintah Daerah melakukan pelatihan mengenai Digital Transformation	Rekrutmen Outsourcing
3		Keuangan Daerah	Jumlah anggaran dan aset yang dikelola pemerintah daerah kurang untuk mendan	Terkendalanya keberlangsungan layanan	Dukungan anggaran yang belum sesuai dengan kebutuhan	Perangkat daerah lebih cermat dalam melakukan Perencanaan Anggaran	2	3	6		12 bulan	SDM dari perangkat daerah dan anggaran	Penyediaan anggaran khusus TIK	Pembuatan SOP penggunaan anggaran untuk pengembangan aplikasi

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
			ai pengem bangan aplikasi											
4	Infrastru ktur (Aplikasi)	Hosting	Limited Environ ment Hosting Capacit y	Layanan tidak dapat diakses	Terbatasnya ketersediaan resources di PDN	Peningkatan environment dan kapabilitas Disaster Recovery Center (DRC)	1	2	2		6 bulan	SDM, dan anggaran pengadaan alat TIK	- Memperbai ki manajeme n perencanaan aplikasi;	Melakukan audit TIK;
5			Gangu an Environ ment Hosting		Force Majure		1	2	2		6 bulan	SDM, dan anggaran pengadaan alat TIK	Menyediak an DRC	
6		Keamanan Teknologi	Seranga n hacker		Celah Kerentanan (vulnerability)		1	3	3		6 bulan	SDM, anggaran maintenance	Menyediak an DRC	Melakukan Audit Keamanan Informasi
7	Culture	Sosial	Budaya masyar akat yang enggan untuk menggu nakan fasilitas layanan pada aplikasi	Fasilitas pada layanan aplikasi yang percuma karena kurang dimanfaatk an oleh masyaraka t	Masyarakat yang memiliki latar pendidikan rendah	Membuat masyarakat lebih terbuka dengan perubahan zaman yang saat ini lebih banyak menggunaka n teknologi	2	3	6		3 bulan	SDM dan angggaran	Mengemba ngkan Aplikasi yang user friendly	Sosialisasi program aplikasi sebagai bentuk pendekatan kepada masyarakat

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
						digital								
8		Ekonomi	Terbatasnya kemampuan akses terhadap layanan online		Masyarakat berpenghasilan rendah sehingga tidak mampu membeli barang elektronik	1. Pengembangan akses internet gratis pada area publik; 2. Penyediaan perangkat untuk mengakses layanan online	2	2	4		6 bulan	SDM dan anggaran	Menyediakan perangkat untuk mengakses layanan online	Kemitraan dengan penyedia internet

4.2 Manajemen Risiko Quick Win Smart Branding

Subbab 4.2 menguraikan Manajemen Risiko Program Quick Win **SAMPANG GEMILANG: Alun-alun Trunojoyo Park** pada Dimensi Smart Branding seperti terlihat pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Manajemen Risiko Quick Win Smart Branding

Kota/Kabupaten	Sampang
Dimensi	Smart Branding
Program Quick Win	SAMPANG GEMILANG: Alun-alun Trunojoyo Park
Keterangan	Merupakan tujuan akhir dari konsep pengembangan pariwisata sebagai daya ungkit ekonomi masyarakat yang berfokus pada pengembangan alun alun trunojoyo sebagai destinasi baru pariwisata dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan dengan berkonsep mengedepankan wajah kota. Inovasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan wisatawan dalam maupun luar daerah Kabupaten Sampang. Inovasi ini juga bertujuan untuk memberikan fasilitasi dan mewadahi para pelaku ekonomi kreatif yang menjadi binaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata. Dalam inovasi ini, komunitas sub sektor ekonomi kreatif akan bergiliran mengisi seni pertunjukan di panggung yang telah disediakan selama satu tahun. Program ini berkolaborasi dengan Perangkat Daerah lainnya di Kabupaten Sampang, Dinas Lingkungan Hidup dan Permukiman (DLH PERKIM) terkait dengan pertamanan dan kebersihan kawasan ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) terkait untuk fasilitas fisik seperti jalan, gorong-gorong, saluran air kotor, pengadaan bangunan fasilitas lainnya
Manfaat	1. Komunitas ekonomi kreatif di Kab. Sampang menjadi terwadahi kegiatannya. 2. Keuntungan ekonomi bagi warga yang tinggal di sekitar Alun-alun Trunojoyo Park 3. Mengenalkan potensi wisata Kab. Sampang, dan dengan adanya kunjungan wisatawan ke Kab. Sampang akan menimbulkan <i>multiplier effect</i> , salah satunya pendapatan bagi daerah.

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
1	Nature	Lingkungan	Banjir di sepanjang Jl. Panglima Sudirman, Jl. Wachid Hasyim dan Jl. Wijaya Kusuma ketika hujan lebat.	Munculnya genangan air kawasan Alun-Alun Trunojoyo Park	Hujan deras, dan tidak didukung oleh saluran gorong-gorong air yang bagus/layak .	Membuat danau kecil buatan yang dapat menjadi daerah resapan air sekaligus objek wisata dan olahraga	2	3	6	DPUPR, DLH Perkim, Disporabudpar	4 x setahun	Anggaran Pemkab untuk penyediaan /pembersihan gorong-gorong/saluran, SDM yang melakukan kegiatan ini.	1. Memperbaiki saluran sehingga berfungsi dengan optimal. 2. Melakukan pembersihan saluran gorong-gorong dengan rutin sehingga aliran air bisa lebih lancar/tidak ada sampah yang tersangkut.	N/A

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
2	Structure	SDM (Komunitas ekonomi kreatif)	Kesenjangan antara komunitas ekonomi kreatif yang akan dilibatkan dan tidak dilibatkan	Sentimen terhadap kebijakan yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten	Fasilitas dan anggaran dari Pemerintah Kota yang terbatas sehingga tidak bisa mewadahi seluruh komunitas ekonomi kreatif.	Membentuk komunitas swadaya masyarakat	2	2	4	Disporabudpar	1-2 kali dalam satu tahun	Anggaran Pemkab, komunitas ekonomi kreatif, personel Disporabudpar.	Pendataan dan pembuatan jadwal komunitas ekonomi kreatif yang akan mengisi pertunjukan	Konsolidasi dengan komunitas ekonomi kreatif.
3			Komunitas ekonomi kreatif yang terlibat potensi mangkir/ tidak hadir untuk mengisi performance.	Pertunjukan tidak bisa diselenggarakan.	Sakit, atau bepergian keluar kota.	Memberikan peluang insentif dan penyediaan penjemputan transportasi	2	2	4	Disporabudpar	1-2 kali dalam satu tahun	Anggaran Pemkab, komunitas ekonomi kreatif, personel Disporabudpar.	Membuat daftar pelaku komunitas ekonomi kreatif cadangan, sehingga ketika seniman yang bersangkutan berhalangan untuk mengisi pertunjukan, sudah ada yang bisa menggantikan.	Membuat Perjanjian Kerjasama antara Disporabudpar dengan komunitas ekonomi kreatif yang terlibat.

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
4		SDM Dinas	Komitmen terhadap program	Keberlanjutan program	Mutasi	Membuat program pemberian penghargaan bagi program yang secara komitmen dilaksanakan	2	2	4	Disporabudpar	1-2 kali dalam satu tahun	Anggaran Pemkab, komunitas ekonomi kreatif, personel Disporabudpar.	N/A	1. Penguatan kelembagaan komunitas ekonomi kreatif. 2. Pembuatan SOP/regulasi sebagai kebijakan yang jelas, sehingga siapapun pejabat yang bertanggung jawab terhadap program ini, akan bisa melakukannya.
5		Keuangan Daerah	Ketersediaan anggaran (adanya pengurangan atau realokasi ke program	Inovasi tidak berlanjut, atau berjalan tidak maksimal.	Tidak lagi menjadi prioritas kebijakan.	Mengoptimalkan program yang dapat meningkatkan PAD	2	3	6	Disporabudpar	1-2 kali dalam satu tahun	Anggaran dari Disporabudpar, CSR, UMKM	Kemitraan dengan perusahaan swasta untuk CSR, UMKM	Pembuatan regulasi sebagai payung kegiatan ini.

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
			lainnya).											
6	Infrastructure	Infrastruktur Fisik	Trotoar yang beralih fungsi menjadi panggung dan berjualan, bukan lagi tempat untuk pejalan kaki.	Kemacetan lalu lintas, atau membahayakan pengguna trotoar karena fasilitas untuk jalan kaki digunakan sebagai panggung dan berjualan, sehingga pedestrian jalan kaki di badan jalan raya.	Kebijakan jadwal penggunaan Panggung dan lokasi pertunjukan yang memanfaatkan sepanjang trotoar di Jl. Wijaya Kusuma	Menyelenggarakan secara rutin kegiatan berjualan dan relokasi yang sesuai ekspektasi pedagang	3	2	6	Disporabudpar	5 kali dalam satu tahun	Anggaran Pemkab, personel Disporabudpar, Satpol PP	1. Penyediaan parkir khusus di luar kawasan yang digunakan untuk stage/performance ini. 2. Pemilihan lokasi panggung di tempat yang risiko paling rendah terhadap pejalan kaki.	Pemberlakukan peraturan untuk penjadwalan penggunaan panggung dan pelarangan parkir/berjualan sekitar panggung dan trotoar.

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
7			Pengunjung parkir di sembarang tempat (termasuk trotoar dan badan jalan raya)	Kemacetan lalu lintas, atau membahayakan pengguna trotoar karena fasilitas untuk jalan kaki digunakan sebagai panggung dan berjualan, sehingga pedestrian jalan kaki di badan jalan raya.	Tidak tersedia lahan parkir khusus, atau pengunjung enggan untuk jalan kaki dari lokasi parkir ke kawasan performance ini.	Membuat lahan parkir yang representatif nyaman dan aman	3	2	6	Disporabudpar	5 kali dalam satu tahun	Anggaran Pemkab, personel Disporabudpar, Dishub	Penyediaan parkir khusus di luar kawasan ini.	Pemberlakuan peraturan untuk penutupan jalan raya atau pengaturan lalu lintas ketika CFD/pertunjukan sedang berlangsung dan Penegakan peraturan pelarangan parkir serta berjualan di trotoar kawasan alun-alun Trunojoyo Park

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
8	Suprastructure	Regulasi dan Kelembagaan	Kecepatan dalam merespon aduan beragam antar OPD/instans vertikal lainnya	1. Masalah tidak segera ditangani 2. Masyarakat kecewa terhadap pengaturan tata letak penjual dan jadwal penggunaan panggung	(1). Variasi komitmen dari Kepala OPD/instansi vertikal lainnya. (2). Kebijakan/SOP masing-masing lembaga berbeda dalam penanganan keluhan (3). Petugas/operator terlambat untuk menerima pengaduan	Membuat pusat aduan 24/7 dan pusat koordinasi	3	3	9	Disporabudpar, DLH	5 kali dalam satu tahun	Anggaran Pemkab, personel Disporabudpar, DLH	SDM Disporabudpar, DLH	Pembuatan SOP/regulasi sebagai kebijakan yang jelas dan Pelatihan SDM
9	Culture	Sosial	Kawasan Alun-alun Trunojoyo Park terlalu ramai dengan jumlah wisata dan penjual	Kerusakan kawasan Alun-alun Trunojoyo Park, atau kawasan Alun-alun Trunojoyo Park menjadi kotor karena sampah	Pengunjung dan Penjual yang tidak bertanggung jawab. Seperti membuang sampah atau mengumpulkan sampah sekitar berjualan, atau	Penerapan sanksi denda ketika terbukti buang sampah sembarangan	3	3	9	Disporabudpar, DLH	5 kali dalam satu tahun	Anggaran Pemkab, personel Disporabudpar, DLH	Penyediaan panggung dan tempat berjualan	Regulasi dan layout parkir, panggung dan tempat berjualan

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
				yang dibuang di sembarang tempat.	vandalisme bangunan di kawasan Alun-alun Trunojoyo Park									

4.3 Manajemen Risiko Quick Win Smart Economy

Subbab 4.3 menguraikan Manajemen Risiko Program Quick Win **Budidaya Tanaman Sehat (BTS)** pada Dimensi Smart Economy seperti terlihat pada Tabel 4. 8.

Tabel 4. 8 Manajemen Risiko Quick Win Smart Economy

Kota/Kabupaten	Sampang
Dimensi	Smart Economy
Program Quick Win	Budidaya Tanaman Sehat (BTS)
Keterangan	Budidaya Tanaman Sehat merupakan metode budidaya yang diadopsi dari salah satu prinsip Pengendalian Hama Terpadu, dimana dalam membudidayakan tanaman yang memadukan semua teknologi budidaya berbasis ramah lingkungan, sehingga dihasilkan tanaman yang sehat, lingkungan yang lestari dan produk yang aman dikonsumsi. Berawal dari produk aman konsumsi ini maka akan menjadi makanan yang sehat dan mendukung pola hidup sehat generasi milenial kita. Budidaya Tanaman Sehat dimaksudkan untuk mengoptimalkan ruang pada lingkungan di beberapa lembaga pendidikan dan instansi perkantoran dengan memanfaatkan peran seluruh komponen agroekosistem seperti musuh alami dan mikroorganisme menguntungkan yang berasosiasi dengan tanaman, sehingga kesehatan tanaman, tanah dan lingkungan akan semakin meningkat. Hal tersebut diharapkan secara signifikan akan semakin mengurangi penggunaan

	bahan-bahan kimia sintetis yang dapat mencemari lingkungan dan meninggalkan residu pada produk hasil pertanian. Selain itu secara estetis dapat menghiasi ruang pada lingkungan pendidikan dan instansi perkantoran dengan hijauan Budidaya Tanaman Sehat. Adapun prinsip Budidaya Tanaman Sehat, meliputi: 1. Perbaikan kesuburan tanah. Perbaikan kesuburan tanah dapat dilakukan dengan penggunaan pupuk organik dan kapur pertanian 2. Pengolahan tanah yang tepat 3. Penggunaan Bibit Varietas Unggul 4. Penanaman Refugia (mikrohabitat buatan yang ditanam dalam lahan pertanian sebagai salah satu upaya konservasi musuh alami terutama parasitoid dan predator di pertanaman). 5. Pengendalian Hama dan Penyakit
Manfaat	Tanaman yang sehat, lingkungan lestari, produknya aman dikonsumsi dengan keterlibatan semua pihak

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/ Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
1	Nature	Lingkungan	Banjir	Tanaman budidaya menjadi rusak/mati, bibit tanaman hilang terbawa banjir	Kurangnya antispasi perlindungan tanaman budidaya akibat bencana banjir	Pembuatan pagar pengaman tanaman, rak-rak tanaman dan green house	1	3	3	DPUPR, BPBD, DLH Perkim, Disperta KP	1 tahun	Anggaran Pemkab untuk pembuatan pagar pengaman tanaman, rak-rak tanaman dan green house	1. Mitigasi bencana banjir 2. Adanya early warning dari Pemerintah akan adanya bencana banjir sehingga masyarakat dapat	1. Adanya SOP Penanganan Bencana Banjir 2. Koordinasi penanganan bencana pasca banjir dengan BPBD dan DLH

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/ Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
													mengantipasi risiko bencana	
		SDM Pelaksana/ Pemerintah	Terbatasnya SDM Pemerintah sebagai penyuluh pertanian	Kurang intensif dalam pemberian penyuluhan dan pengawasan budidaya tanaman sehat kepada petani/ siswa	Adanya mutasi pegawai, jumlah penyuluh pertanian kurang memadai	Rekrutmen tenaga penyuluh pertanian dan tim pendamping / fasilitator budidaya tanaman sehat	2	2	4	Disperta KP, BKDSDM, BPPKAD	1 tahun	Anggaran untuk rekrutmen tenaga ahli pertanian, penyuluh pertanian dan tim fasilitator	1. Adanya rekrutmen ASN, P3K, Narasumber praktisi pertanian, tenaga penyuluh dan tim fasilitator	Koordinasi dengan BKDSDM dan Dinas Pertanian
2	Struktur	SDM Penerima Manfaat: Petani/ Gapoktan/ Siswa pelaku budidaya	Kurangnya pengetahuan budidaya tanaman sehat	Produktivitas hasil tanaman budidaya sehat kurang optimal	Kurangnya pelatihan dan pembinaan terhadap kelompok budidaya tanaman sehat	Transfer knowledge kepada kader petani/ gapoktan dan siswa	2	2	4	Dispert KP, Kepala Lembaga Pendidikan, Ketua Gapoktan	4 kali dalam setahun	Adanya sosialisasi dan Bimbingan Teknis Inovasi Budidaya Tanaman Sehat	1. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya petani / Gapoktan, lembaga pendidikan pentingnya budidaya tanaman sehat. 2. Pelaksanaa	Adanya kader / pelopon petani dan siswa dalam upaya mengembangkan budidaya tananamam

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/ Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
3													n Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Budidaya Tanaman Sehat	
			Tidak rutin dalam penyiraman dan perawatan tanaman	Tanaman budidaya tidak berkembang dengan baik / mati	Kondisi kemarau rawan air, kelangkaan pupuk organik	Pemberian batuan air dan pupuk oleh Pemerintah	1	2	2	Dispert KP, Kepala Lembaga Pendidikan, Ketua Gapoktan	secara berkala dalam 1 tahun	Petani yang terlibat dalam Gakpoktan, siswa-siswi lembaga pendidikan	1. Menugaskan petani / siswa untuk menyiram tanaman secara terjadwal 2. Pemberian pupuk organik sesuai jenis dan kadarnya	Adanya peran serta petani dan siswa dalam upaya memelihara dan mengembangkan budidaya tanaman dengan menyiram, memupuk dan pencegahan gangguan hama

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/ Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
5		Keuangan Daerah	Terbatasnya anggaran akibat adanya refocusing anggaran	Berkurangnya pemberian bantuan benih, penyuluhan dan pengawasan	Ketersediaan dana dinas dalam untuk memataui dan monitoring pelaksanaan	Adanya upaya pembuatan dan pengembangan varietas bibit budidaya tanaman sehat	2	2	4	DLH Perkim, Bappeda Litbang dan BPPKAD	1 tahun anggaran	Ketersediaan dana untuk pelaksanaan inovasi Badidaya Tanaman Sehat	1. Mengganggu pada program dan kegiatan Dinas Ppertanian dan Ketahanan Pangan 2. Alternatif pembiayaan untuk mendukung Budidaya Tanaman Sehat misalnya dari CSR dari Badan Usaha	Adanya peran serta Gapoktan dan siswa dalam upaya memelihara dan mengembangkan Budidaya Tanaman Sehat

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/ Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
6	Infrastruktur	Ketersediaan Infrastruktur fisik	Infrastruktur jalan menuju lokus di perdesaan kurang memadai, kurangnya ketersediaan air bersih	Kesulitan menuju lokasi Budidaya Tanaman Sehat, akibat intensitas penyiraman kurang menyebabkan pertumbuhan tanaman budidaya tidak optimal/mati	Kondisi jalan ke lokasi lokus tidak memadai sempit dan licin di musim penghujan, Ketersediaan air bersih kurang disaat musim kemarau panjang	Keterlibatan peran Pemerintah Desa dari Dana DD dan ADD	2	2	4	Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Bappeda Litbang, DPMD	1 tahun anggaran	Adanya peningkatan jalan akses menuju lokasi Budidaya Tanamam Sehat dan ketersediaan air	1. Mengganggu rkan peningkatan jalan akses menuju lokasi Budidaya Tanaman Sehat 2. Mengganggu rkan sumur bor atau irigasi untuk pengairan tanaman 3. Menggunakan dana perbaikan melalui anggaran desa : DD / ADD di desa yang menjadi lokus Budidaya Tanaman Sehat	Koordinasi dengan OPD terkait Dinas PUPR, BPPKAD, Bappeda Litbang, DPMD

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/ Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
7			Kurangnya ketersediaan bibit unggul, keanekaragaman varietas, penyediaan greenhouse, rak tanaman, peralatan pengolahan pupuk organik	Perlindungan tanaman budidaya rawan terhadap serangan hama, produktivitas hasil pertanian berkurang	Mudah diserang hama dan rentan terhadap penyakit tanaman,	Dengan dibuatnya greenhouse proteksi serangan hama dan penyakit dapat direduksi	2	2	4	Disperta KP, Gapoktan	1 tahun	Adanya peran serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk membantu ketersediaan bibit unggul, keanekaragaman varietas, penyediaan greenhouse, rak tanaman, peralatan pengolahan pupuk organik	1. Mengganggu ketersediaan bibit unggul, keanekaragaman varietas, penyediaan greenhouse, rak tanaman, peralatan pengolahan pupuk organik 2. Melibatkan peran serta Penyuluh Pertanian untuk membantu penanganan masalah di lapangan	Adanya koordinasi dengan Penyuluh Pertanian Disperta KP

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/ Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
8	Suprast ruktur	Regulasi	Belum optimalnya regulasi inovasi Budidaya Tanaman Sehat kepada Lembaga Pendidikan dan Gapoktan	Penerapan regulasi inovasi Budidaya Tanaman Sehat masih terbatas pada Lembaga Pendidikan Menengah Atas (MAN, SMK), sebagian Gapoktan	Masih terbatasnya anggaran, kelengkapan infrastruktur dan petugas penyuluh	Adanya regulasi pengembangan Budidaya Tanaman Sehat ke lembaga pendidikan lainnya seperti pondok pesantren, RT, RW dan masyarakat, di Kabupaten Sampang	1	1	1	Disperta KP	2 kali dalam setahun	Adanya sosialisasi dan pelatihan Budidaya Tanaman Sehat	Terlaksanya inovasi Budidaya Tanaman Sehat dengan baik dan berhasil guna	Adanya SOP Budidaya Tanaman Sehat
9		Kelembagaan	Belum optimalnya kelembagaan inovasi Budidaya Tanaman Sehat kepada Lembaga Pendidikan dan Gapoktan	Penerapan inovasi Budidaya Tanaman Sehat masih terbatas pada Lembaga Pendidikan Menengah Atas (MAN, SMK), sebagian Gapoktan	Masih terbatasnya anggaran, kelengkapan infrastruktur dan petugas penyuluh	Adanya pengembangan kelembagaan Budidaya Tanaman Sehat ke lembaga pendidikan lainnya seperti pondok pesantren, RT, RW dan masyarakat, di	1	1	1	Disperta KP	2 kali dalam setahun	Adanya sosialisasi dan pelatihan Budidaya Tanaman Sehat	Terlaksanya inovasi Budidaya Tanaman Sehat dengan baik dan berhasil guna	Adanya SOP Budidaya Tanaman Sehat

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/ Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
						Kabupaten Sampang								
10	Kultur	Sosial	Masyarakat beranggapan Budidaya Tanaman Sehat masih sulit diterapkan karena faktor lahan, skill dan biaya	Budidaya Tanaman Sehat hanya diterapkan oleh praktisi pertanian / Gapoktan	Minimnya keahlian budidaya pertanian dan ketersediaan infrastruktur	Intensifikasi sosialisasi dan bimtek Budidaya Tanaman Sehat	2	2	4	Disperta KP	3 kali dalam setahun	Adanya sosialisasi dan pelatihan Budidaya Tanaman Sehat	Terlaksananya inovasi Budidaya Tanaman Sehat dengan baik dan berhasil guna	Adanya SOP Budidaya Tanaman Sehat
11		Ekonomi	Kesulitan dalam Pemasaran dan nilai jual hasil Budidaya Tanaman Sehat	Tingkat penjualan rendah dapat mengakibatkan kerugian	Daya beli masyarakat menurun	Adanya upaya perluasan pangsa pasar dengan melibatkan OPD BPPKAD,	2	2	4	Disperta KP, BPPKAD, Dis kopindag, dan DPMPTSP	3 kali dalam setahun	Adanya kegiatan Pasar Murah, Sampang Inverment Week, Event Pameran Pembanguna	1. Mengadakan kegiatan bazar / pameran hasil produksi pertanian 2. Memberi	Adanya kerjasama dengan UMKM, Pasar Tradisional , pelaku kegiatan Bazar /

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
						Diskopindag dan DPMPTSP						n untuk peningkatan pangsa pasar penjualan hasil produk Budidaya Tanaman Sehat	peluang pelaku bisnis untuk memasarkan produk hasil Budidaya Tanaman Sehat	Pemeran hasil produksi untuk meningkatkan pangsa pasar penjualan

4.4 Manajemen Risiko Quick Win Smart Living

Subbab 4.4 menguraikan Manajemen Risiko Program Quick Win **JARI KAKI LIMA (Jaring Risiko berbasis Aplikasi Kesehatan Terintegrasi dengan Melibatkan Masyarakat)** pada Dimensi Smart Living seperti terlihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Manajemen Risiko Quick Win Smart Living

Kota/Kabupaten	Sampang
Dimensi	Smart Living
Program Quick Win	JARI KAKI LIMA (Jaring Risiko berbasis Aplikasi Kesehatan Terintegrasi dengan Melibatkan Masyarakat)
Keterangan	Program JARI KAKI LIMA merupakan inovasi program yang dirancang untuk melaksanakan pendataan kesehatan keluarga pada 168 desa di kabupaten Sampang. Pendataan Kesehatan Masyarakat dilakukan secara Komprehensif melalui Active Case Finding & Active Case Holding Kesehatan Keluarga di Kabupaten Sampang. Pendataan dilaksanakan mengacu pada Indikator Keluarga Sehat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Inovasi ini berangkat dari permasalahan pendataan status kesehatan keluarga yang belum terlaksana dengan optimal sehingga berdampak pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Inovasi program JARI KAKI LIMA yang diusulkan meliputi kegiatan koordinasi antara pengusul dan mitra dalam menentukan target capaian dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Dinas Kesehatan bersama dengan pengusul memberikan pendampingan pada kader dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam program JARI KAKI LIMA agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan optimal. Pengusul dan mitra mengkoordinir terlaksananya pendataan dan pendampingan secara komprehensif kesehatan masyarakat berdasarkan 12 Indikator Keluarga Sehat (IKS).
Manfaat	1. Memberikan arah yang terukur dan sistematis sebagai upaya meningkatkan kesehatan keluarga berdasarkan Indeks Keluarga Sehat (IKS) 2. Terlaksananya perencanaan, penganggaran, penyelenggaraan, pemantauan,dan evaluasi program deteksi dini resiko penyakit pada masyarakat berdasarkan Indeks Keluarga Sehat di Kabupaten Sampang dapat lebih optimal dengan dibuatnya manajemen sistem informasi “JARI KAKI LIMA”. 3. Membantu mitra untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian, yang berdampak pada peningkatan kualitas SDM serta dapat meningkatkan jumlah cakupan & mencapai Kabupaten Sampang Sehat melalui pendekatan keluarga

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
1	Nature	Lingkungan	Banjir	terjadinya kerusakan pada server atau sistem yang disebabkan karena banjir	Rusaknya jaringan kabel/fiber optic internet	Pembaharuan instalasi jaringan serat optik	2	3	6	Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang	3-4 kali dalam satu tahun	Anggaran untuk maintenance jaringan; SDM yang bertanggung jawab di sistem jaringan	1. Pembangunan kanal khusus untuk mencegah terjadinya banjir 2. Perbaikan dan pembersihan gorong-gorong dengan teratur, terutama di musim hujan.	Regulasi tentang mitigasi bencana, terutama bencana banjir
2	Structure	SDM (Birokrasi)	SDM dengan bidang IT kurang memadai	1. Pembangunan sistem dan aplikasi tidak terselesaikan tepat waktu 2. Operasional sistem dan pengembangan	Adanya mutasi pegawai	Membuat pelatihan bidang TI	1	3	3	Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang	3-4 kali dalam satu tahun	Anggaran untuk pelatihan bagi SDM agar skill sesuai dengan yang dibutuhkan	Pelatihan reguler untuk SDM yang bertanggung jawab dalam pengembangan sistem / aplikasi Jari Kaki Lima	1. Surat Keputusan agar SDM yang menjadi bagian dari program ini tidak dimutasi (untuk PNS). 2. Penambahan SDM tenaga kontrak dengan
3			SDM pengelola program dan IT kurang		Proses rekrutmen atau penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan	Penambahan jumlah personil dan pemberian beasiswa untuk peningkatan kompetensi	2	3	6		1-2 kali dalam setahun			

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
				angan program tidak terlaksana dengan maksimal	atau skill yang dimiliki									skill / kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan sistem.
4		SDM (Masyarakat)	Minimnya informasi dan pengetahuan menyebabkan kader kurang maksimal dalam menggunakan aplikasi	Informasi tidak tersampaikan dengan maksimal	Tidak semua kader kesehatan di daerah memahami dengan baik tentang cara menggunakan aplikasi.	Mengadakan pusat pelatihan yang diselenggarakan oleh diskominfo bagi dinas-dinas pendukung lainnya	1	2	2	Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang	1-2 kali dalam setahun	Anggaran untuk sosialisasi program pada kader kesehatan dan tenaga kesehatan di setiap desa di Kabupaten Sampang	Pembuatan sistem yang sederhana, mudah dipahami dan mudah digunakan oleh kader kesehatan di desa maupun bagi tenaga kesehatan di daerah.	Bekerjasama dengan institusi pendidikan (dosen dan mahasiswa) dalam kegiatan pendampingan pendataan dan penggunaan aplikasi Jari Kaki Lima kepada kader kesehatan dan tenaga kesehatan di daerah.

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
5	Infrastruc ture	Infrastruktur Teknologi	Server/wifi mati	Listrik/jaringan mati	Jaringan kabel/fiber optik rusak/mati karena hujan atau banjir.	Pembaharuan instalasi jaringan serat optik	2	3	6	Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang, PLN, provider internet	3-4 kali dalam satu tahun	SDM dari Dinkes, PLN, dan provider internet	1. Penyediaan genset untukantisipasi listrik mati saat kegiatan pengembangan aplikasi. 2. Koordinasi dengan provider internet untuk penyediaan jaringan yang stabil. 3. Penyediaan modem untuk wifi, untukantisipasi jaringan internet mati sehingga server tidak mati. 4. Fasilitas internet sampai ke pelosok desa dalam	

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
													mengakomodir kader menginput data kesehatan masyarakat	
6		Infrastruktur Aplikasi	Server penuh	Sistem macet	Kapasitas server kurang besar	Pembangunan data center	1	3	3	Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang	1-2 kali dalam setahun	Anggaran untuk server	Penyediaan server yang besar	
7			Sistem/server data diretas	Sistem tidak berfungsi	Sistem program tidak lemah	Pembangunan data center	2	3	6	Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang	1-2 kali dalam setahun	Anggaran untuk penyediaan security program.	Penggunaan sistem keamanan Shopos	
8	Suprastrucure	Politik	Pergantian kepala daerah	Perubahan kebijakan terkait SDM kontrak	Pergantian prioritas kebijakan	Kebijakan baruyang mendukung SDM kontrak	1	3	3	Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Sampang	1-2 kali dalam setahun	SDM Dinkes (PNS)	diterbitkannya peraturan bupati tentang aplikasi Jari Kaki Lima 2023	Pelatihan dan peningkatan kapasitas reguler untuk SDM PNS

4.5 Manajemen Risiko Quick Win *Smart Society*

Subab 4.5 menguraikan Manajemen Risiko Program Quick Win **SILAT PSHT (akSI LAYanan keseTaraan Pemberian keSempatan Harapan masyarakat)** pada Dimensi *Smart Society* seperti terlihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10 Manajemen Risiko Quick Win *Smart Society*

Kota/Kabupaten	Sampang
Dimensi	Smart Society
Program Quick Win	SILAT PSHT (akSI LAYanan keseTaraan Pemberian keSempatan Harapan masyarakat)
Keterangan	1. Memberikan kesempatan masyarakat yang berpotensi untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Potensi masyarakat belum berkembang maksimal karena berasal dari keluarga tidak mampu 3. Mengantisipasi terjadinya masyarakat dan/atau anak tidak sekolah karena faktor ekonomi. 4. Memberi kesempatan kepada masyarakat putus sekolah dan/atau tidak sekolah untuk memperoleh layanan pendidikan dan pengetahuan melalui Program Pendidikan Kesetaraan
Manfaat	1. Membantu masyarakat untuk dapat menuntaskan pendidikannya melalui Pendidikan Kesetaran 2. Memberikan peluang dan kesempatan bagi masyarakat yang putus sekolah dan tidak melanjutkan serta tidak memiliki ijazah formal untuk menuntaskan pendidikannya melalui Pendidikan Kesetaran 3. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Sampang. 4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memberikan kesempatan pelayanan Pendidikan dan Pengetahuan

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
1	Nature	Lingkungan	Banjir, puting beliung dan tanah longsor di pinggir sungai	Meninggal, luka, kerugian aset	Area terdampak banjir, angin puting beliung dan Pinggir sungai yang labil	Pembangunan wilayah bebas banjir sebagai best practice	2	2	4	Disdik, DLH	1 x setahun	1) Masyarakat yang terkena dampak Banjir, Puting Beliung dan Tanah Longsor 2) Anggaran Pemkab Sampang 3) SDM yang tanggap bencana	1) Tidak menebang pohon secara liar dan besar-besaran, karena dapat menyebabkan tanah mudah terkikis air hujan sehingga menyebabkan banjir dan longsor; 2) Bersihkan selokan dan aliran sungai agar air mengalir dengan baik serta fungsi selokan dan sungai dapat optimal; 3) Perlengkapan keselamatan	1) Prosedur keselamatan kerja 2) pelatihan singkat dalam keadaan darurat (penjelasan saat apel sebelum kegiatan dimulai)

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
													n sudah ada, pelampung, perahu, serokan sampah, sepatu karet dan lain-lain	
2	Struktural	SDM (komunitas pendidikan non formal)	Kesenjangan antara komunitas non formal yang akan dilibatkan dan tidak dilibatkan	Sentimen terhadap kebijakan yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang	Fasilitas dan anggaran dari Pemerintah Kab. Sampang yang terbatas sehingga tidak bisa mewadahi seluruh komunitas non formal.	Memaksimalkan potensi Pendidikan non formal yang sesuai dengan kebutuhan lokal	1	2	3	Disdik	1-2 kali dalam satu tahun	Korbididikcam, Pengawas, Penilik dan Lembaga untuk memperoleh dan mengolah data masyarakat yang putus sekolah	Sosialisasi dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM dalam memperoleh dan mengolah data masyarakat yang putus sekolah	
3		SDM Dinas	Komitmen terhadap program ini.	Keberlanjutan program	1) Mengabaikan komitmen untuk keberlanjutan	Memberikan apresiasi kepada dinas yang berkomitmen menyelesaikan	3	3	9	Disdik	1-2 kali dalam satu tahun	Disdik, Korbididikcam, Pengawas, Penilik	ada SOP, Juknis, Juklak dan kerangka kerja untuk keberlanjutan	

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
					program; 2) mutasi	an program							an program	
4		Keuangan Daerah	Ketersediaan anggaran (adanya pengurangan atau realokasi ke program lainnya).	Inovasi tidak berlanjut, atau berjalan tidak maksimal.	Tidak lagi menjadi prioritas kebijakan.		2	3	6	Disdik	1-2 kali dalam satu tahun	Disdik, BPKAD, Bappeda Litbang	Revitalisasi dan Optimalisasi anggaran	
5	Infrastruktur (Aplikasi)	Ketersediaan	Kerusakan data pada database/server	Tidak bisa akses aplikasi	Listrik mati, human error	Membangun data center	1	2	2	Disdik	1-2 kali dalam satu tahun	Disdik, Kominfo	Genset, server	Aplikasi, Software, hardware, SOP
6			Jaringan Internet tidak stabil		Data dan file ganda atau duplikat	Membangun data center	1	2	2	Disdik	1-2 kali dalam satu tahun	Disdik, Kominfo	Mobilisasi bantuan logistik/akomodasi	
7			Jangkauan internet yang terbatas		Terbatasnya BTS (Base Transceiver Station) provider	Memfasilitasi lokasi-lokasi BTS yang strategis	1	2	2	Disdik	1-2 kali dalam satu tahun	Disdik, Kominfo		
8		Keamanan	Jaringan terganggu karena gangguan dari eksternal		Serangan hacker	Membangun data center	1	3	3	Disdik	1-2 kali dalam satu tahun	Disdik, Kominfo		

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
9	Suprast ruktur	Kelembagaan	Adanya Kerjasama dengan Cabang Dinas Pendidikan, Kemenag dan Dewan Pendidikan dan tersedianya bank data masyarakat yang putus sekolah dan tidak melanjutkan serta tidak memiliki ijazah formal	1. Data masih manual dan belum terintegrasi 2. SDM belum melaksanakan secara optimal	(1). Variasi komitmen dari Kepala OPD/instansi vertikal lainnya. (2). SDM belum terlatih untuk menyelesaikan tugasnya	Membangun pusat pelatihan	2	3	6	Disdik	1-2 kali dalam satu tahun	Korbididikcam, Pengawas, Penilik dan Lembaga untuk memperoleh data masyarakat yang putus sekolah	Penyediaan SDM dan infrastruktur TIK kepada petugas yang lebih <i>up to date</i> , sehingga petugas tidak tergantung pada peralatan TIK mereka sendiri.	MoU/PKS dengan instansi terkait
10		SOP	Adanya surat edaran Dinas Pendidikan untuk memperoleh data masyarakat yang putus sekolah dan tidak melanjutkan	belum maksimalnya pelaksanaan tindak lanjut surat edaran	Kebijakan/ SOP masing-masing lembaga berbeda dalam penanganan pengumpulan data	Mengkoordinasikan sistem-sistem yang terpisah menjadi terintegrasi	2	2	4	Disdik	1-2 kali dalam satu tahun			1. Surat tugas dari instansi terkait 2. Pembuatan SOP untuk inovasi ini.

4.6 Manajemen Risiko Quick Win Smart Environment

Subab 4.6. menguraikan Manajemen Risiko Program Quick Win **Sekolah Sedekah Sampah (3S)** pada Dimensi Smart Environment seperti terlihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11 Manajemen Risiko Quick Win Smart Environment

Kota/Kabupaten	Sampang
Dimensi	Smart Environment
Program Quick Win	Sekolah Sedekah Sampah (3S)
Keterangan	Salah satu permasalahan di lingkungan masyarakat saat ini adalah peningkatan timbulan sampah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan pola hidup konsumtif di masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memproyeksikan bahwa timbulan sampah per orang per hari untuk kategori kota kecil yaitu sebesar 0,5 Kg/Hari/Orang, dari proyeksi tersebut bisa diketahui timbulan sampah rata-rata perhari yang dihasilkan dalam suatu kabupaten tertentu dengan cara mengalikannya dengan jumlah penduduk. Perilaku masyarakat yang sering kali mengabaikan prinsip-prinsip 3R (Reduce-Reuse-Recycle) juga makin menambah percepatan timbulan sampah dari sumbernya. Hal ini berbanding terbalik dengan pola-pola penanganan pengurangan sampah yang berjalan sangat lambat, maka perlu adanya upaya taktis dan inovatif dalam mendukung percepatan pola penanganan sampah tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam pengurangan sampah adalah suatu hal yang harus diupayakan sebagai produsen sampah terbesar. Berdasarkan catatan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang dunia pendidikan yang dalam hal ini sekolah dan pondok pesantren, menduduki posisi kedua setelah pasar dalam peningkatan timbulan sampah harian. Inovasi Sekolah Sedekah Sampang (3S) diadakan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah secara mandiri, dengan melibatkan lembaga pendidikan yaitu sekolah, sebagai embrio awal untuk dikembangkan pada sektor-sektor yang lain. Harapannya dengan adanya inovasi ini, dapat mengurangi sampah mulai dari sumbernya. Pola penerapan prinsip 3R harus diupayakan disekolah tersebut. Reuse diupayakan dengan pola pendekatan pengelolaan sampah organik menjadi kompos untuk kebutuhan perindangan di sekolah. Reduce diupayakan dengan penggunaan tumbler dan pengurangan penggunaan plastik di kantin sekolah. Recycle diupayakan dengan sedekah sampah tersebut. Sedekah sampah adalah upaya untuk melakukan pemilahan sampah layak jual di sekolah untuk ditukarkan menjadi rupiah, metode pengumpulan sampahnya bisa dengan hasil timbulan sampah disekolah tersebut serta sampah yang dibawa dari rumah masing-masing siswa, setelah semua sampah dipilah sesuai dengan jenis dan klasifikasinya lalu

	kemudian disetorkan kepada Bank Sampah untuk didonasikan dalam bentuk sedekah. Sedangkan rupiah hasil dari pemilahan tersebut lalu dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang ada di sekolah tersebut. Secara bersama-sama akan dilakukan sosialisasi dan pola-pola teknis penanganannya mulai dari tahapan pengumpulan, transporting dan manajemen pengelolaan keuangannya. Dengan adanya program ini diharapkan adanya pengurangan sampah dilingkungan sekolah sebesar 70% dan residu yang dihasilkan bisa lebih dikurangi. Serta adanya perubahan pola peserta didik dalam penanganan sampah.
Manfaat	1. Mendukung kegiatan sosial di lingkup sekolah serta kegiatan penunjang lainnya dengan berbasis pada pengelolaan sampah menjadi rupiah. 2. Memberikan pendidikan secara dini kepada siswa agar terbentuk kebiasaan dalam penanganan sampah baik dilingkungan sekolah bahkan juga akan menjadi kebiasaan di rumahnya.

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/ Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
1	Nature	Lingkungan	Banjir	Hasil perolehan sedekah sampah rusak atau hilang terbawa arus banjir	Kurangnya antispasi perlindungan aset sedekah sampah akibat bencana banjir	Pembuatan pagar pengaman dan rak-rak penyimpanan	1	3	3	DPUPR, BPBD, DLH Perkim	1 tahun	Anggaran Pemkab untuk pembuatan pagar pengaman dan rak-rak penyimpanan	1. Mitigasi bencana banjir 2. Adanya <i>early warning</i> dari Pemerintah akan adanya bencana banjir sehingga masyarakat dapat mengantisipasi risiko bencana	1. Adanya SOP Penanganan Bencana Banjir 2. Koordinasi penanganan bencana pasca banjir dengan BPBD dan DLH

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/ Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
2	Struktural	SDM Pelaksana: DLH Perkim, FPRB, Baznas, BUMN	Terbatasnya SDM Tenaga teknis persampahan, tenaga pengangkut dan pemilah sampah	Kurang intensifnya pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek Pengelolaan Sampah	Adanya mutasi pegawai, jumlah tenaga teknis, tenaga pengangkut dan pemilah sampah kurang memadai	Penambahan tenaga pengangkut dan pemilah sampah	2	2	4	DLH Perkim, FPRB, Baznas, BUMN	1 tahun	Anggaran untuk rekrutmen tenaga pengangkut dan pemilah sampah	1. Adanya rekrutmen ASN/P3K, tenaga pengangkut dan pemilah sampah	Koordinasi dengan BKDSDM dan DLH Perkim terkait rekrutmen tenaga ASN/P3K, tenaga pengangkut dan pemilah sampah yang dibutuhkan
3		SDM Penerima Manfaat : Siswa dan warga sekolah	Upaya siswa dan warga sekolah untuk sedekah sampah belum maksimal	Hasil perolehan sedekah sampah tidak maksimal	Adanya mutasi Kepala Sekolah dengan kebijakan baru dan terbatasnya kegiatan mamim di sekolah	Siswa dan warga selokah dapat membawa sampah dari luar lingkungan sekolah	1	2	2	DLH Perkim, Kepala Lembaga Pendidikan	4 kali dalam setahun	Adanya sosialisasi dan pelatihan Sekolah Sedekah Sampah	1. Mengadakan sosialisasi kepada lembaga pendidikan 2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Sekolah Sedekah Sampah	Melibatkan organisasi di sekolah seperti OSIS, Pramuka dan Kegiatan Ekstrakurikuler lainnya untuk berperan terhadap Sekolah Sedekah Sampah
5		Kuangan Daerah	Terbatasnya anggaran pada Program	Kinerja pengelolaan sampah dan	Kurangnya anggaran pengadaan / pemeliharaa	Alternatif pembiayaan pemeliharaan armada dan	2	2	4	DLH Perkim, Bappeda Litbang dan BPPKAD	1 tahun anggaran	Ketersediaan dana untuk pelaksanaan	1. Menganggarkan pada program	Adanya peran serta FPRB dan siswa dalam

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/ Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
			Pengelolaan Sampah akibat adanya refocusing anggaran	armada pengangkut sampah tidak optimal	n rutin peralatan dan armada pengangkut sampah	peralatan dapat menggunakan biaya operasional dan pemeliharaan sebagian dari hasil penjualan sedekah sampah						n inovasi Sekolah Sedekah Sampah	dan kegiatan DLH Perkin 2. Alternatif pembiayaan untuk mendukung Sekolah Sedekah Sampah misalnya dari CSR Badan Usaha	upaya memelihara dan mengembangkan Sekolah Sedekah Sampah
6	Infrastruktur	Infrastruktur Fisik	Belum optimalnya fasilitas tempat pengumpulan sampah	Kerusakan fasilitas tempat pengumpulan sampah	Alat pengolahan sampah rusak, aus dan karat	Pemeliharaan rutin dan berkala	2	2	4	DLH Perkim, FPRB	3 kali dalam setahun	Adanya pemeliharaan rutin / berkala peralatan pengolahan sampah	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala di fasilitas sampah	Peran DLH Perkim dan FPRB untuk menyediakan anggaran pemeliharaan peralatan / fasilitas sampah

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/ Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
8			Kerusakan armada pengangkut hasil sedekah sampah	Sampah yang terkumpul di keranjang Sekolah Sedekah Sampang tidak dapat terangkut secara maksimal ke tempat Pengumpulan Sampah (di Kec. Jrengik)	Kerusakan mesin dan bak penampung sampah akibat korosi / karat sehingga daya angkut menjadi rendah	Adanya perawatan secara rutin armada pengangkut sedekah sampah	2	2	4	DLH Perkim, FPRB	3 kali dalam setahun	Adanya pemeliharaan rutin / berkala armada pengangkut sampah	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala armada pengangkut sampah	Peran DLH Perkim dan FPRB untuk menyediakan anggaran pemeliharaan armada pengangkut sampah
9	Suprast ruktur	Regulasi	Belum adanya regulasi target kinerja dan capaian hasil Sekolah Sedekah Sampah	Adanya perbedaan persepsi nilai jual pada jenis-jenis sampah kering layak jual	Siswa dan pihak sekolah masih bertanya-tanya target kinerja dan capaian hasil Sekolah Sedekah Sampah	Adanya regulasi yang jelas terhadap pengelolaan Sekolah Sedekah Sampah oleh Tim Teknis Sekolah Sedekah Sampang Kabupaten Sampang	1	1	1	DLH Perkim, FPRB, Baznas, BUMN	2 kali dalam setahun	Adanya sosialisasi dan pelatihan Sekolah Sedekah Sampah	Terlaksananya inovasi Sekolah Sedekah Sampah dengan baik dan berhasil guna	Adanya SOP Sekolah Sedekah Sampah

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/ Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
10		Kelembagaan	Kelembagaan inovasi Sekolah Sedekah Sampah belum tersentuh ke seluruh lembaga pendidikan	Penerapan inovasi Sekolah Sedekah Sampah masih terbatas pada Lembaga Pendidikan Menengah Atas (SMA, MAN, SMK)	Terbatasnya petugas pemungut dan pemilah sampah dari Tim FPRB Sampang serta kurangnya armada pengangkut sampah hasil Sekolah Sedekah Sampah	Adanya pengembangan kelembagaan Sekolah Sedekah Sampah ke seluruh lembaga pendidikan di Kabupaten Sampang	1	1	1	DLH Perkim, FPRB, Baznas, BUMN	2 kali dalam setahun	Adanya sosialisasi dan pelatihan Sekolah Sedekah Sampah	Terlaksananya inovasi Sekolah Sedekah Sampah dengan baik dan berhasil guna	Adanya SOP Sekolah Sedekah Sampah
11	Kultur	Sosial	Terjadinya konflik sosial antara Sekolah Sedekah Sampah dengan pemulung sampah/ barang bekas keliling	Adanya persaingan kepentingan dengan pemulung sampah/ barang bekas keliling mengingat adanya kesamaan obyek	Pemulung sampah/ barang bekas keliling ikut mengambil sampah kering di lingkungan sekolah	Pada inovasi Sekolah Sedekah Sampang ditekankan pada sampah kering layak jual dan di tempatkan di dalam komplek sekolah	2	2	4	DLH Perkim, FPRB, Kepala sekolah	1 tahun	Penyediaan tempat pengumpul sedekah sampah yang aman	1. Penempatan tempat pengumpul sedekah sampah di dalam lingkungan sekolah. 2. Pemulung sampah / barang bekas keliling dilarang mengungut sampah kering	1. Adanya koordinasi dengan pihak keamanan sekolah / satpam / waker 2. Adanya papan pengumuman / banner berisi larangan pemulung sampah / barang bekas keliling

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu/ Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
													layak jual di dalam lingkungan sekolah yang dipantau oleh pihak keamanan sekolah / satpam / waker	mengungut sampah kering layak jual di dalam lingkungan sekolah
12		Ekonomi	Nilai ekonomis sampah kering layak jual masih rendah, belum variatif	Rendahnya keuntungan dari Sekolah Sedekah Sampah yang diterima	Image siswa dan warga sekolah tentang sampah kering layak jual masih berupa sampah gelas / botol plastik, dos, kertas koran, dll	Adanya upaya peningkatan sedekah sampah yang bernilai ekonomis tinggi antara lain : sisa kabel listrik, motherboard rusak, HP rusak, bak/ember bocor, dll	2	2	4	DLH Perkim, FPRB, Kepala sekolah	1 tahun	Adanya sosialisasi kepada lembaga sekolah agar siswa dan warga sekolah bersedekah sampah lebih rutin dan lebih bernilai ekonomis tinggi	Terlaksananya inovasi Sekolah Sedekah Sampah yang lebih baik dan berkelanjutan	1. Penyusunan SOP Sekolah Sedekah Sampah terkait cara kerja dan nilai ekonomis sampah. 2. Adanya Sosialisasi dan Bimtek Sekolah Sedekah Sampah

5. Penutup

Buku 4 *Quick Win Smart City* Daerah Kabupaten Sampang 2024-2033 merupakan buku terakhir sebagai bagian kesinambungan dari Buku 1 Analisis Kesiapan Daerah, Buku 2 *Masterplan Smart City*, dan buku 3 Executive Summary yang telah ditulis sebelumnya. Bahan utama buku 4 ini bersumber dari data primer kegiatan FGD (*Focus Group Discussion*) pada:

1. Bimtek 1 (5-6 Juli 2023) sebagai dasar *Smart City Readiness* yaitu kertas kerja analisis masa depan dan sasaran *smart city* daerah, kertas kerja analisis SWOT-TOWS *smart city* daerah per dimensi, dan kertas kerja pemetaan misi dan sasaran RPJMD daerah terhadap dimensi *Smart City*;
2. Bimtek 2 (2-3 Agustus 2023) yaitu Kertas Kerja Program dan Kertas Kerja Rencana Aksi pembangunan Smart City Jangka Pendek (2024), Jangka Menengah (2025-2028), dan Jangka Panjang (2029-2033);
3. Bimtek 3 (4-5 September 2023) yaitu Kertas Kerja Quick Win dan Manajemen Risiko; dan
4. Bimtek 4 (11-13 Oktober 2023) yaitu Penajaman kembali penetapan program kerja Jangka Panjang 2029-2033, inovasi yang akan dijadikan Quick Win, Manajemen Risiko dan yang terakhir memastikan kelengkapan isian seluruh kertas kerja;

Selama periode empat bulan proses bimbingan teknis dan dengan semangat yang tinggi dari seluruh peserta baik pemerintah daerah dan organisasi masyarakat, akhirnya penandatanganan secara digital Komitmen Bersama Pembangunan Smart City Kabupaten Sampang antara Pemerintah Daerah dan Dirjen Aptika Kominfo dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2023 di Gedung Smart Room Sampang yang juga bersamaan dengan peresmian gedung tersebut.

Dengan penandatanganan nota kesepakatan tersebut Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Sampang bersama-sama telah memiliki komitmen yang kuat untuk menuju *Sampang Smart City* pada tahun 2024-2033.

Demikian sebagai penutup dari penyusunan buku 4 ini, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.

Pj. BUPATI SAMPANG,

Rudi Arifiyanto

Daftar Pustaka

- Bappedalitbang, 2023. Cascading Kinerja Pembangunan Kabupaten Sampang.
- British Standards Institution., 2018. ISO31000:2018 Risk management - guidelines.
- Kemkominfo, 2021. Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City.
- RPJMD Kab. Sampang, 2022. Dokumen RPJMD 2019-2024.
- RPJPD Kab. Sampang, 2010. Dokumen RPJPD 2005-2025.
- Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023a. Kertas Kerja Pemetaan Misi dan Sasaran RPJMD Terhadap Dimensi Smart City.
- Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023b. Kertas Kerja Analisis Kesiapan Smart City Daerah.
- Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023c. Kertas Kerja Analisis SWOT-TOWS.
- Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023d. Kertas Kerja Analisis Masa Depan dan Sasaran Smart City.
- Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023e. Kertas Kerja Profil Quick Win.
- Tim Pelaksana SC Pemda Kab. Sampang, 2023f. Kertas Kerja Manajemen Risiko.

Lampiran

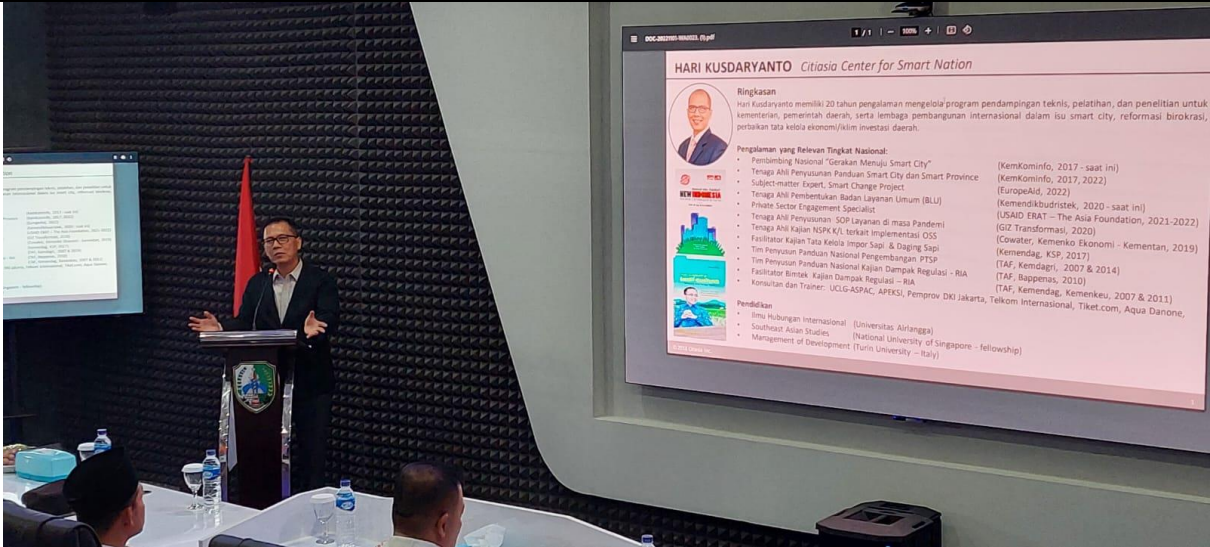
L1. Penandatanganan Komitmen Bersama menuju Sampang Smart City

Penandatanganan komitmen bersama menuju Sampang Smart City dan sekaligus peresmian Smart Room dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023 yang berlokasi di Gedung Smart Room Sampang

1. Daftar Tanda Tangan secara Digital Komitmen Bersama antara Pemerintah Daerah dan Kominfo Pusat
2. Dokumentasi di Gedung Smart Room Sampang


Sambutan Bupati Sampang Bpk. H. Slamet Junaidi dalam acara penandatanganan komitmen bersama menuju Sampang Smart City dan sekaligus peresmian Gedung Smart Room yang berlokasi di halaman Pendopo Trunojoyo

Sambutan Kadiskominfo Kabupaten Sampang Bpk. Amrin Hidayat, S.Kom., M.A.P.



Sambutan Tenaga Ahli Kominfo Bpk. Hari Kusdaryanto



Peresmian Gedung Smart Room pada tanggal 11 Oktober 2023 yang dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekda, kepala OPD, Tim Ahli, dan Kominfo Pusat



Penandatanganan secara digital komitmen Bersama menuju Sampang Smart City pada tanggal 11 Oktober 2023 yang dihadiri oleh Bupati, wakil Bupati, Sekda, kepala OPD, Tim Tenaga Ahli, dan Kominfo Pusat di Gedung Smart Room



Gedung Smart Room Sampang di malam hari
(berlokasi di halaman Pendopo Trunojoyo)



Bersama Bpk. H. Achmad Murang TD, S.T.,M.Si. (Diskominfo Kab. Sampang) sebagai narahubung yang selalu dengan senang hati membantu kami dalam pelaksanaan Bimtek 1-4
(Lokasi di Lobi Gedung Smart Room)

L2. Undangan Bimtek 4 pada tanggal 11-13 Oktober 2023

1. B - 969 - Smart City - Permohonan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Tahap IV dan LAMPIRAN
2. Undangan Penandatanganan Komitmen Bersama Menuju Sampang Smart City dan Peresmian Gedung Smart Room
3. Undangan Bimtek Smart City Tahap IV dari Kabupaten Sampang

4. Undangan Finalisasi Kertas Kerja Penyusunan Masterplan Smart City dari Kabupaten Sampang

L3. Dokumentasi FGD Bimtek 4 hari ke-1 (Rabu, 11 Oktober 2023)

L3.1 Dokumentasi FGD Bimtek 4 hari ke-1 (Rabu, 11 Oktober 2023)


Bpk. Didi Achmadi, S.Pi., M.Si. dari Bappedalitbang (berdiri) yang selalu berperan aktif dalam mengarahkan peserta Bimtek 4 kepada perencanaan pembangunan Smart City

Tim Pembimbing Ahli dari Citiasia, Inc. Bpk. Hari KUSDARYANTO (kiri) dan Kepala Bappedalitbangda Ibu Ir. Hj. UMI HANIK LAILA, MM (kanan)



Kelompok Smart Society



Kelompok Smart Governance



Kelompok Smart Environment



Kelompok Smart Living



Kelompok Smart Economy



Kelompok Smart Branding

L3.2 Dokumentasi FGD Bimtek 4 hari ke-2 (Kamis, 12 Oktober 2023)


Persiapan Blmtek 4 hari ke-2 (Kamis, 12 Oktober 2023)

Peserta Bimtek 4 hari ke-2 yang masih semangat dalam berdiskusi

Kelompok Smart Society



Kelompok Smart Governance



Kelompok Smart Environment



Kelompok Smart Living



Kelompok Smart Economy



Kelompok Smart Branding

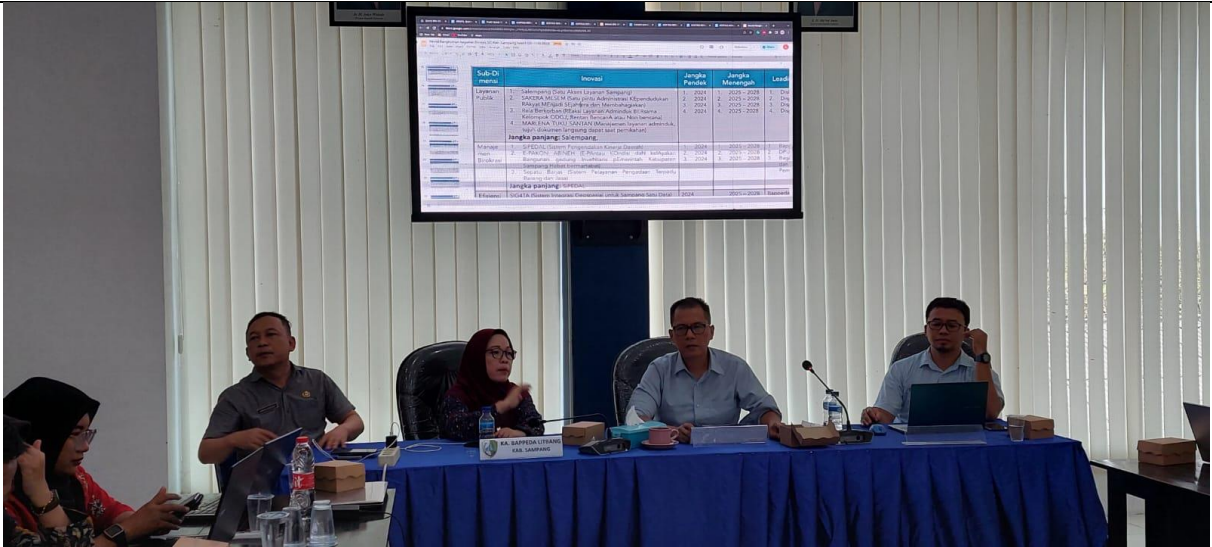


Gedung Bappeda sebagai lokasi utama kegiatan Bimtek 1-4

L3.3 Dokumentasi FGD Bimtek 4 hari ke-3 (Jum’at, 13 Oktober 2023)



Gedung Dinas Kominfo Kabupaten Sampang sebagai lokasi Bimtek 4 hari ke-3



Peran aktif pimpinan Pemda dalam Bimtek 4 (Kadiskomfo dan Kabappedalitbangda)



Koordinator per dimensi



Perwakilan Kelompok per dimensi



Tim inti yang hadir dalam penajaman program kerja dan Quick Win